



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Garuda No. 10 Kelurahan Kayu Ara Lubuklinggau Barat I Sumatera Selatan
Telepon (0733) 325513 Fax. (0733) 325513 Kode Pos 31615
E-mail : bappeda@lubuklinggau.go.id , Website : www.lubuklinggau.go.id



PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024-2026



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Garuda No. 10 Kelurahan Kayu Ara Lubuk linggau Barat I Sumatera Selatan

Telepon (0733) 325513 Fax. (0733) 325513 Kode Pos 31615

E-mail : bappeda@lubuklinggau.go.id , Website : www.lubuklinggau.go.id



WALI KOTA LUBUK LINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3499/SJ dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026;

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang *Pembangunan.....* Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka *Menengah.....*

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Lubuk Linggau.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana.....

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang dibuat bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2023.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RPD

Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPJPD.
- (2) RPD berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, dan RPJPD Kota Lubuk Linggau.
- (3) RPD Tahun 2024-2026 disusun secara teknokratis, yakni menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kota.
- (4) RPD merupakan landasan dan pedoman bagi Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.
- (5) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, dan Renja PD, serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di kota dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2024-2026.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen RPD tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) RPD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. BAB V : Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;

g. Bab VII.....

- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. BAB IX : Penutup.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPD

Pasal 5

Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. terjadi perubahan mendasar meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau pemekaran daerah;
- d. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- e. Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran dari program tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian

sasaran.....

sasaran kota, maka penetapan perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat/tercantum dalam RPD Tahun 2024-2026 dapat berubah sesuai perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan sepanjang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir RPD;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mengakomodir perubahan target indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

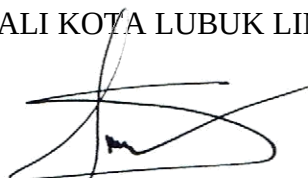
Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 24 Maret 2023

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR



KATA PENGANTAR

Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Lubuk Linggau Periode 2018-2023 pada tahun 2023 menandai juga berakhirnya RPJMD Periode 2018-2023 pada kurun waktu yang sama sementara RPJMD yang baru akan dibuat setelah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Lubuk Linggau perlu disusun suatu dokumen sebagai pedoman Penyusunan RKPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2005-2020, penyelesaian target kinerja RPJMD 2018-2023 yang belum tercapai dan menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kota Lubuk Linggau dengan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan serta mengantisipasi perkembangan pembangunan yang akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024- 2026 disusun sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD. Keselarasan dan kesinambungan antar dokumen tersebut diharapkan akan menjadikan perencanaan pembangunan di Kota Lubuk Linggau dapat selaras, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

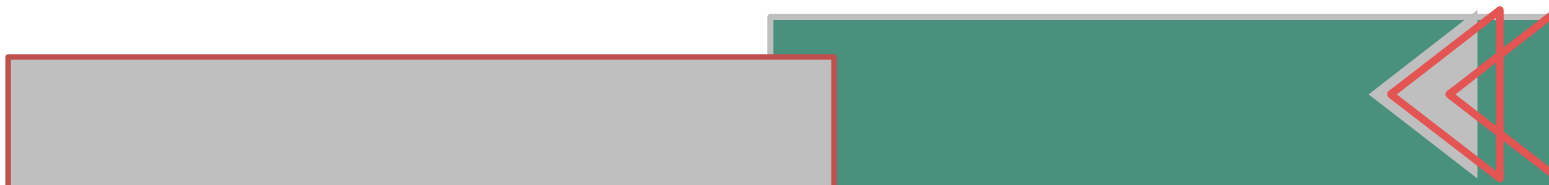
Demikianlah dokumen ini dibuat untuk menggambarkan proses perencanaan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026, serta dalam rangka mendukung keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan dan keberlanjutan kebijakan perencanaan pembangunan.

Lubuk Linggau,

2023

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

H. S. N. PRANA PUTRA SOHE





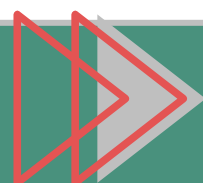
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Hubungan antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya, Dokumen Rencana Penganggaran Daerah, serta Dokumen Rencana Pembangunan Antar Daerah.....	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4.1. Maksud.....	I-5
1.4.2. Tujuan.....	I-6
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-14
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-31
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-59
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Per Urusan, Tujuan, dan Sasaran pada RPJMD Periode Sebelumnya.....	II-61
2.2.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-61
2.2.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah.....	II-63
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-2
3.1.2. Neraca Daerah.....	III-15
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-20
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-20
3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	III-21
3.3. Kerangka Pendanaan.....	III-23
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	III-23





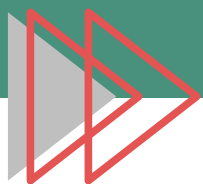
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan Kota Lubuklinggau.....	IV-1
4.1.1. Pembangunan Sosial Budaya dan Umat Beragama.....	IV-1
4.1.2. Pembangunan Ekonomi.....	IV-7
4.1.3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah.....	IV-11
4.1.4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	IV-13
4.1.5. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang.....	IV-17
4.1.6. Tata Kelola Pemerintahan.....	IV-18
4.1.7. Kesejahteraan Masyarakat.....	IV-19
4.2. Kebijakan Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Internasional.....	IV-19
4.2.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	IV-20
4.2.2. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's).....	IV-20
4.3. Isu-Isu Strategis Daerah.....	IV-22
4.3.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar.....	IV-22
4.3.2. Penguatan Perekonomian Perkotaan dan Penanggulangan Kemiskinan.....	IV-25
4.3.3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan.....	IV-29
4.3.4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	IV-31
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1. Visi dan Misi RPJPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2005-2025.....	V-1
5.2. Tujuan Dan Sasaran.....	V-2
 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH...	VI-1
6.1. Strategi Umum Pembangunan Daerah.....	VI-1
6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah.....	VI-2
6.3. Kebijakan Umum Pembangunan.....	VI-8
6.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	VI-8
6.5. Strategi dan Arah Kebijakan Terpadu Kota Lubuk Linggau Tahun 2024- 2026.....	VI-13
6.5. Program Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau 2024-2026.....	VI-24
 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
7.1. Kerangka Pendanaan.....	VII-1
7.2. Program Perangkat Daerah.....	VII-2
 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VIII-1





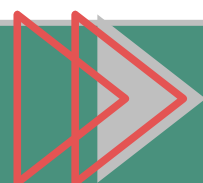
BAB IX PENUTUP.....	IX-1
9.1. Kaidah Pelaksanaan.....	IX-1
9.2. Pedoman Transisi.....	IX-2





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi Kota Lubuk Linggau per Kecamatan.....	II-2
Tabel 2.2. Luas Sub DAS Lakitan dan Sub DAS Kelingi per Kecamatan dalam Kota Lubuk Linggau.....	II-5
Tabel 2.3. Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021.....	II-6
Tabel 2.4. Pola Penggunaan Lahan.....	II-9
Tabel 2.5. PDRB Kota Lubuk Linggau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2022.....	II-16
Tabel 2.6. PDRB Kota Lubuk Linggau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022.....	II-17
Tabel 2.7. PDRB Per Kapita Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-19
Tabel 2.8. Perkembangan Nilai ICOR Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-21
Tabel 2.9. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2022.....	II-22
Tabel 2.10. Angka Melek Huruf Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021.....	II-25
Tabel 2.11. Rata-rata Lama Sekolah Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021.....	II-28
Tabel 2.12. Angka Partisipasi Sekolah Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021.....	II-28
Tabel 2.13. Angka Partisipasi Kasar Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-29
Tabel 2.14. Statistik Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau, 2018-2022.....	II-30
Tabel 2.15. Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021.....	II-31
Tabel 2.16. Jenis Dan Jumlah Organisasi Kepemudaan.....	II-31
Tabel 2.17. Hasil Kinerja Urusan Pendidikan Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021.....	II-31
Tabel 2.18. Capaian SPM Bidang Pendidikan Kota Lubuk Linggau Tahun 2022.....	II-32
Tabel 2.19. Hasil Kinerja Urusan Kesehatan Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021.....	II-33
Tabel 2.20. Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Lubuk Linggau Tahun 2022.....	II-34
Tabel 2.21. Jumlah Bayi Lahir, Berat Bayi Lahir Rendah, dan Bergizi Buruk (Jiwa) Di Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021.....	II-35
Tabel 2.22. Kasus Penyakit dan Jenis Penyakit Di Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2022.....	II-36
Tabel 2.23. Jumlah Fasilitas Kesehatan (Unit) Di Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-36
Tabel 2.24. Jumlah Kasus Penderita Penyakit (Kasus) Di Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2021.....	II-37
Tabel 2.25. Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi (Persen) Di Kota	





Lubuk Linggau Tahun 2020-2021.....	II-37
Tabel 2.26. Jumlah Tenaga Kesehatan (Orang) Di Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-38
Tabel 2.27. Hasil Kinerja Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Lubuk Linggau 2017-2021.....	II-38
Tabel 2.28. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2016-2020 (Kilometer).....	II-39
Tabel 2.29. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2022.....	II-39
Tabel 2.30. Presentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Perumahan (%) Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021.....	II-40
Tabel 2.31. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Lubuk Linggau Tahun 2022...	II-40
Tabel 2.32. Hasil Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-41
Tabel 2.33. Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Lubuk Linggau Tahun 2022.....	II-41
Tabel 2.34. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2020.....	II-42
Tabel 2.35. Capaian SPM Bidang Sosial Kota Lubuk Linggau Tahun 2022.....	II-43
Tabel 2.36. Hasil Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau 2018-2022.....	II-43
Tabel 2.37. Hasil Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kota Lubuk Linggau 2018-2022.....	II-45
Tabel 2.38. Luas Tanah Berdasarkan Hak Guna Kota Lubuk Linggau 2019-2021.....	II-46
Tabel 2.39. Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-47
Tabel 2.40. Hasil Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021.....	II-47
Tabel 2.41. Jumlah Keluarga Sejahtera Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021.....	II-48
Tabel 2.42. Jumlah Peserta KB Aktif (Orang) Kota Lubuk Linggau Tahun 2018 - 2022.....	II-48
Tabel 2.43. Jumlah Pasangan Usia Subur (Jiwa) Kota Lubuk Linggau Tahun 2018 - 2022.....	II-49
Tabel 2.44. Jumlah Klinik Keluarga Berencana (Unit) Kota Lubuk Linggau Tahun 2017 - 2021.....	II-49
Tabel 2.45. Data Layanan Penerbangan Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-51
Tabel 2.46. Hasil Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kota Lubuk Linggau, Tahun 2017-2021.....	II-51
Tabel 2.47. Hasil Kinerja Urusan Pertanian Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2021.....	II-54
Tabel 2.48. Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-54
Tabel 2.49. Luas Tanaman Perkebunan (Ha) Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-54

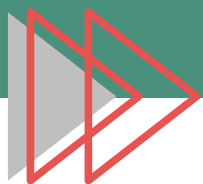


Tabel 2.50. Produksi Daging Ternak (kg) Kota Lubuklinggau Tahun 2017-2021.....	II-55
Tabel 2.51. Produksi Telur Unggas dan Jenis Unggas (Ton) Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021.....	II-55
Tabel 2.52. Produksi Daging Unggas (kg) Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021.....	II-55
Tabel 2.53. Hasil Kinerja Urusan Perikanan Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2020.....	II-57
Tabel 2.54. Hasil Kinerja Fungsi Penunjang Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-58
Tabel 2.55. Hasil Kinerja Urusan Keagamaan Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-59
Tabel 2.56. Pengeluaran per Kapita dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (ADHK) Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2022.....	II-59
Tabel 2.57. Hasil Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi Kota Lubuk Linggau Tahun 2016-2020.....	II-60
Tabel 2.58. Rasio Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau Tahun 2016-2020.....	II-60
Tabel 2.59. Capaian Kinerja Indikator Utama Kota Lubuk Linggau Tahun 2022.....	II-62
Tabel 2.60. Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2022.....	II-63
Tabel 3.1. Capaian Target Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2018-2022.....	III-4
Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022 (dalam Rupiah).....	III-5
Tabel 3.3. Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	III-7
Tabel 3.4. Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	III-7
Tabel 3.5. Struktur Pendapatan Transfer Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	III-8
Tabel 3.6. Capaian Target Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2018-2022.....	III-10
Tabel 3.7. Realisasi Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	III-11
Tabel 3.8. Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	III-12
Tabel 3.9. Capaian Target Pembiayaan Daerah (Pembiayaan Netto) Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	III-13
Tabel 3.10. Perkembangan pembiayaan di Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	III-14
Tabel 3.11. Neraca Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	III-16
Tabel 3.12. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	III-20
Tabel 3.13. Defisit dan Surplus Anggaran Kota Lubuk Linggau Tahun 2018 - 2022.....	III-22
Tabel 3.14. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024-2026	



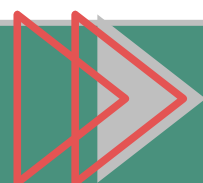
Kota Lubuk Linggau.....	III-26
Tabel 5.1. Tujuan, dan Sasaran Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026.....	V-9
Tabel 6.1. Jenis Pusat Kegiatan, Lokasi dan Prioritas Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) dan Prioritas.....	VI-4
Tabel 6.2. Kawasan Strategis Kota Lubuk Linggau.....	VI-5
Tabel 6.3. Arahan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Unggulan Kecamatan.....	VI-6
Tabel 6.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026.....	VI-16
Tabel 6.5. Program Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau 2024-2026.....	VI-25
Tabel 7.1. Target Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026.....	VII-2
Tabel 7.2. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Periode 2024 sd 2026.....	VII-5
Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Lubuk Linggau.....	VIII-2
Tabel 8.2. Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kota Lubuk Linggau.....	VIII-9
Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Lubuk Linggau.....	VIII-10
Tabel 8.4. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026.....	VIII-22





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah.....	I-5
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Lubuk Linggau.....	II-1
Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Lubuk Linggau.....	II-3
Gambar 2.3. Pola Ruang Kota Lubuk Linggau.....	II-7
Gambar 2.4. Peta Penggunaan Lahan Kota Lubuk Linggau.....	II-9
Gambar 2.5. Pertumbuhan Penduduk Kota Lubuk Linggau Tahun 2018 - 2022.....	II-10
Gambar 2.6. Persentase Distribusi Penduduk Kota Lubuk Linggau Tahun 2022.....	II-11
Gambar 2.7. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Lubuk Linggau dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-14
Gambar 2.8. Laju Inflasi IHK Kota Lubuk Linggau 2018-2022.....	II-18
Gambar 2.9. Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-19
Gambar 2.10. Pertumbuhan Investasi Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022 (Rp. Milyar).....	II-20
Gambar 2.11. Persentase Penduduk Miskin Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-22
Gambar 2.12. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuklingau Tahun 2018-2022.....	II-23
Gambar 2.13. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuklingau Tahun 2012-2022.....	II-24
Gambar 2.14. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022.....	II-25
Gambar 2.15. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Lubuklingau Tahun 2018-2022.....	II-26
Gambar 2.16. Angka Harapan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-27
Gambar 2.17. Perkembangan Angka Kesakitan Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022..	II-27
Gambar 2.18. Prevalensi Balita Stunting Di Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2022.....	II-35
Gambar 2.19. TPAK Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021 Menurut Jenis Kelamin.....	II-44
Gambar 2.20. Rasio AMH di Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021.....	II-44
Gambar 2.21. Rasio APS di Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021.....	II-45
Gambar 2.22. Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Tipe C Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-50
Gambar 2.23. Pertumbuhan Investasi Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-52
Gambar 2.24. Pertumbuhan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-56
Gambar 2.25. Pertumbuhan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022.....	II-57
Gambar 3.1. Perkembangan Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022 (Rp. Juta).....	III-4





Gambar 3.2. Perkembangan Proporsi Belanja Aparatur Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2018-2022.....	III-21
Gambar 3.3. Dinamika Surplus dan Defisit Anggaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2016 - 2020 (Milyar Rupiah).....	III-23
Gambar 5.1. Struktur Pohon Kinerja RPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026.....	V-5
Gambar 5.2. Pohon Kinerja “Meningkatkan Perluasan Akses Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan”.....	V-5
Gambar 5.3. Pohon Kinerja “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi”.....	V-6
Gambar 5.4. Pohon Kinerja “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial”.....	V-6
Gambar 5.5. Pohon Kinerja “Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur”.....	V-7
Gambar 5.6. Pohon Kinerja “Percepatan Perwujudan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.....	V-7
Gambar 6.1. Penyesuaian Tema Pembangunan Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026.....	VI-13





**Lampiran Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau
Tahun 2024-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi Daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir tahun 2022 atau tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Untuk Kota Lubuk Linggau, dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau periode 2018-2023 yang menandai berakhirnya pula RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2023 pada tahun 2023 ini sehingga dibutuhkan dokumen transisi sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Sesuai dengan amanat UU tersebut dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Kota Lubuk Linggau akan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang disebut Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 sebagai pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang lebih lanjut akan menjadi dasar penyusunan APBD dan bagi kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2024-2026.

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh daerah pada masa transisi ini terdiri dari RPJPD, RPD, RKPD dan Renstra-PD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki dokumen yang saling berhubungan. RPJPD yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian disinkronisasikan dengan RPD masa transisi sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan. Selanjutnya RPD dijabarkan ke





tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Lubuk Linggau. RPD ini juga sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 ini memiliki nilai strategis karena dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024-2026 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama masa transisi tahun 2024-2026. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 telah melewati beberapa tahapan sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan melalui proses yang melibatkan berbagai perwakilan para pemangku kepentingan yaitu dari unsur Perguruan Tinggi/Akademisi, LSM, Dunia Usaha, Perbankan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi, Kecamatan dan DPRD melalui Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022. Kemudian dilakukan asistensi dan konsultasi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan Rapat-rapat Pembahasan dengan Tim Penyusun RPD. Selanjutnya dokumen RPD telah direview oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan serta dievaluasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lubuk Linggau untuk dilakukan penyempurnaan dan kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana





Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2009 Nomor 16);
19. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuk Linggau.

1.3 Hubungan antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya, Dokumen Rencana Penganggaran Daerah, serta Dokumen Rencana Pembangunan Antar Daerah

Penyusunan RPD harus berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, RPJPD Kota Lubuk Linggau, RPJMN, RPJMD atau RPD Provinsi Sumatera Selatan, RTRWN, RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan RTRW Kota Lubuk Linggau agar kebijakan dan sasaran pokok dalam RPD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan pembangunan dan

Keterkaitan antara dokumen RPJPD dan RPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat, sehingga terciptanya sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah. Pada tahap yang lebih operasional RPD akan diacu dan dipedomani oleh semua pembahasan tahunan (RKPD) yang menjadi pedoman RAPD dan rinciannya (RKA-PD), hubungan tersebut tergambar di Gambar 1.1.

The diagram illustrates the Regional Development Planning Process (RTRW) in West Java, showing the flow from Spatial (SPASIAL) to Aspatial (ASPIRAL) and then to the Final Development Plan (RTRW). The process is divided into three stages: 20 Years (20 TAHUN), 5 Years (5 TAHUN), and 1 Year (1 TAHUN). The Spatial stage includes RTRWN (RTR Pulau, RTR KSN), RTRW PROV (RTR KSP), and RTRW KAB/KOTA (RTR KSK, RDTR). The Aspatial stage includes RPJPN, RPJMN, RKP, RPJPD PROV, RKP PD PROV, RKP PD K/K, and RTRW. The Final Development Plan stage includes RAPBN, RAPBD PROV, and RAPBD K/K. The process is also categorized by PUSAT (Central) and DAERAH (Regional).

- 
2. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumber daya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan.
 3. Memberikan arah dan sekaligus tolak ukur keberhasilan pembangunan.
 4. Merumuskan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
 5. Merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan rangkaian kegiatan penyusunan APBD tahunan.
2. Mewujudkan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan Provinsi dan Nasional dengan memperhatikan isu strategis dan dinamika terkini.
3. Menjadi pedoman evaluasi kinerja pembangunan daerah.
4. Mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang berkelanjutan.
5. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

RPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

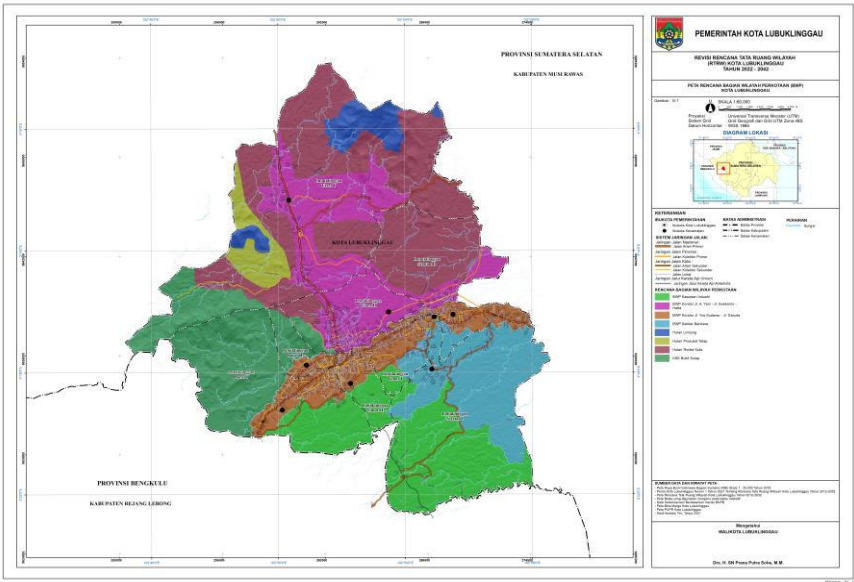
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas wilayah Kota Lubuk Linggau adalah 367,73 KM2. Secara geografis Kota Lubuk Linggau berada di bagian Barat Provinsi Sumatera Selatan dengan kedudukan geografis terletak antara 102° 40'00"-103° 0'0" Bujur Timur (BT) dan 3° 4'10" – 3° 22' 30" Lintang Selatan (LS) dan dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

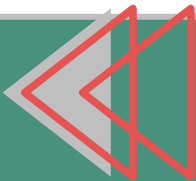
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Batu Kuning Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, dan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

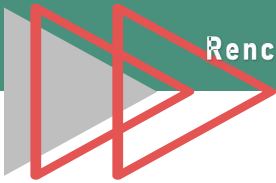
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Lubuk Linggau



Sumber: RTRW Kota Lubuk Linggau 2022-2042

Wilayah Kota Lubuk Linggau terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dan 72 (tujuh puluh dua) Kelurahan sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:





Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Lubuk Linggau per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Lubuk Linggau Timur I	Air Kuti	8	1.402,57	3,81%
2	Lubuk Linggau Timur II	Mesat Seni	9	888,59	2,42%
3	Lubuk Linggau Selatan I	Perumnas Rahmah	7	7.647,27	20,79%
4	Lubuk Linggau Selatan II	Marga Rahayu	9	4.018,57	10,93%
5	Lubuk Linggau Barat I	Kayu Ara	11	5.773,89	15,70%
6	Lubuk Linggau Barat II	Sido Rejo	8	773,94	2,10%
7	Lubuk Linggau Utara I	Petanang Ilir	10	13.965,05	37,97%
8	Lubuk Linggau Utara II	Batu Urip Permai	10	2.309,69	6,28%
Kota Lubuk Linggau			72	36.779,58	100,00%

Sumber: RTRW Kota Lubuk Linggau 2022-2042

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Kondisi Topografi (kemiringan lahan dan garis kontur) suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian lahan dan penataan ruang alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan. Kemiringan lereng merupakan faktor utama yang menentukan suatu daerah apakah layak untuk dibudidayakan atau tidak. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti persawahan, ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan dibawah 15 persen, sedangkan lahan dengan kemiringan diatas 40 persen akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan. Karakteristik tiap kemiringan lereng dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Kelerengan 0% - 5% dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan kecil.
- 2) Kelerengan 5% - 10% dapat digunakan untuk kegiatan perkotaan dan pertanian, namun bila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya masih mungkin terjadi erosi.
- 3) Kelerengan 10% - 30% merupakan daerah yang rawan erosi, terutama bila tumbuhan pada permukaannya ditebang. Daerah ini masih dapat dibudidayakan namun dengan usaha lebih.
- 4) Kelerengan > 30% merupakan daerah yang sangat peka terhadap bahaya erosi, dan kegiatan di atasnya harus bersifat non budidaya. Apabila terjadi penebangan hutan akan membawa akibat terhadap lingkungan yang lebih luas.

Secara umum topografi wilayah kota Lubuk Linggau dipengaruhi morfologi wilayah Pegunungan Bukit Barisan dimana lahan di wilayah kota memiliki beberapa klasifikasi, yaitu: tanah datar/dataran (kemiringan 0–2%); perbukitan landai (kemiringan 2–5%); perbukitan sedang (kemiringan 5 – 15%), perbukitan



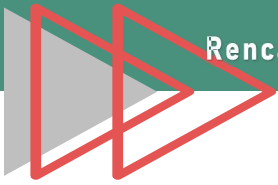
Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Lubuk Linggau



Secara umum jenis batuan dasar yang terbentuk di wilayah Kota Lubuk Linggau tersusun berupa *pumiceous tuff*, *sandy tuff* dan *tuff acecous sand stone* yang kesemuanya bersifat vulkan kuartar. Bahan-bahan ini kaya dengan plagioklas dan umumnya bersifat masam, kedap air dan plastis teguh. Sedangkan kondisi stratigrafi wilayah didominasi oleh satuan alluvial dengan sebaran yang cukup merata dan merupakan suatu rangkaian antiklin yang tersebar pada bagian barat wilayah perencanaan.



-



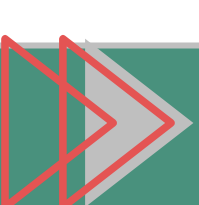
banjir/genangan dengan tingkat kesuburan relatif sedang tergantung bahan yang diendapkan. Umumnya keasaman PH 4,5 – 5,5, tekstur halus, drainase jelek dan cocok untuk pengembangan areal persawahan dan tanaman palawija.

- Litosol dan Asosiasi Litosol, banyak dijumpai di wilayah pada elevasi tinggi, terbentuk dari bahan tufa vulkan andesitis - basaltis dengan tingkat kesuburan relatif sedang. Umumnya keasaman PH 5,5 – 6,5, tekstur halus, struktur gembur, warna coklat hingga merah dan cocok untuk pengembangan tanaman keras, rumput-rumputan dan ternak.
- Regosol, merupakan jenis tanah yang mempunyai perkembangan profil tinggi dengan warna hitam hingga kelabu tua, banyak dijumpai di wilayah dataran bergelombang dan terbentuk dari bahan tufa abu dan batuan intersedimen dengan tingkat kesuburan relatif sedang umumnya keasaman PH 5,5 – 6,5, tekstur agak kasar, sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, struktur gembur dan cocok untuk pengembangan tanaman padi, palawija dan tanaman keras lainnya.
- Asosiasi Gleihumus, banyak dijumpai di wilayah dataran dan bergelombang, banyak mengandung unsur hara dan peka terhadap erosi. Umumnya keasaman PH 4,5 – 6,5, tekstur halus, sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, struktur gembur dan cocok untuk pengembangan areal tanaman padi.

2.1.1.4. Hidrologi

Karakteristik hidrologi Kota Lubuk Linggau sangat dipengaruhi oleh adanya beberapa sungai yang mengalir di wilayah kota ini, terutama yang terbesar adalah Sungai Kelingi dan sungai Lakitan, serta beberapa sungai kecil lainnya, yaitu Sungai Kesie, Sungai Ketue, Sungai Kati dan beberapa anak sungai lain. Air sungai mempunyai debit yang relatif tidak berfluktuasi secara mencolok antara musim kemarau dengan musim penghujan, dan keduanya dimanfaatkan sebagai sumber air baku oleh sebagian masyarakat. Aliran sungai juga difungsikan sebagai sistem drainase, pembuangan limbah, dan beberapa diantaranya dimanfaatkan untuk irigasi kegiatan pertanian di wilayah sekitarnya.

Karakteristik morfologi tanah Kota Lubuk Linggau relatif datar, dimana terdapat alur-alur dan sungai sehingga membentuk suatu wilayah aliran sungai yang termasuk dalam Sub Das Lakitan seluas 20.573,9 Ha dan Sub DAS Kelingi seluas 19.516 Ha, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:





Tabel 2.2. Luas Sub DAS Lakitan dan Sub DAS Kelingi per Kecamatan dalam Kota Lubuk Linggau

NO	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Luas Sub. DAS (KM ²)	Termasuk Dlm Sub DAS
1	Lubuk Linggau Selatan I	85,14	85,14	Sub. DAS Kelingi
2	Lubuk Linggau Selatan II	37,16	9,58	Sub. DAS Kelingi
			27,58	Sub. DAS Lakitan
3	Lubuk Linggau Barat I	4,81	4,81	Sub. DAS Kelingi
4	Lubuk Linggau Barat II	11,439	10,81	Sub. DAS Kelingi
			0,629	Sub. DAS Lakitan
5	Lubuk Linggau Utara I	152,42	6,97	Sub. DAS Kelingi
			145,42	Sub. DAS Lakitan
6	Lubuk Linggau Utara II	37,1	5,02	Sub. DAS Kelingi
			32,08	Sub. DAS Lakitan
7	Lubuk Linggau Timur I	13,9	13,9	Sub. DAS Kelingi
8	Lubuk Linggau Timur II	10,12	10,12	Sub. DAS Kelingi

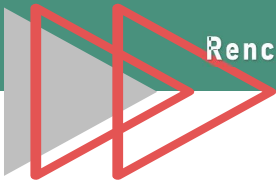
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Adapun sungai-sungai yang melalui wilayah Kota Lubuk Linggau antara lain adalah Sungai Kelingi, Sungai Kesie, Sungai Ketue, Sungai Kati dan lainnya. Secara umum sungai-sungai tersebut termasuk tipe parenial, yaitu sungai yang mempunyai aliran sepanjang tahun, sehingga debit air tidak berfluktuasi cukup tinggi antara musim kemarau dengan musim hujan. Pada umumnya sungai-sungai tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat. sebagai sumber air baku untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan urusan pertanian.

2.1.1.5. **Klimatologi**

Kota Lubuk Linggau mempunyai tipe iklim tropis dengan variasi curah hujan rata-rata tahun 2021 sebanyak mm/tahun, dimana setiap tahun jarang sekali ditemukan bulan kering. Kelembaban udara rata-rata pada tahun 2021 adalah sebesar 78,56 persen. Selama tahun 2021, penyinaran matahari rata-rata tahunan di wilayah perencanaan berkisar 36 persen (>6 jam/hari) dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April dan terendah pada bulan Desember. Suhu udara rata-rata di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2021 sebesar 29°C dengan fluktuasi yang tidak terlalu tinggi, sehingga sepanjang tahun relatif sama. Secara umum, kondisi klimatologi di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2021 tidak mengganggu produktivitas tanaman di Kota Lubuk Linggau.





Tabel 2.3. Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Lubuk Linggau Tahun 2021

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
1. Januari	235,7	17
2. Februari	181,4	19
3. Maret	251,9	19
4. April	127,6	13
5. Mei	144,8	15
6. Juni	60	8
7. Juli	124,7	6
8. Agustus	116,1	13
9. September	229	12
10. Oktober	118,1	12
11. November	421,4	23
12. Desember	587,5	23
Jumlah	2.362,5	163
Rata-rata	196,875	13,58

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2022

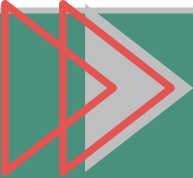
2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Lubuk Linggau saat ini meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi permukiman, pemerintahan dan perkantoran, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perkebunan, tegalan, perikanan (tambak), pelayanan fasilitas umum, dan lain-lain. Penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penggunaan untuk kegiatan terbangun dan penggunaan untuk kegiatan tidak terbangun.

Karakter perkembangan kawasan terbangun Kota Lubuk Linggau tidak lepas dari keberadaan Kota Lubuk Linggau yang berada pada perlintasan pergerakan antar wilayah serta jaringan jalan regional (Lintas Sumatera) yang menghubungkan kota-kota utama di Pulau Sumatera. Sebagai konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup permukiman, perdagangan dan jasa, pemerintahan dan perkantoran, industri dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama (linier).

Sejalan kondisi tersebut maka perkembangan Kota Lubuk Linggau terjadi secara linier dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros jalur Lintas Tengah Lintas Sumatera (terkonsentrasi pada pusat kota), sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kota (kesenjangan perkembangan kegiatan di pusat kota dengan bagian-bagian wilayah kota lainnya), terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan sebagainya.

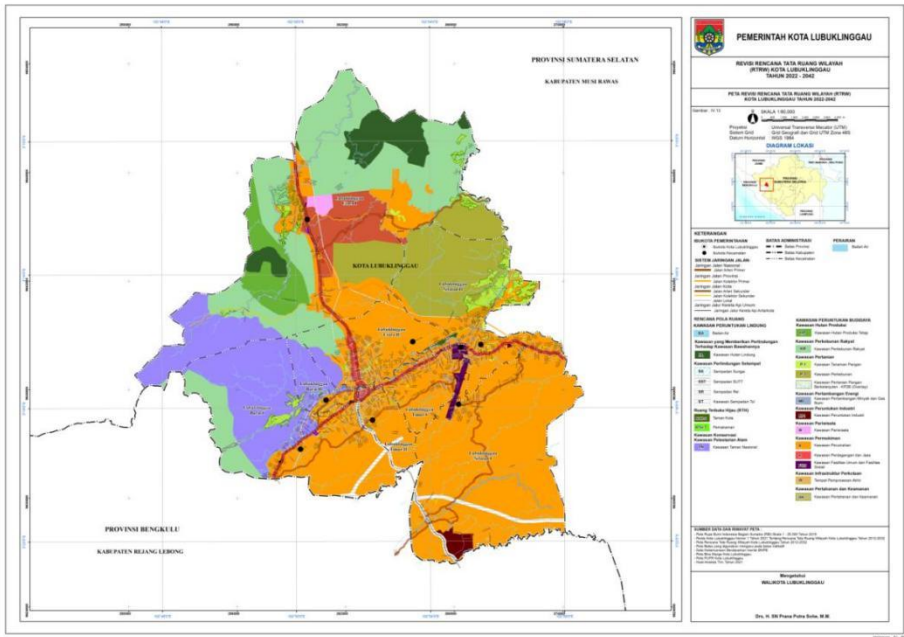
Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola





ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daerah transisi. Pola ruang Kota Lubuk Linggau ditunjukkan oleh Gambar berikut.

Gambar 2.3. Pola Ruang Kota Lubuk Linggau



Sumber: RTRW Kota Lubuk Linggau 2022-2042

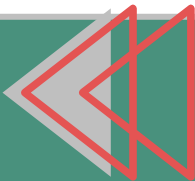
Untuk jelasnya sebaran dan kecenderungan penggunaan lahan Kota Lubuk Linggau yang terjadi saat ini dapat dilihat pada bahasan berikut ini.

a) Kegiatan Permukiman

Kawasan permukiman merupakan kegiatan kota yang berfungsi sebagai hunian bagi warga Kota Lubuk Linggau. Luas penggunaan lahan untuk permukiman sebesar 23 persen dari luas keseluruhan Kota Lubuk Linggau atau sekitar 9.234,5 Ha. Karena adanya jalur lintas sumatera yang membentang di tengah-tengah Kota Lubuk Linggau, maka aktivitas penduduk pun terkonsentrasi di sepanjang jalur tersebut (Jalan Yos Sudarso) atau di Pusat Kota. Namun dengan adanya pembangunan jalan lingkar utara dan selatan, serta terminal tipe B di Kecamatan Utara I, ada kecenderungan perkembangan permukiman ke wilayah ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan kawasan perumahan baru di wilayah ini. Bangunan perumahan di Kota Lubuk Linggau meliputi bangunan permanen, semi permanen dan sederhana.

b) Kegiatan Pemerintahan dan Perkantoran

Salah satu fungsi Kota Lubuk Linggau adalah sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas perkantoran. Kawasan perkantoran swasta saat ini terkonsentrasi di pusat kota (Kecamatan Lubuk Linggau Timur I dan II) dan sebagian tersebar di sepanjang jalan utama kota (Jalan Yos Sudarso). Sedangkan untuk perkantoran pemerintah saat ini terkonsentrasi di 3 (tiga) tempat, yaitu di Kecamatan Lubuk Linggau Barat (Kayuara), Lubuk Linggau Timur (Pusat Kota), dan Lubuk Linggau Utara (kompleks perkantoran dan sarana olah raga).





c) Kegiatan Perdagangan dan Jasa

Kota Lubuk Linggau cukup potensial dalam kegiatan perdagangan dan jasa, hal ini nampak dari banyaknya tempat-tempat perdagangan dan jasa serta beraneka ragam fasilitas pendukungnya. Perkembangan perdagangan dan jasa ini tidak terlepas dari letak Kota Lubuk Linggau yang berada pada jalur lintas sumatera dan fungsinya sebagai kota transit, sebagai akibat dari hal tersebut maka Kota Lubuk Linggau berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa (distribusi dan akumulasi) berbagai komoditas perekonomian dari wilayah sekitarnya.

Persebaran kegiatan perdagangan dan jasa skala kota (modern) yang terjadi saat ini yaitu disepanjang Jalan Yos Sudarso, Terminal Kalimantan (Terminal Kota), Stasiun kereta api (Pusat Kota), namun sudah ada upaya untuk mendistribusikan kegiatan perdagangan ke wilayah-wilayah pinggiran seperti di wilayah utara dan selatan. Sedangkan untuk kegiatan perdagangan skala lokal (tradisional) seperti toko, warung dan pasar letaknya menyebar mendekati kawasan permukiman.

Kota Lubuk Linggau memiliki 9 (sembilan) pasar yaitu di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan (Pasar Simpang Priuk dan Pasar Moneng Sepati), Kecamatan Lubuk Linggau Barat (Pasar Inpres Blok A dan Blok B, Pasar Terminal Agribisnis, dan Pasar Tanjung Aman), Kecamatan Lubuk Linggau Utara II (Pasar Satelit dan Pasar Bukit Sulap), Kecamatan Lubuk Linggau Timur II (Pasar Mesat Seni).

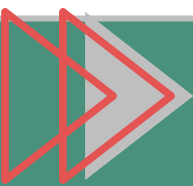
Permasalahan perdagangan dan jasa yang terjadi saat ini disebabkan belum adanya pengaturan yang jelas antara kegiatan perdagangan skala regional (wilayah) dengan skala kota (dilakukan dengan sistem rolling / shift di sekitar Terminal Kalimantan), serta belum adanya kawasan-kawasan khusus untuk perdagangan sehingga kegiatan perdagangan terkonsentrasi di pusat kota.

c) Kegiatan Industri

Kegiatan industri di Kota Lubuk Linggau umum berupa industri kecil yang lokasinya tersebar diseluruh bagian wilayah kota. Beberapa jenis kegiatan industri yang ada di Kota Lubuk Linggau berupa industri kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, elektronik dan aneka industri. Karena sebagian besar merupakan industri kecil, maka kegiatan ini menyatu dengan lokasi permukiman.

d) Fasilitas Umum

Fasilitas umum di Kota Lubuk Linggau umumnya terkonsentrasi di pusat kota. Ada beberapa fasilitas umum yang lokasinya menyebar seperti sarana pendidikan, sarana peribadatan dan sarana kesehatan.





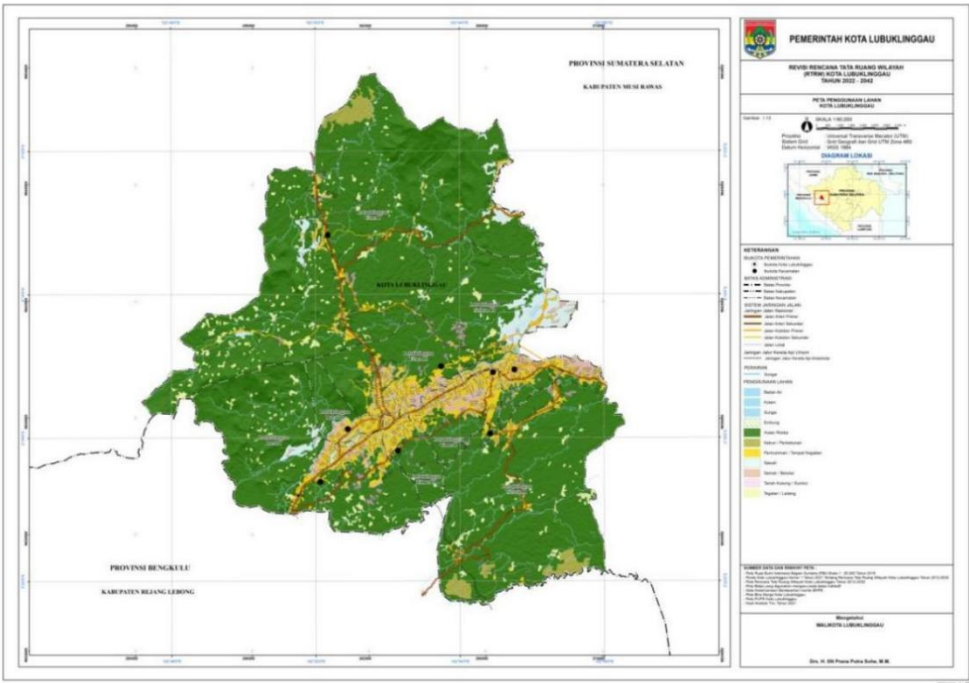
Untuk lebih jelasnya, pola penggunaan lahan di Kota Lubuk Linggau dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut :

Tabel 2.4. Pola Penggunaan Lahan

No.	Tutupan Lahan Tahun 2021	Luas (Ha)	%
1	Badan Air	1,27	0,003%
2	Embung	1,84	0,01%
3	Hutan (Rimba,lindung,Produksi)	29.679,29	80,66%
4	Kebun/Perkebunan	573,54	1,56%
5	Kolam	11,16	0,03%
6	Permukiman/Tempat Kegiatan	3.385,32	9,20%
7	Sawah	980,03	2,66%
8	Semak/Belukar	659,79	1,79%
9	Sungai	175,32	0,48%
10	Tanah Kosong/Gundul	291,01	0,79%
11	Tegalan/Ladang	1.035,43	2,81%
	Kota Lubuk Linggau	36.779,58	100,00%

Sumber: RTRW Kota Lubuk Linggau 2022-2042

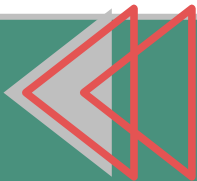
Gambar 2.4. Peta Penggunaan Lahan Kota Lubuk Linggau

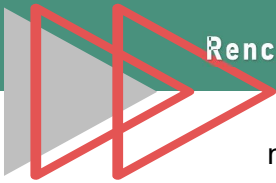


Sumber: RTRW Kota Lubuk Linggau 2022-2042

Di Kota Lubuk Linggau juga terdapat Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang termasuk dalam hutan nasional seluas 6.616,95 Ha. Selain itu juga ada kawasan resapan air yang terletak di Bukit Cogong, dimana pengelolaannya bersama-sama dengan Kabupaten Musi Rawas. Sementara untuk Hutan Kota seluas 60 Ha terdapat di daerah Cikencreng dan Gua Batu. Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah mengusulkan alih fungsi Hutan Produksi Tetap di Bukit Hulu Tumpah seluas 11.700 Ha di Kecamatan Lubuk Linggau Utara I untuk areal penggunaan lainnya, antara lain untuk perkantoran.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Lubuk Linggau bahwa di dalam wilayah Kota hendaknya terdapat Ruang Terbuka Hijau minimal 30 persen dari keseluruhan luas wilayah Kota itu sendiri, maka



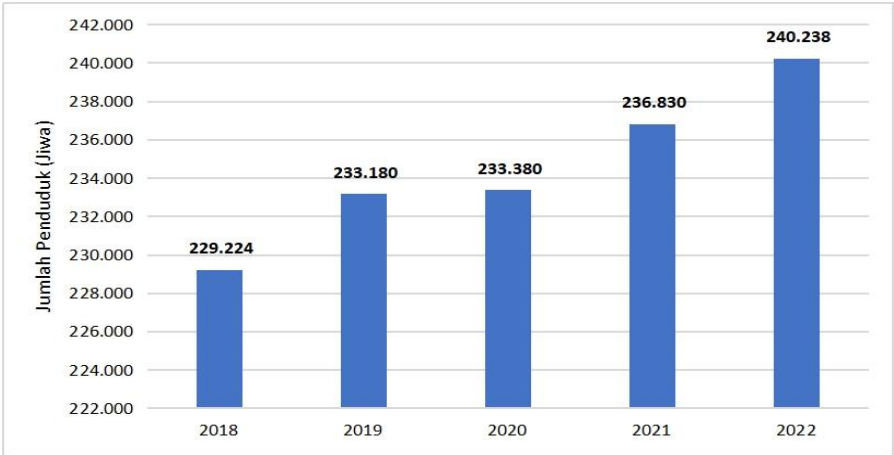


masih perlu peningkatan, karena sampai dengan tahun 2016 Ruang Terbuka Hijau di Kota Lubuk Linggau baru mencapai 19.687 m² yang terdiri dari hutan kota, sempadan sungai, sempadan rel, sempadan SUTT, pemakaman, taman kota.

2.1.1.7. Kependudukan

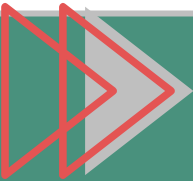
Penduduk Kota Lubuk Linggau pada tahun 2022 berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh BPS adalah sebanyak 240.238 jiwa yang terdiri atas 120.961 jiwa penduduk laki-laki dan 119.277 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk setiap tahun terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2022 sebesar 1,44 persen. Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk di Kota Lubuk Linggau adalah sebesar 598 jiwa per km.

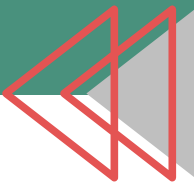
Gambar 2.5. Pertumbuhan Penduduk Kota Lubuk Linggau Tahun 2018 - 2022



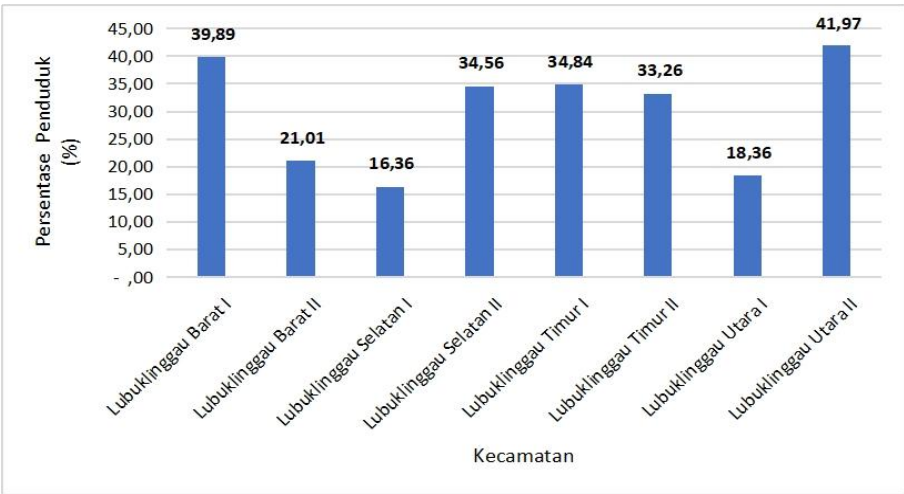
Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2022

Distribusi penduduk menurut kecamatan tidak merata. Dari delapan kecamatan yang ada di Kota Lubuk Linggau, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II memiliki jumlah penduduk paling banyak (41.970 jiwa), kemudian diikuti oleh Kecamatan Lubuk Linggau Barat I (39.886 jiwa). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I (16.364 jiwa) dan Lubuk Linggau Utara I (18.356 jiwa).





Gambar 2.6. Persentase Distribusi Penduduk Kota Lubuk Linggau Tahun 2022



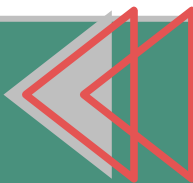
Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2022

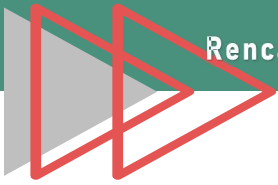
2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Struktur Ruang RTRW Kota Lubuk Linggau memuat pusat-pusat pertumbuhan yang diharapkan menjadi pemicu pengembangan wilayah dalam Kota Lubuk Linggau. Sektor perdagangan dan jasa yang menjadi kegiatan utama pendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Lubuk Linggau dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan, sektor ini terus berkembang dan menjadi potensi untuk terus dikembangkan sebagai sektor terbesar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuk Linggau. Kawasan Perdagangan dan Jasa difokuskan pada Pusat Pelayanan Kota (PPK) Pasar Pemiri dengan didukung oleh 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK). Simpul pertumbuhan ini diproyeksikan sebagai pemicu pertumbuhan dan pengembangan wilayah sebagai titik sentral pendukung pengembangan kawasan.

Kota Lubuk Linggau telah memiliki Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022-2042. Penataan ruang kota bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kota Lubuk Linggau yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai kota perdagangan dan jasa berskala regional. Adapun Rencana struktur ruang wilayah tersebut meliputi:

- a) Sistem pusat pelayanan kota, meliputi:
 - I) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - II) Pusat pelayanan kota (PPK);
 - III) Sub-pusat pelayanan kota (Sub-PPK); dan
 - IV) Pusat lingkungan (PL).
- b) Sistem jaringan prasarana kota, meliputi:
 - I) Rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
 - II) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya.





Beberapa Potensi Kota Lubuk Linggau yang patut untuk dikembangkan antara lain:

a) Wisata

Pemerintah Kota Lubuk Linggau memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam baik dari sisi produk wisata maupun pasar wisatawan. Keragaman alam dan budaya yang dimiliki tersebut merupakan modal dasar dalam pengembangan daya tarik wisata. Namun beberapa kendala yang dihadapi adalah belum tertatanya objek wisata dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung. Untuk pengembangan sektor pariwisata saat ini sudah ada obyek wisata yaitu:

I. Wisata Alam

- a) Air Terjun Taqli;
- b) Air Terjun Temam II;
- c) Bukit Sulap;
- d) Goa Batu Kel. Taba Jemekeh;
- e) Goa Batu Naga Kelurahan Jukung;
- f) Air Terjun Curug Layang Kel. Lubuk Kupang; dan
- g) Air Terjun Sei.Sando Kel. Kayu Ara.

II. Wisata Budaya

- a) Museum Subkoss Garuda
- b) Benteng Kuto Ulak Lebar;
- c) Rumah Adat di Kel. Batu Urip dan Kel. Jukung.

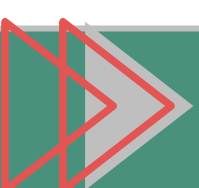
III. Wisata Buatan

- a) DAM Air Watervang
- b) Danau Malus Kel. Petanang
- c) DAM KESIE

b) Pertanian, perikanan dan peternakan

Pertanian di Kota Lubuk Linggau secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, ternak, ikan, dan hutan). Sektor pertanian juga memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi yaitu rata-rata sebesar 24% dari jumlah penduduk bekerja, meskipun presentase penyerapannya cenderung menurun.

Namun hubungan antar subsistem pertanian dan sektor lain (*linkages*) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional, hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri yang belum optimal dalam pengolahan dan pemasarannya. Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian.





Kota Lubuk Linggau memiliki potensi pembangunan ekonomi peternakan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap, usaha budidaya air tawar. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis perikanan serta produksi sumber daya perikanan masih jauh dari potensi yang ada. Dilain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan.

c) Investasi

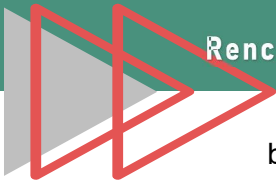
Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan UMKM dalam pembangunan serta rentannya UMKM terhadap perubahan harga bahan bakar. Masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil. Selain itu, dibutuhkan pengembangan UMKM dan koperasi yang mampu mengembangkan agroindustri dan bisnis guna menunjang daya beli dan ketahanan pangan. Lebih dari 90 persen, investasi yang ditanamkan di Kota Lubuk Linggau bergerak pada sektor sekunder, yang rentan terhadap pengaruh ekonomi global.

2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan analisis, kemungkinan terjadinya bencana di kota Lubuk Linggau adalah berasal dari banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi serta angin puting beliung. Saat ini, bencana banjir belum terjadi secara mengkhawatirkan hanya sebatas banjir sesaat atau genangan air selama beberapa jam setelah hujan deras mengguyur kondisi tersebut sering terjadi pada kawasan Pusat Kota yaitu di beberapa titik di depan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin. Selanjutnya, tanah longsor dikhawatirkan terjadi di sekitar Bukit Sulap terutama pada daerah permukiman yang terletak dibawah kaki bukit sulap karena masyarakat yang mengambil batu alam untuk peralatan dapur dari Bukit Sulap yaitu pada wilayah Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, dan sebagian besar Kelurahan didaerah Kecamatan Lubuk Linggau Utara II yaitu Kelurahan Kaliserayu Kelurahan Ulak Surung, Kelurahan Jogoboyo.

Bahaya kebakaran sering terjadi karena kecerobohan masyarakat, misalnya kompor, tabung gas bahkan karena lilin dan membakar sampah di halaman. Permukiman yang padat ataupun dibuat dari bahan kayu menyebabkan kawasan permukiman rawan kebakaran. Di Kota Lubuk Linggau potensi terbesar untuk





bahaya kebakaran terdapat di Kelurahan Jawa Kanan SS, Kelurahan Mesat Seni dan Kelurahan Mesat jaya.

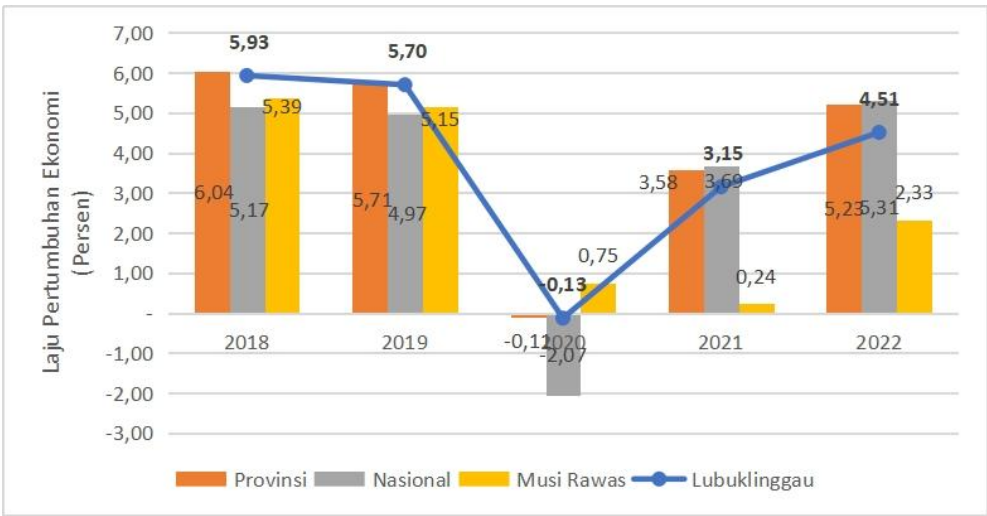
Dalam hal gempa bumi, Kota Lubuk Linggau berdekatan dengan kawasan Bukit Barisan yang memiliki salah satu lempeng (vault) gempa bumi di pulau Sumatera. Kemungkinan terjadi bencana gempa bumi di kota Lubuk Linggau tetap perlu menjadi pertimbangan karena lokasinya relatif berdekatan dengan kawasan Bukit Barisan.

Bencana akibat angin puting beliung dalam beberapa tahun terakhir ini yaitu terdapat di Kecamatan Lubuk Linggau Utara I dan Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, hal ini diakibatkan karena pengaruh *global warming* maupun *climate change*. Oleh sebab itu, perlu juga diwaspadai akibat dari angin puting beliung yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Korban yang mungkin terjadi dalam jumlah besar di kota Lubuk Linggau, kemungkinan terjadi akibat dari gempa bumi maupun kebakaran.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Lubuk Linggau berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai Rp.7,687 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.4,671,9 triliun. Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Lubuk Linggau tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,36 persen. Adanya pandemi COVID-19 menekan kinerja hampir seluruh lapangan usaha di Kota Lubuk Linggau.

Gambar 2.7. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Lubuk Linggau dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

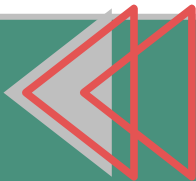
Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Lubuk Linggau pada tahun 2022 berada di bawah pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dan





pertumbuhan ekonomi Nasional. Namun, jika dibandingkan dengan Kabupaten Musi Rawas, pertumbuhan ekonomi Kota Lubuk Linggau selalu berada di atas persentase pertumbuhan ekonomi Nasional sepanjang lima tahun terakhir.

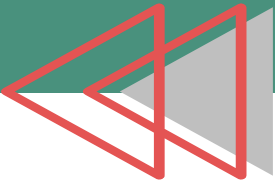
Lebih lanjut, pertumbuhan PDRB Kota Lubuk Linggau dapat dilihat pada Tabel 2.5. dan Tabel 2.6. berikut.



Tabel 2.5. PDRB Kota Lubuk Linggau Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2022

No	Sektor	2018		2019		2020		2021*		2022**	
		Rp. (Milyar)	%	Rp. (Milyar)	%	Rp. (Milyar)	%	Rp. (Milyar)	%	Rp. (Milyar)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	237,01	5,77	245,17	5,65	247,88	5,72	252,2	5,64	256,27	5,49
B	Pertambangan & penggalian	69,79	1,70	73,81	1,70	75,18	1,73	77,25	1,73	80,55	1,72
C	Industri pengolahan	265,88	6,48	286,97	6,61	285,75	6,59	292,31	6,54	310,39	6,64
D	Pengadaan Listrik & Gas	4,17	0,10	4,55	0,10	5,18	0,12	5,44	0,12	5,77	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,50	0,23	9,37	0,22	9,72	0,22	9,73	0,22	10,22	0,22
F	Konstruksi	980,60	23,88	1.015,62	23,40	986,26	22,76	1001,59	22,41	1021,5	21,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	688,50	16,77	738,84	17,02	735,10	16,96	775,41	17,35	833,28	17,84
H	Transportasi dan Pergudangan	260,44	6,34	281,60	6,49	270,24	6,24	275,36	6,16	299,3	6,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	149,72	3,65	168,86	3,89	156,49	3,61	163,91	3,67	185,96	3,98
J	Informasi dan Komunikasi	73,54	1,79	78,98	1,82	87,41	2,02	91,81	2,05	98,57	2,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	243,13	5,92	243,52	5,61	247,30	5,71	250,47	5,60	251,53	5,38
L	Real Estate	382,93	9,33	411,13	9,47	424,62	9,80	445,58	9,97	467,72	10,01
M,N	Jasa Perusahaan	48,31	1,18	52,73	1,21	51,15	1,18	51,32	1,15	53,89	1,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	125,26	3,05	126,71	2,92	132,85	3,07	138,06	3,09	138,14	2,96
P	Jasa Pendidikan	260,26	6,34	270,79	6,24	266,43	6,15	279,13	6,24	279,22	5,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,85	2,12	95,02	2,19	104,62	2,41	109,99	2,46	112,29	2,40
R,S,T,U	Jasa Lainnya	220,19	5,36	236,45	5,45	247,60	5,71	250,67	5,61	267,29	5,72
	PDRB	4.106,07	100,00	4.340,12	100,00	4.333,78	100,00	4.470,23	100,00	4.671,89	100,00

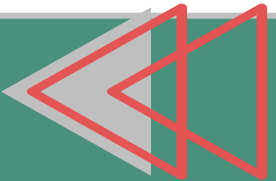
Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2023



**Tabel 2.6. PDRB Kota Lubuk Linggau Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022**

No	Sektor	2018		2019		2020		2021*		2022**	
		Rp. (Milyar)	%	Rp. (Milyar)	%	Rp. (Milyar)	%	Rp. (Milyar)	%	Rp. (Milyar)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	313,31	5,11	329,90	4,96	341,84	5,09	353,83	5,02	377,77	4,91
B	Pertambangan & penggalian	109,40	1,78	116,82	1,76	119,64	1,78	123,48	1,75	128,71	1,67
C	Industri pengolahan	421,39	6,87	460,76	6,93	471,43	7,02	495,08	7,03	548,46	7,13
D	Pengadaan Listrik & Gas	6,93	0,11	7,14	0,11	8,30	0,12	8,96	0,13	9,62	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,37	0,20	12,40	0,19	12,78	0,19	13,11	0,19	13,97	0,18
F	Konstruksi	1.490,66	24,30	1.557,10	23,42	1.514,45	22,54	1577,91	22,41	1702,06	22,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.270,61	20,71	1.425,51	21,44	1.448,12	21,56	1539,82	21,87	1728,06	22,48
H	Transportasi dan Pergudangan	381,21	6,21	418,51	6,30	405,65	6,04	415,1	5,89	485,74	6,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	252,39	4,11	295,33	4,44	279,17	4,16	293,62	4,17	340,29	4,43
J	Informasi dan Komunikasi	86,94	1,42	95,36	1,43	106,07	1,58	111,49	1,58	119,72	1,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	335,36	5,47	341,93	5,14	344,19	5,12	356,02	5,06	368,72	4,80
L	Real Estate	512,61	8,36	569,21	8,56	596,15	8,87	637,11	9,05	687,11	8,94
M,N	Jasa Perusahaan	76,84	1,25	88,11	1,33	86,48	1,29	87,42	1,24	96,12	1,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	158,12	2,58	160,10	2,41	172,62	2,57	180,15	2,56	184,6	2,40
P	Jasa Pendidikan	319,66	5,21	340,65	5,12	343,62	5,11	361,56	5,13	367,45	4,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108,58	1,77	120,19	1,81	137,32	2,04	147,92	2,10	154,52	2,01
R,S,T,U	Jasa Lainnya	278,83	4,54	308,79	4,64	330,40	4,92	339,41	4,82	374,87	4,88
	PDRB	6.135,21	100,00	6.647,81	100,00	6.718,23	100,00	7.041,99	100,00	7.687,79	100,00

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2023



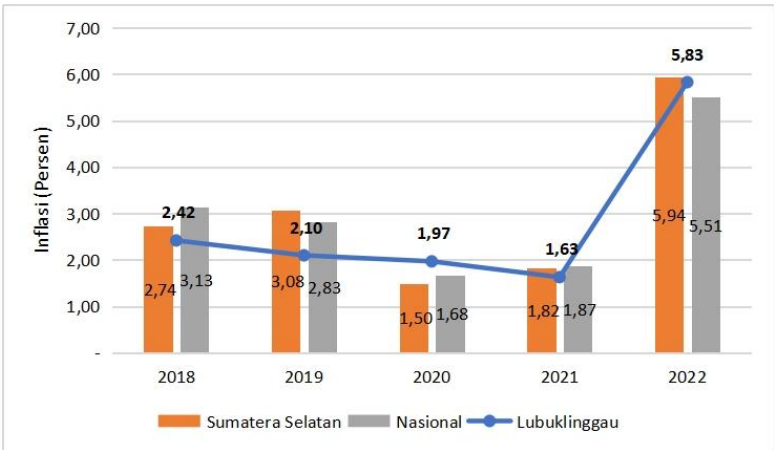
2.1.2.1.2. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (demand side) dimana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (supply side) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi Kota Lubuk Linggau mengalami angka tertinggi pada masa hari raya lebaran, serta liburan tengah tahun dan akhir tahun. Sementara dari sisi suplai, inflasi di Lubuk Linggau juga dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang. Faktor cuaca yang tidak menentu dapat mendorong peningkatan harga komoditas, terutama sayur dan buah yang produksinya terganggu akibat hama penyakit serta gagal panen.

Secara umum laju inflasi di Kota Lubuk Linggau dari tahun 2018 sampai 2021 memiliki tren yang terus menurun. Namun pada tahun 2022, inflasi Kota Lubuk Linggau meningkat hingga mencapai 5,83 persen, mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 4,2 persen. Meningkatnya nilai inflasi di tahun 2022 menunjukkan meningkatnya permintaan dan daya beli selama masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Gambar 2.8. Laju Inflasi IHK Kota Lubuk Linggau 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

2.1.2.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB per-kapita Kota Lubuk Linggau menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seperti yang disajikan pada tabel, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap

penduduk Kota Lubuk Linggau rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Tabel 2.7. PDRB Per Kapita Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. ADHB	6.135,21	6.643,68	6.718,23	7.041,97	7.687,79
b. ADHK 2010	4.106,07	4.339,20	4.333,67	4.470,23	4.671,89
PDRB Perkapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	26.765,13	28.491,89	28.786,89	29.734,52	32.000,72
b. ADHK 2010	17.912,96	18.688,96	18.509,86	19.875,27	19.446,92
Jumlah penduduk (Ribu jiwa)	229,22	233,18	233,38	236,83	240,24

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2023

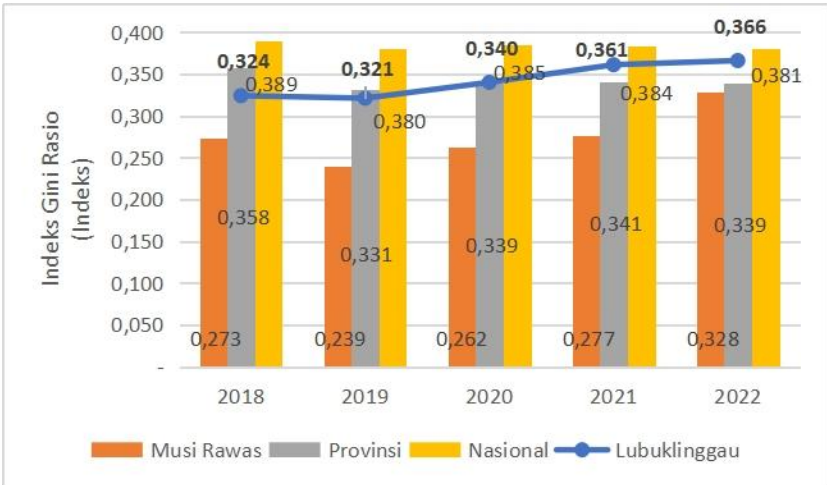
2.1.2.1.4. Indeks Gini

Capaian Indeks Gini Kota Lubuk Linggau cenderung mengalami peningkatan mulai tahun 2019 sampai 2022. Pada tahun 2018, Indeks Gini di Kota Lubuklinggau sempat mengalami penurunan dari 0,324 jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 0,378. Capaian Indeks Gini Kota Lubuk Linggau kembali meningkat di tahun 2019 yaitu 0,320 hingga mencapai 0,366 di tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pendapatan di Kota Lubuk Linggau.

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Gini Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas, pada tahun 2021 capaian Indeks Gini Kota Lubuk Linggau sedikit lebih tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan capaian Indeks Gini Nasional, capaian Indeks Gini Kota Lubuk Linggau masih lebih baik. Rasio Gini kembali meningkat dan semakin meningkat dari tahun 2020 hingga 2022 akibat pandemi COVID-19.

Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuk Linggau secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.9. Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

2.1.2.1.5. **Perkembangan Investasi**

Nilai investasi total Kota Lubuk Linggau cenderung mengalami penurunan dari tahu 2018 sampai dengan 2022 hingga mencapai Rp.2.026,64 Milyar. Kondisi ini terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, sehingga berdampak pada iklim investasi.

Gambar 2.10. Pertumbuhan Investasi Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022 (Rp. Milyar)



Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2023

2.1.2.1.6. **Incremental Capital Output Ratio (ICOR)**

Besaran ICOR Kota Lubuk Linggau pada selama kurun waktu 2018-2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2021, nilai ICOR mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2020 nilai ICOR belum dapat dihitung dikarenakan perekonomian Kota Lubuk Linggau mengalami kontraksi sebesar 0,13%. Pada tahun 2021 besaran ICOR mencapai 14,85 merupakan masa peralihan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Pada tahun 2022, nilai ICOR mengalami penurunan menjadi 10,05. Namun, angka ini masih tinggi untuk menggambarkan dampak investasi dalam pembangunan di Kota Lubuk Linggau. Nilai ICOR tahun 2022 menunjukkan bahwa untuk menaikkan produksi 1 unit output diperlukan investasi sebesar 10,05 unit hal ini menunjukan belum efisiennya investasi di Kota Lubuk Linggau.

Lebih lanjut perkembangan nilai ICOR di Kota Lubuk Linggau tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.8. Perkembangan Nilai ICOR Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	4.106,07	4.339,20	4.333,67	4.470,23	4.671,89
Perubahan (Miliar Rp)	229,93	233,13	(5,54)	136,57	201,66
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	2.009,65	2.068,07	2.043,31	2.020,21	1.974,52
ICOR	8,72	8,86	n/a	14,85	10,05
*Angka Sementara					
** Angka Sangat Sementara					

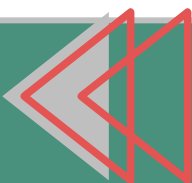
Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2023

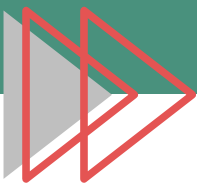
Koefisien ICOR yang relatif besar pada tahun 2021 dapat mengindikasikan investasi yang ditanamkan pada periode tersebut relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang dihasilkan relatif kecil. Dengan kata lain, investasi yang ditanamkan di Kota Lubuk Linggau selama periode 2017-2021 belum efektif sehingga relatif kurang efisien.

2.1.2.1.7. Kemiskinan

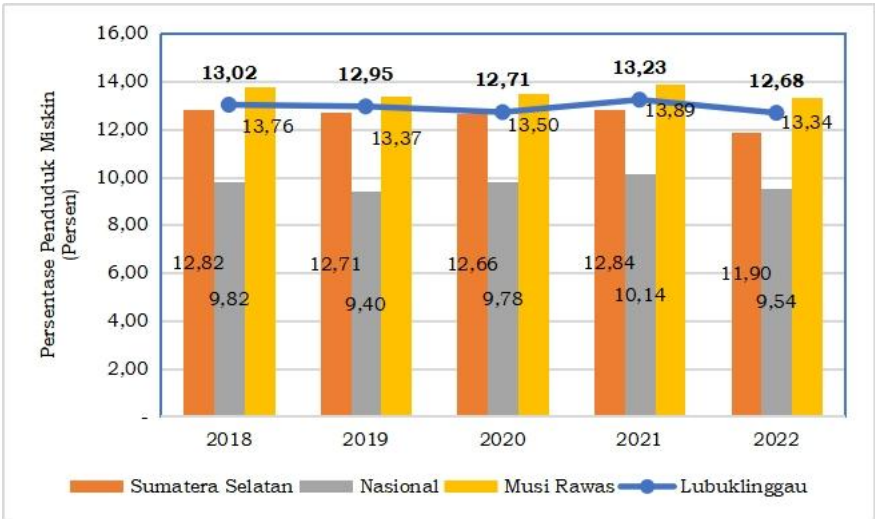
Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan.

Ditinjau dari garis kemiskinan, yang merupakan nilai pengeluaran kebutuhan makanan dan non makanan, pada tahun 2022, Kota Lubuk Linggau memiliki angka garis kemiskinan sebesar Rp. 541.784. Sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kota Lubuk Linggau menunjukkan tren yang terus menurun. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di Kota Lubuk Linggau mencapai 13,02 dan terus turun hingga mencapai 12,68 persen pada tahun 2022. Angka ini masih relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 yang mencapai 11,90 persen dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan persentase kemiskinan nasional pada tahun 2022 yang mencapai 9,54 persen.





Gambar 2.11. Persentase Penduduk Miskin Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

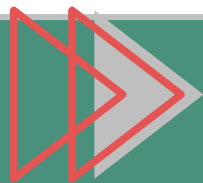
Tabel 2.9. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Orang)	Penduduk miskin	
		Ribu Jiwa	%
2018	470.897	29,74	13,02
2019	477.756	29,98	12,95
2020	495.213	29,80	12,71
2021	516.763	29,80	13,23
2022	541.784	30,68	12,68

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Terdapat beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering digunakan adalah head count (P0). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Indikator ini mudah dihitung dan dipahami, namun tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi. Hal ini dikarenakan ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin. Oleh karena itu, dikenal juga indikator kemiskinan yang lain yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau P2).

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Akan tetapi, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P2). Penurunan pada P1 mengidentifikasikan adanya perbaikan secara rata-rata

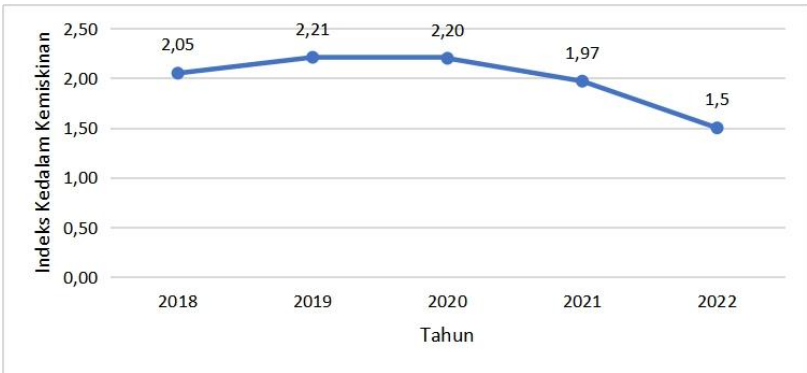




pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan dan penurunan pada P2 mengidentifikasi berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Lubuk Linggau selama kurun waktu 2018-2022 cenderung menurun. Pada tahun 2018, P1 sebesar 2,05 dan turun hingga mencapai 1,5 persen pada tahun 2022. Secara rinci, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuk Linggau tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

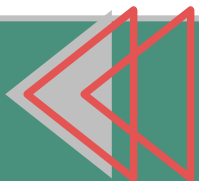
Gambar 2.12. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022



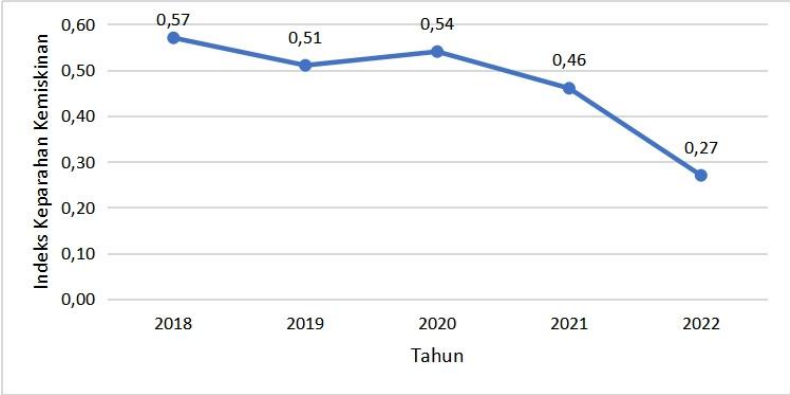
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index–P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuk Linggau dalam lima tahun terakhir memiliki tren menurun. Pada tahun 2018, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuk Linggau sebesar 0,57, selanjutnya turun signifikan hingga menjadi 0,27 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2022 terus berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2021.



Gambar 2.13. Indeks Keparahkan Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus berikutnya pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah fokus kesejahteraan sosial. Fokus ini memotret kondisi kesejahteraan masyarakat terutama dari segi pendidikan dan kesehatan. Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan menemukan dan mengenali permasalahan yang ada. Indikator-indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator pembangunan pendidikan (Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni), indikator pembangunan kesehatan (Angka kematian bayi dan angka harapan hidup) dan rasio penduduk yang bekerja. Berdasarkan capaian indikator IPM, hal yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja faktor-faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian IPM. Selain itu, perlu di perhatikan juga upaya untuk mendorong kenaikan peningkatan capaian IPM Hal tersebut perlu koordinasi lintas sektor antar Perangkat Daerah pengampu di lingkungan Kota Lubuk Linggau.

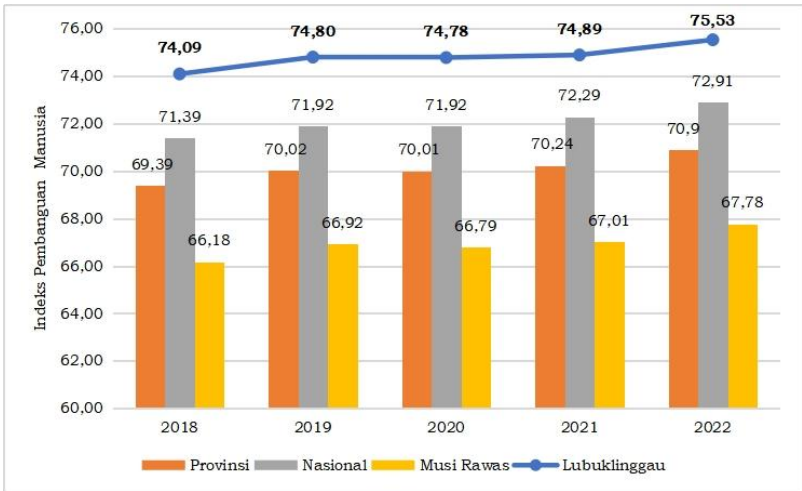
2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lubuk Linggau cenderung mengalami peningkatan dari 74,89 pada tahun 2018 menjadi 75,53 pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, IPM Kota Lubuk Linggau sudah di atas rata-rata capaian Provinsi dan Nasional.

Besar kecilnya angka IPM tidak terlepas dari unsur-unsur pembentuknya, yaitu angka harapan hidup, angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup (GNP Per Kapita). Dengan status yang disandang Kota Lubuk Linggau tersebut, maka ada indikasi bahwa pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (daya beli) relatif baik. Peningkatan IPM terjadi karena peningkatan angka harapan

hidup penduduk, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran perkapita masyarakat.

Gambar 2.14. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

2.1.2.2.2. Angka Melek Huruf

Kemampuan baca tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan yang tercermin dari data angka melek huruf, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya. Persentase penduduk yang melek huruf pada tahun 2021 mencapai 99,09 persen sisanya penduduk yang buta huruf sebesar 0,91 persen. Secara rinci perkembangan AMH penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10. Angka Melek Huruf Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

Angka Melek Huruf	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jenis Kelamin					
Laki-laki	99,15	99,37	99,15	99,72	99,09
Perempuan	97,74	98,05	99,04	98,28	99,10
Total	98,44	98,72	99,09	99,06	99,09

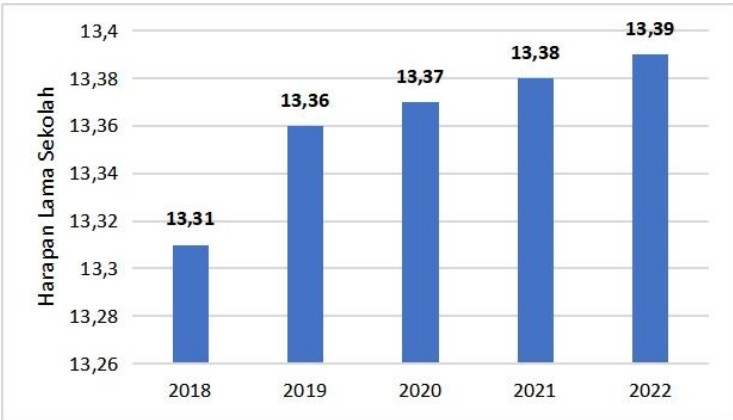
Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2021

Secara detil kondisi Angka Melek Huruf Kota Lubuk Linggau pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.10. Secara terpilah dapat ditunjukkan bahwa di tahun 2021 penduduk Kota Lubuk Linggau berjenis kelamin laki-laki sebesar 99,09 persen dapat membaca dan menulis huruf latin dan sebesar 99,10 persen penduduk kota Lubuk Linggau berjenis kelamin perempuan dapat membaca dan menulis huruf latin.

2.1.2.2.3. Harapan Lama Sekolah

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan pendidikan adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS mencerminkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Selama 2017-2021 perkembangan capaian angka HLS cenderung memiliki tren yang meningkat meskipun relatif kecil. Kenaikan angka HLS tersebut berarti bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2018 angka HLS Kota Lubuk Linggau mencapai 13,31 tahun meningkat sebesar 0,08 poin menjadi 13,39 tahun pada tahun 2022. Capaian pada tahun 2022 tersebut menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun belum memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D3 atau D4.

Gambar 2.15. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2022

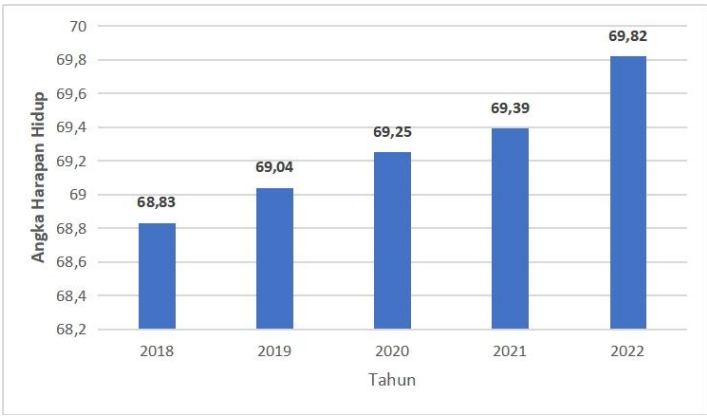
Berdasarkan perkembangan capaian angka HLS tersebut diketahui bahwa masih diperlukan upaya untuk mendorong kemajuan pembangunan pendidikan. Capaian angka HLS Kota Lubuk Linggau dapat ditingkatkan dengan mendorong pembangunan pendidikan pada wilayah kecamatan-kecamatan yang masih tergolong rendah pelayanan pendidikannya.

2.1.2.2.4. Angka Harapan Hidup

Indikator berikutnya yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH pada saat lahir (*life expectancy at birth*) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Perkembangan AHH di Kota Lubuk Linggau dalam kurun waktu 2018-2022 menunjukkan peningkatan. Dari 68,83 tahun di tahun 2018 meningkat menjadi 69,82 tahun di tahun 2022. Angka 69,82 tahun tersebut menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang lahir pada tahun 2022 hingga akhir hayatnya.

Capaian AHH dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kesehatan, ekonomi, budaya dan pendidikan sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian AHH diperlukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya-upaya dari berbagai faktor tersebut.

Gambar 2.16. Angka Harapan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

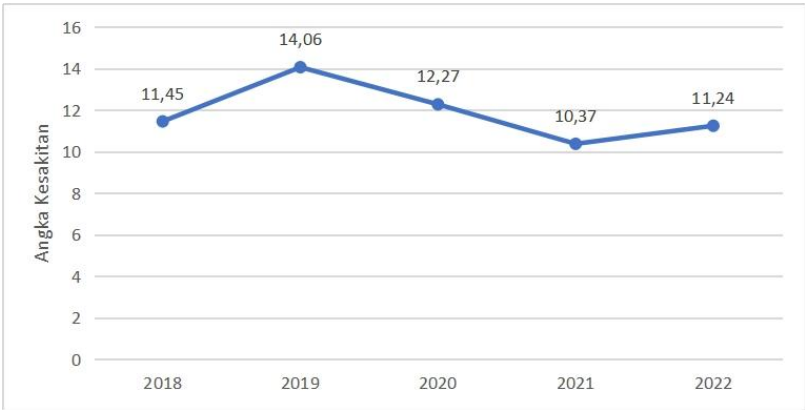


Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2022

2.1.2.2.5. Angka Kesakitan

Angka Kesakitan yaitu persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu aktivitasnya pada kurun waktu 2018-2022. Berdasarkan Gambar 2.17. tampak bahwa angka kesakitan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 14,06. Besaran ini selanjutnya menurun hingga tahun 2021 menjadi 10,37 dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 11,24.

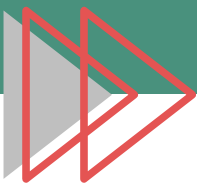
Gambar 2.17. Perkembangan Angka Kesakitan Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2023

2.1.2.2.6. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Lubuk Linggau selama tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah mencapai 9,50 dan pada tahun 2021 meningkat



hingga 9,90. Angka ini sudah melebihi program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun. Adapun jika dipilah menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih lama bersekolah dibanding perempuan. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 10,27 tahun sementara penduduk berjenis kelamin perempuan hanya mencapai 9,65 tahun. Hal ini dapat menjadi indikasi awal bahwa masih adanya kesenjangan gender.

Tabel 2.11. Rata-rata Lama Sekolah Kota Lubuk Linggau
Tahun 2017-2021

Rata-rata Lama Sekolah	Tahun				
Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020	2021
Laki-laki	10,05	9,90	10,18	10,26	10,27
Perempuan	9,46	9,32	9,63	9,64	9,65
Total	9,50	9,51	9,81	9,89	9,90

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2022

2.1.2.2.7. Angka Partisipasi Sekolah

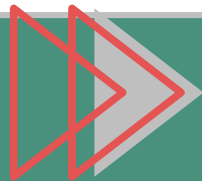
Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai proporsi anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Namun, meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

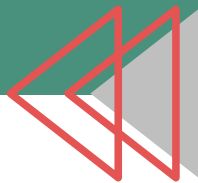
Tabel 2.12. Angka Partisipasi Sekolah Kota Lubuk Linggau
Tahun 2017-2021

APS	Tahun				
Kelompok Umur	2017	2018	2019	2020	2021
7-12	99,53	99,54	99,82	99,99	99,96
13-15	96,42	96,34	95,54	95,82	97,31
16-18	69,13	78,89	78,14	78,34	80,03

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2022

APS menurut kelompok umur disajikan pada tabel 2.13. APS usia 7-12 tahun mencapai 99,96 persen pada tahun 2021. Sementara itu, APS kelompok umur 13-15 tahun 2021 mencapai 97,31 persen. Adapun APS usia 16-18 tahun meningkat dari tahun sebelumnya mencapai 80,03 persen di tahun 2021.





2.1.2.2.8. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengukur tingkat partisipasi sekolah setiap jenjang pendidikan tanpa melihat umur. Meskipun APK merupakan angka kasar dan cenderung lebih tinggi dibanding APS dan APM, ukuran ini masih sering dipakai untuk melihat banyaknya anak yang masuk sekolah tidak tepat waktu.

APK di Kota Lubuk Linggau cenderung fluktuatif. Pada jenjang pendidikan SD/Sederajat, APK pada tahun 2018 mencapai 115,28 persen dan menurun hingga mencapai 106,42 persen pada tahun 2022. Sementara itu APK pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat mengalami peningkatan dari 86,51 persen pada tahun 2018 menjadi 90,18 persen pada tahun 2022. APK pada jenjang pendidikan SMA/Sederajat pada tahun 2018 sebesar 77,4 persen dan turun menjadi 76,31 persen pada tahun 2022. Dibandingkan dengan APM, dapat disimpulkan bahwa persentase anak yang sekolah tidak tepat waktu cukup tinggi, di atas 100 persen di tingkat SD maupun SMA.

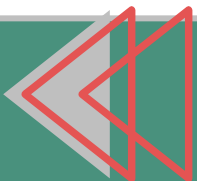
Tabel 2.13. Angka Partisipasi Kasar Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

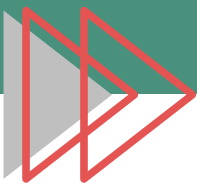
Angka Partisipasi Kasar (Persen)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jenjang Pendidikan					
SD/Sederajat	115,28	113,05	110,63	112,74	106,42
SMP/Sederajat	86,51	99,21	89,67	98,46	90,18
SMA/Sederajat	77,4	64,8	74,69	69,93	76,31

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2022

2.1.2.2.9. Tenaga Kerja

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Lubuk Linggau dari tahun 2017 sampai tahun 2021 terus bertambah sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk usia kerja yang besar tersebut disertai dengan kualitas yang memadai, maka kondisi ini akan memberikan kontribusi yang positif terhadap keberhasilan program pembangunan di Kota Lubuk Linggau. Jumlah dan kualitas penduduk usia kerja pada dasarnya dapat diamati dari beberapa variabel demografi seperti struktur umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikannya. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, penduduk usia 15 tahun ke atas juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kemudian jumlah penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja di Kota Lubuk Linggau juga selalu mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2022.





Tabel 2.14. Statistik Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau, 2018-2022

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Usia Kerja	Orang	164.206	166.934	172.300	175.127	n/a
2	Angkatan Kerja	Orang	111.615	118.147	121.049	128.894	n/a
	Penduduk yang bekerja	Orang	106.531	112.640	112.078	120.815	n/a
	Pengangguran	Orang	5.084	5.507	8.971	8.079	n/a
3	Bukan Angkatan Kerja	Orang	52.591	48.787	51.251	46.233	n/a
	Sekolah	Orang	15.775	16.005	14.668	11.982	n/a
	Mengurus Rumah Tangga	Orang	31.090	27.763	30.114	29.146	n/a
	Lainnya	Orang	5.726	5.019	6.469	5.105	n/a
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,84	70,65	70,25	73,6	67,93
5	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	66,44	65,44	n/a	n/a	n/a
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,59	4,71	7,41	6,27	5,94
7	Upah Minimum Regional	Rp	2.595.995	2.804.453	n/a	n/a	n/a
8	Penduduk bekerja menurut lapangan kerja utama						
	Sektor Primer	%	13,11	17,24	15,63	n/a	n/a
	Sektor Sekunder	%	16,92	16,15	12,05	n/a	n/a
	Sektor Tersier	%	69,96	66,62	72,32	n/a	n/a

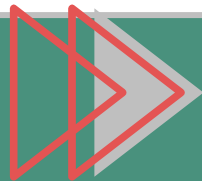
Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2022

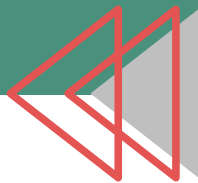
Data ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau menunjukkan bahwa penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari 161.435 orang pada tahun 2017 menjadi 175.127 orang pada tahun 2021. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Lubuk Linggau. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 73,6 persen atau 128.894 orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 120.815 penduduk bekerja dan 8.079 orang pengangguran.

Secara persentase, TPT pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,33 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 menjadi 5,94 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar hampir 6 orang penganggur. Adanya pertumbuhan ekonomi yang positif memberikan dampak positif bagi kondisi ketenagakerjaan di Kota Lubuk Linggau.

2.1.2.3. Fokus Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga Kota Lubuk Linggau dalam periode 2017-2021 yang cenderung stagnan dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 2.15. Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Grup Kesenian ¹⁾	35	35	35	40	40
2	Jumlah Gedung Kesenian ¹⁾	1	1	1	2	2
3	Jumlah Sarana Olahraga Per 1000 Penduduk ²⁾	0,21	0,257	0,26	0,31	0,317
4	Jumlah Organisasi Olahraga ²⁾	60	65	75	115	181

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Dinas Pemuda dan Olahraga, 2022

Tabel 2.16. Jenis Dan Jumlah Organisasi Kepemudaan

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
1	Organisasi Bidang Politik**	Organisasi	18	20	21	37
2	Organisasi Bidang Olahraga**	Organisasi	65	75	115	181
3	Organisasi Bidang Ekonomi**	Organisasi	21	20	20	83
4	Organisasi Bidang Sosial**	Organisasi	47	52	71	95

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuk Linggau, 2022

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

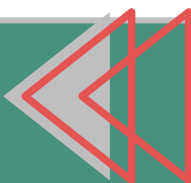
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1. Pendidikan

Perkembangan pembangunan pendidikan di Kota Lubuk Linggau dapat dilihat dari keadaan pendidikan penduduk Kota Lubuk Linggau melalui pendekatan indikator-indikator pendidikan seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), pendidikan anak usia dini, fasilitas pendidikan, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan, guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, rasio ketersediaan sekolah, rasio guru/murid, rasio guru/murid per kelas rata-rata.

Tabel 2.17. Hasil Kinerja Urusan Pendidikan Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
	Usia 7-12 tahun	100	100.42	99.72	99.99	94.72
	Usia 13-15 tahun	100	100.93	99.47	95.82	80.53
	Usia 16-18 tahun	100	99.3	99.3	78.34	25.07
2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	27.5	29.16	29.72	26.04	32.74
3	Fasilitas Pendidikan					
	Prosentase Ruang Kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	86.57	98.07	88.17	52.1	45.28
	Prosentase Ruang Kelas pendidikan SMP/SMPLB/MTs kondisi bangunan baik	84.96	98.99	85.64	72.87	63.20
	Prosentase Ruang Kelas pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	65.03	62.74	62.89	62.89	93.10
4	Angka Putus Sekolah					
	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.12	0.1	0.08	0.81	0.82
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.48	0.38	0.32	1.39	1.40
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0	0	0	0.25	0.46
5	Angka Kelulusan (AL)					
	AL SD/MI	99.96	99.75	99.75	98.85	97.12
	AL SMP/MTs	98.6	98.74	98.88	93.23	93.23





	AL SMA/SMK/MA	106.58	104.4	131.17	92.26	92.26
6	Angka Melanjutkan (AM)					
	AM dari SD/MI ke SMP/MTs	100.02	100.41	100.82	122.87	108.91
	AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	125.53	124.91	124.84	86.61	144.27
7	Guru yang memenuhi kualifikasi	47.25	48.72	49.8	98.74	65.76
8	S1/D-IV					
8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah					
	SD	300.02	0.45	104	42.41	0.36
	SMP	242.84	1.37	35	32.64	0.30
	SMA	171.4		25	41.37	
9	Rasio guru/ murid					
	SD	0.75	0.72	0.66	0.8	6.16
	SMP	1.2	1.28	1.3	1.02	8.22

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau, 2022

Angka Putus Sekolah di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang tidak signifikan jika dibandingkan dengan hasil kinerja pada tahun 2020. Sementara itu, Angka Kelulusan (AL) pada tahun 2021 mengalami penurunan. Sebagaimana diketahui, adanya pandemic COVID-19 pada tahun 2021 secara massif berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia. Faktor ini tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu faktor utama menurunnya kinerja urusan pendidikan di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2021.

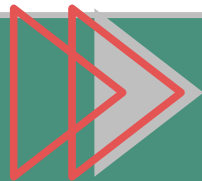
Hal lain yang menjadi perhatian adalah menurunnya hasil kinerja terkait fasilitas pendidikan. Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil kinerja indikator fasilitas pendidikan dan indikator rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah. Di samping itu, rasio guru/murid pada jenjang SMP dan SMA juga mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan fasilitas pendidikan serta ketersediaan tenaga pendidik di Kota Lubuk Linggau masih perlu ditingkatkan.

Disamping indikator-indikator urusan pendidikan di atas, hasil kinerja urusan pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.18. Capaian SPM Bidang Pendidikan Kota Lubuk Linggau Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Capaian
PENDIDIKAN		66.86%
1	Pendidikan Dasar	94.45%
2	Pendidikan Kesenjangan	55.08%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	51.04%

Sumber : Bangda Kemendagri, Tahun 2022





2.1.3.1.2. Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Upaya pembangunan bidang kesehatan yang telah diselenggarakan Kota Lubuk Linggau telah berhasil menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hampir secara merata pada seluruh wilayah Kota Lubuk Linggau. Setiap kecamatan saat ini telah mempunyai Puskesmas yang diharapkan mampu melayani dan menjangkau seluruh masyarakat dalam wilayah kerja masing masing.

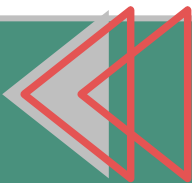
Namun, meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya menyebabkan rasio fasilitas kesehatan di Kota Lubuk Linggau mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh capaian beberapa indikator seperti: rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk; dan rasio rumah sakit per satuan penduduk. Perkembangan posyandu sangat dipengaruhi oleh upaya kader dalam mengelola posyandu, ditambah dukungan dari perangkat kelurahan dan dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dll.

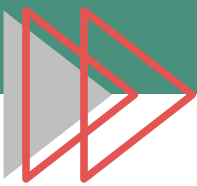
Di samping itu indikator terkait cakupan pelayanan kesehatan seperti: cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan cakupan desa/ kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) juga mengalami penurunan. Di sisi lain, indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menunjukkan performa yang cukup baik pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan kinerja indikator tersebut pada tahun 2020.

Lebih lanjut, hasil kinerja urusan kesehatan Kota Lubuk Linggau tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19. Hasil Kinerja Urusan Kesehatan Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio posyandu per satuan balita	4.18	4.6	4.7	5.5	3.69
2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0.177	0.179	0.176	0.175	0.177
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.0177	0.0175	0.0172	0.0171	0.0253
4	Rasio dokter per satuan penduduk	0.313	0.541	0.534	0.628	0.507
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	4,080	4,227	3,289	4,488	4.358
6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	82.26	75.4	77.1	86.9	91.74
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95.6	93.1	97.9	91	99.37
8	Cakupan Desa/ kelurahan <i>Universal</i>	98.2	100	100	99.08	100





No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
	<i>Child Immunization</i> (UCI)					
9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
10	Cakupan kunjungan bayi	92.48	90.43	92.51	91.1	97
11	Cakupan puskesmas	1.19	1.12	1.12	1.25	125%
12	Cakupan pembantu puskesmas	0.93	0.29	0.29	0.28	26%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, 2022

Disamping indikator-indikator urusan kesehatan di atas, hasil kinerja urusan kesehatan juga dapat dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun hasil pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

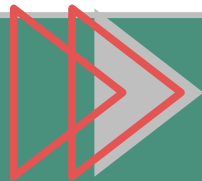
Tabel 2.20. Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Lubuk Linggau Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian
KESEHATAN		76.34%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	98.73%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	96.98%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	97.78%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	76.87%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	86.67%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	50.97%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	91.43%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	57.12%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	49.55%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	91.00%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	65.09%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	53.90%

Sumber: Bangda Kemendagri, Tahun 2022

Hal lain yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja urusan kesehatan dapat dilihat dari bagaimana capaian penurunan *stunting* di suatu wilayah. Kejadian balita *stunting* merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia saat ini. *Stunting* (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO.

Secara umum, hasil kinerja kejadian balita *stunting* di Kota Lubuk Linggau mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan prevalensi balita *stunting* pada tahun 2022 yang mencapai angka 11,7 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi *stunting* di Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, kondisi *stunting* Kota Lubuk Linggau jauh lebih baik dan telah



memenuhi target penurunan stunting Nasional yaitu 14 persen. Lebih lanjut kondisi balita *stunting* di Kota Lubuk Linggau dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.18. Prevalensi Balita *Stunting* Di Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2022



Sumber: SSGBI, 2019-2022

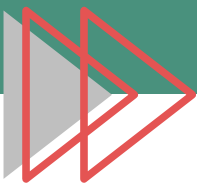
Menurunnya prevalensi balita stunting yang sangat drastis ini menunjukkan keberhasilan penanganan masalah stunting yang komprehensif melalui kerjasama lintas sektoral antar Perangkat Daerah di Kota Lubuk Linggau . Di samping itu kejadian balita *stunting* sangat berkaitan dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat, seperti: kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, buruknya kondisi kesehatan lingkungan, kurangnya perilaku hidup, bersih dan sehat, pola asuh anak yang kurang baik, dan lain-lain. Seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 yan ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, prevalensi balita stunting di Kota Lubuk Linggau mampu ditekan secara maksimal.

Tabel 2.21. Jumlah Bayi Lahir, Berat Bayi Lahir Rendah, dan Bergizi Buruk (Jiwa) Di Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

No	Bayi	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bayi Lahir	3 823	4 291	4 425	4 185	3 926
2	Berat Bayi Lahir Rendah	19	0	0	13	0
3	Gizi Buruk	0	3	3	0	0

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Bayi yang lahir di kota Lubuk Linggau pada tahun 2017 berjumlah 3.823 jiwa dan mengalami kenaikan dan penurunan hingga pada tahun 2021 berjumlah 3.926 jiwa. Untuk bayi lahir dengan berat badan rendah pada tahun 2017 sejumlah 19 jiwa di tahun 2018 dan 2019 tidak terdapat lagi bayi dengan bayi lahir berat badan rendah. Namun, pada tahun 2020 terdapat 13 bayi dengan berat badan rendah dan kembali tidak ada di tahun 2021. Kemudian bayi bergizi buruk sejumlah 3 pada tahun 2018 dan 2019.



Tabel 2.22. Kasus Penyakit dan Jenis Penyakit
Di Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2022

No	Kasus Penyakit dan Jenis Penyakit	2019	2020	2021	2022
1	Angka Penemuan TBC	844	270	340	626
2	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	216	244	137	387
3	Jumlah Kasus Baru AIDS	3	4	4	3
4	Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk	0.4	0	0	1,7
5	Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk	0.03	0.02	0	0,01
6	Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	59,85	61,92	38,86	110,21

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

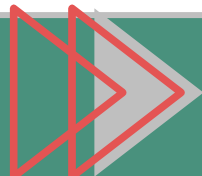
Dari tabel diatas dapat kita lihat Angka Penemuan TBC di tahun 2019 sebanyak 844 kasus mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 270 kasus namun kembali meningkat hingga di tahun 2022 menjadi 626 kasus. Angka Keberhasilan Pengobatan TBC di tahun 2019 sebanyak 216 kasus mengalami peningkatan hingga di tahun 2022 menjadi 387 kasus. Untuk Jumlah Kasus Baru AIDS di tahun 2019 sebanyak 3 kasus di tahun 2020 dan 2021 sebanyak 4 kasus dan turun menjadi 3 kasus di tahun 2022. Penemuan Kasus Baru Kusta di tahun 2019 sebesar 0,4 per 100.000 Penduduk meningkat di tahun 2022 menjadi 1,7 per 100.000 penduduk. Angka Kesakitan Malaria di tahun 2019 sebesar 0,03 per 1.000 Penduduk dan di tahun 2022 turun menjadi sebesar 0,01. Angka Kesakitan DBD di tahun 2019 mencapai 59,85 per 100.000 Penduduk di tahun 2019 meningkat menjadi 61,92 per 100.000 Penduduk kemudian menurun menjadi sebesar 38,86 per 100.000 Penduduk di tahun 2021. Angka ini kembali meningkat di tahun 2022 menjadi sebanyak 110,21 per 100.000 penduduk.

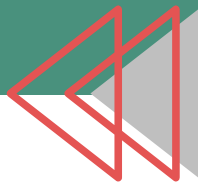
Tabel 2.23. Jumlah Fasilitas Kesehatan (Unit)
Di Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

No	Jumlah Fasilitas Kesehatan (Unit)	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rumah Sakit Umum	3	3	4	4	4
2	Rumah Sakit Khusus	-	-	1	2	2
3	Rumah Sakit Ibu dan Anak	-	2	-	-	-
4	Puskesmas	9	10	10	10	10
5	Klinik/Balai Kesehatan	-	12	9	16	n/a
6	Posyandu	100	97	106	104	n/a
7	Puskeslur	-	48	-	-	n/a

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Jumlah Rumah Sakit Umum di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 3 unit dan di tahun 2020 hingga 2022 bertambah menjadi 4 unit. Puskesmas di Kota Lubuk Linggau tahun 2019 sebanyak 9 unit dan tahun 2019 hingga 2022 sebanyak 10 unit. Klinik atau balai kesehatan di tahun 2019 sebanyak 12 unit di tahun 2020 sebanyak 9 unit dan di tahun 2021 sebanyak 16 unit. Untuk Posyandu di tahun 2018 sebanyak 100 unit di tahun 2019 sebanyak 97 unit dan di tahun 2020 berjumlah 106 unit hingga di tahun 2021 sebanyak 104 unit.





Tabel 2.24. Jumlah Kasus Penderita Penyakit (Kasus)
Di Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2021

No	Penyakit	2017	2018	2019	2020	2021
1	HIV/AIDS	19	9	5	9	9
2	IMS	-	-	-	-	-
3	DBD	73	447	139	145	91
4	Diare	5.775	4.031	5.336	2.696	1.951
5	TB	1.104	1.082	844	270	340
6	Malaria		19	8	4	0

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Penderita penyakit HIV/AIDS di Kota Lubuk Linggau di Tahun 2017 sebanyak 19 kasus menurun di tahun 2018 sebanyak 9 kasus dan menjadi 5 kasus di tahun 2019 namun meningkat menjadi 9 kasus di tahun 2020 dan 2021. Tidak terdapat kasus penyakit Infeksi Menular Seksual di Kota Lubuk Linggau dari tahun 2017 hingga 2021. Demam Berdarah Dengue di tahun 2017 sebanyak 73 kasus, di tahun 2018 sebanyak 447 kasus dan di tahun 2019 menurun menjadi 139 kasus, yang meningkat kembali di tahun 2020 menjadi sebanyak 145 kasus hingga di tahun 2021 menjadi 91 kasus. Jumlah kasus Penyakit diare menjadi terbanyak kasus di Kota Lubuk Linggau karena jumlahnya yang mencapai 5.775 kasus di Tahun 2017 sempat menurun di tahun 2018 menjadi 4.031 kasus namun kembali meningkat di tahun 2019 menjadi sebanyak 5.336 kasus, hingga akhirnya di tahun 2021 berjumlah 1.951. Jumlah kasus Tuberkulosis di Tahun 2017 sebanyak 1.104 kasus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi sebanyak 270 kasus namun mengalami peningkatan kasus menjadi sebanyak 340 kasus di tahun 2021. Kasus penyakit malaria di tahun 2017 sebanyak 72 kasus terus mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi tidak ada kasus malaria.

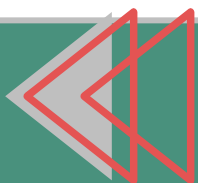
Tabel 2.25. Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi (Persen)
Di Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2021

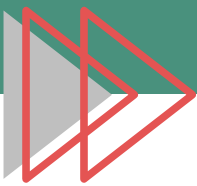
No	Tenaga Kesehatan	2020	2021
1	BCG	96.06	92.44
2	DPT	89.74	91.81
3	Campak	70.22	80.19
4	Polio	96.3	92.9
5	Hepatitis B	91.42	92.95

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Presentase balita yang mendapat imunisasi di Kota Lubuk Linggau dapat di lihat melalui tabel di atas. Imunisasi yang di lakukan kepada balita meliputi BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*), DPT (*difteri, pertusis, dan tetanus*), Campak, Polio dan Hepatitis.

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Lubuk Linggau dapat diketahui berdasarkan tabel berikut. Pada tahun 2022, jumlah tenaga kesehatan mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat





kekurangan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Lubuk Linggau.

Tabel 2.26. Jumlah Tenaga Kesehatan (Orang)
Di Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

No	Tenaga Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tenaga Medis	13	60	116	166	64
2	Perawat	155	511	634	732	232
3	Bidan	111	240	342	368	143
4	Tenaga Kefarmasian	16	72	89	90	33
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	-	34	33	42	34
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	-	17	17	25	19
7	Tenaga Gizi	11	18	21	24	17
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	-	21	23	51	-

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

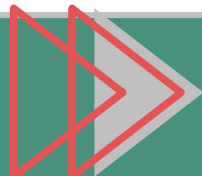
2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

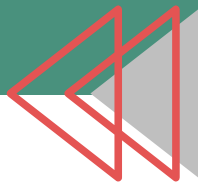
Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan perekonomian Kota Lubuk Linggau khususnya aksesibilitas yang menghubungkan PL dan sub PPK dengan PPK dalam kondisi baik di tahun 2021 meningkat sebesar 79,98 persen. Lebih lanjut, hasil kinerja urusan pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan Kota Lubuk Linggau tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27. Hasil Kinerja Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kota Lubuk Linggau 2017-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prosentase panjang jalan yang menghubungkan PL dan sub PPK dengan PPK dalam kondisi baik	69,42	71,13	73,74	74,19	79,98
2	Rasio Jaringan Irigasi	54,85	58,42	61,19	62,85	62,85
3	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	91,32	91,76	93,32	93,80	65,19
4	Persentase rumah tangga berakses air bersih perpipaan	33,01	34,37	35,64	38,76	38,50
5	Jembatan dalam kondisi baik	70,83	69,88	71,17	69,14	78,94
6	Persentase Pembangunan RTH	4,55	4,57	4,60	4,61	4,61
7	Prosentase layanan IMB	88,50	88,56	88,60	88,70	88,70
8	Persentase ketaatan penataan ruang	55,18	45,24	35,85	34,90	34,90
9	Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang	0	0	0	0	0
10	Persentase Penurunan Konflik Pertanahan Dalam Wilayah	-	-	-	-	-
11	Persentase Legalitas Tanah	20	4,35	2,39	3,9	3,9

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau, 2022





Tabel 2.28. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2018-2022 (Kilometer)

Keadaan		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jenis Permukaan					
	a Diaspal	361,25	369,14	373,12	375,54	376,53
	b Penetrasi Macadam	-	-	-	-	-
	c Rigid Pavement	-	-	-	-	-
	d Kerikil	43,59	40,09	36,11	40,09	40,09
	e Tanah	32,21	26,28	29,11	22,78	23,67
	f Tidak Dirinci	282,78	286,63	288,00	293,63	293,63
2	Kondisi Jalan					
	a Baik	509,77	530,80	531,53	545,94	418,67
	b Sedang	106,95	110,04	114,03	95,5	96,23
	c Rusak Ringan	53,71	50,13	51,60	46,62	47,75
	d Rusak Berat	49,4	31,17	29,17	43,78	171,27
3	Kelas					
	a Kelas I	-	-	-	-	-
	b Kelas II	-	-	-	-	-
	c Kelas III	-	-	-	-	-
	d Kelas III A	-	-	-	-	-
	e Kelas III B	5,28	--	-	-	-
	f Kelas III C	-	-	-	-	-
	g Kelas Tidak Dirinci	-	658,08	-	-	-

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2022
Keterangan : - penetrasi macadam/lapen : aspal dasar/lapisan dasar;
- rigid pavement : jalan beton

Disamping indikator-indikator urusan pekerjaan umum di atas, hasil kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun hasil pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

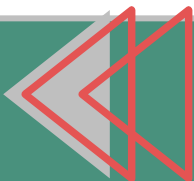
Tabel 2.29. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2022

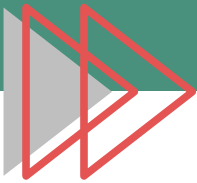
No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Capaian
PEKERJAAN UMUM		49.10%
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	78.39%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah domestik	19.81%

Sumber: Bangda Kemendagri, Tahun 2022

2.1.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan Kawasan permukiman di Kota Lubuk Linggau dapat dilihat dalam tabel 2.23 tentang Presentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Perumahan. Fasilitas perumahan rumah tangga di Kota Lubuk Linggau menurut BPS Provinsi Sumatera Selatan meliputi sumber penerangan listrik, Air minum leding dan kemasan, air bersih dan Jamban sendiri dengan Tangki Septik. Pada tahun 2021 presentase sumber penerangan listrik mencapai 99,99 persen di Kota Lubuk Linggau, menandakan seluruh wilayah di Kota Lubuk Linggau telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan kemudian penggunaan air minum leding dan kemasan sebesar 26,81 persen,





penggunaan air bersih sebesar 66,58 persen dan penggunaan Jamban sendiri dengan tangki septik sebesar 79,07 persen.

Tabel 2.30. Presentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Perumahan (%) Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sumber Penerangan Listrik	99,87	100	99,87	99,36	99,99
2	Air Minum Leding dan Kemasan	33,26	30,62	28,52	31,85	26,81
3	Air Bersih	65,17	61,84	61,7	68,09	66,58
4	Jamban Sendiri dengan Tangki Septik	72,9	77,23	84,51	83,19	79,07

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Disamping indikator-indikator urusan perumahan dan kawasan permukiman di atas, hasil kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun hasil pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Lubuk Linggau Tahun 2022

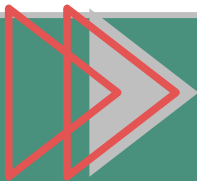
No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Capaian
PERUMAHAN RAKYAT		58.86%
1	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak huni bagi Korban Bencana Kab/Kota	100.00%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	17.72%

Sumber: Bangda Kemendagri, Tahun 2022

2.1.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Pembangunan kawasan tak terlepas dari kebijakan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Pembangunan kawasan tidak dapat dilepaskan dari K3 (ketertiban, kebersihan, dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat, dan lainnya. Di samping itu, perlindungan masyarakat terkait kebencanaan juga menggambarkan pencapaian urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Adapun capaian beberapa indikator yang menggambarkan kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kota Lubuk Linggau selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 2.32. Hasil Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) ¹	Angka	352	204	132	143	190
2	Zero Konflik Antar Umat Beragama ²	%	100	100	100	100	100
3	Angka kriminalitas ³	angka	814	709	305	312	n/a
4	Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran ⁴	%	50	88	88	89,58	93,90
5	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) ⁴	menit	15	15	15	15	15

Sumber: 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau, 2023
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuk Linggau, 2023
3. BPS Sumatera Selatan, 2023
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuk Linggau, 2023

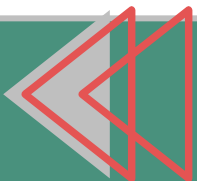
Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah pelanggaran K3 dan angka kriminalitas di Kota Lubuk Linggau. Capaian zero konflik antar umat beragama di Kota Lubuk Linggau terbilang stagnan baik di angka 100 persen. Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran juga mengalami peningkatan yang semula 50 persen di tahun 2018 menjadi 88 persen di tahun 2020. Namun, peningkatan angka cakupan tersebut belum diikuti dengan peningkatan tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK dengan tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK yaitu 15 menit.

Disamping indikator-indikator urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di atas, hasil kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dapat dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun hasil pencapaian SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33. Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Lubuk Linggau Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Capaian
TRANTIBUMLINMAS		84.88%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	91.48%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	54.44%
3	Pelayanan informasi rawan bencana	65.33%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	88.00%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	93.90%

Sumber: Bangda Kemendagri, 2022





2.1.3.1.6. Sosial

Selain mengatasi kemiskinan, permasalahan pada urusan sosial di Kota Lubuk Linggau adalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Beberapa jenis PMKS menunjukkan peningkatan yang dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.34. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2020

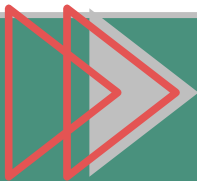
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Satuan	2018	2019	2020
1. Anak Jalanan	Orang	25	35	35
2. Penderita Sakit Jiwa	Orang	45	47	50
3. Gepeng (Gelandangan dan Pengemis)	Orang	30	27	15
4. Penderita HIV/AIDS	Orang	0	0	0
5. Pecandu Narkoba	Orang	5	8	10
6. Fakir Miskin	Orang	16.047	19.036	17.443
7. Bayi Terlantar	Orang	0	1	2
8. Anak Terlantar	Orang	300	150	112

Sumber: Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau, 2021

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, jumlah anak jalanan, penderita sakit jiwa, pecandu narkoba, dan bayi terlantar di Kota Lubuk Linggau selama periode 2018-2020 cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun, jumlah gelandangan dan pengemis serta anak terlantar menurun setiap tahunnya. Sementara itu, jumlah fakir miskin selama kurun waktu tiga tahun terakhir trennya fluktuatif dengan angka yang cukup besar dengan rata-rata 17.508 per tahunnya. Hal ini berkaitan dengan tren kemiskinan di Kota Lubuk Linggau tahun 2018-2020, dimana angka kemiskinan pada tahun 2020 mencapai 12,71 persen, turun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 12,95 persen.

Persentase PMKS yang mampu keluar dari Permasalahan Sosial pada tahun 2020 sebesar 88,60 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 86,89 persen. Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif yang semula 188 kelompok lembaga pada tahun 2018 menjadi 255 kelompok lembaga pada tahun 2020.

Disamping indikator-indikator urusan sosial di atas, hasil kinerja urusan sosial dapat dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun hasil pencapaian SPM urusan sosial Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.35. Capaian SPM Bidang Sosial Kota Lubuk Linggau Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian
SOSIAL		97.79%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti Sosial	92.95%
2	Rehabilitasi sosial Dasar anak terlantar di luar panti sosial	98.67%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	98.67%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar Panti Sosial	98.67%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100.00%

Sumber: Bangda Kemendagri, 2022

2.1.3.1.7. Tenaga Kerja

Tingkat pencari kerja yang ditempatkan di Kota Lubuk Linggau selama periode 2018-2022 mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2018 terdapat 21,00 persen pencari kerja yang ditempatkan, maka di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 22,24 persen. Tingkat pengangguran terbuka Kota Lubuk Linggau sempat mengalami kenaikan dari 4,55 persen di tahun 2018 hingga 7,41 persen di tahun 2020. Namun, pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,94 persen.

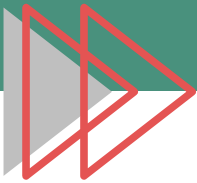
Tabel 2.36. Hasil Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pencari kerja yang ditempatkan ¹⁾	21,00	22,24	-	-	-
2	Tingkat pengangguran terbuka ¹⁾	4,55	4,66	7,41	6,27	5,94

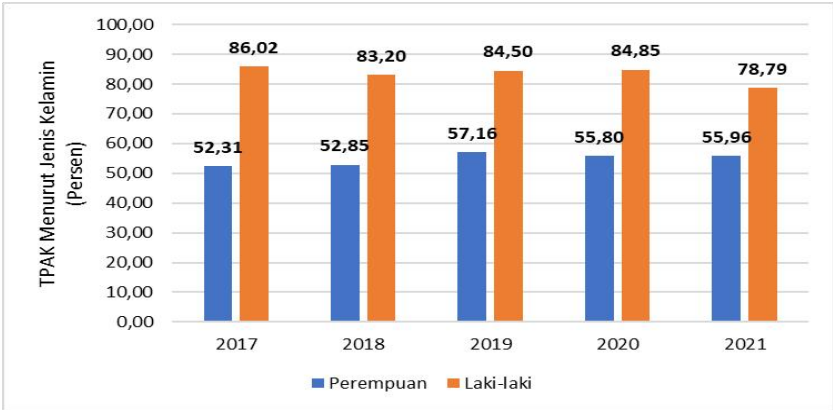
Sumber: 1) Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau, 2022

2.1.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan. Jika dilihat perkembangannya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kota Lubuk Linggau cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. TPAK perempuan tertinggi adalah pada tahun 2019, sebesar 57,16 persen. Pada tahun 2020 TPAK perempuan menurun sebesar 1,36 persen, menjadi 55,80 persen. Namun, pada tahun 2021 mulai menunjukkan peningkatan menjadi 55,96 persen.



Gambar 2.19. TPAK Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021 Menurut Jenis Kelamin



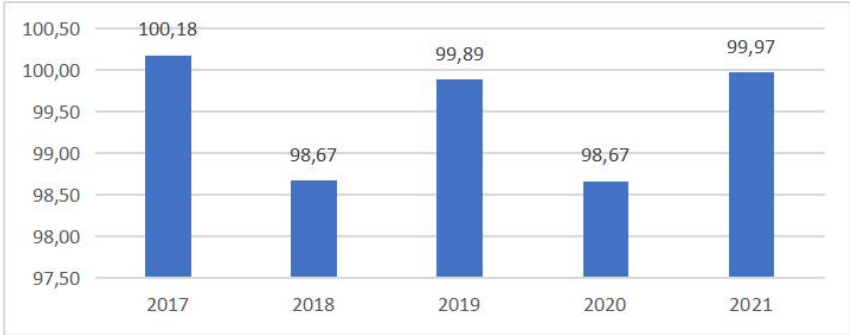
Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2022 (diolah)

Jika membandingkan TPAK penduduk perempuan dengan TPAK penduduk laki-laki, penduduk laki-laki masih mendominasi pasar tenaga kerja. Hal ini memang wajar terjadi, mengingat secara budaya laki-laki dipandang sebagai sosok yang bertanggungjawab secara ekonomi dalam keluarga, sehingga proporsi laki-laki yang masuk dalam kategori angkatan kerja jauh lebih besar daripada perempuan.

Selain dilihat dari Indeks Paritas Gender (IPG) Angka Partisipasi Murni (APM) atau rasio APM perempuan terhadap laki-laki, angka melek huruf juga menjadi indikator pencapaian SDG's bagi tujuan kelima, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Rasio AMH usia 15-24 perempuan terhadap laki-laki di Kota Lubuk Linggau cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio AMH Perempuan/Laki-laki mencapai 98,67 persen dan pada tahun 2021 menurun hingga 99,97 persen. Angka di bawah 100 persen berarti bahwa pada kelompok usia 15-24 tahun, proporsi laki-laki yang melek huruf tidak sama dengan proporsi perempuan yang juga melek huruf.

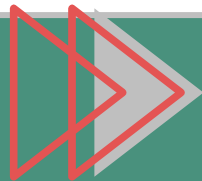
Dengan demikian dapat dikatakan masih terjadi ketimpangan gender dalam hal RAMH di Kota Lubuk Linggau.

Gambar 2.20. Rasio AMH di Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021



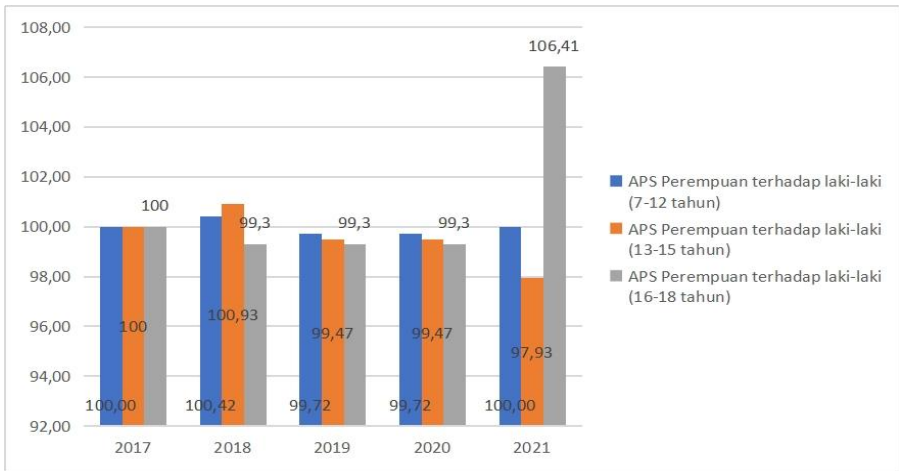
Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2022

Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok umur 7- 12 tahun, pada tahun 2020 sebesar 99,72 naik menjadi 100 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan tidak adanya kesenjangan gender pada APS anak usia 7-12



tahun. Hal berbeda ditunjukkan Rasio APS usia 13-15 tahun yang menunjukkan penuunan dari 99,47 di tahun 2020 menjadi 97,93 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi kesenjangan gender pada APS anak usia 13-15 tahun. Sementara itu, APS pada usia 16-18 tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu mencapai 106,41 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan tidak adanya kesenjangan gender pada APS anak usia 16-18 tahun.

Gambar 2.21. Rasio APS di Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2022

2.1.3.1.9. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

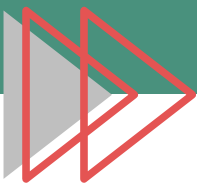
Tabel 2.37. Hasil Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kota Lubuk Linggau 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan pangan utama per 1.000 penduduk/tahun	141.804	103.452	107.502	160.004,76	65.221
2	Ketersediaan Energi Per-Kapita	2.325,60	2.198,53	2.389,61	2.379,20	2.143
3	Ketersediaan Protein Per-Kapita	69,52	60,55	63,00	62,89	70,6
4	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuk Linggau, 2023

2.1.3.1.10. Pertanian

Urusan pertanian di Kota Lubuk Linggau menjadi salah satu urusan yang menjadi fokus urusan pemerintahannya. Penyelesaian izin lokasi dari tahun 2018 hingga tahun 2021 telah mencapai 100 persen. Begitu juga indikator persentase penyelesaian permasalahan pertanian sesuai perundang-undangan.



Adapun data badan pertanaan Kota Lubuk Linggau tahun 2018 sampai dengan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.38. Luas Tanah Berdasarkan Hak Guna Kota Lubuk Linggau 2019-2021

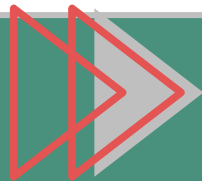
Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
Luas Hak Milik	Ha	4.266.720	5.443.620	888.872	9.755.060
Luas Hak Guna Bangunan	Ha	170.942	499.343	154.438	249.985
Luas Hak Guna Usaha	Ha	-	-	-	-
Luas Hak Pakai	Ha	273.135	466.551	193.892	437.529
Jumlah Hak Wakaf	Ha	27.054	48.775	8.889	6.752
Jumlah Hak Pengelolaan	Ha	-	-	-	-
Jumlah Hak Sewa	Ha	-	-	-	-
Jumlah Girik	Ha	-	-	-	-
Jumlah hak-hak lain	Ha	-	-	-	-
JUMLAH		4.737.851	6.458.289	1.246.091	10.449.326

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau, 2022

2.1.3.1.11. Lingkungan Hidup

Sampah merupakan hal yang sangat penting untuk ditangani saat ini, semakin bertambah jumlah penduduk semakin bertambah pula jumlah timbulan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Lubuk Linggau antara lain : penyediaan sarana kebersihan, sosialisasi program Adipura, soialisasi program adiwiyata untuk sekolah berwawasan lingkungan, melakukan pelatihan terkait pengelolaan sampah dengan system 4R (*Reuse, Reduce, Recycle, and Replace*). Pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh masyarakat melalui pemilahan sampah organik, anorganik dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, untuk sampah anorganik dapat di gunakan kembali sesuai fungsinya misal kantong plastik, dapat juga diolah menjadi barang yang berguna melalui proses tertentu misalnya bekas kemasan plastik bisa dijadikan tas, topi atau kaleng bekas bisa diolah menjadi pot bunga, tempat pensil dan asbak serta sampah plastik, botol dan lain-lain dapat juga langsung dijual ke pengepul barang bekas untuk didaur ulang sehingga timbulan sampah yang dihasilkan dapat diperkecil bahkan dihilangkan, hal ini akan mengurangi timbunan sampah di TPA.

Di Kota Lubuk Linggau terdapat 1 (satu) TPA di Kelurahan Lubuk Binjai dengan luas area 25 Ha. Permasalahan yang timbul adalah sebagian besar masyarakat masih memperlakukan sampah dengan pola lama dengan membuang sampah tanpa dilakukan pengelolaan sampah terlebih dahulu.





Tabel 2.39. Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase penanganan sampah	60,10	59,30	58,46	56,75	67
2	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	97,50	97,50	97,50	89	N/a
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75	80,50	80,40	60,43	64,86

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau, 2022

2.1.3.1.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Diketahui bahwa rasio penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2017 mencapai 1.06, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 1,02. Sedangkan rasio bayi berakta kelahiran di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2017 telah mencapai 1,73 dan terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga menjadi 2,57 di tahun 2019.

Tabel 2.40. Hasil Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	1,06	1,10	1,02	N/a	N/a
2	Rasio bayi berakte kelahiran	1,73	1,90	2,57	N/a	N/a
3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100	100	100	100	100
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

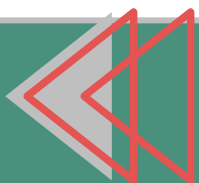
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau, 2022

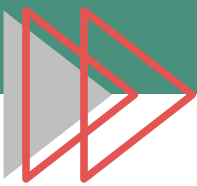
2.1.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat pedesaan, dibutuhkan perangkat pemerintahan desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan kepada masyarakat, mulai dari tingkat RT sampai desa. Salah satu indikator yang menggambarkan kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu nilai swadaya masyarakat. Selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2021, nilai swadaya masyarakat Kota Lubuk Linggau meningkat dari Rp.1.238.000.000 pada tahun 2018 menjadi Rp.2.000.000.000 pada tahun 2021.

2.1.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana atau lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara. Program KB juga secara khusus dirancang agar





menciptakan kemajuan, kestabilan, kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Keluarga berencana adalah program yang juga diatur dalam UU NO. 10 tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Tabel 2.41. Jumlah Keluarga Sejahtera Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

No	Keluarga Sejahtera	2017	2018	2019	2020	2021
1	I	1 419	20 029	14 428	16	12 927
2	II	14 713	16 428	26 305	254	16 957
3	III	26 264	-	-	-	14 982
4	III+	42 396	-	-	-	-

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

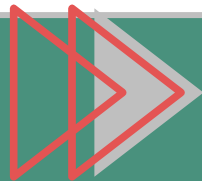
Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).Tingkat Kesejahteraan KeluargaTingkat kesejahteraan keluarga menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS); Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS-I); Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS-II); Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS-III); Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus). Dapat dilihat dari tabel diatas keluarga sejahtera Kota Lubuk Linggau.

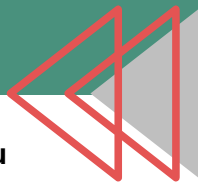
Tabel 2.42. Jumlah Peserta KB Aktif (Orang) Kota Lubuk Linggau Tahun 2018 - 2022

No	Jenis KB	2018	2019	2020	2021	2022
1	IUD	1.014	1.282	1.318	1.267	442
2	MOW	874	906	913	891	626
3	MOP	174	172	166	165	61
4	Kondom	2.537	2.643	2.653	2.703	711
5	Susuk	8.355	8.008	8.552	8.319	2.983
6	Implan	14.753	15.175	14.093	14.701	13.224
7	Pil	7.880	8.223	8.203	9.313	3.084
	Jumlah	35.587	36.409	35.898	37.359	21.131

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jumlah Peserta KB Aktif Kota Lubuk Linggau Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat dari tabel diatas.





Tabel 2.43. Jumlah Pasangan Usia Subur (Jiwa) Kota Lubuk Linggau Tahun 2018 - 2022

Tanaman	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pasangan Usia Subur	39.830	47.754	46.327	42.486	32.666

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

Jumlah pasangan usia subur di Kota Lubuk Linggau dari Tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami penurunan. Di tahun 2018 sebanyak 39.830 jiwa, di tahun 2019 sebanyak 47.754 jiwa, di tahun 2020 sebanyak 46.327 jiwa, kemudian di tahun 2021 sebanyak 42.486 jiwa dan di tahun 2022 sebanyak 32.666 jiwa.

Tabel 2.44. Jumlah Klinik Keluarga Berencana (Unit) Kota Lubuk Linggau Tahun 2017 - 2021

No	Klinik KB	2018	2019	2020	2021	2022
1	Klinik Keluarga Berencana	117	97	100	89	68
2	Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kelurahan	72	72	72	72	72

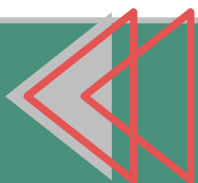
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

Jumlah Klinik Keluarga Berencana di Kota Lubuk Linggau di tahun 2018 sebanyak 117 unit, di tahun 2019 menjadi 97 unit, di tahun 2020 sebanyak 100 unit, dan di tahun 2021 sebanyak 89 unit, hingga terakhir di tahun 2022 sebanyak 68 unit. Untuk Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kelurahan di Tahun 2018 hingga terakhir di tahun 2022 sebanyak 72 unit.

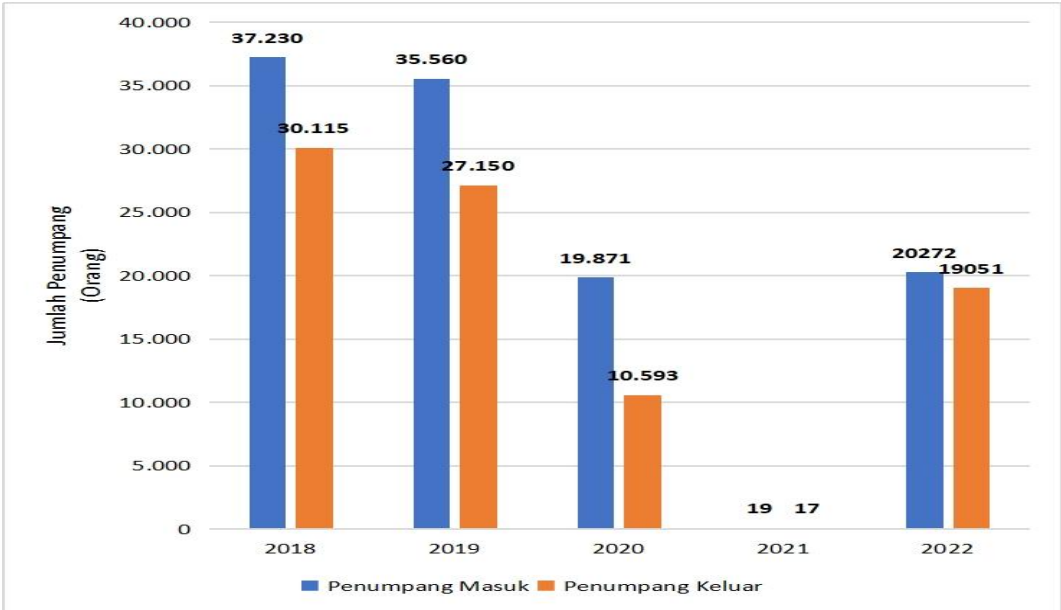
2.1.3.1.15. Perhubungan

Kota Lubuk Linggau terletak pada posisi geografis yang sangat strategis yaitu di antara provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu serta ibu kota provinsi Sumatera Selatan (Palembang) dan merupakan jalur penghubung antara Pulau Jawa dengan kota-kota bagian utara Pulau Sumatera. Sehingga Kota Lubuk Linggau memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur perhubungan. Lokasi yang strategis sebagai kota transit menyebabkan moda angkutan darat berkembang. Banyaknya kendaraan angkutan barang yang berdimensi besar dan berat yang melintasi jalan utama Kota Lubuk Linggau dapat berakibat pada kelancaran arus lalu lintas dalam Kota. Adanya jalan lingkaran sebagai jalan alternatif bagi kendaraan berat dapat mengurangi kemacetan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP) serta angkutan regional, Kota Lubuk Linggau memiliki 1 Terminal Tipe A. Sementara Terminal Tipe C difungsikan untuk pelayanan penumpang dalam kota. Data perhubungan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terminal tipe C di Kota Lubuk Linggau telah melayani 39.323 penumpang yang keluar masuk terminal.



Gambar 2.22. Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Tipe C Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau, 2023

Pada tahun 2016 Kota Lubuk Linggau membuka jalur penerbangan udara dengan rute penerbangan ke Kota Lubuk Linggau-Palembang maupun sebaliknya dan ke Jakarta-Lubuk Linggau maupun sebaliknya. Pada tahun 2018 secara keseluruhan jumlah penerbangan udara Bandara Silampari sebanyak 1.071 penerbangan. Pada tahun 2021 jumlah penerbangan yang berangkat dan datang mengalami penurunan menjadi 103. Penurunan ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung semenjak akhir Februari 2020. Pada Bulan Agustus dan September 2021 tidak ada penerbangan dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada Oktober 2021 kasus Covid-19 mulai menurun dan penerbangan dibuka kembali untuk rute Lubuk Linggau. Sedangkan pada November dan Desember tidak ada penerbangan dikarenakan maskapai yang digunakan, yaitu Batik Air, lebih memfokuskan penyediaan penerbangan di Indonesia bagian Timur sehingga tidak melakukan perjalanan udara untuk rute Lubuk Linggau.

Namun, pada tahun 2022 jumlah keberangkatan penerbangan mengalami peningkatan kembali. Hal ini sebagai dampak pelonggaran PPKM selama masa pandemi COVID dan wujud pemulihan ekonomi pasca pandemi. Jumlah kedatangan penerbangan mencapai 149 dan kedatangan penerbangan mencapai 149 penerbangan.

Jumlah penumpang yang diangkut dari Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau selama tahun 2021 hanya mencapai 9.510 orang, lebih banyak dibandingkan banyaknya penumpang yang diangkut menuju Bandara Silampari yang mencapai 8.394 orang. Sedangkan pada tahun 2022 terlihat adanya kenaikan yang sangat signifikan pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sehingga jumlah penumpang yang berangkat meningkat hingga

mencapai 18.847 orang dan jumlah penumpang yang datang mencapai 18.454 orang.

Tabel 2.45. Data Layanan Penerbangan Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penerbangan	1.071	1.064	640	206	298
Jumlah Penumpang (Orang)					
Datang	98.863	88.116	24.397	8.394	18.454
Berangkat	101.546	88.293	23.542	9.510	18.847

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2022

2.1.3.1.16. Komunikasi dan Informatika

Indeks SPBE di Kota Lubuk Linggau selama periode 2018-2021 mengalami kenaikan, semula indeks SPBE nilai 1 di tahun 2018 menjadi 1,97 pada tahun 2021. Begitu juga dengan indikator lainnya yang menggambarkan kinerja urusan komunikasi dan informatika, yaitu Nilai Self Assesment SPBE dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Nilai Self Assesment SPBE Kota Lubuk Linggau meningkat dari nilai 1 pada tahun 2018 menjadi 2,75 pada tahun 2022. Sementara Indeks Keterbukaan Informasi Publik meningkat dari 60 pada tahun 2018 menjadi 70 di tahun 2021.

2.1.3.1.17. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Secara umum, persentase koperasi aktif dari tahun 2016 hingga tahun 2021 cenderung menurun. Capaian tertinggi sebesar 70 persen didapat pada tahun 2018, sementara capaian terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 53,30 persen koperasi aktif. Penurunan persentase koperasi aktif merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang merebak di tahun 2020. Namun, dalam masa pemulihan di tahun 2021 persentase koperasi aktif kembali meningkat menjadi 55,20 persen. Sementara itu, jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari tahun 2017 sampai tahun 2020 cenderung stagnan di angka 5.303 UMKM. Jumlah UMKM kembali meningkat pada tahun 2021, yaitu sebesar 6.112 UMKM yang menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi.

Tabel 2.46. Hasil Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kota Lubuk Linggau, Tahun 2017-2021

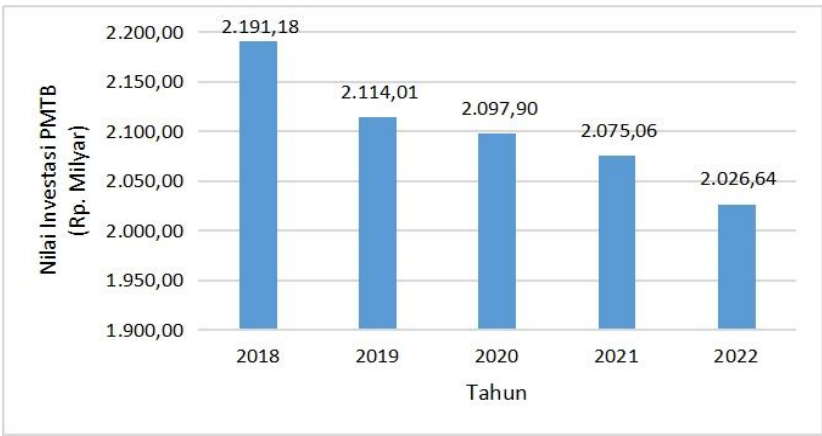
No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase koperasi aktif	60	70	57,41	53,30	55,20
2	Jumlah UMKM	5.303	5.303	5.303	5.303	6.112

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuk Linggau, 2022

2.1.3.1.18. **Penanaman Modal**

Nilai investasi total Kota Lubuk Linggau selama lima tahun terakhir cenderung menurun. Nilai investasi tertinggi pada tahun 2018 mencapai Rp.2.191,18 Milyar, terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi Rp.2.026,64 Milyar. Kondisi ini terjadi sebagai dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, sehingga berdampak pada iklim investasi.

Gambar 2.23. Pertumbuhan Investasi Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2023 (PMTB)

2.1.3.1.19. **Statistik**

Urusan statistik di Kota Lubuk Linggau meliputi pengembangan dan pelayanan data, serta pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah, sehingga pada akhirnya akan terdapat satu data atau informasi yang dapat digunakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Salah satu indikator yang menggambarkan urusan statistik di Kota Lubuk Linggau adalah persentase data dan informasi yang dipublikasikan. Dimana capaian indikator ini pada awal periode RPJMD adalah sebesar 60 persen.

2.1.3.1.20. **Persandian**

Urusan persandian di Kota Lubuk Linggau diarahkan untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, yang ditunjukkan dengan indikator Indeks KAMI (Keamanan Informasi). Indeks KAMI merupakan salah satu instrumen penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2013. Serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah. Selama periode tahun 2018 sampai dengan 2021, capaian Indeks KAMI Kota Lubuk Linggau mengalami peningkatan, semula bernilai 1 pada tahun 2018 menjadi 2 pada tahun 2021.



2.1.3.1.21. Perpustakaan

Urusan perpustakaan di Kota Lubuk Linggau digambarkan dengan indikator cakupan layanan ruang baca publik dan jumlah kunjungan masyarakat ke ruang baca publik. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2018-2020) cakupan layanan ruang baca publik meningkat dari tahun 2018 hingga 2020, yaitu 26,49 persen menjadi 39 persen. Namun, jumlah kunjungan masyarakat ke ruang baca publik menurun. Pada tahun 2018 sebesar 362.780 orang dan di tahun 2021 sebesar 270.133 orang. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah kunjungan kembali meningkat yaitu sebanyak 293.490 orang. Hal ini menunjukkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Lubuk Linggau yang telah membaik pasca pandemi COVID-19.

2.1.3.1.22. Kearsipan

Peran dan fungsi arsip selain sebagai bahan utama untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja pemerintah adalah sebagai bahan rekam informasi pemerintah, sejarah dan informasi lainnya. Urusan kearsipan di Kota Lubuk Linggau ditunjukkan oleh indikator Indeks Arsip yang terus meningkat dari tahun 2018 sebesar 81,96 hingga tahun 2021 mencapai 84,88. Namun pada tahun 2022 Indeks Arsip mengalami penurunan dengan realisasi Nilai 'C'.

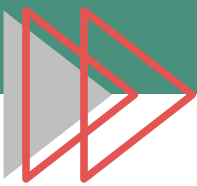
2.1.3.2. Fokus Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Pertanian

Produktivitas padi Kota Lubuk Linggau pada tahun 2018 mencapai 5,05 ton/ha dan mengalami peningkatan menjadi 5,72 ton/ha di tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 5,15 ton/ha dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 5,43 ton/ha hal ini disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian. Produktivitas padi diperoleh dengan menghitung produksi padi dibagi luas panen padi yang datanya dapat dilihat pada tabel hasil kinerja urusan pertanian Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021 dibawah.

Produktivitas jagung pada tahun 2018 sebanyak 5,67 ton/ha mengalami penurunan hingga menjadi 4,34 ton/ha di tahun 2021. Sementara itu, produktivitas kedelai mengalami peningkatan dan penurunan selama 4 (empat) tahun berjalan dari tahun 2018 sebesar 3,85 ton/ha menjadi 1,29 ton/ha pada tahun 2021.





Tabel 2.47. Hasil Kinerja Urusan Pertanian Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2021

No	Bidang Pertanian	2018	2019	2020	2021
1	Produktivitas Padi. (Ton/Hektar)	5,05	5,72	5,15	5,43
	-Produksi Padi. (Ton)	6.483,89	9.001,03	8.532,43	9.188,56
	-Produksi Padi Setara Beras (Ton)	3.704,22	5.142,26	4.874,54	5.249,40
	-Luas Panen Padi. (Hektar)	1.282,56	1.571,70	1.655,53	1.691,88
2	Produktivitas jagung(Ton/Hektar)	5,67	5,67	5,52	4,34
3	Produktivitas kedelai(Ton/Hektar)	3,85	3,00	0,37	1,29

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau, 2022

Tabel 2.48. Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

No	Tanaman	2018	2019	2020	2021	2022
1	Karet	8.344,58	9.109,17	9.256,25	9.052,43	9.163,03
2	Kelapa	49,2	47,25	60,23	60,58	58,39
3	KelapaSawit	258,48	289,65	309,86	527,56	1.572,58
4.	Kopi	801,02	754,48	868,4	885,23	881,45
5.	Lada	-	-	-	-	-
6.	Kakao	15,75	14,25	14,00	12,25	9,25
7.	Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Tabel diatas menunjukkan perkembangan produksi tanaman perkebunan di Kota Lubuk Linggau dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 produksi karet merupakan produksi hasil perkebunan paling tinggi mencapai 8.344,58 Ton dan di tahun 2022 produksi karet sebesar 9.163,03 ton. Produksi kelapa dari tahun 2018 hingga 2021 terus cenderung meningkat namun turun menjadi 58,39 ton di tahun 2022. Produksi Kelapa Sawit mencapai angka tertinggi di tahun 2022 sebesar 1.572,58 ton. Produksi kopi dalam kurun waktu lima tahun terakhir sangat fluktuatif dari 801,02 ton di tahun 2021 menjadi 881,45 ton di tahun 2022. Untuk Kakao mengalami penurunan hingga menjadi 9,25 ton di tahun 2022.

Tabel 2.49. Luas Tanaman Perkebunan (Ha) Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

No	Tanaman	2018	2019	2020	2021	2022
1	Karet	13.981	13.981	13.305,9	11.906,95	11.873,45
2	Kelapa	221,85	221,85	221,85	215,15	215,15
3	KelapaSawit	234,95	234,95	234,95	917,25	950,75
4.	Kopi	1.473	1.473	1.473,35	1.259,58	1.259,58
5.	Kakao	68	68	68	40	38
6.	Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Jika dilihat dari luasnya, perkembangan luas tanaman perkebunan di Kota Lubuk Linggau dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel diatas. Berdasarkan tabel diatas luas tanaman perkebunan karet di Kota Lubuk Linggau setiap tahunnya mengalami penurunan hingga di tahun 2022 sebesar 11.873,45 hektar. Untuk luas tanaman perkebunan kelapa dari tahun 2018 sebesar 221,85

hektar mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 215,15 hektar. Untuk luas tanaman kebun kelapa sawit mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2022 sebesar 950,75 hektar. Luas tanaman perkebunan kopi juga mengalami penurunan hingga di Tahun 2022 sebesar 1.259,58 hektar.

Tabel 2.50. Produksi Daging Ternak (kg) Kota Lubuk Linggau
Tahun 2017-2021

No	Ternak	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi Perah	-	-	-	-	-
2	Sapi Potong	636 594,00	608 580,00	641 424,00	962 605,00	1 010 906,00
3	Kuda	-	-	-	-	-
4.	Kerbau	97 137,00	60 425,00	86 648,00	1 103,00	1 544,00
5.	Kambing	128 188,00	112 678,13	118 208,00	90 306,63	94 826,38
6.	Domba	13 795,00	9 713,00	11 680,00	16 441,00	17 214,00
7.	Babi	33 511,00	12 566,66	13 614,00	-	-

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Perkembangan produksi daging ternak sapi potong, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi di Kota Lubuk Linggau dapat dilihat dari tabel di atas. Paling banyak di tahun 2021 adalah produksi daging sapi potong yang mencapai 1.010.906 kg kemudian kambing sebesar 94.826,38 kg, domba 17.214 kg dan terakhir kerbau 1.544 kg.

Tabel 2.51. Produksi Telur Unggas dan Jenis Unggas (Ton)
Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

No	Jenis Unggas	2018	2019	2020	2021	2021
1	Ayam Kampung	61 636,27	54 716,00	50 516,00	51 526,00	51 526,00
2	Ayam Petelur	-	-	109 127,12	111 309,66	111 309,66
3	Itik/Itik Manila	135 406,48	133 051,00	132 916,00	135 574,00	135 574,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Dapat dilihat dari tabel diatas untuk produksi telur unggas dan jenis unggas. Produksi telur ayam kampung, ayam petelur dan ayam itik/itik manila di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2021 sebesar 51.526 ton, 111.309,66 ton dan 135.574 ton.

Tabel 2.52. Produksi Daging Unggas (kg) Kota Lubuk Linggau
Tahun 2017-2021

No	Jenis Unggas	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ayam Kampung	35 558,00	28 910,89	25 665,00	33 926,44	34 603,88
2	Ayam Petelur	290	-	-	5 544,00	5 654,88
3	Ayam Pedaging	97 631,00	185 448,48	437 966,00	582 298,20	593 943,90
4	Itik/Itik Manila	16 247,00	19 122,44	18 789,00	18 333,48	18 700,53

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2022

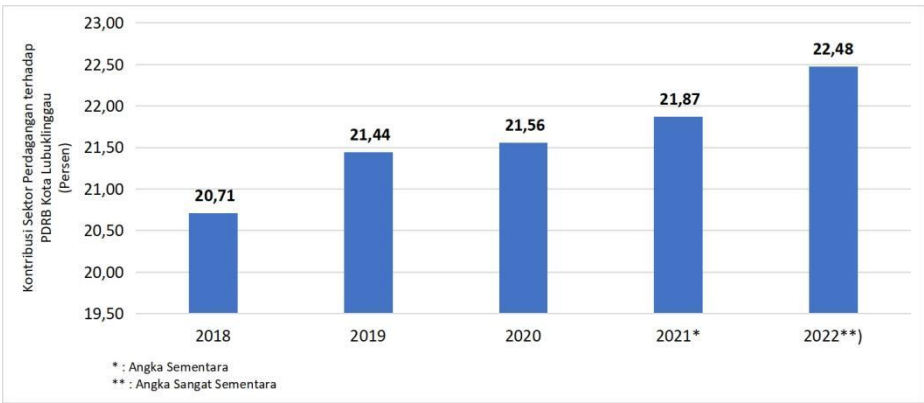
Produksi Daging Unggas Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021 seperti pada tabel diatas, ayam kampung sebanyak 35.558 kg di tahun 2017 dan menurun di tahun 2018 menjadi sebesar 28.910 kg kembali turun di tahun 2019 sebanyak 25.665 kg hingga naik menjadi 33.926,44 kg di tahun 2020 dan 34.603,88 kg di tahun 2021.

Untuk ayam petelur mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang sebesar 5.544 menjadi 5.654 di tahun 2021. Selanjutnya ayam pedaging yang paling banyak di produksi dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan hingga terakhir mencapai 593.943,90 kg. untuk daging itik/itik manila selama 5 tahun terakhir paling tinggi di tahun 2018 sebesar 19.122,44 kg kemudian di tahun 2021 sebesar 18.700,53 kg.

2.1.3.2.2. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota Lubuk Linggau dan terus menunjukkan tren perkembangan yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Lubuk Linggau. Jika pada tahun 2018 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mencapai 20,71 persen, dan terus meningkat sampai dengan tahun 2022 yaitu 22,48 persen.

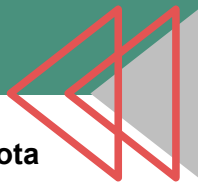
Gambar 2.24. Pertumbuhan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022



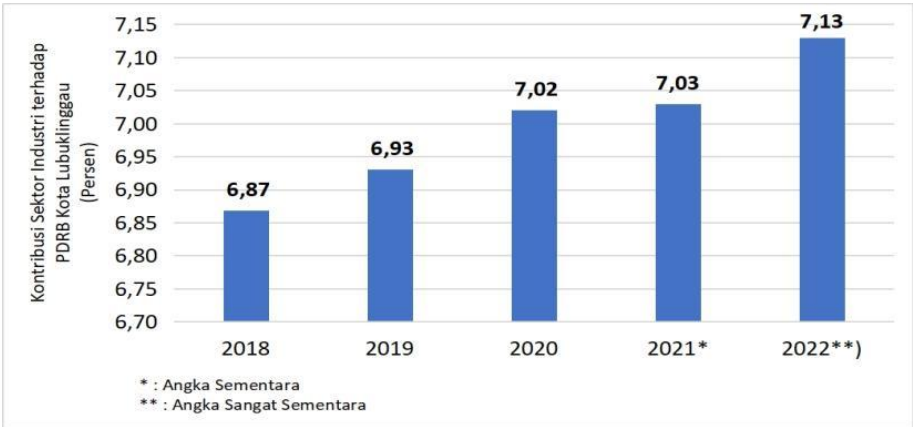
Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2023

2.1.3.2.3. Perindustrian

Perkembangan kontribusi sektor industri Kota Lubuk Linggau cenderung mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2018 sektor industri hanya memberikan kontribusi sebesar 6,87 persen terhadap perekonomian Kota Lubuk Linggau dan kontribusinya terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,13 persen pada tahun 2022.



Gambar 2.25. Pertumbuhan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2022

2.1.3.2.4. Perikanan

Potensi sektor perikanan di Kota Lubuk Linggau yaitu pengelolaan sumber daya perikanan air tawar. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam Implementasi Pengelolaan sumber daya perikanan air tawar secara terpadu. Perkembangan pengelolaan sektor perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53. Hasil Kinerja Urusan Perikanan Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2020

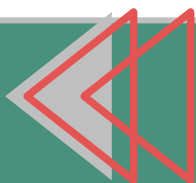
No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perusahaan	Perusahaan	-	14	16	18	18
2	Jumlah Produksi	Ton	302	412	-	280	225
3	Jumlah Pembenihan Ikan Rakyat	Unit	7	47	2	4	4
4	Jumlah Produksi Benih Ikan Rakyat	Ton	13.898.983	14.800.140	-	100.029	18.799.504

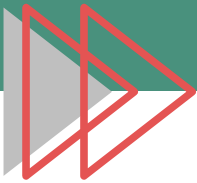
Sumber: Dinas Perikanan Kota Lubuk Linggau, 2023

Jumlah produksi perikanan pada tahun 2022 sebesar 225 ton, jumlah produksi ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 280 ton di tahun 2021. Untuk perkembangan jumlah benih ikan rakyat pada tahun 2022 yaitu sebesar 18.799.504 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di tahun 2021 sebesar 100.029 ton. Untuk jumlah pembenihan ikan rakyat selama lima tahun terakhir ini mengalami penurunan dan pada tahun 2020 ada 2 pembenihan dakyat dibanding tahun 2019 ada 47 pembenihan rakyat.

2.1.3.3. Fungsi Penunjang

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung oleh fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Dalam fungsi penunjang perencanaan, terlihat adanya kemajuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini terlihat dari capaian tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang mengalami perbaikan nilai yaitu setiap tahunnya. Pada tahun 2018, tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebesar 72,4 meningkat menjadi 74,46 pada tahun 2022.

Tata kelola keuangan daerah Kota Lubuk Linggau tergolong baik. Hal ini diindikasikan oleh Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau yang berada di level Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama periode 2018-2022. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Lubuk Linggau masih belum optimal. Alokasi belanja pegawai yang masih cukup tinggi, mengakibatkan manfaat untuk belanja langsung bagi masyarakat masih terbatas.

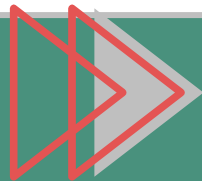
Untuk penyediaan layanan publik, pemerintah Kota Lubuk Linggau wajib menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah yang ditandai dengan tidak adanya suap, kesesuaian proses pemberian pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan serta kemudahan pengaduan masyarakat. Selain itu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel diharapkan dapat menjadi pemicu Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam rangka meningkatkan kapasitas birokrasi.

Tabel 2.54. Hasil Kinerja Fungsi Penunjang Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,29	2,3	3,84	4,09	4,26
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	72,4	66,10	78,76	78,88	79,97
3	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB (71,52)	BB (72,22)	BB (73,41)	BB (73,76)	BB (74,46)
4	Indeks Kapasitas Birokrasi	68	68	58,06	66,2	N/a

Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2022

Di bidang keagamaan, hasil kinerja Pemerintah Kota Lubuk Linggau sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.30 yang menunjukkan persentase rumusan kebijakan regulasi dibidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti sebesar 90 persen. Demikian juga dengan organisasi keagamaan yang aktif yang dapat dilihat dari terfasilitasinya pembinaan keagamaan yang mencapai 80 persen. Namun, beberapa indikator belum menunjukkan kinerja yang memuaskan dikarenakan adanya pandemic COVID-19 yang melanda tahun 2020. Kegiatan yang terkena dampak COVID-19 seperti kegiatan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) maupun Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ).





Tabel 2.55. Hasil Kinerja Urusan Keagamaan Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase rumusan kebijakan/ regulasi di bidang kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	90	90	90	90	100
2	Persentase organisasi keagamaan yang aktif	80	80	80	80	100
3	Persentase Kesiapan Cabang STQ Daerah	100	100	0	0	100
4	Persentase Utusan MTQ Berprestasi	100	100	46	46	30
5	Terlaksananya fasilitasi pembinaan keagamaan	100	100	5	5	100
6	Persentase realisasi bantuan dibidang kegamaan yang dilaksanakan	100	100	50	50	67

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Lubuk Linggau, 2023

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran per Kapita dan Pengeluaran konsumsi rumah tangga. Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran per Kapita Kota Lubuk Linggau dari Tahun 2019 sebesar Rp.13.586.000,00 mengalami penurunan menjadi Rp. 11.885.080 di tahun 2022. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami peningkatan hingga di tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 2.855,25 milyar.

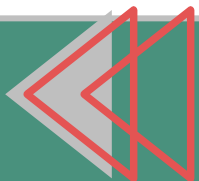
Tabel 2.56. Pengeluaran per Kapita dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (ADHK) Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran per Kapita	13.586.000,00	13.243.000,00	13.267.000,00	11.885.080,00
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (milyar rupiah)	2.644,90	2.644,90	2.687,27	2.855,25

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2023

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Dalam RTRW, wilayah produktif dalam wilayah Kota Lubuk Linggau terfokus pada perumahan dan/atau perdagangan jasa yang didukung dengan pemanfaatan perkebunan dan pertanian dengan rasio luasan wilayah produktif sesuai dengan luas seluruh wilayah budidaya. Wilayah industri difokuskan dikembangkan di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I dan Lubuk Linggau Utara I yang di terpadukan dengan kawasan pergudangan dengan luas 290 Ha di Lubuk Linggau Selatan I dan 50 Ha Lubuk Linggau Utara I yang sampai saat ini belum direalisasikan. Sampai pada saat ini untuk wilayah Kota Lubuk Linggau belum terdapat wilayah banjir ataupun wilayah kekeringan. Rasio luas wilayah perkotaan terhadap seluruh wilayah budidaya adalah 49,44.





2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada.

Tingkat keamanan di Kota Lubuk Linggau dapat digambarkan melalui indikator angka kriminalitas. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, angka kriminalitas Kota Lubuk Linggau cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016, angka kriminalitas Kota Lubuk Linggau mencapai 1.329 kasus dan mengalami penurunan hingga mencapai 305 kasus pada tahun 2020. Selain itu, berkaitan dengan ketepatan layanan perizinan, tingkat layanan perizinan telah mencapai 100 persen pada tahun 2018.

Tabel 2.57. Hasil Kinerja Fokus Iklim Berinvestasi Kota Lubuk Linggau Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka kriminalitas ¹⁾	1.329	994	814	709	305
2	Tingkat ketepatan layanan perizinan ²⁾	99	100	100	100	98

Sumber: 1) Satuan Polisi Pamong Praja/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021

2) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Lubuk Linggau, 2021

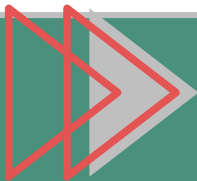
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Dalam kurun lima tahun terakhir, rasio ketergantungan Kota Lubuk Linggau terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018, rasio ketergantungan mencapai 48,02 dan meningkat hingga mencapai 47,62 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota Lubuk Linggau mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.58. Rasio Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2021

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio lulusan S1/S2/S3	2,731	2,827	2,867	N/a	N/a
2	Rasio ketergantungan	48,02	47,82	47,62	48,41	48,57

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2021

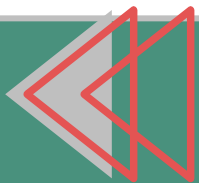




2.2. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Per Urusan, Tujuan, dan Sasaran pada RPJMD Periode Sebelumnya

2.2.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2022

Capaian misi yang harus diemban oleh pemerintah bersama masyarakat Kota Lubuk Linggau dievaluasi berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Secara umum capaian dapat ditunjukkan pada tabel berikut.



Tabel 2.59. Capaian Kinerja Indikator Utama Kota Lubuk Linggau Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi				Kondisi Akhir RPJMD 2023	Capaian terhadap Target 2021/2022
			2019	2020	2021	2022		
Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Indeks Pengetahuan	Indeks	0,698	0,701	0,702	0,702	0,711	98,73
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kesehatan	Indeks	0,754	0,758	0,76	0,766	0,769	107,93
Meningkatnya kesadaran <i>civil society</i>	Indeks Kesadaran Demokrasi	Indeks	60,6	75,77	75,713	-	87	121,71
Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Nilai ICOR	Nilai	8,93	0	14,85	10,05	6,95	55,40
Meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa	PDRB sektor perdagangan dan jasa	Rp (Miliar)	1.637,4	1.652,20	1.992,35	2.096,80	1.903,33	110,16
Meningkatnya pertumbuhan Industri	Laju Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	%	7,35	-0,41	2,24	5,82	5,64	103,19
Meningkatnya pengembangan pariwisata	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	%	3,89	3,61	3,67	3,98	4,1	97,07
Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,71	7,41	6,27	5,94	5,07	82,84
Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,795	0,787	0,48	0,502	0,814	61,67
Menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	2,21	2,2	1,97	1,5	1,87	119,79
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,59	0,53	0,46	0,27	0,49	144,90
	Angka Kemiskinan	%	12,95	12,71	13,23	12,68	12,4	97,74
Menguatnya ketahanan pangan daerah	Rasio kecukupan pangan	Rasio	0,95	1	0,92	0,91	1,14	79,82
Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Luas Kawasan Kumuh	Ha	517,66	517,66	442,37	422,53	514,61	117,89
Meningkatnya infrastruktur dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	%		58,62	60,43	N/a	65	115,86
Meningkatnya pengembangan wilayah	Indeks Aksesibilitas	Indeks	0,728	0,75	0,707	0,772	0,788	91,62
Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,4	80,4	60,43	64,86	66,33	97,78
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,36	3,84	4,09	4,26	3,98	107,04
		Nilai	C	CB	B	A-	B	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,17	78,76	78,88	79,97	82	97,52
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yg bersih dan akuntabel	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	100,00
Meningkatnya kapasitas birokrasi	Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks	50,46	58,06	66,2	N/a	60,7	109,06

Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2023



2.2.2.Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah

Keseluruhan capaian pembangunan Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 sampai dengan 2022 per Urusan pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing di bab ini, disajikan pada tabel 2.60 berikut ini.

Tabel 2.60. Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Lubuk Linggau Tahun 2020-2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode PRPJMD 2020	2021		2022		Kondisi Kinerja Akhir P-RPJMD 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
I	Indikator Makro							
1	PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)	Rp (Juta)	4.334.370	4.739.509	4.470.230	5.025.696	4.671,89	5.345.016
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,13	5,06	3,15	5,42	4,51	5,64
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,78	75,12	74,89	75,44	75,53	75,76
4	Angka Kemiskinan	%	12,71	12,6	13,23	12,51	12,68	12,4
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,41	6,4	6,27	5,73	5,94	5,07
6	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,34	0,336	0,36	0,334	Belum rilis	0,33
II	Indikator Kinerja Daerah Pada Masing-Masing Urusan							
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	Pertumbuhan PDRB	%	-0,13	5,06	3,15	5,42	4,51	5,64
2	Laju inflasi	%	1,97	1,6	1,63	1,53	5,83	1,43
3	PDRB per kapita (ADHK)	Rp.	18.509.861	19.822.371	19.875.270	20.735.379	19.446.923	21.758.842
4	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	21,51	16,81	21,87	16,86	22,48	16,9
5	Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	%	18,58	29,9	18,35	29,95	17,71	30
6	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	7	6,65	7,03	6,73	7,13	6,81
II.	Kesejahteraan Sosial							
1	Indeks PembangunanManusia (IPM)	Nilai Indeks	74,78	75,12	74,89	75,44	75,53	75,76
2	Angka melek huruf	%	103,6	100	99,09	100	98,85	100
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,89	9,82	9,9	9,89	9,91	9,96
4	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37	13,55	13,38	13,6	13,39	13,65
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,41	6,4	6,27	5,73	5,94	5,07
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,43	1,46	1,14	1,45	1,44	1,43
III.	Seni Budaya dan Olahraga							
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	%	0	78	-	78	0	80
2	Jumlah Prestasi Olahraga yang diraih	cabor	0	85	33	88	0	90



Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan RPJMD 2020	2021		2022		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2023
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
I.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
1	Produktifitas Pangan Utama	Ton/Ha	12,4	15,3	15,3	16,4	-	17,2
II.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	45	51,76	45,28	54,01	-	56,26
2	Jumlah pusat-pusat ekonomi baru	kawasan	0	2	0	3	0	3
III.	Fokus Iklim Berinvestasi							
1	Nilai ICOR	Nilai	8,02	8,72	14,85	8,65	10,05	8,58
2	Angka kriminalitas	Jumlah Angka	265	150	312	125	-	100
3	IKM Bidang Pelayanan Perizinan	%	80	80	86,54	80	86,64	80
IV.	Fokus Sumber Daya Manusia							
1	Indeks Sumber Daya Manusia	Indeks	72,57	72,66	73,00	72,88	76,3	73,09
2	Indeks Pengetahuan	Indeks	0,701	0,704	0,702	0,707	0,702	0,711
3	Indeks Kesehatan	Indeks	0,758	0,76	0,76	0,765	0,83	0,769
ASPEK PELAYANAN UMUM								
I.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1.	Pendidikan							
1	Rata-Rata Lama Sekolah	nilai	9,89	12	9,9	12	9,91	12
2	Harapan Lama Sekolah	nilai	13,37	9	13,38	9	13,39	9
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	51,45	52,65	75,31	53,85	98,68	55,05
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	94,06	95,06	92,34	95,86	98,68	96,06
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	95,34	96,14	96,37	96,34	55,08	96,74
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	76,25	77,25	53,63	78,45	N/a	78,85
2.	Kesehatan							
1	Angka Harapan Hidup		68,83	69,5	69,39	69,75	69,82	69,8
2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	143,18	45,33	141,81	45,33	46,2	45,33
3	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	4,57	4,1	2,4	4,1	0,69	4,1
4	Pravelensi Stunting Pada Balita	%	-	22,9	22,8	21,1	11,7	20,4
5	Prevalensi Balita gizi Buruk	%	1,3	1,3	0	1,3	1,27	1,3
6	Angka Kematian balita (Per 1000 balita)	Nilai	3	3	0	3	0	3

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan RPJMD 2020	2021		2022		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2023
7	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76	83	80,73	84	79	85
8	IR DBD Per 100.000 Penduduk	nilai	163	80	40	70	91	60
9	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	%	0,006	0,006	0,035	0,006	2,7	0,006
10	Insiden TB Per 100.000 Penduduk	nilai	580	487	126	440	N/a	385
11	Kasus Malaria Per 1000 penduduk	kasus	0,25	0,25	0	0,25	0	0,25
12	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,19	0,24	2,09	0,25	N/a	0,26
13	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	75	75	66,7	75	N/a	75
14	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	98,34	98,34	93,65	98,34	99,55	98,34
15	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	93,14	94,14	95,39	96,14	96,64	97,14
16	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	97,52	97,82	96,83	98,32	101,12	98,52
17	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		66,39	67,29	91	68,45	96,5	68,76
18	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	11,58	12,16	100	12,76	92,45	13,4
19	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	35,57	37,35	75	39,21	52,47	41,18
20	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	75,73	78,75	75,04	81,9	95,24	85,18
21	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	38,16	39,69	60	41,28	56	42,93
22	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	25,82	26,85	47	27,92	50	29,04
23	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	64,66	67,24	66	69,93	50,00	72,73
24	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	92,28	95,97	18	96,71	64,00	98,51
25	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	16,65	17,32	18	18,01	49,71	18,73
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	31,1	81,91	76,15	95,07	33,33	101,9
2	Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Mantap	%	28,13	56,23	62,7	78,29	73,76	115,84

Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan RPJMD 2020	2021		2022		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2023
3	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTR	%	70,83	90	70,83	95	75	100
4	Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	%	308,89	100	29,17	100	69,5	100
5	Persentase Legalitas Tanah	%		20	-	20	100	20
6	Prosentasi layanan sanitasi skala perkotaan	%	41,56	50,1	23,38	77,62	23,38	87,5
7	Prosentase Penduduk berakses air minum Perpipaan	%	38,76	39,3	39,63	40,65	42,04	42
8	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Standar	%	0	41,67	0	70,83	100	100
9	Persentase Penurunan Titik Rawan Bencana Akibat Daya Rusak Air	%	0	20	22,24	20	29,51	20
10	Prosentase jaringan Irigasi Fungsional	%	40,6	21,67	40,6	21,67	78	21,67
11	Persentase penyedia usaha jasa konstruksi daerah berdaya saing	%	0	65	0	82,5	38,89	100
12	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Rasio	10,47	10,89	10,47	11,32	10,47	11,78
13	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	81,28	84,53	85	87,91	85	91,42
14	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	82,17	85,45	82,89	88,87	82,89	92,43
15	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	0	100	0	100
16	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Rasio	100	100	100	100	100	100
17	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	1,86	1,94	100	2,01	100	2,09
18	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	100	100	99	100	99	100
19	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	100	100	0	100	0	100
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung PSU yang memadai (diatas 70%)	%	74,21	76	96,95	78	92,36	80
2	Persentase Rumah Layak Huni	%	70,5	93,15	95,31	93,25	99,2	93,3
3	Cakupan MBR mendapatkan Akses Bantuan Peningkatan RTLH	rumah	737	1988	126	2388	560	2788
4	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	0	100	0	100
5	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	0	100	0	100
6	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	8,74	9,09	0,45	9,45	48,24	9,83

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan RPJMD 2020	2021		2022		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2023
7	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	4,39	4,56	3,09	4,75	75,39	4,94
8	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	87,37	90,87	11,33	92,5	20,51	94,28
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
1	Tingkat Penurunan Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	%	73,24	85	64,44	85	100	85
2	Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu	%	-	78	0	79	0	80
3	Zero Konflik Antar Umat Beragama	%	100	100	100	100	100	100
4	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	angka	11,56	6,27	13,56	5,16	6,27	4,07
5	Persentase penanganan bencana	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	89,47	93,05	100	96,77	100	98
7	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	44,44	46,22	100	48	76,06	50
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	65,33	100
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	40	100	48	100
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	93,90	100
11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	93,90	100
6.	Sosial							
1	Persentase PMKS yang mampu keluar dari Permasalahan Sosial	%	88,6	90,34	89,49	91,48	-	92,46
2	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	Kelompok lembaga	255	260	211	265	320	270
3	Persentase PMKS yang Mandiri	%	0	90,34	89,49	91,48	-	92,46
4	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	85,87	89,3	89,4	92,88	92,95	96,59
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
II.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
1.	Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	66,67	100	66,67	100

Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan RPJMD 2020	2021		2022		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2023
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	5	32	12,94	34,6	45,7	35,3
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%		72,08	3,36	74,97	3,36	77,96
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%		26,3	15,5	27,5	30,3	30
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	IPG (indeks pembangunan gender)	%	95,83	96,06	95,84	96,13	96,01	96,2
2	IDG (indeks pemberdayaan gender)	%	65,13	59,96	60,81	60,96	66,28	61,96
3	Rasio anak yang mengalami kekerasan per 1.000 jumlah anak	nilai	0,21	0,21	0,21	0,21	5,9	0,21
4	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,98	1,02	0,3	1,06	n/a	1,1
5	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,02	0,02	0,042	0,02	n/a	0,02
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	26,72	27,78	8,91	28,9	6,28	30,05
3	Pangan							
1	Rasio kecukupan pangan	nilai	1	1,05	0,92	1,1	0,91	1,14
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	73	75	88,8	76	83,0	77
3	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	100	100	7624,6	100	N/a	100
4	Pertanahan							
1	Persentase Legalitas Tanah	%	-	20	N/a	20	N/a	20
	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	0	100	54,17	100
5	Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,4	64,95	60,43	65,64	64,86	66,33
2	Indeks pencemaran air	Nilai	68,75	70,08	55	70,1	65	70,12
3	Indeks pencemaran udara	Nilai	85,71	77,32	85,57	77,34	87,21	77,36
4	Indeks tutupan lahan	Nilai	88,56	88,64	23,26	88,66	23,26	88,68
5	Tingkat penurunan emisi GRK	%	-	2	-	2	N/a	2
6	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	%	70	75	74,9	80	75	85
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	83,22	100	84,19	100	94,93	100
2	Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	30,91	40	38,71	50	42,93	60
3	Perekaman KTP elektronik	%	97	97	96,29	98	98,77	98
4	Kepemilikan akta kelahiran	%	97	98	97,35	98	97,98	98
5	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	38	39	51,28	41	86,96	42



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan RPJMD 2020	2021		2022		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2023
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Nilai swadaya masyarakat	(juta) Rupiah	1.500	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
2	Rata-rata nilai gotong-royong kelurahan per tahun	rupiah	1,5	3,5	25	5	1,5	6,5
3	Jumlah pemanfaatan teknologi tepat guna	Orang/klp	-	24	8	32	N/a	40
4	Persentase rencana kegiatan pembangunan kelurahan berbasis swadaya masyarakat	%	-	20	20	20	N/a	20
5	Jumlah lembaga masyarakat dalam penerapan 10 program pokok PKK	kelompok	81	81	81	81	81	81
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Angka Kelahiran Kasar (<i>Crude Birth Rate</i>)	Per 1000 penduduk	-	16	18,08	15	18,3	14
2	Rata- rata jumlah anak perkeluarga/TFR	Jumlah Anak	1,8	1,8	1,83	1,8	1,8	1,8
3	Cakupan pasangan usia subur yang tidak ber-kb (unmeetnet)	%	11,27	11	7,92	10,27	23,32	9,27
4	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,35	2,44	2,38	2,54	-	2,64
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	77,76	79,5	84,74	80	59,74	80,1
9.	Perhubungan							
1	Angka kecelakaan lalu lintas	angka	52	42	78	42	78	42
2	Rasio jumlah angkutan umum terhadap jumlah penduduk	rasio	0,001	0,001	0,0004	0,001	0,0004	0,001
3	IKM layanan transportasi angkutan perkotaan	indeks	81,05	85	81,2	85	81,58	85
4	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	53	55	0,48	57	0,48	60
5	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		44	46	0,43	48	0,43	49
10	Komunikasi dan Informatika							
1	Indeks SPBE	nilai	2,5	3	3,0	3,3	2,45	3,6
2	Nilai Self Assesment SPBE	nilai	2,3	3	2,53	3,3	2,3	3,6
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	indeks	70	75	73,1	85	68,77	90
4	Data informasi yang dipublikasikan	%	70	70	75,0	75	70	80
5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	2,5	2,6	2,5	2,7	2,5	2,81
6	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100,0	100	100	100
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	100,0	100	100	100



Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan RPJMD 2020	2021		2022		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2023
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
1	Persentase Koperasi Sehat	%	10,9	10,6	134,90	11,7	19,2	12,9
2	Persentase koperasi aktif	%	53,3	53,3	78,20	55	8	58
3	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	Rasio	11,52	11,98	14,40	12,46	N/a	12,96
4	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Rasio	0,95	0,98	0,87	1,02	0,87	1,06
12	Penanaman Modal							
1	Jumlah nilai investasi	Rp(juta)	-	585.553	1559999,00	605.000	1.974,52	625.000
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	134	100	46,95	100	30	100
13.	Kepemudaan dan Olah Raga							
1	Jumlah Pemuda Kader Berprestasi	orang	400	405	415,00	410	175	415
2	Persentase Wirausaha Muda	%	17,69	19	19,22	20	8,4	21
3	Jumlah Prestasi Olahraga yang diraih	cabor	0	85	33,00	88	11	90
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		3,67	3,82	6,02	3,97	0,050	4,13
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		6,28	6,54	5,01	6,8	3,91	7,07
14.	Statistik							
1	Persentase data dan informasi yang dipublikasikan	%	60	75	70,00	85	60	90
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	0,00	100	0	100
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	0,00	100	0	100
15.	Persandian							
1	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	indeks	0,21	1	13,00	1	16	1
16.	Kebudayaan							
1	Kekayaan Budaya daerah ditetapkan	nilai	4	4	4,00	4	4	5
2	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	57,69	60	67,85	62,4	0	64,9
17.	Perpustakaan							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	270.133	280.938	58,56	292.176	58,56	303.863
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	1	1	12,43	1	12,43	1
18.	Kearsipan							
1	Indeks Arsip	indeks	84,88	88	88	89	N/a	90



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan RPJMD 2020	2021		2022		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2023
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	100	100	0	100	0	100
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	85	88,4	0	91,94	0	95,61
III.	Urusan Pilihan							
1.	Pariwisata							
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	147.061	153.000	176.712	154.000	194.218	155.000
2	Produk wisata unggulan daerah	%	2	2	50	3	50	4
3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-90,43	2	-30,18	3	-30,18	4
4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	-43,87	5	12	7	12	10
2.	Pertanian							
1	Produktifitas Pangan Utama	Ton/Ha	13	15,3	15,3	16,4	13	17,2
2	Produktifitas Tanaman Holtikultura	Ton/Ha	49	56,6	56,6	57,4	45	58,8
3	Produktifitas Perkebunan	Ton/Ha	0,52	6,1	6,1	7,4	3	8,55
4	Produktifitas Tanaman Biofarmika	Ton/Ha	10	11,3	11,3	12,1	11,3	13,5
5	Produktifitas Peternakan	Ton/Ha	1,7	1,9	1980	2,3	1,98	2,4
6	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ha/thn	523,1	544,03	4,14	565,79	4,14	588,42
3.	Perdagangan							
1	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB	%	16,72	16,81	17,35	16,86	17,35	16,9
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	25,97	27,01	83,07	28,09	100	29,21
4.	Perindustrian							
1	Persentase Peningkatan Omset IKM	%		60	0	70	N/a	80
2	Persentase IKM yang masuk Pasar modern	%	3	3	3	3	3	3
3	Tingkat inflasi harga pokok dan penting	%	-	1,5	0,45	1,3	5,22	1
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	10	10,4	100	10,82	100	11,25
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100
5.	Kelautan dan Perikanan							
1	Tingkat konsumsi ikan	gram/kap/ hari	42	43,5	42	44	49,1	44,5
2	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	4492 Ton	4510 Ton	3551 Ton	4547 Ton	4775,0	4774 Ton



Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan RPJMD 2020	2021		2022		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2023
IV.	Fungsi Penunjang							
1.	Perencanaan Pembangunan							
1	Nilai SAKIP pada Aspek Perencanaan Kinerja	Nilai	22,18	26,42	25,6	28	25,64	30
2	Nilai aspek perencanaan strategis	Nilai	7,39	8,56	8,68	8,99	8,68	10
3	Nilai Aspek Perencanaan Kinerja Tahunan	Nilai	14,60	16,90	18,16	17,75	18,16	20,00
4	Nilai SAKIP pada Aspek Pengukuran Kinerja	Nilai	17,92	21,95	20,94	23,49	21,09	25
5	Nilai Aspek Pemenuhan Pengukuran Kinerja	Nilai	3,58	4,15	4,81	4,36	4,81	5
6	Nilai Aspek Kualitas Pengukuran Kinerja	Nilai	8,96	10,98	9,84	11,74	9,84	12,5
7	Nilai Aspek Implementasi Pengukuran Kinerja	Nilai	5,38	6,59	4,17	7,05	4,17	7,5
2.	Keuangan							
1	Pertumbuhan PAD	%	-	9,33	N/a	9	-0,19	9,63
2	WTP dengan nilai tinggi	%	-	93,2	N/a	93,25	-	93,3
3	Rasio belanja pegawai terhadap belanja modal	rasio	0,89	0,75	N/a	0,7	0,84	0,67
4	Persentase belanja modal terhadap belanja APBD	%	26	28,5	N/a	29	37	30
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
1	Rata-rata Nilai Kerja ASN	angka	83,06	84	91,45	85	88	86
2	Rata-rata nilai Capaian Target Kinerja	angka	82,49	79	91,45	82	-	85
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	46,33	48,19	602,99	50,12	49	52,12
4	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	13,45	13,99	6,76	14,55	6,76	15,13
5	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	100	100	98,03	100	100	100
4.	Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang menjadi masukan perumusan kebijakan	%	-	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan inovasi oleh stakeholder	%	-	29	50,57	35	49,67	41
5.	Inspektorat							
1	Maturity Level SPIP	level	3	3	3	3	3	3
6.	Sekretariat DPRD							
1	Persentase Legislasi Daerah	%	85,39	86	74	87	70	88
7.	Sekretariat Daerah							
1	Nilai Rata-rata Profesionalisme Aparatur Pelayanan	Nilai	82,49	83	87	84	90	85
2	Persentase Kecukupan SDM Aparatur Pelayanan UPP	%	60	80	80	90	80	90
3	Persentase UPP yang menerapkan budaya pelayanan	%	65	80	80	85	80	90
4	Rata-rata Pemenuhan dan Kualitas Sarana Prasarana Yanlik	Nilai	1,5	2,5	2,5	2,75	3	3
5	Persentase UPP Yang Menerapkan Prinsip Pemenuhan Sarana Prasarana Yanlik	%	65	80	80	90	80	90



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan RPJMD 2020	2021		2022		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2023
6	Persentase UPP yang memiliki Sarana Prasarana Yanlik dalam kondisi baik	%	60	80	80	90	80	90
7	Persentase Pelayanan per Jenis Layanan Selesai Tepat Waktu	%	60	80	80	85	90	90
8	Nilai Rata-Rata Penerapan Kebijakan Pelayanan UPP	nilai	70	72,5	72,5	73	73,5	73,5
9	Persentase UPP yang telah Menerapkan Standar Pelayanan per Jenis Layanan	%	60	80	80	90	80	90
10	Nilai aspek inovasi	nilai	B	BB	0	BB	-	A
11	Nilai aspek sistem informasi	nilai	B	BB	0	BB	-	A
12	Persentase ketersediaan regulasi/kebijakan pendukung penerapan inovasi	%	60	80	80	90	80	90
12	Persentase ketersediaan regulasi/kebijakan pendukung penerapan inovasi	%	60	80	80	90	80	90
13	Persentase UPP yang memiliki inovasi layanan	%	60	80	80	90	80	90
14	Persentase UPP yang memiliki sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan	%	70	85	85	90	85	95
15	Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Pada Komponen SAKIP	Nilai	10,05	14	11,86	14,05	14	14,05
16	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Data Kinerja Secara Berkala	%	70	85	85	90	85	100
18	Persentase Kecukupan SDM Pelaporan Kinerja Daerah sesuai Kebutuhan	%	70	85	85	90	85	100
19	Persentase organisasi tepat fungsi tepat ukur	%	-	30	30	40	100	50
20	Persentase Kesesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah	%	80	100	100	100	N/a	100
21	Persentase Penerapan Tugas Fungsi sesuai tugas jabatan	%	100	100	100	100	N/a	100
22	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki pejabat sesuai dengan Peta Jabatan	%	100	100	100	100	N/a	100
23	Persentase tingkat harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah	%	100	100	100	100	100	100
24	Persentase perangkat daerah yang memiliki aparatur penyusunan produk hukum daerah	%	60	90	100	100	N/a	100
25	Nilai Capaian Aksi HAM Daerah	nilai	A	A	A	A	N/a	A
26	Persentase Capaian Pengendalian Kegiatan Pembangunan	%	80	85	85	90	90	90
27	Persentase Perangkat Daerah yang mengupload struktur anggaran melalui Sismonteptra	%	80	100	100	100	N/a	100
28	% pengadaan barang/jasa yang diselesaikan oleh ULP	%	100	100	100	100	100	100
29	Persentase pengadaan barang/jasa perangkat daerah	%	80	100	100	100	100	100



Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan RPJMD 2020	2021		2022		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2023
30	Laju Inflasi Daerah	%	0,2	0,1	0,35	0,1	1	0,1
31	Rekomendasi stake holder yang ditindaklanjuti sebagai Kebijakan Daerah	rekomendasi	100	100	100	100	N/a	100
32	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	%	80	85	85	85	N/a	90
33	Persentase Lembaga Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri	%	100	100	100	100	85	100
34	Persentase Pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang kesra	%	-	100	100	100	-	100
8.	Kecamatan							
1	Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Barat I	%	75	90	100	95	100	100
2	Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Barat II	%	100	100	100	100	100	100
3	Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Timur I	%	85	85	100	85	100	90
4	Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Timur II	%	86	100	81	100	100	100
5	Persentase Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Timur II	%	86	100	81	100	N/a	100
6	Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Utara I	%	75	85	97,14	85	90	90
7	Persentase Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Utara I	%	75	85	95,99	85	N/a	90
8	Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Utara II	%	100	100	90	100	90	100
9	Persentase Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Utara II	%	100	100	90	100	N/a	100
10	Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I	%	86	100	100	100	90	100
11	Persentase Kelurahan yang menerapkan Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I	%	86	100	100	100	N/a	100
12	Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II	%	85	85	N/a	85	90	90

Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2023



BAB III

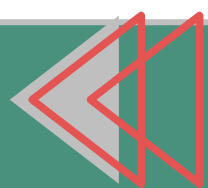
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasi program- program yang dicanangkan.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk itu dibutuhkan



data dan analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya tiga tahun sebelumnya.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa tiga tahun mendatang. Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Adapun upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Lubuk Linggau dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Gambaran kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan pada waktu yang telah lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun ke belakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan. Analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sangat penting untuk merancang keuangan masa depan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca keuangan daerah. APBD meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu diterapkan prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) pendapatan daerah; (2) belanja daerah; dan (3) pembiayaan daerah. Pendapatan maupun belanja daerah diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah dan memiliki pengaruh terhadap ekuitas dana lancar yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya khususnya dalam konteks keuangan daerah.



Sementara pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Konsep penganggaran pada dasarnya membandingkan antara anggaran dan realisasinya antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu pula dengan APBN/APBD yang membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, yang kemudian perhitungan proyeksi selama tiga tahun ke depan (dari tahun 2024 s.d tahun 2026) akan dijelaskan pada sub bab tersendiri.

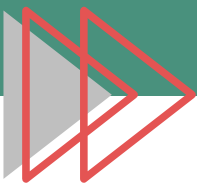
A. Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan komponen APBD yang memiliki peranan penting karena sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas tiga kelompok sumber pendapatan utama yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama periode tahun 2018-2022, proporsi kontribusi dari ketiga sumber tersebut memiliki perkembangan dengan tren yang berbeda sehingga terjadi pergeseran struktur pendapatan daerah Kota Lubuk Linggau.

Secara umum rata-rata capaian realisasi pendapatan daerah belum mencapai 100 persen. Capaian realisasi pendapatan yang kurang dari 100 persen berarti terdapat defisit pendapatan daerah riil dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Namun, target dan realisasi pendapatan daerah secara umum telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya





pada tahun 2022 terdapat penurunan target dan realisasi pendapatan. Berikut Tabel 3.1. menunjukkan capaian target pendapatan daerah Kota Lubuk Linggau tahun anggaran 2018-2022.

Tabel 3.1. Capaian Target Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2018-2022

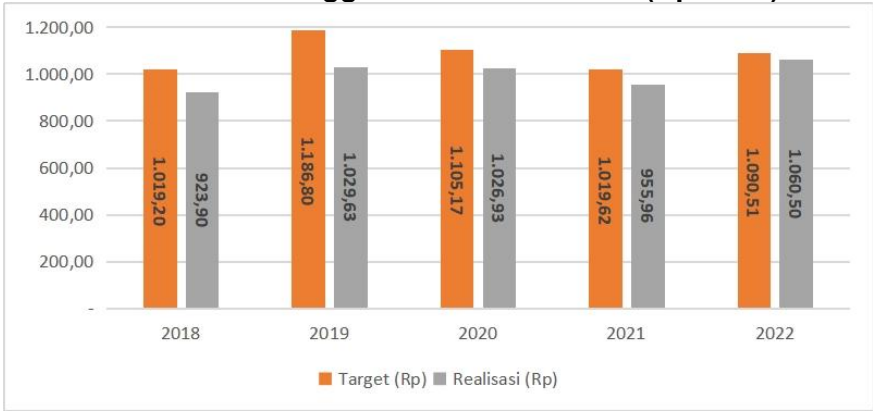
Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah / Berkurang
2018	1.019.204.334.095,25	923.898.833.425,26	90,65	-95.305.500.669,99
2019	1.186.803.260.874,36	1.029.631.473.221,94	86,76	-157.171.787.652,42
2020	1.105.166.576.137,54	1.026.932.400.770,59	92,92	-78.234.175.366,95
2021	1.019.618.461.467,32	955.956.405.192,69	93,76	-63.662.056.274,63
2022	1.090.512.850.566,00	1.060.499.402.627,54	93,90	-66.492.084.094,46

Sumber: BPKAD Kota Lubuk Linggau, 2023

Realisasi pendapatan daerah dapat kita lihat dari Tabel 3.1 pada tahun 2018 capaian realisasi anggaran Kota Lubuk Linggau 90,65 persen yang kemudian di Tahun 2019 menurun menjadi 86,76 persen dan kemudian di tahun 2020 kembali naik menjadi 92,92 persen. Selanjutnya terus meningkat di Tahun 2021 menjadi 93,76 persen dan di tahun 2022 menjadi 93,90 persen. Ditargetkan realisasi pendapatan daerah Kota Lubuk Linggau dapat terus meningkat, dengan capaian realisasi mencapai 100 persen atau pun lebih. Peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun pendapatan daerah yang sah lainnya.

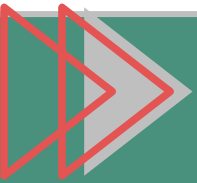
Berikut Gambar 3.1. menunjukkan grafik perkembangan capaian realisasi pendapatan daerah di Kota Lubuk Linggau tahun 2018-2022.

Gambar 3.1. Perkembangan Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022 (Rp. Juta)



Sumber: BPKAD Kota Lubuk Linggau, 2023

Untuk melihat laju pertumbuhan pendapatan daerah dilihat dari perkembangannya dengan menggunakan data realisasi pendapatan lima tahun ke belakang. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah periode tahun 2018 - 2022 disajikan pada Tabel 3.2. berikut ini.





Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022(dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
4	PENDAPATAN DAERAH	923.898.833.425,26	1.029.631.473.221,94	1.026.932.400.770,59	955.956.405.192,69	1.060.499.402.627,54
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	105.606.815.786,70	100.950.256.993,95	86.319.561.348,87	128.297.636.758,39	104.399.965.189,33
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	38.458.611.583,00	41.197.444.298,00	36.400.395.511,00	39.064.581.076,00	50.387.265.416,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	8.646.857.070,53	3.948.136.050,00	3.185.339.037,00	5.207.620.310	5.758.970.894,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	1.722.814.964,94	1.874.875.354,20	2.008.538.142,02	2.230.523.344	2.437.443.567,98
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	56.778.532.168,23	53.929.801.291,75	44.725.288.658,85	81.794.912.028	45.816.285.311,35
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	790.476.187.559,56	900.083.616.227,99	908.254.490.662,72	798.265.268.434,30	956.099.437.438,21
4 . 2 . 1	Transfer Pemerintah Pusat	706.155.116.266,00	763.615.315.295,00	747.054.536.129,00	689.461.712.478,00	806.854.254.743,00
4 . 2 . 3	Transfer Antar Daerah	66.571.071.293,56	112.098.408.032,99	63.192.608.214,00	108.803.555.956,30	149.245.182.695,21
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.815.830.079,00	28.597.600.000,00	32.358.348.759,00	29.393.500.000,00	-
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LRA	27.815.830.079,00	28.597.600.000,00	32.358.348.759,00	29.393.500.000	-

Sumber:BPKAD Kota Lubuk Linggau, 2023



PAD merupakan sumber pendapatan yang mengalami kenaikan dan penurunan dalam kurun waktu dari tahun 2018-2022. PAD dari tahun 2018 sebesar Rp.105.606.815.786,71 menurun di tahun 2019 menjadi Rp.100.950.256.993,95 dan terus menurun menjadi Rp.86.319.561.348,87 pada tahun 2020. PAD sempat mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp.128.297.636.758,39 kemudian di tahun 2022 menurun kembali sehingga PAD menjadi sebesar Rp. 104.399.965.189,33. Penurunan yang terjadi disebabkan dari jumlah Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD Yang Sah yang secara umum mengalami fluktuasi. Terjadi kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya.

Sumber pendapatan daerah Kota Lubuk Linggau dari Pendapatan transfer mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 sebesar Rp.790.476.187.559,56 dan terjadi kenaikan di tahun 2019 menjadi Rp.900.083.616.227,99. Pendapatan Transfer terus mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi Rp.908.254.490.662,72 namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp.798.265.268.434,30 dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi Rp. 956.099.437.438,21. Secara umum proporsi kontribusi Pendapatan transfer Kota Lubuk Linggau lebih dari 50 persen.

Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan tren pertumbuhan negatif selama periode 2018-2022. Lain-lain Pendapatan yang Sah memiliki proporsi kontribusi yang paling kecil. Pada tahun 2021, kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan daerah Kota Lubuk Linggau yaitu sebesar Rp.29.393.500.000,00. Sementara pada tahun 2022, tidak ada pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima oleh Kota Lubuk Linggau.

Meskipun perkembangan PAD menurun, sumber pendapatan ini memiliki posisi yang signifikan bagi struktur pendapatan daerah. Kuatnya peranan PAD dalam pembentukan pendapatan daerah mengindikasikan bahwa postur pendapatan daerah masih relatif kuat. Hal tersebut disebabkan pemanfaatan potensi-potensi daerah yang dimiliki telah dilakukan dengan semakin optimal.

Selanjutnya apabila dilihat dari segi pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan, diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami rata rata pertumbuhan yaitu 0,05 persen. Komponen Pendapatan Transfer memiliki rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,045 persen. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah secara umum terus mengalami penurunan. Pertumbuhan komponen Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.3.



Tabel 3.3. Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
4	Pendapatan	0,019	0,114	-0,003	-0,07	0,11	0,034
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-0,086	-0,044	-0,145	0,49	-0,19	0,005
4.2	Pendapatan Transfer	0,002	0,139	0,009	-0,12	0,20	0,045
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12,483	0,028	0,132	-0,09	-1,00	2,310

Sumber: BPKAD Kota Lubuk Linggau, 2023

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah terbagi atas empat komponen utama yaitu: a) Pajak Daerah; b) Retribusi Daerah; c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi PAD pada periode 2018-2022 tidak memenuhi target yang ditetapkan, pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp. 104.399.965.189,33. Struktur PAD Kota Lubuk Linggau dapat didasarkan pada persentase kontribusi masing-masing komponen (Tabel 3.4).

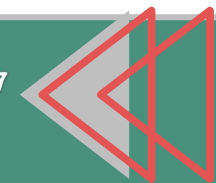
Tabel 3.4. Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	36,42%	40,81%	42,17%	30,45%	48,26%
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	8,19%	3,91%	3,69%	4,06%	5,52%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	1,63%	1,86%	2,33%	1,74%	2,33%
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	53,76%	53,42%	51,81%	63,75%	43,88%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Lubuk Linggau, 2018-2022; Hasil Olahan, 2023

Komponen PAD membentuk pola struktur PAD yang sama setiap tahunnya pada periode 2018-2022, meskipun masing-masing komponen mengalami fluktuasi persentase. Pola struktur PAD yang terbentuk pada periode 2018-2022 dengan urutan persentase paling tinggi ke paling rendah yaitu: 1) Pajak Daerah; 2) Lain-lain PAD yang Sah; 3) Retribusi Daerah; 4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Proporsi paling tinggi pada PAD Kota Lubuk Linggau adalah Pajak Daerah, yang berkontribusi sebesar 48 persen terhadap PAD pada tahun 2022. Proporsi Pajak Daerah pada tahun 2022 memiliki persentase paling tinggi pada periode 2018-2022. Selain Pajak Daerah, struktur PAD





Kota Lubuk Linggau disusun oleh komponen lain, yang diurutkan berdasarkan proporsi kontribusi terhadap PAD, yaitu Lain-lain PAD yang Sah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada tahun 2022, masing-masing komponen tersebut secara berturut-turut memiliki persentase sebesar 43,88 persen; 5,52 persen; dan 2,33 persen.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terbagi atas empat komponen utama yang meliputi: a) Transfer Pemerintah Pusat; b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya; c) Transfer Antar Daerah; dan d) Bantuan Keuangan. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan yang memegang peranan penting dalam struktur pendapatan daerah Kota Lubuk Linggau.

Struktur Pendapatan Transfer (Tabel 3.5.) menunjukkan proporsi masing-masing komponen penyusun Pendapatan Transfer Kota Lubuk Linggau. Transfer Pemerintah Pusat merupakan komponen utama dalam struktur Pendapatan Transfer Kota Lubuk Linggau, yang memiliki persentase paling tinggi pada periode 2018-2022. Pada tahun 2018, struktur Pendapatan Transfer Kota Lubuk Linggau disusun oleh 89,33 persen Transfer Pemerintah Pusat, 2,25 persen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan 8,95 persen Transfer Antar Daerah. Pada tahun 2022, proporsi Transfer Pemerintah Pusat meningkat menjadi 83,77 persen dan Transfer Antar Daerah meningkat menjadi 16,23 persen.

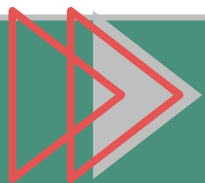
Tabel 3.5. Struktur Pendapatan Transfer Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Transfer Pemerintah Pusat	89,33	84,84	82,25	86,37	83,77
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	2,25	1,24	5,08	0	0
Transfer Antar Daerah	8,42	12,45	6,96	13,63	16,23
Bantuan Keuangan - LRA	0,00	1,47	5,71	0	0
PENDAPATAN TRANSFER	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Lubuk Linggau, 2018-2022; Hasil Olahan, 2023

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan yang Ditetapkan oleh Pemerintah (Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya).





Berdasarkan struktur Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Kota Lubuk Linggau berupa Pendapatan Hibah. Selama periode 2018-2022, Pendapatan Hibah paling besar diperoleh pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.32.358.348.759,00. Namun, pada tahun 2022 Kota Lubuk Linggau tidak memperoleh Pendapatan Hibah.

1) Belanja Daerah

Definisi Belanja Daerah menurut Permendagri 86 tahun 2017 adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan di masa mendatang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pada periode tahun 2018-2022, Pemerintah Kota Lubuk Linggau menetapkan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Arah kebijakan tersebut tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Lubuk Linggau tahun 2018-2023, yaitu 1) melaksanakan perencanaan penganggaran belanja berbasis kinerja dan 2) melaksanakan pengendalian belanja sesuai dengan dokumen anggaran. Pada periode 2018-2022, rata-rata capaian realisasi belanja Pemerintah kota Lubuk Linggau sebesar 89,92 persen. Hal ini menunjukkan masih adanya deviasi dari capaian realisasi belanja.

Besarnya deviasi capaian realisasi belanja perlu diperhatikan untuk setiap tahun anggaran. Hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan antara lain: 1) penentuan target yang perlu direncanakan dengan baik, misalnya terkait capaian tahun sebelumnya, besarnya anggaran dan rencana alokasinya; serta 2) optimalisasi realisasi belanja daerah, khususnya untuk pelaksanaan program maupun kegiatan. Capaian yang baik adalah berada di sekitar 100 persen, mengindikasikan capaian yang optimal. Capaian tertinggi belanja daerah Kota Lubuk Linggau pada periode 2018-2022 yaitu sebesar 92,70 persen di tahun 2020. Meskipun dengan persentase capaian bervariasi, realisasi belanja daerah maupun target yang ditetapkan terus meningkat. Tabel 3.6. berikut menunjukkan capaian target belanja daerah di Kota Lubuk Linggau.

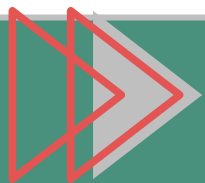


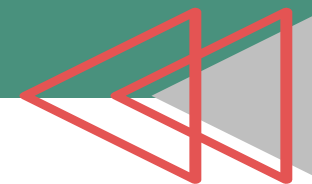


Tabel 3.6. Capaian Target Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah/Berkurang
2018	949.569.693.009,46	859.504.888.223,19	90,52	-90.064.804.786,27
2019	1.096.836.419.208,00	944.032.235.462,00	86,07	-152.804.183.746,00
2020	1.100.499.658.230,36	1.020.121.040.765,77	92,70	-80.378.617.464,59
2021	1.221.533.477.164,96	948.463.242.185,50	77,65	-273.070.234.979,46
2022	1.223.959.581.971,00	1.162.820.849.448,20	95.00	-61.138.732.522,80

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Lubuk Linggau, 2018-2022;
Hasil Olahan, 2023

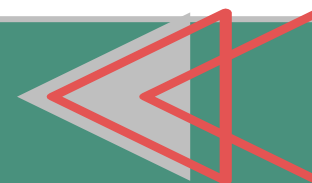




Tabel 3.7. Realisasi Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
BELANJA	859.504.888.223,19	944.032.235.462,40	1.020.121.040.765,77	948.463.242.185,50	1.162.820.849.448,20
BELANJA OPERASI	649.516.620.490,95	689.059.769.341,40	649.922.142.865,50	616.328.781.044,50	733.970.779.361,20
Belanja Pegawai	366.776.538.867,75	396.166.114.692,70	378.828.322.491,00	346.392.440.564,00	359.220.909.073,00
Belanja Barang dan Jasa	209.552.325.504,20	264.270.159.798,70	245.541.364.231,50	257.384.866.728,50	325.350.180.851,20
Belanja Bunga	-	-	-	-	7.315.243.513,00
Belanja Hibah	72.654.474.319,00	28.180.558.850,00	25.369.353.143,00	12.486.473.752,00	38.608.945.924,00
Belanja Bantuan Sosial	533.281.800,00	442.936.000,00	183.103.000,00	65.000.000,00	3.475.500.000,00
BELANJA MODAL	209.920.267.732,24	254.283.952.721,00	334.867.453.980,27	331.394.237.141,00	428.202.927.087,00
Belanja Modal Tanah	3.432.258.685,00	2.921.634.346,00	4.180.671.710,00	-	8.322.213.959,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.161.722.679,99	42.104.479.952,00	41.511.737.266,00	34.974.246.850,00	25.905.888.028,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.186.744.876,00	71.321.586.061,00	93.220.271.633,27	59.810.307.168,00	47.779.448.452,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	127.461.601.491,25	132.846.066.508,00	192.349.210.115,00	228.810.890.667,00	336.645.742.957,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	677.940.000,00	5.090.185.854,00	3.605.563.256,00	7.798.792.456,00	9.549.633.691,00
BELANJA TAK TERDUGA	68.000.000,00	217.500.000,00	35.331.443.920,00	740.224.000,00	647.143.000,00
Belanja Tak Terduga	68.000.000,00	217.500.000,00	35.331.443.920,00	740.224.000,00	647.143.000,00
BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	490.314.000,00	471.013.400,00	497.591.600,00	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	490.314.000,00	471.013.400,00	497.591.600,00	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Lubuk Linggau, 2018-2022





Berdasarkan Tabel 3.7. dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah Kota Lubuk Linggau periode tahun 2018-2022 berfluktuasi setiap tahunnya. Fluktuasi realisasi belanja ini dipengaruhi oleh fluktuasi realisasi belanja yang disajikan pada Tabel 3.7. Realisasi belanja tertinggi terjadi pada Tahun 2022 senilai Rp.1.162.820.849.448,20. Sedangkan realisasi belanja terendah terjadi pada tahun 2018 senilai Rp.859.504.888.223,19.

Dilihat dari rata-rata pertumbuhan, secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan per tahun belanja daerah Kota Lubuk Linggau periode tahun 2018-2022 sebesar 5,66 persen dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Operasi sebesar 2,19 persen, rata-rata pertumbuhan Belanja Modal sebesar 13,91 persen, rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Terduga sebesar 3.233,62 persen, dan rata-rata pertumbuhan Belanja Transfer Bantuan Keuangan sebesar -19,66 persen. Bila ditinjau dari proporsi belanja daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, persentase komponen Belanja Operasi Kota Lubuk Linggau memiliki proporsi belanja daerah tertinggi yaitu sebesar 75,57 persen di tahun 2018, dimana penggunaan paling besar adalah pada komponen Belanja Pegawai.

Pada tahun 2018-2022 Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau didominasi oleh Belanja Operasi dengan rata-rata realisasi sebesar 93,63 persen. Untuk perkembangan realiasi Belanja modal pada kurun waktu tahun 2018-2022 rata-rata nya sebesar 81,62 persen. Proporsi belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 32,83 persen. Lebih lanjut rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

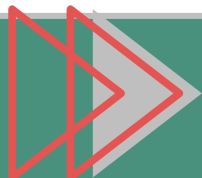
**Tabel 3.8. Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau
Tahun 2018-2022**

Uraian	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
Belanja	-0,013	0,098	0,081	-0,07	0,23	0,064
Belanja Operasi	0,026	0,061	-0,057	0,05	0,19	0,034
Belanja Modal	-0,114	0,211	0,317	-0,01	0,29	0,139
Belanja Tak Terduga	-0,856	2,199	161,443	-0,98	-0,13	32,336
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	-	-0,039	0,056	-1,00	-	-0,197

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Lubuk Linggau, 2018-2022; Hasil Olahan, 2023

c. Pembiayaan Daerah

Definisi Pembiayaan Daerah dalam Permendagri 86 tahun 2017 adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran





yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sama halnya dengan analisis belanja daerah, analisis terhadap pembiayaan daerah dilakukan sebagai bahan penentuan kebijakan pembiayaan di masa mendatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

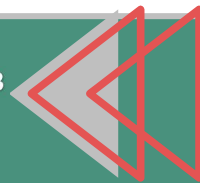
Pembiayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lubuk Linggau meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah selama periode 2018-2022 sangat fluktuatif, hal ini disebabkan karena faktor pembayaran hutang (*carry over*) dana bagi hasil migas dari pusat yang berfluktuasi setiap tahunnya, hal ini mengakibatkan perencanaan pembiayaan untuk tahun selanjutnya menjadi fluktuatif.

Perkembangan pembiayaan netto Kota Lubuk Linggau periode 2018-2022 ditunjukkan pada Tabel 3.9. Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nominal pembiayaan netto yang positif menunjukkan bahwa daerah mampu mencukupi pengeluaran pembiayaan dikarenakan penerimaan pembiayaan yang lebih besar. Secara umum, pembiayaan netto di Kota Lubuk Linggau selama tahun 2018 hingga 2022 selalu menunjukkan capaian positif. Capaian pembiayaan netto mencapai 100 persen. Pada tahun 2018, capaian sebesar 90,50 persen. Pada tahun 2022, capaian meningkat menjadi 100 persen. Tabel 3.9. berikut ini menunjukkan perkembangan pembiayaan di Kota Lubuk Linggau pada 2018-2022.

**Tabel 3.9. Capaian Target Pembiayaan Daerah (Pembiayaan Netto)
Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022**

Tahun	Target	Realisasi	%	Bertambah/Berkurang
2018	-69.144.327.085,79	-62.580.170.070,79	90,51	6.564.157.015,00
2019	-89.966.841.666,72	-84.766.841.666,72	94,22	5.200.000.000,00
2020	-4.167.603.907,18	-4.167.603.907,18	100,00	-
2021	-201.915.015.697,64	-20.485.015.697,64	10,15	181.430.000.000,00
2022	133.446.731.404,83	133.446.731.404,83	100,00	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Lubuk Linggau, 2018-2022;
Hasil Olahan, 2023



Tabel 3.10. Perkembangan pembiayaan di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.694.369.334,21	1.323.461.131,00	832.396.092,82	20.716.265.697,64	133.446.731.404,83
Penggunaan SiLPA	1.694.369.334,21	1.323.461.131,00	832.396.092,82	2.146.265.697,64	27.978.178.704,83
Penerimaan Kembali Piutang	-	-	-	18.570.000.000,00	105.468.552.700,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	64.274.539.405,00	86.090.302.798,00	5.000.000.000,00	231.250.000,00	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	9.550.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	63.274.539.405,00	76.540.302.798,00	-	231.250.000,00	-
PEMBIAYAAN NETTO	-62.580.170.070,79	-84.766.841.667,00	-4.167.603.907,18	20.485.015.697,64	133.446.731.404,83

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Lubuk Linggau, 2018-2022;
Hasil Olahan, 2023



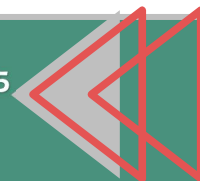
3.1.2. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan *good government governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

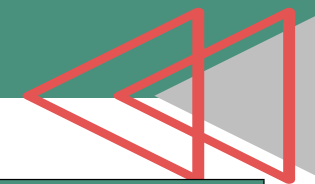
Sesuai dengan ketentuan Permendagri No 86 Tahun 2017 Analisis neraca daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang.

Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dapat dikonversi menjadi kas. Neraca Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau periode 2018-2022 dan rata-rata pertumbuhan disajikan pada tabel 3.11 berikut ini.

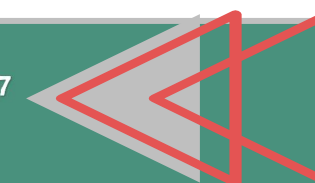


Tabel 3.11.
Neraca Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	143.820.286,11	57.330.926,55	61.967.593,37	224.311.087,56	-
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368.763.132,83
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.363.394,00	34.666.146,00	268.000,00	1.695.027,00	0,00
Kas di BLUD	774.250.183,07	615.197.752,07	1.524.576.730,07	27.431.323.216,07	4.412.800.866,61
Kas Dana BOS	95.699.690,00	27.082.743,00	8.978.759,00	296.352.670,00	11.940.244,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	309.100.353,10	42.209.554,00	414.686.565,00	15.941.945,20	2.000.000.000,00
Kas Lainnya	14.776.314,00	82.991.713,70	136.212.050,20	1.111.374.865,00	82.888.606.700,50
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802.857.623,81
Piutang Pajak Daerah	7.524.623.828,00	9.444.682.150,00	12.235.830.798,00	15.686.217.568,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	7.539.803.503,82	8.372.920.879,00	0,00	0,00	(31.725.777.942,84)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.144.642,48
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.536.340.488,00	12.073.428.965,00	20.695.855.637,00	4.165.596.207,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat				0,00	37.231.584.826,85
Piutang Transfer Antar Daerah	51.196.630.502,99	4.392.538.881,00	4.410.212.663,00	6.291.729.571,00	1.084.016.216.891,04
Piutang Lainnya	1.222.931.150,00	13.053.223.515,33	178.260.255,00	19.612.105.859,00	0,00
Penyisihan Piutang	(2.136.725.782,11)	(3.740.362.682,14)	(6.410.869.805,34)	-6.197.910.938,55	2.092.056.977,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	13.194.595,00	0,00	1.243.474.850.543,37

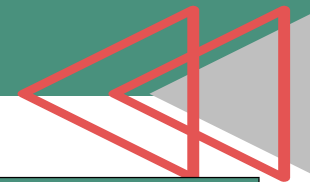


URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Persediaan	7.859.023.091,40	21.610.002.117,22	19.493.913.081,88	22.908.428.992,53	2.674.484.770.948,95
JUMLAH ASET LANCAR	88.083.637.002,38	66.065.912.660,73	53.802.360.600,18	91.547.166.069,81	87.459.809.642,25
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.698.014.149.307,37)
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228.463.863.931,18
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	370.017.129,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal	49.258.013.262,58	58.177.890.768,47	68.924.923.992,23	94.303.403.512,64	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	0,00	0,00	0,00	219.771.380.872,04
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	49.258.013.262,58	58.177.890.768,47	68.924.923.992,23	94.303.403.512,64	8.136.627.143.180,89
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	49.258.013.262,58	58.177.890.768,47	68.924.923.992,23	94.303.403.512,64	0,00
ASET TETAP					
Tanah	137.918.167.821,00	182.460.850.333,00	470.354.724.492,60	546.595.906.680,60	0,00
Peralatan dan Mesin	365.127.786.460,60	405.118.947.384,60	460.646.981.380,60	501.190.177.339,60	123.594.091.208,00
Gedung dan Bangunan	825.389.430.084,30	922.596.184.268,23	976.166.471.087,23	1.092.643.407.580,93	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.948.713.944.412,37	2.123.464.962.782,49	2.289.762.087.976,37	2.519.304.873.328,16	0,00



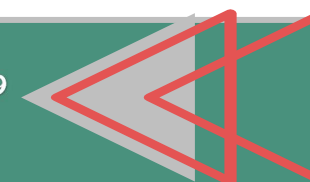
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Aset Tetap Lainnya	35.012.393.748,91	43.259.694.658,91	47.377.432.765,91	52.389.148.965,91	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	35.524.004.085,73	38.106.651.058,57	61.702.505.629,70	20.001.407.681,00	95.866.346.046,00
Akumulasi Penyusutan	(1.084.665.068.924,35)	(1.295.920.237.625,47)	(1.524.523.996.844,09)	-1.750.100.719.374,10	0,00
JUMLAH ASET TETAP	2.263.020.657.688,56	2.419.087.052.860,33	2.781.486.206.488,32	2.982.024.202.202,10	0,00
DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	9.556.250,00	12.347.916,67	12.750.000,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00-	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.645.640.858,00	2.003.286.887,50	5.925.805.795,99	18.604.321.510,00	0,00
Aset Lain-lain	18.644.718.413,20	19.373.465.734,08	17.588.434.033,98	18.398.653.690,62	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	-13.546.168.691,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-1.940.825.658,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	21.299.915.521,20	21.389.100.538,25	23.526.989.829,97	21.515.980.851,62	0,00
JUMLAH ASET	2.421.662.223.474,72	2.564.719.956.827,78	2.927.740.480.910,70	3.189.390.752.636,17	0,00
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.772.775,00	0,00	424.000,00	424.000,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	14.598.083,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	101.833.333,33	41.666.666,66	21.666.666,66	18.333.333,34	0,00



URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Utang Belanja	32.354.277.775,00	36.392.721.794,00	34.381.394.122,00	58.746.956.371,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	64.838.451.274,00	64.317.823.134,39	28.980.963.778,00	63.710.215.225,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	97.297.335.157,33	100.752.211.595,05	63.384.448.566,66	122.490.527.012,34	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang kepada Pemerintah Pusat	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0,00	0,00	18.570.000.000,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0,00	0,00	18.570.000.000,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	97.297.335.157,33	100.752.211.595,05	63.384.448.566,66	141.060.527.012,34	0,00
EKUITAS					
EKUITAS	2.324.364.888.317,39	2.463.967.745.232,73	2.864.356.032.344,04	3.048.330.225.623,83	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.421.662.223.474,72	2.564.719.956.827,78	2.927.740.480.910,70	3.189.390.752.636,17	0,00

Sumber: BPKAD Kota Lubuk Linggau, 2023





3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

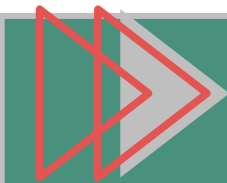
Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kota Lubuk Linggau, khususnya belanja pegawai (aparatur). Proporsi belanja aparatur dapat menunjukkan apakah penggunaan anggaran keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi belanja aparatur maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah proporsi belanja aparatur maka semakin tinggi penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah atau pelayanan publik. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah. Tabel 3.12. berikut menunjukkan proporsi belanja kebutuhan aparatur di Kota Lubuk Linggau.

Tabel 3.12. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022

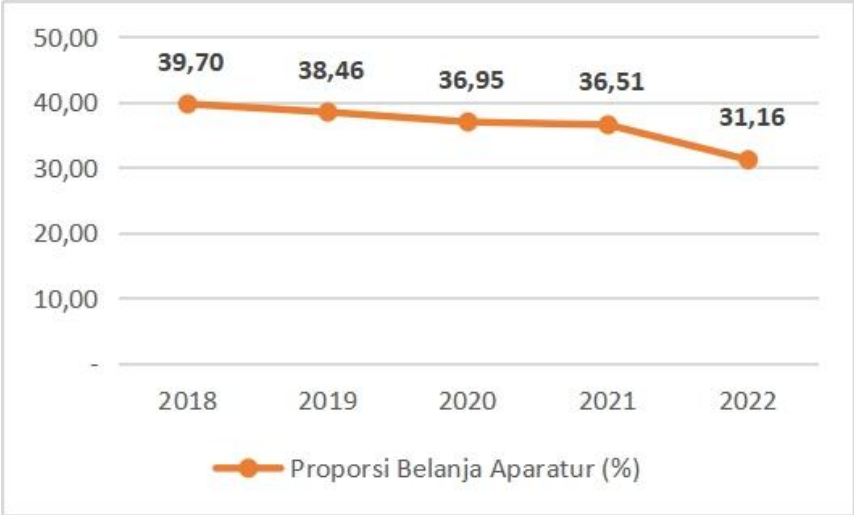
Tahun	Belanja Aparatur (Rupiah)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Proporsi Belanja Aparatur (%)
2018	366.776.538.867,75	923.779.427.628,19	39,70
2019	396.166.114.692,70	1.030.122.538.260,00	38,46
2020	378.828.322.491,00	1.025.121.040.765,77	36,95
2021	346.392.440.564,00	948.694.492.185,50	36,51
2022	351.095.384.377,00	1.162.820.849.448,20	31,16

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Lubuk Linggau, 2018-2022; Hasil Olahan, 2023.

Pada tahun 2022, jumlah Belanja Aparatur sebesar 351,095 miliar rupiah. Berdasarkan proporsi belanja aparatur terhadap total belanja, menunjukkan tren negatif yang berarti Belanja Aparatur semakin menurun. Hal tersebut mengindikasikan kemajuan yang baik dalam hal peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan pembangunan daerah. Proporsi Belanja Aparatur Kota Lubuk Linggau berada kurang dari 50 persen. Pada tahun 2018, proporsi Belanja Aparatur sebesar 39,70 persen, terus menurun menjadi 38,46 persen pada tahun 2019 dan 36,95 persen pada tahun 2020. Penurunan proporsi Belanja Aparatur paling besar adalah pada 2021-2022, yaitu menurun sebesar 5,35 persen. Secara diagramatis, perkembangan proporsi belanja aparatur ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Perkembangan Proporsi Belanja Aparatur Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2018-2022



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Lubuk Linggau, 2018-2022; Hasil Olahan, 2023.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kota Lubuk Linggau ditinjau berdasarkan surplus atau pun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Tabel 3.13. menunjukkan analisis pembiayaan yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pengeluaran pembiayaan daerah, dan surplus/ defisit di Kota Lubuk Linggau.

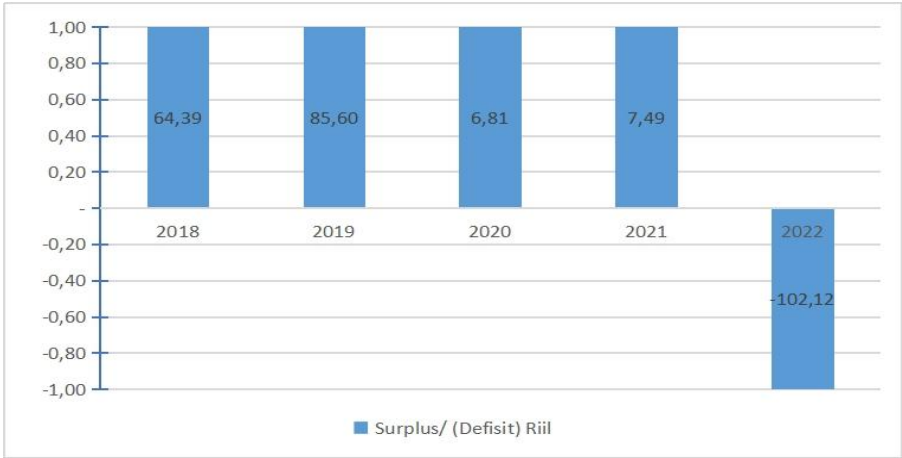
Tabel 3.13. Defisit dan Surplus Anggaran Kota Lubuk Linggau Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	923.898.833.425,26	1.029.631.473.222	1.026.932.400.770,59	955.956.405.193	1.060.499.402.627,54
2.	Belanja Daerah	859.504.888.223,19	944.032.235.462,00	1.020.121.040.765,77	948.463.242.185,50	1.162.820.849.448,20
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	64.274.539.405,00	86.090.302.798,00	5.000.000.000,00	231.250.000,00	133.446.731.404,83
	Surplus/ (Defisit) Riil	64.393.945.202,07	85.599.237.759,94	6.811.360.004,82	7.493.163.007,19	-102.321.446.820,66

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Lubuk Linggau, 2018-2022;
Hasil Olahan, 2023.

Kondisi keuangan daerah Kota Lubuk Linggau pada periode 2018-2022 mengalami empat kali surplus riil dan satu kali defisit riil berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus anggaran terjadi pada tahun 2018-2021 sedangkan defisit anggaran terjadi pada tahun 2022. Kondisi surplus dan defisit anggaran daerah Kota Lubuk Linggau ditunjukkan pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3. Dinamika Surplus dan Defisit Anggaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2018 - 2022 (Milyar Rupiah)



Sumber: BPKAD Kota Lubuk Linggau, 2023 (diolah)

Defisit riil dapat ditutupi dengan berbagai komponen, yaitu SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah. Komponen-komponen tersebut termasuk dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah. Defisit riil di Kota Lubuk Linggau dapat dipenuhi dengan SiLPA. Hal tersebut disebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya memiliki proporsi dari total defisit riil sebesar lebih dari 100 persen.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Lubuk Linggau terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kota Lubuk Linggau bergantung pada anggaran selama tiga tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang.

Dalam kerangka pendanaan pembangunan tahun 2024 -2026 diarahkan untuk penyelarasan dan sinergi, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan

pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kota Lubuk Linggau memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Arah dan Kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, yaitu dengan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

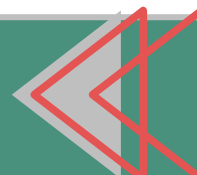
- a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah yaitu dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
- b. Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- c. Penganggaran berbasis kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Kota Lubuk Linggau secara konsisten dan



berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit dua persen dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Kota Lubuk Linggau secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal sepuluh persen dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diproyeksikan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan daerah yang disinkronisasikan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional, mendanai pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Dalam rangka menutup kekurangan arus kas Pemerintah Kota Lubuk Linggau, salah satu kebijakan pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Lubuk Linggau menetapkan target penerimaan pada komponen Pinjaman Daerah. Anggaran tersebut akan di peruntukan untuk membiayai sektor pelayanan publik. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah, seperti target peningkatan PAD, rencana investasi, dan lain sebagainya. Perkiraan pendapatan daerah disajikan secara indikatif dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Proyeksi keuangan Kota Lubuk Linggau 2024-2026 ditunjukkan pada tabel berikut.



Tabel 3.14.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024-2026 Kota Lubuk Linggau

Kode Rekening	Uraian	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	890.995.702.958,58	912.279.146.006,36	934.161.434.364,53
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	115.450.966.287,00	121.223.514.601,35	127.284.690.331,42
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	54.546.946.287,00	57.274.293.601,35	60.138.008.281,42
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.529.020.000,00	7.905.471.000,00	8.300.744.550,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	1.850.000.000,00	1.942.500.000,00	2.039.625.000,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	51.525.000.000,00	54.101.250.000,00	56.806.312.500,00
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	775.544.736.671,58	791.055.631.405,01	806.876.744.033,11
4 . 2 . 1	Transfer Pemerintah Pusat	697.951.017.060,00	711.910.037.401,20	726.148.238.149,22
4 . 2 . 2	Transfer Antar Daerah	77.593.719.611,58	79.145.594.003,81	80.728.505.883,89
5	BELANJA	778.786.978.831,00	798.526.247.396,23	818.833.477.782,19
5 . 1	BELANJA OPERASI	740.404.207.271,06	707.469.477.416,48	724.158.866.964,81
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	430.217.380.371,24	438.821.727.978,67	447.598.162.538,24
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.831.126.899,82	245.647.749.437,82	250.560.704.426,57
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	58.355.700.000,00	12.000.000.000,00	15.000.000.000,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5 . 2	BELANJA MODAL	35.822.771.559,94	88.496.769.979,75	92.114.610.817,38
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah		-	-
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000.000,00	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.822.771.559,94	58.496.769.979,75	56.114.610.817,38
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	22.000.000.000,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2025	2026
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	2.560.000.000,00	2.560.000.000,00	2.560.000.000,00
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	2.560.000.000,00	2.560.000.000,00	2.560.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(35.000.000.000,00)	(35.000.000.000,00)	(35.000.000.000,00)
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00
6 . 2 . 3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00

Sumber: BPKAD Kota Lubuk Linggau, 2023

Target APBD Kota Lubuk Linggau pada periode 2024-2026 direncanakan seperti pada Tabel 3.14. pada kerangka pendanaan Rencana Pembangunan Daerah ini secara garis besar dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2024 sampai dengan 2026 merupakan kerangka target indikatif APBD dalam mendanai program pembangunan daerah tahun 2024 sampai dengan 2026. Rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode 2024-2026 tersebut direncanakan sebesar 5 persen. Rencana kenaikan tersebut masih didominasi oleh pajak daerah. Pajak daerah sebagai sumber utama pendapatan asli daerah di kota Lubuk Linggau direncanakan untuk naik rata-rata 5 persen setiap tahunnya.

Kontribusi terbesar dari pajak tersebut masih diharapkan dari pajak hotel dan restoran. Sektor pajak lain yang diperkirakan naik adalah pajak parkir. Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebenarnya bisa menjadi sumber pendapatan yang baru sebagai akibat dari kenaikan kelas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, besarnya permintaan keringanan pajak dari masyarakat membuat sektor pajak ini sulit untuk ditargetkan untuk naik. Pajak BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang selama ini menjadi salah satu sumber PAD yang cukup besar diperkirakan tidak berkembang dikarenakan pemindahan hak atas tanah dan bangunan pada tahun sebelumnya cukup banyak terjadi.

Berdasarkan data pada periode 2018-2023, sektor pajak lain masih diperkirakan stagnan. Dari sektor retribusi, yang diprediksi akan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 5 persen per tahun. Kenaikan yang relatif kecil tersebut diasumsikan pada kenaikan tarif yang tidak bisa besar karena lebih memprioritaskan pelayanan pada masyarakat.

Data PAD pada Tabel 3.13. menunjukkan adanya kenaikan PAD dari tahun 2021 ke 2022. Hal ini disebabkan adanya kenaikan pada pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Walaupun mengalami penurunan pada tahun 2022, pada periode 2024-2026 nilai hasil Lain-lain PAD Yang Sah diprediksi mengalami kenaikan 5 persen.

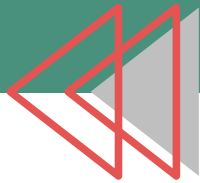
Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada periode 2024-2026 diprediksi pada angka 1,67 persen. Hal ini disebabkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mendapatkan refocusing anggaran dari pemerintah pusat dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang mengakibatkan pengurangan alokasi DAU, DBH dan DAK yang merupakan komponen dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Kedepan perlu diantisipasi dampak dari kebijakan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mengakibatkan pembagian dana transfer ke pemerintah Daerah mengalami penurunan, serta potensi DBH dari SDA berikut turunannya belum dioptimalkan dan sebagian besar bukan merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah.

Dari segi belanja, belanja daerah Kota Lubuk Linggau pada periode 2024-2026 diprediksi mengalami kenaikan, dengan rata-rata kenaikan 2,54 persen per tahun. Secara keseluruhan APBD Kota Lubuk Linggau 2024-2026, defisit belanja belanja dapat ditutup dari besarnya penerimaan pembiayaan. Besarnya penerimaan



pembiayaan, memungkinkan Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk melakukan investasi dengan melakukan penyertaan modal terhadap Badan Usaha Milik Daerah. Secara umum, SiLPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya) menunjukkan tren yang naik.





BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Kota Lubuk Linggau

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

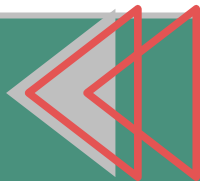
Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

4.1.1. Pembangunan Sosial Budaya dan Umat Beragama

A. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana; peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi. Di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pencapaian target RPD mampu dicapai dengan baik, namun masih terdapat indikator yang realisasinya masih rendah, yaitu indikator akta kematian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian kepada pemerintah.

Di bidang Keluarga Berencana, upaya untuk meningkatkan kesertaan ber-KB perlu ditingkatkan dalam hal akses dan kualitas pelayanan KB yang merata. Permasalahan pelayanan KB antara lain kurang optimalnya petugas lapangan dalam melakukan penyuluhan tentang kesadaran dalam ber-KB; ketersediaan sarana dan prasarana KB di klinik KB dan kendaraan pelayanan KB keliling tidak didukung oleh rasio prasarana pelayanan KB yang masih di bawah target; pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak masih belum optimal; serta masih rendahnya keikutsertaan atau partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB.



B. Kesehatan

Dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan yaitu agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan diantaranya melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, meskipun pada kenyataannya pelayanan kesehatan masih belum dapat memuaskan masyarakat. Ditinjau dari beberapa indikator, pembangunan kesehatan telah menunjukkan keberhasilan antara lain meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian bayi.

Namun, beberapa permasalahan masih ditemukan di Kota Lubuk Linggau dalam penyelenggaraan urusan kesehatan. Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan sebagai berikut:

1. Angka Kematian Ibu masih tinggi

Menurut *World Health Organization* (WHO), kematian ibu atau maternal death menurut adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh kejadian yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Sementara menurut Badan Pusat Statistik, Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Meskipun mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya, namun Angka Kematian Ibu tahun 2022 masih cukup tinggi, yaitu sebesar 46,2 per 100.000 kelahiran hidup dan tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Beberapa faktor penyebab kematian ibu hamil diantaranya kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi; kehamilan yang tidak diinginkan sehingga tidak mengakses layanan kesehatan untuk pemeriksaan; masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk mengakses pelayanan ANC (*Antenatal Care*); dan belum optimalnya sistem rujukan maternal neonatal.

Dalam rangka pencegahan kematian ibu diperlukan kerjasama yang sinergis dari berbagai sektor mengingat banyaknya kematian ibu hamil. Pemerintah Kota Lubuk Linggau pun terus berupaya dalam mengurangi angka kematian ibu dimulai dari peningkatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga, pemenuhan kebutuhan



gizi ibu hamil, sampai dengan peningkatan penyediaan alat fasilitas kesehatan secara merata.

2. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat masih rendah

Secara umum, jika dilihat dari capaian SPM Bidang Kesehatan, cakupan pelayanan kesehatan di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2022 masih di bawah 100 persen. Beberapa pelayanan kesehatan cakupan pelayanannya masih tergolong rendah, yaitu di bawah 70 persen. Pelayanan kesehatan tersebut diantaranya adalah pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV).

Cakupan pelayanan kesehatan yang masih belum optimal dapat menghambat pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi penyakit dini. Lebih lanjut, rendahnya cakupan pelayanan kesehatan sangat berdampak pada pencapaian keberhasilan pelaksanaan program kegiatan urusan kesehatan Kota Lubuk Linggau. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya cakupan pelayanan kesehatan diantaranya adalah belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, dan masih rendahnya kompetensi tenaga kesehatan.

3. Masih ada kasus balita gizi buruk

Jumlah balita yang mengalami gizi buruk pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Berdasarkan Data Stunting, pada tahun 2022 terdapat balita gizi buruk sebanyak 7 (tujuh) anak. Hal ini disebabkan kurang optimalnya pemantauan pertumbuhan sehingga *early warning* balita yang mengalami 2 kali turun (2T) tidak berjalan optimal sebagai upaya pencegahan gizi buruk. Masih adanya balita gizi buruk mengindikasikan belum optimalnya kualitas kesehatan. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan balita.

4. Masih tingginya angka kesakitan

Menurut Badan Pusat Statistik, Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang menderita sakit terhadap total penduduk. Menderita sakit adalah mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya). Indikator ini dapat



dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu.

Angka kesakitan Kota Lubuk Linggau pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021, semula 10,37 menjadi 10,89. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

C. Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Permasalahan yang masih terdapat dalam penyelenggaraan urusan pendidikan diantaranya masih adanya anak putus sekolah. Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Lubuk Linggau. Penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Sasaran pembangunan di bidang pendidikan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Keberhasilan pembangunan pendidikan di Kota Lubuk Linggau antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk buta huruf, meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun dan pendidikan lanjutan serta berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Permasalahan pendidikan di Kota Lubuk Linggau ditandai dengan masih kurangnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana prasarana, dan operasional sekolah dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan pendidikan adalah pendidikan moral baik itu tenaga pendidik dan murid itu sendiri. Kurangnya etos kerja tenaga pendidik dan kurikulum yang diterapkan tidak sesuai dengan kondisi yang ada juga menjadi kendala dalam pembangunan bidang pendidikan.

Indikator pembangunan pendidikan lainnya yang tidak kalah penting di Kota Lubuk Linggau adalah terkait Pendidikan Anak Usia Dini



(PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK). Permasalahan dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan PAUD/TK adalah tidak meratanya lembaga PAUD/TK yang ada di setiap kelurahan serta kurang partisipasinya orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

D. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan generasi penerus, penanggungjawab dan pelaku pembangunan bangsa di masa depan. Selain itu, pemuda juga potensial untuk menopang produktivitas nasional, terutama terkait dengan pemanfaatan peluang bonus demografi. Pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kota Lubuk Linggau sudah cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Tidak adanya regulasi tentang pengelolaan pengembangan sarana dan prasarana olahraga; 2) Belum adanya surat pengesahan/ pelimpahan kewenangan pengelolaan asset; 3) Kurangnya standardisasi dan sertifikasi terkait pelatih dan official; 4) Kurangnya kompetisi SDM mengenai iptek olahraga; 5) Belum adanya regulasi yang mengatur tentang olahraga berkelanjutan; 6) SDM pegawai yang masih sangat kurang; 7) Belum berjalannya kemitraan dibidang olahraga dan kepemudaan; 8) Masih kurangnya keterampilan dan kecakapan pemuda; dan 9) Maraknya masalah sosial kepemudaan.

E. Kebudayaan

Kebudayaan harus dikembangkan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa. Berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya karakter dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman dan kearifan lokal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Namun dalam pencapaian target pembangunan masih ditemukan permasalahan diantaranya, kegiatan seni budaya yang masih didominasi oleh pertunjukan seni, sedangkan yang bersifat kajian masih sangat minim. Selain itu, tempat pertunjukan seni belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.

F. Keagamaan

Kerukunan umat beragama mencakup toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama. Secara umum, kondisi kerukunan umat beragama di Kota Lubuk Linggau sudah cukup baik. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna mendukung peningkatan kerukunan umat beragama, diantaranya melalui pembinaan pendidikan agama dan organisasi serta peningkatan sarana dan prasarana peribadatan. Namun



fasilitasi kegiatan keagamaan masih belum optimal dan kurangnya perawatan terhadap sarana dan prasarana peribadatan itu sendiri.

G. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) masih terbatas dan pemberdayaan perempuan belum optimal. Walaupun berbagai kemajuan telah dicapai dalam peningkatan kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan belum optimal, yang antara lain ditunjukkan dengan lambatnya peningkatan nilai indeks pemberdayaan gender (IPG) setiap tahunnya. Adapun permasalahan terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dijabarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender, meliputi:
 - a. Penganggaran responsif gender yang masih kecil bila dibandingkan dengan total anggaran belanja langsung perangkat daerah;
 - b. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam legislatif;
 - c. Rendahnya produktifitas pelaku ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki;
 - d. Belum optimalnya peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan perempuan.
2. Permasalahan berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, meliputi:
 - a. Belum optimalnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pada lembaga perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Belum optimalnya kemitraan antara DPPPAPM, masyarakat dan institusi lainnya dalam pencegahan korban dan pemberian layanan kepada masyarakat korban kekerasan.
3. Permasalahan berkaitan dengan tumbuh kembang anak, meliputi:
 - a. Peningkatan capaian status kota layak anak yang belum optimal;
 - b. Kurang optimalnya sinergi lintas institusi, baik pemda, masyarakat maupun dunia usaha dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak, terutama penanganan anak-anak terlantar, anak jalanan dan anak disabilitas;
 - c. Belum optimalnya pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pada lembaga forum anak di setiap jenjang;
 - d. Masih butuhnya peningkatan partisipasi dan keterlibatan anak dalam penentuan kebijakan daerah terkait dengan pemenuhan hak anak,



4. Permasalahan berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga, meliputi:
 - a. Belum optimalnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pada lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
 - b. Belum optimalnya sosialisasi akan keberadaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
5. Permasalahan berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, meliputi:
 - a. Belum optimalnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pada lembaga kemasyarakatan, sehingga fungsi lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah daerah belum sepenuhnya berjalan; dan
 - b. Belum optimalnya kerjasama antar elemen ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dunia usaha dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan kekompakan guna memajukan daerah.

4.1.2. Pembangunan Ekonomi

A. Stabilitas Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Lubuk Linggau selama periode 2018-2022 menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kota Lubuk Linggau tumbuh diangka 3,15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi akibat pandemic COVID-19 perlahan mulai menunjukan tren positif di bandingkan dengan tahun 2020. Kemudian di tahun 2022, Kota Lubuk Linggau mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,51 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat yang semakin membaik.

Dalam konteks pembangunan daerah, stabilitas ekonomi merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*). Stabilitas ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi di daerah. Selama periode 2018-2022, perekonomian Kota Lubuk Linggau ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan riil sektor ekonomi dari tahun ke tahun yang selalu meningkat. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan daerah yang semakin baik. Selain itu, peningkatan tersebut mengindikasikan kondisi perekonomian Kota Lubuk Linggau yang semakin pulih dari pengaruh krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia pada umumnya.

Selama periode 2018-2022, struktur ekonomi Kota Lubuk Linggau masih didominasi oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil



dan sepeda motor serta kegiatan konstruksi. Meskipun lapangan usaha ini secara berturut-turut di tahun 2019 dan tahun 2020 atau pada saat krisis COVID-19 pertumbuhannya berkontraksi minus 2,89 persen dan minus 0,51 persen namun kontribusi dari lapangan usaha ini masih di atas 20 persen dari total PDRB Kota Lubuk Linggau.

Dari sisi inflasi, secara umum laju inflasi di Kota Lubuk Linggau dari tahun 2018 sampai 2021 memiliki tren yang terus menurun. Namun pada tahun 2022, inflasi Kota Lubuk Linggau meningkat hingga mencapai 5,83 persen, mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 4,2 persen. Meningkatnya nilai inflasi di tahun 2022 menunjukkan meningkatnya permintaan dan daya beli selama masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Tingginya inflasi di tahun 2022 menunjukkan naiknya permintaan dan daya beli setelah pandemi COVID-19, hal ini juga menunjukkan bahwa ekonomi mengalami pertumbuhan.

Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang yang tidak sama dengan daerah lain. Dengan kata lain, masing-masing daerah mempunyai sektor perekonomian unggulan yang berbeda dengan daerah lain. Hal ini berdampak pada corak pembangunan yang diterapkan. Kebijakan pembangunan ekonomi suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah yang bersangkutan.

B. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Selama ini permodalan, pemasaran dan manajemen merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh pelaku UMKM. Berbagai usaha telah ditempuh oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut. Hasil dari usaha tersebut tampak pada peningkatan jumlah UMKM di Kota Lubuk Linggau hingga tahun 2019. Namun, jumlah ini stagnan pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021.

Program-program terkait peningkatan dan pengembangan usaha koperasi dan UKM tidak dapat berjalan dengan optimal. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 melemahkan perekonomian hingga menyentuh level terbawah yang berhubungan dengan UKM. Sehingga, pencapaian indikator program sangat jauh dari yang ditargetkan.

Program pemberdayaan yang diadakan pemerintah belum mampu mencapai hasil optimal karena dalam pelaksanaannya sering menemui kendala ketersediaan dana. Disamping itu, pelatihan usaha lebih sering tidak tepat sasaran. Pelatihan usaha yang tidak tepat sasaran sesungguhnya menunjukkan tidak adanya analisis terhadap pihak-pihak mana saja yang membutuhkan dan yang tidak membutuhkan. Diperlukan data yang komprehensif terkait jumlah pelaku yang membutuhkan pelatihan, pihak yang telah mendapatkan pelatihan dan pihak yang belum mendapatkan pelatihan sehingga pelatihan dapat lebih efektif dan merata.



Di samping itu, UMKM di Kota Lubuk Linggau masih membutuhkan solusi yang lebih inovatif selain pemberian bantuan modal dan pelatihan manajemen untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi agar mampu meningkatkan usaha dan daya saing mereka.

C. Pariwisata

Sektor pariwisata dalam pembangunan Kota Lubuk Linggau turut memberikan kontribusi. Hal ini dapat dilihat dari indikator kunjungan wisatawan yang meningkat seiring dengan peningkatan destinasi pariwisata yang dikembangkan. Meskipun demikian, guna terus meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Lubuk Linggau, pemerintah perlu menyikapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program bidang pariwisata, antara lain: (i) minimnya anggaran dalam mengembangkan destinasi wisata, (ii) masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha pariwisata, dan (iii) masih banyak Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang belum dikelola dan dikembangkan.

D. Investasi

Investasi sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, selama periode 2018-2022 cenderung menurun. Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah melakukan upaya melalui peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, peningkatan pelayanan perizinan terpadu, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, serta penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah. Namun dalam pencapaian target masih terdapat permasalahan antara lain : (i) kurangnya promosi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan investor, (ii) iklim investasi yang kurang kondusif seperti lingkungan sosial, politik, hukum dan sistem birokrasi di daerah sebagai pertimbangan awal investor untuk melakukan investasi, (iii) pemerintah dan kebijakannya yang tidak ramah terhadap investasi, (iv) kualitas pelayanan investasi yang masih rendah, dan (v) infrastruktur dan sistem transportasi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha.

E. Perdagangan dan Jasa

Sektor perdagangan dan jasa merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Lubuk Linggau. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat-tempat perdagangan dan jasa serta beragam fasilitas pendukungnya. Namun perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa masih terpusat pada satu kawasan di Pusat Pelayanan Kota dan perlu adanya persebaran kegiatan perdagangan dan jasa dan peningkatan fasilitas dan sarana perdagangan dan jasa yang merata di setiap Sub Pusat Pelayanan Kota dan titik-titik kawasan



strategis dalam rangka memperlancar arus barang dan jasa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Lubuk Linggau.

F. Perindustrian dan Perdagangan

Kota Lubuk Linggau berada di daerah perlintasan beberapa kota besar di Sumatera, baik kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan maupun Provinsi lain seperti Jambi dan Bengkulu. Posisi ini merupakan pangsa pasar potensial bagi perkembangan sektor perdagangan. Namun dalam perjalanannya pertumbuhan di sektor perdagangan tersebut masih terdapat beberapa masalah yang harus ditangani dan di antaranya adalah kurangnya investasi di sektor perdagangan yang berdaya saing, belum adanya pola kemitraan antara pelaku usaha IKM dan UKM dengan pemilik modal.

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Lubuk Linggau belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik. Di antaranya dengan belum adanya tempat yang representatif bagi PKL, masih kurangnya kesadaran dari pelaku terhadap aturan yang telah dibuat pemerintah dan efektifitas pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar. Selain itu juga berkaitan dengan kesadaran untuk menjaga kebersihan dan higienitas khususnya bagi PKL yang berjualan makanan. Selain dari PKL pihak konsumen seringkali membeli di tempat-tempat yang dilarang oleh Pemerintah yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Data statistik industri Kota Lubuk Linggau untuk tahun 2022 menunjukkan jumlah industri berskala kecil menengah sebanyak 717 unit dengan nilai investasi sebesar Rp.36.571.622.000 dan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.114 orang. Sektor industri telah menyumbang sekitar 7,13 persen dari nilai tambah yang tercipta seluruh sektor lapangan usaha pada tahun 2022. Secara keseluruhan, kontribusi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB tergolong cukup baik karena merupakan salah satu dari empat komponen PDRB dengan kontribusi terbesar.

G. Tenaga Kerja

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Lubuk Linggau dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja adalah tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi meskipun mengalami penurunan. Pada periode tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu sebesar 5,94 di tahun 2022 dengan angkatan kerja menurun sebesar 113.645 di tahun 2022 yang sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 128.894.

Untuk menciptakan lapangan kerja formal membutuhkan investasi yang cukup besar serta dibutuhkan cara yang tepat untuk



menarik investor agar dapat berinvestasi di Kota Lubuk Linggau serta mengembangkan kegiatan yang sesuai dengan corak dan warna perekonomian di Kota Lubuk Linggau. Demikian juga dengan pengembangan industri kreatif yang dapat dijadikan sebagai pilihan untuk menyerap tenaga kerja yang profesional. Selain itu dirasakan masih kurangnya tingkat perlindungan dan pengawasan perusahaan terhadap tenaga kerja.

4.1.3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah

A. Sistem Drainase Perkotaan

Sistem drainase di Kota Lubuk Linggau terdiri dari 2 sistem, yaitu Sistem Makro dan Sistem Mikro. Sistem Makro terdiri dari sungai dan sistem mikro terdiri dari saluran drainase tersier (lingkungan), saluran sekunder dan saluran primer. Pengelolaan drainase untuk *gray water* dan air hujan saat ini masih dicampur tanpa ada pengelolaan terpisah, dari limbah cucian dan air buangan kamar mandi disalurkan ke saluran drainase lingkungan (tersier), dari saluran tersier menuju saluran ke saluran drainase sekunder dan diteruskan ke saluran primer selanjutnya berakhir ke Sungai Kelingi. Begitu juga dengan buangan air hujan dari talang disalurkan ke saluran tersier dan seterusnya.

Kondisi drainase Kota Lubuk Linggau beberapa tahun belakangan ini tidak mampu menampung jumlah air limpasan, terutama pada saat hujan turun dengan intensitas sedang hingga tinggi. Akibatnya, muncul genangan air di beberapa titik, seperti di Jalan Yos Sudarso. Munculnya titik-titik genangan antara lain disebabkan tersumbatnya saluran drainase oleh sampah dan tingginya laju perubahan penggunaan lahan di Kota Lubuk Linggau. Perubahan kondisi lahan dari ruang terbuka menjadi lahan terbangun mengurangi kemampuan infiltrasi tanah dan menjadikan air hujan yang turun menjadi air limpasan (*run off*). Air limpasan dalam volume besar akan mengalir menuju tempat dengan ketinggian lebih rendah, termasuk ke dalam saluran-saluran air. Jika kapasitas saluran drainase yang ada tidak mampu menampung jumlah air limpasan yang dihasilkan pada saat kondisi hujan, maka muncullah titik-titik genangan di beberapa tempat di Kota Lubuk Linggau.

Permasalahan yang mendesak mengenai drainase di Kota Lubuk Linggau diantaranya adalah (1) belum terintegrasinya saluran tersier dan sekunder dengan saluran pembuangan primer, (2) belum adanya perencanaan skala kota (*masterplan*) dalam perencanaan drainase di Kota Lubuk Linggau; (3) banyaknya sedimentasi dan sampah buangan yang memenuhi saluran drainase yang ada; (4) pembangunan drainase primer terkendala masalah dana, lahan dan belum tersediannya DED; (5) daya tampung dimensi saluran sudah tidak memadai lagi untuk dapat



menerima limpasan air hujan; dan (6) kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kondisi drainase agar tetap berfungsi dengan baik.

B. Pengelolaan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan air bersih juga terus meningkat. Permasalahan pokok dalam pemenuhan air bersih, meliputi: i) masih terbatasnya cakupan pelayanan air bersih, ii) terbatasnya sumber air bersih selain yang berasal dari air tanah, iii) keterbatasan jaringan pelayanan air bersih.

Pengelolaan air bersih di Kota Lubuk Linggau dikelola oleh sebuah Perusahaan daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bukit Sulap. Sumber air bersih tersebut didapat dari Sungai kelingi, Sungai Malus, Sungai Apur dan Air tanah. Sampai pada tahun 2022 pelanggan PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau mencapai 17.927 pelanggan dengan jumlah air yang disalurkan sebanyak 2.516.902 m³.

Namun demikian permasalahan air bersih masih menjadi permasalahan di Kota Lubuk Linggau, oleh karena itu PDAM Tirta Bukit Sulap terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Lubuk Linggau. Untuk daerah yang padat penduduk ketersediaan air bersih masih menjadi masalah terutama pada musim kemarau, karena pasokan air PDAM kurang maksimal dan kondisi kualitas air tanah sudah menurun sehingga masyarakat mendapatkan air dari sumur gali yang kondisi airnya masih cukup baik dan air sungai.

C. Ketahanan Energi Listrik

Sebagai suatu kawasan perkotaan Kota Lubuk Linggau harus didukung oleh ketersediaan fasilitas dan utilitas yang memadai. Listrik merupakan kebutuhan primer bagi sebuah kota saat ini. Hampir semua aktivitas masyarakat membutuhkan dukungan energi listrik.

Pada tahun 2022 hampir seluruh rumah tangga di Kota Lubuk Linggau sudah menggunakan sumber penerangan listrik baik itu PLN maupun Non PLN. Jumlah pelanggan listrik di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2022 adalah sebanyak 87.580 pelanggan dengan daya listrik yang terpasang sebanyak 114.992.749 VA. Akan tetapi tingkat pelayanan yang ada masih cukup rendah, dimana masih sering terjadinya pemadaman listrik. Untuk mengembangkan jaringan listrik di masa mendatang maka diperlukan penambahan daya listrik. Hal ini mengingat tingkat kebutuhan energi listrik penduduk semakin meningkat sejalan dengan perkembangan Kota Lubuk Linggau sebagai pengaruh kemajuan



teknologi. Pengembangan jaringan listrik di Kota Lubuk Linggau ini dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan kota dan dilakukan secara terpadu dengan pengembangan jaringan lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

D. Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Permasalahan perumahan di Kota Lubuk Linggau adalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Lubuk Linggau. Dengan populasi penduduk yang semakin besar maka kebutuhan akan tempat tinggal semakin banyak, sedangkan lahan yang tersedia jumlahnya tetap. Akibatnya muncul dampak dari ketidaksesuaian ini, antara lain munculnya perumahan kumuh yang biasanya muncul di kawasan perkotaan, yaitu terdapatnya permukiman di sepanjang jalan rel kereta api dan di sepanjang sungai.

Permasalahan utama permukiman di bantaran sungai Kota Lubuk Linggau berakar pada ketidaksesuaian penggunaan lahan badan sungai yang sebenarnya difungsikan sebagai jalur hijau, akan tetapi dipergunakan penduduk sebagai tempat bermukim. Selain itu, padatnya permukiman di bantaran sungai menjadikan permukiman di daerah tersebut memiliki kesan kumuh. Ditambah lagi dengan kondisi sanitasi yang buruk, semakin menjadikan permukiman di bantaran sungai tidak ideal untuk bermukim.

Dampak lainnya adalah munculnya perumahan yang mempunyai kualitas rendah karena sebagian masyarakat memiliki daya beli yang minim. Hal ini ditandai dengan adanya permukiman yang cukup padat dan letak bangunan sangat tidak teratur. Selain itu juga sulitnya untuk mendapatkan akses prasarana dasar perumahan yaitu kurang tersedianya jaringan drainase yang memadai, sebagian besar jaringan jalan permukiman di kawasan permukiman sangat sempit dan hanya berupa gang-gang kecil dan akses menuju kawasan perumahan sangat kurang dan tidak memadai.

4.1.4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

A. Ketahanan Pangan

Dalam hal ketersediaan pangan utama, selama periode 2018-2022 Kota Lubuk Linggau mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2018 sebesar 141.804 penduduk/tahun maka pada tahun 2022 telah mencapai 160.005 penduduk/tahun. Akan tetapi cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan atau individu masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh minimnya



tenaga pengurus lumbung pemerintah dan dana pembangunan yang minim sehingga belum adanya penambahan cadangan pangan pemerintah.

Dalam hal keamanan pangan, pengawasan dan pembinaan telah dilaksanakan dengan baik di Kota Lubuk Linggau. Begitu pula dengan pemantauan stabilitas harga dan pasokan pangan yang pelaksanaannya sudah optimal.

B. Pertanian

Produksi padi di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2022 menjadi sebesar 20.498 ton dengan luas panen 1.337 Ha. Padi merupakan bahan pangan pokok sebagian besar masyarakat Kota Lubuk Linggau yang produksinya terus menerus mengalami peningkatan sejalan dengan tren pertumbuhan penduduk. Namun, adanya pergeseran pola hidup dan ekonomi dari tingkat pedesaan ke perkotaan yang menjadikan pergeseran pola hidup yang semula bertani menjadi pedagang dan sebagainya menyebabkan beberapa lahan dialihfungsikan menjadi tempat tinggal dan tidak tergarap. Dengan semakin berkurangnya lahan pertanian, diperlukan peningkatan produktivitas padi agar kebutuhan pangan di Kota Lubuk Linggau dapat terpenuhi. Adapun yang menjadi perhatian meliputi sarana dan prasarana irigasi yang belum memadai, sulitnya mendapatkan pupuk yang bersubsidi serta banyaknya penggunaan bibit non sertifikat.

C. Perikanan

Di bidang perikanan kemampuan menyediakan ikan sebagai sumber protein konsumsi masyarakat maupun sebagai bahan baku industri pengolahan dinilai masih belum optimal, dan dihadapkan pada beberapa permasalahan diantaranya :

1. Tingginya harga ikan di Kota Lubuk Linggau yang disebabkan oleh kurangnya pasokan ikan dari luar Kota Lubuk Linggau;
2. Belum adanya pengembangan klaster usaha pengolahan hasil perikanan dalam bentuk UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang berbasis pada produk bernilai tambah dan memenuhi selera pasar;
3. Pola pemasaran hasil perikanan yang masih tradisional, belum menerapkan sistem rantai dingin pada penanganan hasil produk perikanan, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas bahan baku olahan perikanan. Hal ini masih ditambah dengan masih adanya penggunaan bahan pengawet ikan diluar ambang batas;
4. Banyaknya pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang bersifat tradisional (dengan mutu produk, syarat teknis, sanitasi dan higienis yang rendah dan yang jauh dari persyaratan mutu ekspor) karena



- rendahnya kesadaran, pengetahuan dan permodalan, serta keterbatasan sarana-prasarana penyimpanan hasil tangkapan;
5. Kurangnya pasokan ikan seperti benih ikan/calon induk/induk ikan unggul dari luar/dalam Kota Lubuk Linggau;
 6. Tingginya sarana dan prasarana produksi yaitu : tinggi harga pakan setiap tahunnya menyebabkan biaya produksi ikan meningkat terus sehingga petani pembudidaya ikan/kelompok tani ikan cenderung mengurangi usaha produksi ikan yang akan dihasilkan;
 7. Tingginya tingkat kematian ikan yang disebabkan oleh terjangkitnya penyakit ikan yang menyerang/mewabah yang disebabkan oleh bakteri *Aeromonas*, *Streptococcus* SP.;
 8. Selain itu faktor alam yaitu sering terjadinya kemarau panjang yang sering terjadi beberapa tahun terakhir yang menyebabkan kurangnya debit air sungai di wilayah sentral produksi ikan di Kota Lubuk Linggau;
 9. Belum optimalnya pemanfaatan UPTD Pembenihan Ikan untuk meningkatkan stok benih ikan dan mutu benih ikan; dan
 10. Masih terbatas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang perikanan. Secara umum tingkat profesionalisme/ kualitas SDM perikanan masih kurang, hal ini terlihat dari masih adanya pegawai yang menempati tugas tidak sesuai dengan kompetensinya. Disamping itu masih kurangnya pelatihan/ Diklat Teknis.

D. Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif. Permasalahan lingkungan hidup di Kota Lubuk Linggau antara lain masih kurang optimalnya pengelolaan sampah dan sistem sanitasi di Kota Lubuk Linggau.

Sebagaimana kota pada umumnya, sampah menjadi permasalahan lingkungan penting Kota Lubuk Linggau yang tidak bisa diabaikan. Sampah yang tidak ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit. Sampah merupakan hal yang sangat penting untuk ditangani saat ini, semakin bertambah jumlah penduduk semakin bertambah pula jumlah timbulan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Lubuk Linggau antara lain: penyediaan sarana kebersihan, sosialisasi program Adipura, sosialisasi program adiwiyata untuk sekolah berwawasan lingkungan, melakukan pelatihan terkait pengelolaan sampah dengan sistem 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, and*



Replace). Tetapi pada kenyataannya pengelolaan sistem 4R yang dilakukan belum optimal. Permasalahan yang timbul adalah sebagian besar masyarakat masih memperlakukan sampah dengan pola lama dengan membuang sampah tanpa dilakukan pengelolaan sampah terlebih dahulu.

Pengelolaan sampah belum dilakukan oleh masyarakat, yaitu belum melalui pemilahan sampah organik, anorganik dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, untuk sampah anorganik dapat digunakan kembali sesuai fungsinya misal kantong plastik, dapat juga diolah menjadi barang yang berguna melalui proses tertentu misalnya bekas kemasan plastik bisa dijadikan tas, topi atau kaleng bekas bisa diolah menjadi pot bunga, tempat pensil dan asbak serta sampah plastik, botol dan lain-lain dapat juga langsung dijual ke pengepul barang bekas untuk didaur ulang sehingga timbunan sampah yang dihasilkan dapat di perkecil bahkan dihilangkan, hal ini akan mengurangi timbunan sampah di TPA.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan anggaran dan sarana terbatas belum dapat melayani pengangkutan sampah secara menyeluruh dalam Kota Lubuk Linggau, yaitu dilihat dari timbunan volume sampah yang dihasilkan penduduk Kota Lubuk Linggau sebesar 122.700 ton/hari, dengan jumlah sampah yang ditangani sebesar 89 persen saja. Hal ini dikarenakan kurangnya armada untuk mengangkut produksi sampah yang berada di jalan-jalan lingkungan akibatnya di beberapa titik yang tidak mendapat pelayanan angkutan sampah terdapat penumpukan sampah dan TPS liar. Sebagian dari sampah tersebut ada yang dikubur dan ada yang dibakar, hal ini akan menambah buruk kualitas lingkungan (udara) di Kota Lubuk Linggau. Di Kota Lubuk Linggau terdapat 1 (satu) TPA di Kelurahan Lubuk Binjai dengan *system controlled landfill/ sanitary landfill* yang lebih luas areanya dibandingkan dengan TPA di Petanang yang sudah tidak dioperasikan lagi.

Permasalahan sanitasi yang dihadapi Kota Lubuk Linggau cukup kompleks. Permasalahan mendesak sistem sanitasi adalah sebagai berikut: 1) pembuangan air limbah domestik masih bergabung dengan saluran buangan air hujan; 2) masih ada masyarakat yang belum mengerti bagaimana kondisi tangki septik yang sehat; dan 3) belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur bagi dunia usaha dan developer/ pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah di tempat usaha dan perumahan.



4.1.5. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

A. Perubahan Penggunaan Lahan

Daerah perkotaan diidentikkan dengan jumlah penduduk yang tinggi dan penggunaan lahan didominasi oleh lahan terbangun. Tingginya jumlah penduduk ini mengakibatkan kebutuhan penduduk akan ruang terutama ruang yang semakin tinggi terutama untuk lahan terbangun. Hal ini pada akhirnya akan menjadi pemicu terjadinya konversi lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Hal ini terjadi juga di Kota Lubuk Linggau. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan di Kota Lubuk Linggau didominasi oleh permukiman, yang semakin meningkat menjadi 3.385,32 Ha. Sedangkan penggunaan lahan perkebunan dan pertanian mengalami penurunan.

B. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam pembangunan kota untuk meningkatkan kualitas ruang kota yang asri, nyaman dan sehat. Ketersediaan RTH di Kota Lubuk Linggau masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Permasalahan RTH di Kota Lubuk Linggau meliputi penyediaan dan penyebaran dan kualitas RTH publik dan privat di seluruh wilayah serta pengembangan tajuk hijau.

C. Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lubuk Linggau tahun 2022-2042 merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah belum efektifnya RTRW sebagai instrumen pembangunan yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan piranti peraturan untuk menunjang pelaksanaan RTRW. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota yaitu dengan memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang (sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi yang tegas.



4.1.6. Tata Kelola Pemerintahan

A. Reformasi Birokrasi

Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku seluruh jajaran aparat pemerintahan di semua tingkatan secara terpadu dan sistemik. Selain itu upaya penataan ulang secara bertahap dan sistematis terhadap pemerintah daerah perlu terus dilakukan melalui penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang profesional, akuntabilitas tinggi kepada masyarakat dan pelayanan publik yang prima. Selain itu, permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah mensinergikan antar lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.

B. Keuangan Daerah

Pembangunan Kota Lubuk Linggau memerlukan dukungan ketersediaan anggaran yang memadai. Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan daerah adalah meningkatkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah baik yang konvensional maupun non konvensional. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil. Pertumbuhannya yang ditargetkan meningkat 10 persen tiap tahunnya belum dapat terealisasi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain menurunnya kesadaran wajib pajak, belum maksimalnya kompetensi aparatur pengelola pajak, masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah, belum optimalnya database wajib pajak retribusi daerah, serta belum optimalnya sistem pengelolaan pendapatan daerah. Permasalahan lainnya yaitu pendapatan transfer dari pemerintah pusat semenjak masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan dan refocusing anggaran sehingga pembiayaan terhadap program pembangunan yang sudah direncanakan mengalami penyesuaian/pengurangan alokasi.

C. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Permasalahan terkait kelembagaan dan ketatalaksanaan antara lain: struktur kelembagaan pemerintahan Kota Lubuk Linggau masih belum optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat. Selain itu, tata laksana di lingkungan organisasi Pemerintah Kota Lubuk Linggau juga masih perlu mendapat perhatian khusus, agar lebih respon terhadap kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih prima dalam artian dapat lebih cepat, mudah, murah dan terhindar dari



praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Permasalahan tata laksana tersebut sangat terkait erat dengan kualitas dan kapasitas sumber daya pegawai yang masih belum memadai, sehingga berpengaruh pada lemahnya pelayanan publik yang langsung kepada masyarakat seperti kecamatan dan kelurahan.

4.1.7. Kesejahteraan Masyarakat

A. Kemiskinan Kota

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Lubuk Linggau. Persentase penduduk miskin Kota Lubuk Linggau mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 12,68 persen menjadi sebesar 12,68 persen pada tahun 2022. Penurunan penduduk miskin tersebut merupakan dampak dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kota Lubuk Linggau sehingga mampu mengurangi kemiskinan secara bertahap. Ke depan diharapkan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dapat secara kontinyu memfokuskan program/kegiatan pembangunan yang tepat sasaran sehingga dapat terus menekan angka penduduk miskin.

B. Permasalahan Sosial

Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

4.2. Kebijakan Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Internasional

Penentuan isu strategis didahului dengan review terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kota Lubuk Linggau. Hasil review akan melengkapi draft isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kota Lubuk Linggau.



4.2.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- 5) Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dan
- 6) Sosial

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

4.2.2. Sustainable Development Goals (SDG's)

Berakhirnya MDGs pada tahun 2015 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2030. Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang telah dilaksanakan selama periode 2000-2015 memang telah membawa berbagai kemajuan. Sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Kota Lubuk Linggau. Akan tetapi, beberapa indikator yang mengukur target di bidang kesehatan masih cukup jauh dari capaian dan harus mendapatkan perhatian khusus. Target yang belum tercapai di antaranya adalah tingkat kemiskinan nasional, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk, prevalensi HIV dan AIDS serta beberapa indikator terkait lingkungan, ekonomi serta hukum dan tata kelola yang baik.

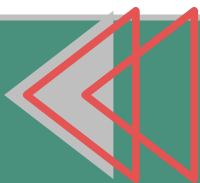
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi



nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Indonesia, maka capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat dari 4 (empat) pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar tata kelola pelaksanaan.

Adapun tujuan TPB/SDGs adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------|--|
| Tujuan 1 | Tanpa kemiskinan
Pengentasan segala bentuk <u>kemiskinan</u> di semua tempat. |
| Tujuan 2 | Tanpa kelaparan
Mengakhiri <u>kelaparan</u> , mencapai <u>ketahanan pangan</u> dan perbaikan <u>nutrisi</u> , serta menggalakkan <u>pertanian yang berkelanjutan</u> |
| Tujuan 3 | Kehidupan sehat dan sejahtera
Menggalakkan hidup <u>sehat</u> dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia |
| Tujuan 4 | Pendidikan berkualitas
Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang |
| Tujuan 5 | Kesetaraan gender
Mencapai <u>kesetaraan gender</u> dan memberdayakan semua perempuan. |
| Tujuan 6 | Air bersih dan sanitasi layak
Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua |
| Tujuan 7 | Energi bersih dan terjangkau
Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua |
| Tujuan 8 | Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua |
| Tujuan 9 | Industri, inovasi dan infrastruktur
Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi. |
| Tujuan 10 | Berkurangnya kesenjangan
Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. |
| Tujuan 11 | Kota dan komunitas berkelanjutan
Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. |
| Tujuan 12 | Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan |



Tujuan 13	Penanganan perubahan iklim Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya
Tujuan 14	Ekosistem laut Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
Tujuan 15	Ekosistem daratan Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati
Tujuan 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
Tujuan 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

4.3. Isu-Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan hasil pembobotan dan kriteria terkait isu-isu strategis Kota Lubuk Linggau, maka isu-isu strategis yang paling menentukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan dasar yang mendukung terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing;
- 2) Penguatan perekonomian perkotaan dan penanggulangan kemiskinan;
- 3) Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan; dan
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

4.3.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar

A. Kesehatan

Kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Upaya pengendalian COVID-19 masih menjadi salah satu isu di bidang kesehatan. Upaya pengendalian COVID-19 akan tetap dilakukan dengan melanjutkan vaksinasi COVID-19. Hal lain yang menjadi isu bidang kesehatan adalah penguatan sistem kesehatan dengan upaya peningkatan



kualitas pelayanan kesehatan guna menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dan menekan angka penyakit menular seperti AIDS, Tuberculosis dan Malaria. Di samping itu, penurunan prevalensi balita stunting masih menjadi isu penting di bidang kesehatan guna mendukung pencapaian target stunting nasional sebesar 12 persen.

Keberhasilan seluruh indikator pencapaian program perbaikan gizi masyarakat, tidak serta merta membuatnya luput dalam rencana pembangunan Kota Lubuk Linggau. Indikator prevalensi gizi buruk serta prevalensi balita dengan berat badan rendah/gizi kurang tetap menjadi prioritas pembangunan kesehatan. Namun demikian, target indikator harus dapat disesuaikan agar selaras dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Di samping itu, upaya peningkatan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan memperhitungkan rasio dokter spesialis dan dokter umum baik untuk dokter pemerintah maupun dokter swasta. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit), dapat dilakukan dengan peningkatan manajemen puskesmas melalui BLUD/ dana JKN serta peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Kunjungan lansia ke pelayanan kesehatan dapat dioptimalkan melalui pos bina terpadu lansia.

Faktor kesehatan lingkungan dapat menjadi salah satu penyebab penyebaran penyakit menular, sehingga pengendalian penyakit menular masih menjadi prioritas pembangunan periode selanjutnya. Disamping itu, optimalisasi Dana BOK dan evaluasi kinerja petugas kesehatan lingkungan untuk turun kelapangan dapat menjadi salah satu upaya pengendalian penyakit menular. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat juga harus disesuaikan dengan standar kesehatan.

B. Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan. Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Lubuk Linggau telah memenuhi target pencapaian, hal ini ditunjukkan oleh indeks pendidikan yang pencapaiannya lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Akan tetapi pembangunan bidang pendidikan harus lebih ditingkatkan lagi.

Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada pemenuhan layanan pendidikan dasar yang berkualitas, perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan



pembangunan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi agar dapat melahirkan lulusan perguruan tinggi yang berdaya saing untuk menjawab tantangan dalam persaingan global.

C. Perumahan dan Permukiman

Isu-isu strategis meliputi:

1. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Peningkatan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak antara lain adalah dengan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Pergeseran target dan indikator dari backlog perumahan menjadi target *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu akses masyarakat terhadap rumah yang aman, terjangkau dan memadai atau layak huni. Indikator utama rumah layak huni berdasarkan indikator SDGs yakni rumah tangga dikatakan memiliki akses dan menghuni rumah layak huni didasarkan pada ketahanan konstruksi, akses air bersih, akses sanitasi, dan luas lantai per kapita. Sehingga upaya meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak huni menjadi isu penting dimasa mendatang untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni.

2. Peningkatan Cakupan Layanan dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Permukiman

Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman berupa air minum dan sanitasi secara merata dan berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam penyediaan air minum adalah upaya untuk meningkatkan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem perpipaan (PDAM Tirta Bukit Sulap) dan akses terhadap sistem non-perpipaan terlindungi. Selain itu harus diciptakan sistem perencanaan penyediaan air minum yang optimal. Untuk Pendanaan harus digali sumber-sumber pendanaan alternatif khususnya melalui pendanaan dari pihak swasta.

Seperti sebagian besar kota-kota di Indonesia, Lubuk Linggau belum memetakan kebutuhan infrastruktur dan layanan air limbah serta tidak tersedianya rencana rinci terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Akibatnya, prioritas serta pentahapan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah tidak tergambar jelas. Pengembangan prasarana air limbah di Lubuk Linggau juga terhambat oleh kesiapan pendanaan,



sehingga strategi yang perlu dikedepankan adalah pengembangan sistem pengolahan setempat dan sistem terpusat skala komunal.

Untuk pengelolaan persampahan, perhatian pemerintah Kota Lubuk Linggau harus sejalan dengan kebijakan nasional yaitu upaya pengurangan volume timbulan sampah melalui penerapan konsep *reduce, reuse, recycle, dan replace* (4R) untuk membatasi laju timbulan sampah. Dari sisi pengangkutan sampah, perlu disiapkan Tempat Pembuangan Akhir yang layak dan dikelola secara *sanitary landfill* sehingga diharapkan terjadi peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah. Hal tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kelembagaan pengelola sampah yang lebih profesional. Untuk itu perlu dipertimbangkan untuk membentuk Perusahaan Daerah pengelola persampahan.

Belum optimalnya fungsi drainase sebagai pematas air hujan yang mengakibatkan timbulnya genangan merupakan permasalahan utama yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan drainase Kota Lubuk Linggau. Untuk mengatasinya perlu dilakukan peningkatan kapasitas drainase dengan terlebih dahulu mengoptimalkan perencanaan sistem pengelolaan drainase Kota Lubuk Linggau.

D. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Berbagai kemajuan dalam pembangunan yang responsif gender telah dicapai baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun dalam bidang politik dan jabatan publik. Berdasarkan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tantangan yang akan dihadapi adalah meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait akan pentingnya pembangunan yang responsif gender; meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, serta koordinasi pelaksanaannya.

4.3.2. Penguatan Perekonomian Perkotaan dan Penanggulangan Kemiskinan

A) Perekonomian

Dilihat dari perkembangannya, struktur ekonomi Kota Lubuk Linggau tidak begitu banyak mengalami perubahan, yaitu masih didominasi oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda. Namun, sektor lainnya seperti Sektor Konstruksi, Real Estate,



Industri Pengolahan, Transportasi dan Perhubungan menjadi penting peranannya dalam pembentukan PDRB/PDB dan menjadi sektor unggulan di masa depan.

Dilihat dari tingkat kompetitifnya, sektor jasa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan yang paling menjanjikan. Sektor ini memiliki kontribusi yang meningkat terhadap perekonomian dan perdagangan Lubuk Linggau, meskipun persinya masih di bawah tingkat yang dicapai oleh beberapa sektor ekonomi lainnya pada saat ini. Pentingnya sektor jasa bagi pertumbuhan ekonomi diperjelas oleh keterkaitan ke depan yang kuat ke seluruh sektor perekonomian lainnya.

Pemulihan kondisi perekonomian menuju endemi COVID-19 masih menjadi isu utama di bidang perekonomian. Pemulihan ekonomi dilakukan melalui pengendalian inflasi di daerah dan peningkatan belanja pemerintah pada produk dalam negeri. Untuk meningkatkan daya saing Kota Lubuk Linggau diawali dengan peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk dapat mendorong arus investasi masuk (baik investasi domestik maupun investasi asing) dan dapat memberikan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap berkembangnya usaha di Kota Lubuk Linggau dan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha di Kota Lubuk Linggau difokuskan pada penyederhanaan dan harmonisasi berbagai regulasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi, kepastian dan kemudahan untuk melakukan investasi dan berusaha.

Di samping itu, transformasi ekonomi digital turut menjadi isu penting di masa mendatang. Pengembangan ekonomi digital dilakukan melalui pengembangan ekosistem digital Indonesia dengan mendorong kebijakan dan regulasi yang mendukung inovasi; membangun infrastruktur dasar dan infrastruktur keuangan yang kuat, kokoh, dan terintegrasi; menyediakan dukungan fiskal, seperti insentif perpajakan dan dukungan pembiayaan bagi UMKM; serta memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai program pemerintah dan layanan publik.

Hal lain yang dapat menjadi peluang bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk meningkatkan daya saing ekonominya adalah dengan penumbuhan gugus (cluster) industri unggulan berbasis agrobisnis yang diintegrasikan dan Industri Kecil dan Mikro (IKM) di yang banyak tersebar di Kota Lubuk Linggau. Apalagi didukung oleh lokasi Kota Lubuk Linggau yang dikelilingi oleh daerah hinterland penghasil bahan mentah yang berkualitas.



B) Ketahanan Pangan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan pangan dan gizi turut meningkat. Meskipun kecukupan gizi masyarakat Kota Lubuk Linggau sudah cukup terpenuhi, ditandai dengan keberhasilan pemerintah menekan prevalensi balita gizi buruk, namun pemerintah masih perlu memprioritaskan ketahanan pangan. Adapun isu-isu strategis terkait ketahanan pangan tahun 2024-2026, meliputi:

1. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pangan berbasis potensi pangan lokal.
2. Pengembangan lembaga ketahanan pangan & peningkatan sumber daya aparatur dalam upaya pembinaan kepada petani/peserta pada desa mandiri pangan
3. Mendorong tumbuhnya industri olahan pangan berbasis potensi lokal.
4. Menjaga stabilitas harga pangan
5. Pengembangan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman.
6. Optimalisasi kelembagaan Pangan (lumbung pangan) masyarakat, pekarangan Pangan Lestari (P2L), toko tani Indonesia (TTI) Kota Lubuk Linggau, serta Dewan ketahanan Pangan (DKP).
7. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal.
8. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal belum optimal
9. Pengembangan cadangan pangan pemerintah
10. Mengidentifikasi wilayah yang sering mengalami kelangkaan pasokan pangan dan wilayah dengan masyarakat rawan pangan.
11. Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ketahanan pangan.
12. Pemanfaatan media informasi untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat melalui produk pangan lokal.
13. Penyuluhan, pembinaan keamanan pangan di sekolah dan masyarakat.
14. Analisis cadangan pangan sampai pada tingkat Rumah Tangga.
15. Promosi pangan lokal di level nasional
16. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM)
17. Analisis PPH Ketersediaan dan Konsumsi

C) Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan dan ketimpangan mengalami tren menurun hingga akhir tahun 2022, bahkan angka kemiskinan mencapai nilai terendah *single digit* pada akhir 2022 sebesar 12,68 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional, regional dan daerah. RPJPD menargetkan setiap periode lima tahunan RPJMD dapat menekan laju pertumbuhan



penduduk miskin hingga 0-1 persen. Pada periode 2022-2024, rata-rata laju pertumbuhan penduduk miskin telah mencapai 1,02 persen. Artinya, pemerintah masih harus bekerja keras untuk mencapai target RPJPD. Membahas isu strategis dalam penanggulangan kemiskinan hendaknya dilihat dari sudut pandang yang luas yang mencakup dimensi kemiskinan itu sendiri, yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ketenagakerjaan, sektor ketahanan pangan dan sektor infrastruktur dasar.

Isu strategis yang berkembang diantaranya adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Berdasarkan hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya.

Sesuai data Evaluasi Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2022, anggaran terkait kemiskinan di tahun 2022 mencapai Rp.88.336.424.465. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem lebih difokuskan pada bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.

Untuk melakukan penurunan angka kemiskinan ekstrem diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta penguatan kelembagaan. Sistem perlindungan dan jaminan sosial terus diperbarui sehingga benar-benar tepat sasaran, artinya penerima manfaat merupakan masyarakat yang berhak sesuai dengan kriteria, sehingga diperlukan updating data maupun mekanisme pemutakhiran mandiri data terpadu fakir miskin. Permasalahan kemiskinan juga erat kaitannya dengan masalah pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka dalam periode 2018-2022 berfluktuatif. Permasalahan pengangguran ini harus disikapi dengan serius



oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan iklim investasi sehingga tercipta lapangan kerja formal.

4.3.3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan

A) Infrastruktur

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan merupakan aspek utama di dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan lain-lain.

B) Peningkatan Konektivitas Wilayah

Fungsi sarana dan prasarana sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi ditunjukkan pada peran transportasi yang dapat memungkinkan orang, barang, dan jasa dan input produksi lainnya. Peningkatan konektivitas nasional ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya transaksi logistik. Hal ini akan dilakukan melalui pembangunan jalan dan jembatan dari daerah-daerah pinggiran Kota Lubuk Linggau menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Selain itu, diperlukan pula pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi baik untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, maupun sosial.

Di wilayah Kota Lubuk Linggau terdapat Bandar Udara Silampari yang menjadi sarana perhubungan udara yang memungkinkan perjalanan menuju Jakarta dapat ditempuh dalam jarak tempuh kurang lebih satu jam. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Lubuk Linggau dan daerah disekitarnya. Tantangan yang akan dihadapi kedepan yaitu pemanfaatan ruang di daerah sekitar kawasan bandara harus mendapat perhatian khusus sehingga bangunan konstruksi tidak menyalahi ketentuan yang dapat mengganggu penerbangan dan navigasi perhubungan udara. Solusinya suatu kebijakan dan regulasi yang ditetapkan Pemerintah Kota Lubuk Linggau sangat diperlukan untuk mengatur mengenai detail rencana penataan ruang di wilayah kawasan bandar udara Silampari.

Keberadaan angkutan kereta api semakin penting peranannya karena mempunyai nilai lebih terhadap angkutan darat lainnya, antara lain angkutan kereta api relatif murah, cepat, aman dan terjadwal. Terlebih lagi dengan semakin terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi kerusakan ruas jalan. Selain itu dapat mengurangi beban volume lalu lintas



jalan raya dan dapat mengangkut penumpang maupun barang secara masal (*mass rapid transportation*).

Daya hubung Kota Lubuk Linggau terhadap Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yaitu Palembang serta kota-kota lainnya semakin tinggi dengan adanya angkutan penumpang maupun barang berupa kereta api yang secara periodik mampu melayani kebutuhan masyarakat. Pelayanan kereta api Kota Lubuk Linggau merupakan pelayanan regional, dan di Kota Lubuk Linggau merupakan awal dan tujuan akhir penumpang.

C) Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan organisasi. Penerapan teknologi informasi pada organisasi pemerintah secara umum bertujuan untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Dari sisi pemerintah, dapat meningkatkan transparansi yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan. Namun, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik hingga saat ini dirasa masih belum optimal.

Dari sisi masyarakat, penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena syarat utama penggunaan teknologi informasi untuk proses kerja dan pelayanan publik adalah untuk prosedur pelayanan yang baku dan standar yang jelas dari sisi waktu penyelesaian maupun biaya yang harus dikeluarkan. Untuk mendukung program Kota Lubuk Linggau yaitu *Smart City* diperlukan usaha-usaha dan inovasi untuk mendukung terciptanya layanan publik berbasis informasi. Di samping itu, diperlukan penajaman lebih dalam untuk menentukan indikator sasaran dan target.

D) Lingkungan Hidup

Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Fokus pembangunan bidang lingkungan hidup adalah mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup. Pembangunan harus menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.



Beberapa isu strategis Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup dalam pembangunan Kota Lubuk Linggau untuk 3 (tiga) tahun kedepan yaitu :

1) Terjadinya degradasi lingkungan.

Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/atau industri.

2) Peningkatan beban pencemaran.

Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun.

3) Perubahan iklim.

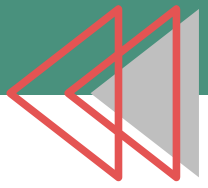
Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.

4.3.4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Lubuk Linggau sudah termasuk sangat baik dengan didapatkannya opini BPK atas laporan keuangan Kota Lubuk Linggau saat ini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini harus dipertahankan.

Dalam hal penyediaan layanan publik, pemerintah Kota Lubuk Linggau wajib menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah yang ditandai dengan tidak adanya suap, kesesuaian proses pemberian pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan serta kemudahan pengaduan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan utamanya dengan mengubah pola pikir para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat.





BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026, perlu dirumuskan tujuan pembangunan daerah dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Tujuan dan sasaran ini merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait dalam memberikan arah terhadap pembangunan kabupaten secara umum.

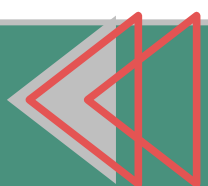
5.1. Visi dan Misi RPJPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2005-2025

Berdasarkan kondisi Kota Lubuk Linggau dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kota Lubuk Linggau dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Lubuk Linggau Tahun 2005–2025 adalah:

"Menjadikan Kota Lubuk Linggau Berakhlak dan Terbaik di Sumatera Selatan".

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** adalah melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan sebagai warga kota Lubuk Linggau dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika kebangsaan;
- 2. Mewujudkan kota yang berdaya-saing** melalui pembangunan sumber daya manusia berkualitas yang menguasai keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dalam mengolah sumber daya ekonomi lokal yang diperlukan oleh pasar lokal, regional dan internasional, serta memperkuat fundamental perekonomian lokal melalui pengembangan potensi unggulan ekonomi daerah, memperkuat posisi sebagai kota transit dan pusat kegiatan industri dan jasa dalam keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
- 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** melalui pembinaan dan pengembangan budaya dan kearifan lokal, memperkuat peran masyarakat sipil, pembinaan kelembagaan politik, memperkuat kualitas



desentralisasi dan otonomi daerah, meningkatkan kualitas hubungan kerja kelembagaan antar seluruh unit kerja pemerintahan secara vertikal dan horisontal, menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil;

4. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** melalui percepatan pembangunan daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dan kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan, keberpihakan kepada kelompok masyarakat ekonomi lemah dan sub wilayah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara terfokus, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
5. **Mewujudkan Kota Lubuk Linggau yang maju, asri dan lestari** melalui penataan ruang dan tataguna lahan yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang senafas dengan konservasi lingkungan hidup dan taman nasional dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
6. **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik** melalui pembentukan organisasi pemerintahan kota yang minim struktur kaya fungsi, menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai batas kewenangan dan berorientasi pada peningkatan pelayanan umum, membina hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif daerah dalam semangat kemitraan yang seimbang dan sejati, membina hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah, membangun hubungan kerja koordinatif dan konsultatif dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh Departemen dan lembaga pemerintah pusat, melembagakan budaya kerja yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan prima, menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan ditengah-tengah masyarakat serta meningkatkan daya saing seluruh unit usaha ekonomi lokal dari semua ukuran dan skala dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

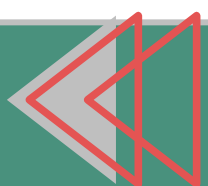
5.2. Tujuan Dan Sasaran

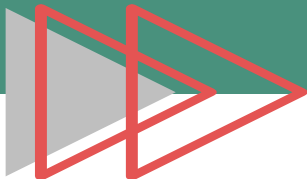
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kota Lubuklingau Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah RPD



merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi RPJPD yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024-2026 dirumuskan dalam sebuah pohon kinerja. Pohon kinerja merupakan alat bantu dalam menggambarkan hubungan logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Adapun struktur pohon kinerja Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 ditunjukkan dalam Gambar 5.1.





Gambar 5.1. Struktur Pohon Kinerja RPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

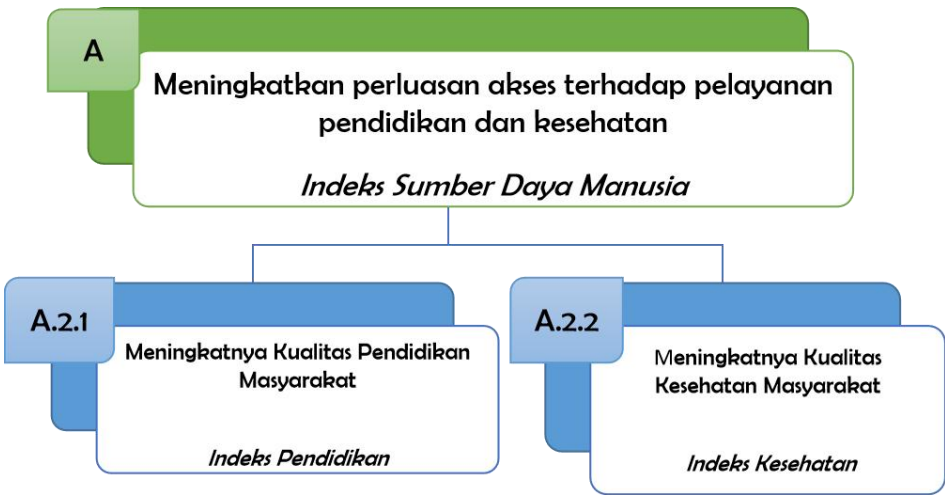


Sumber: Bappeda Litbang Kota Lubuk Linggau, 2023



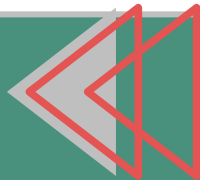
Gambar 5.1. di atas menyajikan struktur pohon kinerja tujuan dan sasaran RPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026. Dari Gambar 5.1. ditunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) tujuan yang terdiri atas 17 *intermediate outcome level 2*, 107 *intermediate outcome level 1*, dan 238 output. Lebih lanjut struktur pohon kinerja masing-masing tujuan pembangunan dijabarkan dalam Gambar 5.2 sampai dengan Gambar 5.6.

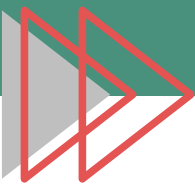
Gambar 5.2. Pohon Kinerja “Meningkatkan Perluasan Akses Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan”



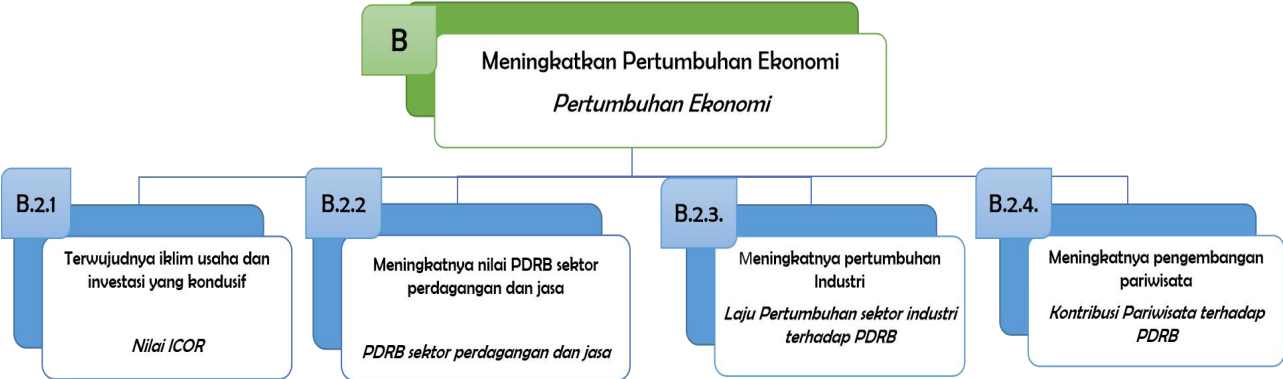
Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2023

Pada struktur pohon kinerja tujuan ke-1, yaitu Meningkatkan Perluasan Akses Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, terdapat 2 (dua) *intermediate outcome level 2*, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, yang digambarkan dengan indikator “Indeks Pendidikan”, dan 2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, yang digambarkan dengan indikator “Indeks Kesehatan”.





Gambar 5.3. Pohon Kinerja “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi”



Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2023

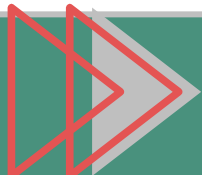
Pada struktur pohon kinerja tujuan ke-2, yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, terdapat 4 (empat) *intermediate outcome level 2*, yaitu: 1) Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif, yang digambarkan dengan indikator “Nilai ICOR”, 2) Meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa, yang digambarkan dengan indikator “PDRB sektor perdagangan dan jasa”, 3) Meningkatnya pertumbuhan Industri, yang digambarkan dengan indikator “Laju pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB”, dan 4) Meningkatnya pengembangan pariwisata, yang digambarkan dengan indikator “Kontribusi pariwisata terhadap PDRB”.

Gambar 5.4. Pohon Kinerja “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial”



Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2023

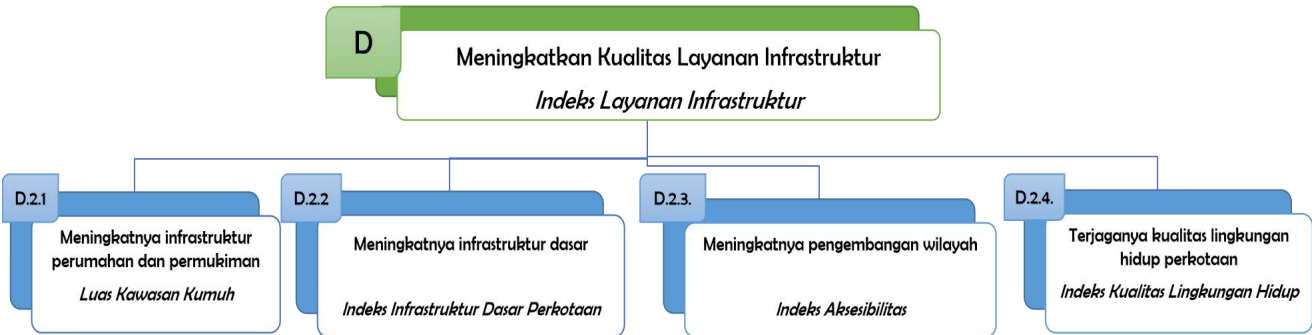
Pada struktur pohon kinerja tujuan ke-3, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, terdapat 4 (empat) *intermediate outcome level 2*, yaitu: 1) Menurunnya pengangguran, yang digambarkan dengan indikator “Tingkat pengangguran terbuka”, 2) Meningkatnya daya beli masyarakat, yang digambarkan dengan indikator “Indeks Pengeluaran”, 3) Menurunnya Tingkat Kemiskinan, yang digambarkan dengan indikator “Angka Kemiskinan”, “Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)”, dan “Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)”, dan 4) Meningkatnya





pengembangan pariwisata, yang digambarkan dengan indikator “Rasio kecukupan pangan”.

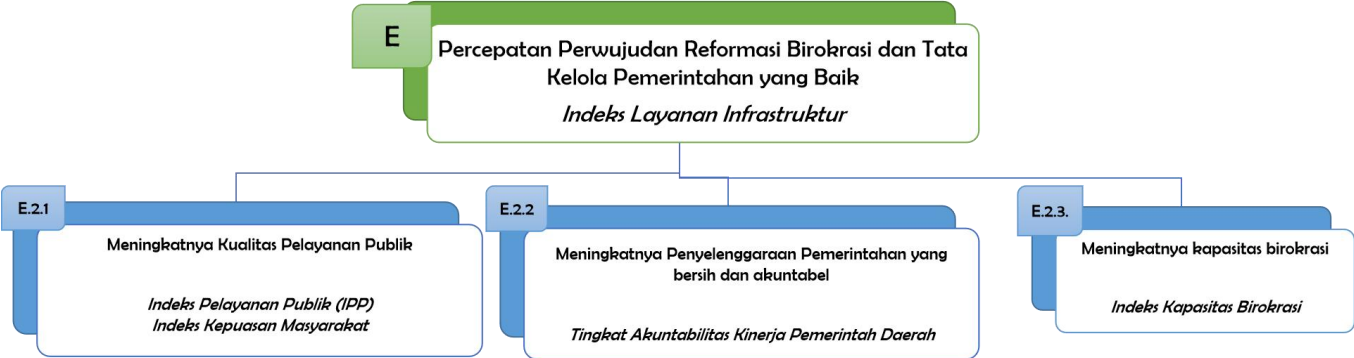
Gambar 5.5. Pohon Kinerja “Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur”



Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2023

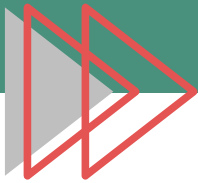
Pada struktur pohon kinerja tujuan ke-4, yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur, terdapat 4 (empat) *intermediate outcome level 2*, yaitu: 1) Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman, yang digambarkan dengan indikator “Luas kawasan kumuh”, 2) Meningkatnya infrastruktur dasar, yang digambarkan dengan indikator “Indeks infrastruktur dasar perkotaan”, 3) Meningkatnya pengembangan wilayah, yang digambarkan dengan indikator “Indeks aksesibilitas”, dan 4) Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan, yang digambarkan dengan indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”.

Gambar 5.6. Pohon Kinerja “Percepatan Perwujudan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”



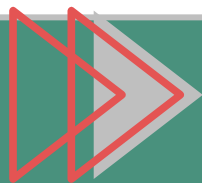
Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2023

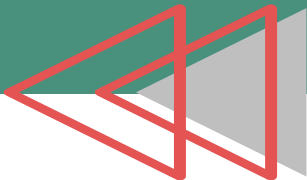




Pada struktur pohon kinerja tujuan ke-5, yaitu Percepatan Perwujudan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, terdapat 3 (tiga) *intermediate outcome level 2*, yaitu: 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, yang digambarkan dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik (IPP)” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat, 2) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang digambarkan dengan indikator “Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”, dan 3) Meningkatnya kapasitas birokrasi, yang digambarkan dengan indikator “Indeks Kapasitas Birokrasi”.

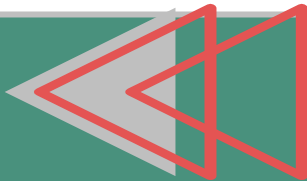
Tujuan dan sasaran beserta target yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga tiga tahun ke depan dijabarkan pada Tabel 5.1.





Tabel 5.1. Tujuan, dan Sasaran Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2022)	Target		
					2024	2025	2026
1	Meningkatkan perluasan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan		Indeks Sumber Daya Manusia	72,013	72,23	72,446	72,661
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,702	0,709	0,711	0,713
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,766	0,773	0,777	0,780
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	4,51	5,78	5,95	6,43
		Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Nilai ICOR	10,05	8,30	7,98	7,67
		Meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa	PDRB sektor perdagangan dan jasa	2.096,80	2.132,65	2.178,88	2.225,10
		Meningkatnya pertumbuhan Industri	Laju Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	5,82	6,52	7,59	8,65
		Meningkatnya pengembangan pariwisata	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	3,98	4,042	4,107	4,151
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		Indeks Gini	0,366	0,333	0,332	0,331
		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,94	4,79	4,62	4,25
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	0,502	0,74	0,77	0,8
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	12,68	12,35	12,23	12,12
			Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,5	1,47	1,45	1,41
			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,27	0,24	0,23	0,21
		Menguatnya ketahanan pangan daerah	Rasio kecukupan pangan	0,91	1,09	1,16	1,18
4	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur		Indeks Layanan Infrastruktur	Belum rilis	50,83	51,7	52,57



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target		
					2024	2025	2026
		Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Luas Kawasan Kumuh	422,53	413,87	414,8	410,16
		Meningkatnya infrastruktur dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	Belum rilis	65,86	67,67	69,48
		Meningkatnya pengembangan wilayah	Indeks Aksesibilitas	0,775	0,793	0,808	0,822
		Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,86	67,46	68,37	69,28
5	Percepatan Perwujudan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	55,47	57,29	60,41	63,69
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,26	4,4	4,57	4,74
			Indeks Kepuasan Masyarakat	79,97	82,48	83,25	84,55
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya kapasitas birokrasi	Indeks Kapasitas Birokrasi	66,2	69,08	70,15	72,85

Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2023



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN,

DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga agar segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, diperlukan kajian tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026. Penyusunan strategi dan arah kebijakan ini selaras dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah di jelaskan dalam bab sebelumnya.

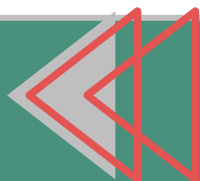
6.1. Strategi Umum Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026, digunakan empat strategi pembangunan secara umum yaitu strategi *progrowth*, *projob* dan *propoor*, serta *pro environment*.

1. **Pro-growth**, berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan.

Strategi pertumbuhan tetap digunakan dengan tujuan untuk memperbesar produk domestik. Namun demikian strategi pertumbuhan dilaksanakan secara bersamaan dengan strategi pemerataan pembangunan melalui strategi jalur ganda (*dual track strategy*). Strategi pertumbuhan dapat dilihat dari meningkatnya PDRB dan pendapatan perkapita, namun di sisi lain terjadi ketimpangan antar wilayah dan antar penduduk. Ketimpangan ini terjadi karena gagalnya asumsi *trickle down effect* sebagai mekanisme pemerataan dalam strategi pertumbuhan ekonomi. Strategi *pro-growth* dilaksanakan dengan tidak mengabaikan aspek keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat baik dalam bidang sosial ekonomi dan politik sehingga tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Upaya yang dilakukan melalui sejumlah instrument yaitu peningkatan investasi, penciptaan iklim usaha yang kondusif, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

2. **Pro-job**, berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong terbukanya peluang kerja bagi angkatan kerja, khususnya tenaga terdidik (bagi lulusan sekolah setingkat SMA dan Perguruan Tinggi) dan tenaga terlatih. Strategi yang dilakukan meliputi tiga langkah : 1) Perluasan kesempatan kerja berarti



mendorong berkembangnya sektor riil di Kota Lubuk Linggau terutama sektor industri, perdagangan dan jasa; 2) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, standarisasi dan sertifikasi; 3) Menjaga iklim ketenagakerjaan melalui penataan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.

3. **Pro-poor**, berarti pembangunan yang memiliki dimensi keberpihakan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung atau termarginalkan. Strategi yang dilakukan meliputi tiga klaster sesuai dengan tingkat kemiskinannya, yaitu: 1) Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, yang diarahkan pada rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin; 2) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup kelompok masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandiriannya; 3) Membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
4. **Pro-environtment**, diarahkan pada pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara yang pada gilirannya mengalami degradasi yang berakibat pada timbulnya bencana.

Namun demikian, strategi yang diharapkan dalam RPD ini adalah strategi yang digunakan untuk menjawab tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Lubuk Linggau mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau Tahun 2012-2032. Kebijaksanaan pengembangan tata ruang wilayah Kota Lubuk Linggau dimaksudkan untuk mendukung tujuan pengembangan wilayah Kota Lubuk Linggau dalam meningkatkan fungsi dan peranan Kota Lubuk Linggau dalam konteks internal dan eksternal serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperlebar hubungan serta memperbesar orientasi dan pelayanan.

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Lubuk Linggau dirumuskan berdasarkan:

1. Tujuan penataan ruang Kota Lubuk Linggau
2. Karakteristik Kota Lubuk Linggau
3. Kapasitas sumber daya Kota Lubuk Linggau

Kebijakan pengembangan pola ruang Kota Lubuk Linggau, meliputi :

1. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
2. Pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;



3. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
4. Pengembangan kawasan permukiman yang berwasan lingkungan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

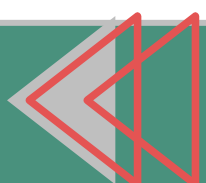
Strategi penataan ruang Kota Lubuk Linggau merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi :

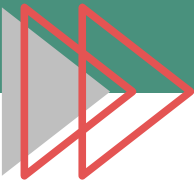
1. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kota;
2. Sebagai arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kota Lubuk Linggau;
3. Sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Lubuk Linggau.

Rencana struktur ruang wilayah Kota Lubuk Linggau merupakan rencana pengaturan pemanfaatan dan pengembangan pusat pelayanan kota dan sub pusat kota secara optimal dan terpadu. Dengan demikian akan tercipta suatu keseimbangan dan keserasian pertumbuhan serta perkembangan wilayah Kota Lubuk Linggau secara menyeluruh. Rencana Struktur Ruang Kota Lubuk Linggau melihat dan mempertimbangkan potensi dari masing-masing sub pusat kota, sehingga diharapkan rencana struktur Kota Lubuk Linggau membentuk sistem keterkaitan antara beberapa Sub PPK dengan PPK.

Penentuan konsepsi struktur ruang Kota Lubuk Linggau sampai tahun 2032 dilakukan berdasarkan fungsi Kota Lubuk Linggau sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dari sistem struktur ruang di Propinsi Sumatera Selatan. Di samping itu, struktur ruang kota juga dibentuk oleh kegiatan utama kota, hirarki kota serta pola jaringan jalan.

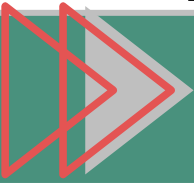
Untuk lebih memperjelas fungsi Kota Lubuk Linggau ini, maka perlu dibentuk struktur kota yang berjenjang dan mampu menjangkau seluruh wilayah kota. Sesuai dengan konsepsi perencanaan sebelumnya, struktur ruang direncanakan untuk memudahkan kegiatan pembangunan dan pengendalian pelayanan agar lebih efisien dan efektif. Atas dasar pertimbangan tersebut maka wilayah perencanaan Kota Lubuk Linggau seluas 367,73 Km² atau 36,77 Ha terdiri dari 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota (PPK), PPK tersebut meliputi 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) dan masing-masing Sub PPK tersebut meliputi beberapa Pusat Lingkungan. Pemantapan dan penentuan pembagian PPK, Sub PPK dan PL merupakan acuan untuk menetapkan pengembangan struktur tata ruang kota yang lebih detail dan akan dituangkan kemudian di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Lubuk Linggau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

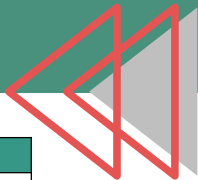




Tabel 6.1. Jenis Pusat Kegiatan, Lokasi dan Prioritas Penataan Ruang Kota Lubuk Linggau Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) dan Prioritas

No	Pusat Kegiatan	Titik Lokasi Pusat	Prioritas
1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Pusat Kota Lubuk Linggau berdasarkan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	1. Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, serta simpul transportasi yang melayani skala regional dan kota. 2. Untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota pusat pertumbuhan nasional (Palembang), melalui pengembangan dan peningkatan fungsi kota.
2	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Pusat Kota (Kelurahan Pasar Pemiri)	Kawasan perkotaan yang memberikan pelayanan skala kota maupun skala regional, pelayanannya diarahkan di pusat pelayanan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional dan pusat pemerintahan.
3	Sub Pusat Pelayanan Kota	1. Kel. Kayu Ara 2. Kel. Petanang Ilir 3. Kelurahan Air Kuti 4. Kelurahan Air Kati	1. Pusat kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum di pusat pelayanan Kota Lubuk Linggau. 2. Pusat kegiatan kawasan pertumbuhan baru, pelayanan umum dan perumahan di pusat pelayanan Kota Lubuk Linggau. 3. Pusat pelayanan kesehatan Kota Lubuk Linggau, kawasan perkantoran dan pusat jasa transportasi udara Kota Lubuk Linggau. 4. Pusat kegiatan kawasan industri dan pergudangan, pelayanan angkutan barang peti kemas dan pelayanan perumahan di Kota Lubuk Linggau.
4	Pusat Lingkungan	1. Kel. Belalau II 2. Kel. Margorejo 3. Kel. Marga Bakti 4. Kel. Sumber Agung 5. Kel. Jukung 6. Kel. Air Temam 7. Kel. Eka Marga 8. Kel. Simpang Periuk 9. Kel. Siring Agung 10. Kel. Watervang 11. Kel. Tanjung Aman	Berfungsi sebagai pusat permukiman dan pusat perdagangan skala lingkungan.
5	Kawasan Strategis Nasional (KSN)	Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kecamatan Lubuk Linggau Utara II dan Kecamatan Lubuk Linggau Barat II	Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau





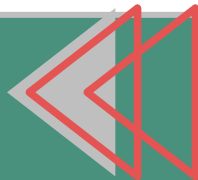
No	Pusat Kegiatan	Titik Lokasi Pusat	Prioritas
			lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis TNKS di Kota Lubuk Linggau seluas 6.616 Ha.
6	Kawasan Strategis Provinsi	Koridor Sepanjang Jalan Yos Sudarso	1. Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi. 2. Wilayah yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional yang melayani wilayah <i>hinterland</i> -nya

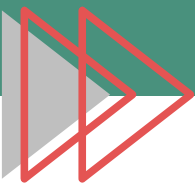
Sumber : RTRW Kota Lubuk Linggau 2012-2032

Rencana tata ruang wilayah Kota Lubuk Linggau juga memberikan arahan tentang pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Kawasan strategis di Kota Lubuk Linggau sesuai dengan katagori dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2. Kawasan Strategis Kota Lubuk Linggau

No	Kawasan Strategis	Kriteria	Arahan Pengembangan
1.	Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup	1. Keberadaaan TNKS di Kota Lubuk Linggau seluas 6.616 Ha 2. Melestarikan dan melindungi Taman Nasional Kerinci Seblat Bukit Sulap;
2.	Kawasan Perkotaan Kota Lubuk Linggau	1. Sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan dan juga sebagai pusat distribusi 2. Merupakan urat nadi ekonomi Kota Lubuk Linggau yang memiliki aspek dukungan infrastruktur yang memadai serta memiliki daya saing lokasi	1. Revitalisasai kawasan perdagangan dan jasa; 2. Penataan lingkungan sekitar; 3. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan dalam mendukung fungsi kawasan sebagai kawasan perkotaan; 4. Dalam struktur ruang provinsi, Kota Lubuk Linggau telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
3.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kawasan pertanian sawah irigasi teknis dengan luas kurang lebih 2.000 Ha yang terdapat di Kelurahan Eka Marga, Kelurahan Marga Bakti, Kelurahan Margorejo, Kelurahan	1. Penetapan deliniasi kawasan tanaman pangan di Kelurahan Eka Marga; 2. Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pertanian; 3. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan





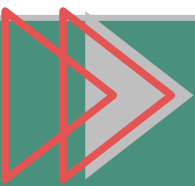
No	Kawasan Strategis	Kriteria	Arahan Pengembangan
		Karang Ketuan, Kelurahan Siring Agung Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II dan Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuk Linggau Barat II	4. pertanian;dan Pengembangan industri pengelolaan hasil pertanian.
4.	Kawasan Strategis dari kepentingan sosial budaya	Rumah khas atau adat yang ada di Kota Lubuk Linggau berbentuk panggung dan terbuat dari kayu di Kelurahan Batu Urip dan Kelurahan Jukung,	1. Penetapan deliniasi kawasan strategis sosial budaya di Kelurahan Batu Urip dan Kelurahan Jukung; 2. Penataan kembali rumah-rumah adat di Kelurahan Batu Urip dan Kelurahan Jukung; 3. Menghidupkann kembali acara-acara adat istiadat Kota Lubuk Linggau seperti upacara perkawinan dan sebagainya di Kelurahan Batu Urip dan Kelurahan Jukung; dan 4. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan strategis sosial budaya.

Sumber : RTRW Kota Lubuk Linggau 2012-2032

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, wilayah kecamatan memiliki peran yang sangat strategis sehingga diperlukan strategi pengembangan wilayah pada masing-masing kecamatan berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada. Kota Lubuk Linggau terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Kecamatan Lubuk Linggau Utara I, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I, dan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II.

Tabel 6.3. Arahan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Unggulan Kecamatan

No	Wilayah	Unggulan Wilayah	Arahan Pengembangan
1	Kecamatan Lubuk Linggau Barat I	- Pengembangan kawasan pasar regional dan tradisional - Kawasan perkantoran - Kawasan permukiman - Kawasan tanaman pangan - Kawasan pertahanan dan keamanan	- Pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan - Pengembangan kawasan permukiman - Merupakan salah satu kecamatan yang juga mendukung kawasan tanaman pangan
2	Kecamatan Lubuk Linggau Barat II	- Kawasan perdagangan - Kawasan wisata budaya - Kawasan perumahan	- Pengembangan kawasan perdagangan Pasar Inpres Blok A dan Blok B - Pengembangan kawasan wisata Museum Subkos dan Benteng Kuto



No	Wilayah	Unggulan Wilayah	Arahan Pengembangan
			- Kawasan peruntukkan perumahan
3	Kecamatan Lubuk Linggau Timur I	- Kawasan pariwisata - Pelayanan kesehatan - Kawasan permukiman	- Pengembangan kawasan wisata Dam Air Watervang - Pengembangan kawasan Gua Batu Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I - Pengembangan Rumah Sakit Siti Aisyah Tipe C
4	Kecamatan Lubuk Linggau Timur II	- Kawasan perdagangan dan jasa	- Pengembangan toko modern di Pusat Pelayanan Kota khususnya di kanan-kiri jalan Yos Sudarso dan A. Yani
5	Kecamatan Lubuk Linggau Utara I	- Kawasan perumahan - Kawasan perkebunan - Kawasan perkantoran - Kawasan peruntukkan pasar tradisional - Kawasan peruntukan industri rumah tangga / kecil dan mikro - Kawasan pariwisata alam	- Pengembangan kawasan perumahan dengan konsep Kasiba Lisiba - Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah - Pasar Satelit - Pengembangan kawasan sentra industri kreatif - Pengembangan kawasan wisata Air Terjun Taqli
6	Kecamatan Lubuk Linggau Utara II	Kawasan pariwisata	- Pengelolaan kawasan Bukit Sulap Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuk Linggau Utara II - Pengembangan kawasan Air Terjun Sei Sando Kelurahan Ulak Surung - Pengembangan kawasan wisata budaya Rumah Adat Batu Urip.
7	Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I	- Kawasan industri - Kawasan pariwisata - Kawasan cagar budaya pelestarian rumah adat - Kawasan perkebunan - Kawasan peternakan	- Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri menengah seluas kurang lebih 290 Ha - Pengembangan kawasan pariwisata Air Terjun Curug Layang - Pengembangan kawasan Air Terjun Temam - Pengembangan kawasan Gua Batu Naga Kelurahan Jukung Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I. - Kawasan pelestarian rumah adat di Kelurahan Jukung Selatan I - Pengembangan kawasan peternakan dengan luas 241 Ha
8	Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II	- Kawasan pertanian berkelanjutan - Kawasan perikanan	- Kawasan lahan pertanian berkelanjutan dengan luas kurang lebih sebesar 2.128 Ha - Kawasan peruntukan



No	Wilayah	Unggulan Wilayah	Arahan Pengembangan
			perikanan tangkap budidaya; dan kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Sumber : RTRW Kota Lubuk Linggau 2012-2032

6.3. Kebijakan Umum Pembangunan

Kebijakan umum pembangunan daerah diarahkan untuk:

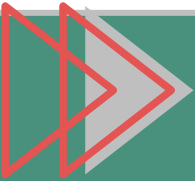
1. Menyelaraskan program-program prioritas pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan program prioritas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat;
2. Melaksanakan program yang mendukung pencapaian standar pelayanan minimal dan operasional;
3. Melaksanakan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan iklim usaha dan investasi (implementasi dan penguatan PTSP), peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
4. Melaksanakan program prioritas dalam memepercepat pengurangan angka kemiskinan melalui sinergi program pemerintah pusat dan daerah;
5. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat yang mendukung pencapaian target pembangunan nasional (*Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Environment*) dan tujuan pembangunan SDG's), pemenuhan ketentuan perundang-undangan (anggaran bidang pendidikan lebih dari 20 persen dan anggaran bidang kesehatan lebih dari 10 persen), pendampingan program-program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan; dan
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat Kota.

6.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui penerapan kebijakan pendapatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
- 2) Pemutakhiran data potensi dan data pendukung sebagai dasar penghitungan Bagi Hasil Dana Perimbangan;
- 3) Membentuk perusahaan daerah (BUMD) pelayanan masyarakat yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) yang selain menjamin kelangsungan dan pengembangan BUMD tersebut, juga





mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

- 4) Melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru;
- 5) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam teknis pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
- 6) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan;
- 7) Perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan penerimaan pendapatan asli daerah; dan
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan penerimaan pendapatan asli daerah.

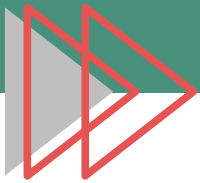
2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Kota Lubuk Linggau secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit dua puluh persen dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Kota Lubuk Linggau secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal sepuluh persen dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Kebijakan belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

- Penganggaran gaji dan tunjangan PNSD Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
- Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Tunjangan Kinerja Daerah yang dialokasikan untuk PNSD Kota Lubuk Linggau;
- Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan untuk PNSD guru berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Sertifikasi Guru PNSD;





- Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain untuk pimpinan dan anggota DPRD;
- Penganggaran belanja pemenuhan kebutuhan pelayanan Wali kota dan wakil Wali kota.

b. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Program yang didanai dari belanja hibah meliputi hibah kepada lembaga/instansi terkait yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

c. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat. Anggaran belanja bantuan sosial ditetapkan untuk diberikan kepada organisasi kemasyarakatan berupa organisasi/kegiatan keagamaan, organisasi/kegiatan kepemudaan, bantuan kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, kegiatan kependidikan, bantuan organisasi profesi, dan bantuan kepada rumah tangga miskin.

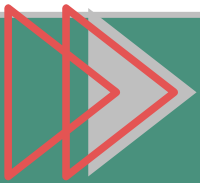
Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Selain itu, dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian objek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.

d. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam rangka untuk melaksanakan program khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dalam rangka pemberdayaan masyarakat atau tujuan lain yang telah ditentukan seperti belanja bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

e. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran yang diperuntukkan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti





penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

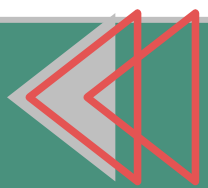
Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024-2026, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang produktif di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

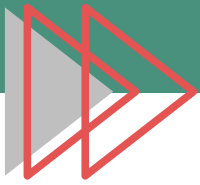
Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar
Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
 - f) sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar
Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;



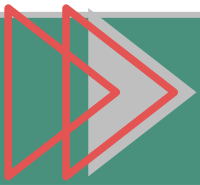


- m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
- b. Urusan pemerintahan pilihan
 Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
 - a) kelautan dan perikanan;
 - b) pariwisata;
 - c) pertanian;
 - d) Perdagangan; dan
 - e) Perindustrian.
- c. Unsur pendukung, meliputi:
 - 1) sekretariat Daerah; dan
 - 2) sekretariat DPRD.
- d. Unsur penunjang, meliputi:
 - 1) perencanaan;
 - 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan;
- e. Unsur pengawas yaitu inspektorat;
- f. Unsur kewilayahan, meliputi:
 - 1) kecamatan.

Kebijakan belanja daerah juga difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Alokasi belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan.

3. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pemerintah Kota Lubuk Linggau akan memberikan penyertaan modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan





berkembang. Penambahan penyertaan modal dilengkapi dengan analisis investasi. Salah satu strategi dan upaya untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerah yang defisit dari Pendapatan daerah, Pemerintah Kota Lubuk Linggau mempertimbangkan melakukan Pinjaman Daerah sebagai solusi untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan strategis yang mendukung upaya pemulihan ekonomi daerah.

6.5. Strategi dan Arah Kebijakan Terpadu Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Penjabaran tujuan dan sasaran RPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 dirumuskan dalam 2 (dua) prioritas pembangunan yaitu pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan peningkatan sektor jasa. Dalam pelaksanaan prioritas pembagunan tersebut diperlukan arah kebijakan yang mampu menjawab isu strategis dan permasalahan yang ada di Kota Lubuk Linggau.

Gambar 6.1. Penyesuaian Tema Pembangunan Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026



Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2023

Berikut adalah penjelasan fokus/tema pembangunan Kota Lubuk Linggau:

I. Agenda Pembangunan Tahun I (2024)

Pembangunan Tahun 2024 menjadi tahap awal bagi Kota Lubuk Linggau dalam melaksanakan tahap I RPD. Pembangunan tahun 2024 ini memiliki fokus pembangunan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pada tahun ini tema pembangunan Kota Lubuk Linggau yaitu, “Perwujudan Kota Metropolitan Madani Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.



Pada tahun ini pembangunan ekonomi masyarakat akan berfokus pada peningkatan kualitas SDM terutama peningkatan kualitas skill tenaga kerja, diharapkan mampu meningkatkan kualitas daya saing pekerja, dan mampu bekerja di sektor perindustrian sebagaimana ciri dari kota metropolis. Serta dengan SDM yang berkualitas akan lahir kota yang ramah, taat aturan, sejahtera, berbudaya dan beradab. Dengan ini diharapkan akan terwujudnya kota industri yang ramah dan partisipatif dalam pembangunan yang didukung dengan SDM yang berkualitas.

II. Agenda Pembangunan Tahun II (2025)

Pembangunan Tahun 2025 merupakan kelanjutan pembangunan Kota Lubuk Linggau tahun 2024 yang akan berfokus pada peningkatan kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan SDM dengan tema pembangunan **“Peningkatan Daya Saing Daerah Didukung Pelayanan Publik dan Infrastruktur yang Unggul”**. Pada tahun 2025, dengan memperhatikan potensi unggulan daerah terutama dalam pengelolaan SDA yang didukung dengan SDM yang unggul, infrastruktur yang mumpuni, dan pelayanan pemerintah yang handal, diharapkan dapat mendorong perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi sehingga mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah.

III. Agenda Pembangunan Tahun III (2026)

Pembangunan tahun ketiga (2026) menjadi tahun terakhir serta merupakan penentuan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026. Pada tahun ini pembangunan akan berfokus untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi serta memelihara kelangsungan standar hidup bagi seluruh penduduknya melalui pembangunan ekonomi yang berkualitas dengan tetap memelihara kemandirian ekonomi, dengan tema pembangunan yaitu **“Peningkatan Ketahanan Kota Melalui Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan”**.

Pondasi utama dalam mencapai ketahanan ekonomi kota ditentukan oleh kemampuan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah dan tingkat kemiskinan wilayah. Pembangunan tahun 2026 akan dilaksanakan dengan menitikberatkan pembangunan yang merata diseluruh bidang. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja sehingga menyebabkan berkurangnya angka kemiskinan dan laju pengangguran. Disamping itu pencapaian ketahanan kota didukung dengan proses pembangunan yang bisa memaksimalkan sumber daya alam yang disediakan. Sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan pembangunan yang berkelanjutan.

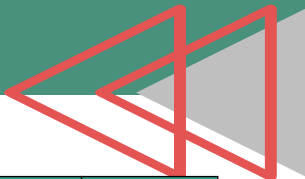


Strategi dan arah kebijakan yang diharapkan dalam RPD ini adalah strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk menjawab tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hubungan antara setiap strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran terpadu disajikan pada Tabel 6.4. di bawah ini.

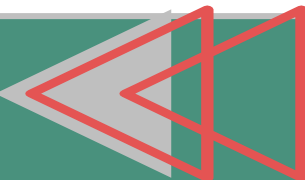


Tabel 6.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

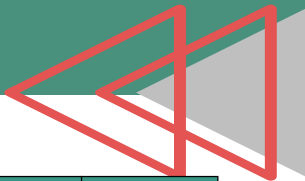
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
Meningkatkan perluasan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik			
			Peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran			
		Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan dasar	Pemerataan memperoleh layanan pendidikan dasar melalui perluasan daya tampung sekolah pendidikan dasar			
			Kolaborasi lintas sektor untuk penerapan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI), dan Penguatan layanan satu tahun pra-sekolah			
		Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan			
		Memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada masyarakat miskin dan berprestasi	Pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu			
		Mengembangkan perpustakaan daerah	Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan			
		Mengembangkan budaya dan peningkatan prestasi olahraga	Pengembangan budaya olahraga melalui pendidikan dan masyarakat			
		Meningkatkan kualitas hidup anak, perempuan dan pemuda	Penguatan layanan penanganan kekerasan terhadap anak secara terpadu			
			Optimalisasi pencegahan perkawinan anak dan penarikan pekerja anak dari pekerjaan terburuk			



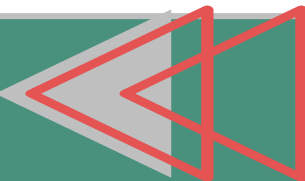
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
			Peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak anak dalam kondisi khusus termasuk anak yang berhadapan dengan hukum			
			Penciptaan lingkungan ramah anak			
			Penguatan tata kelola layanan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan anak, optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)			
			Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan daerah			
			Penguatan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan			
			Peningkatan partisipasi aktif pemuda terutama melalui kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi			
			Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, intoleransi, penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual			
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Perluasan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik			
			Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap			
			Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi			
			Peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional			
		Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik terintegrasi			



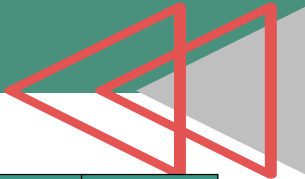
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
		Meningkatkan pengendalian penyakit	Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini			
		Menguatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat			
		Menguatkan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	Penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas			
			Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan			
			Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan			
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi						
	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif			
			Peningkatan pelayanan perizinan investasi			
			Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi			
			Penguatan penyelenggaraan pemilu tahun 2024			
			Penguatan pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila			
			Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong			
		Menguatkan kewirausahaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Peningkatkan kemitraan usaha antarausaha mikro kecil dan usaha menengah besar			
			Peningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi			



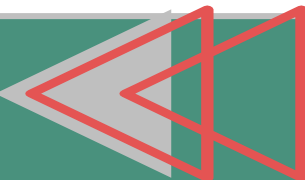
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
		Menyempurnakan regulasi dan kebijakan yang dapat mendorong investasi	Koordinasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan yang dapat mendorong investasi			
	Meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa	Meningkatan prasarana perdagangan	Pengembangan sentra perdagangan di pusat-pusat pertumbuhan wilayah			
			Peningkatan kualitas pasar tradisional			
		Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Penerapan kebijakan perlindungan konsumen			
	Meningkatnya pertumbuhan Industri	Meningkatkan daya saing produk kreatif	pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM)			
			Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif			
		Fasilitasi investasi dan pembangunan kawasan industri	Penguatan infrastruktur pendukung industri			
		Meningkatan industri berbasis pengolahan	Akselerasi industrialisasi berbasis pengolahan			
	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Pengembangan objek daya tarik wisata	Peningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata			
		Meningkatan kemitraan dan pemasaran pariwisata, dengan menumbuhkan sektor informal	Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata			
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial						
	Menurunnya pengangguran	Meningkatan produktivitas tenaga kerja	penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis			
		Menciptakan lapangan kerja	Pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula			



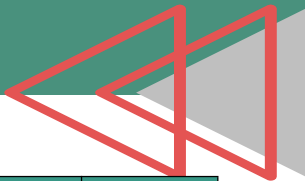
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Peningkatkan koordinasi stabilitas harga	Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memperkuat tata kelola sistem logistik			
		Menjaga kecukupan pasokan bahan pokok konsumsi masyarakat	Peningkatkan ketersediaan pangan pokok konsumsi masyarakat			
	Menurunnya Tingkat Kedalaman dan Tingkat Keparahan Kemiskinan	Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial	perluasan dan penguatan penyaluran bantuan sosial			
			Penguatan integrasi penyaluran program bantuan sosial			
			Pengembangan mekanisme terintegrasi program-program bantuan sosial			
		Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi	pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan			
			fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan			
			Penyelenggaraan kewirausahaan sosial			
		Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur yang pro rakyat miskin	Pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana prasarana ramah anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas			
	Menguatnya ketahanan pangan daerah	Peningkatkan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Meningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan			
			Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan			
			Meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan			
		Meningkatan infrastruktur dan	Pembangunan infrastruktur sanitasi permukiman			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
		layanan sanitasi permukiman	Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi			
	Meningkatnya infrastruktur dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas	Peningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar			
			Penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan konektivitas kegiatan antar wilayah			
			Penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas			
Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur						
	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang memadai	Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan			
			Peningkatan layanan infrastruktur dasar permukiman			
		Meningkatan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman	Pembangunan infrastruktur sanitasi permukiman			
			Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi			
	Meningkatnya infrastruktur dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas	Peningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar			
			Penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan konektivitas kegiatan antar wilayah			
			Penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas umum permukiman yang memenuhi SPM			
			Penyediaan Infrastruktur dasar yang memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)			
	Meningkatnya pengembangan wilayah	Pembangunan infrastruktur sesuai dengan tata ruang dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang			

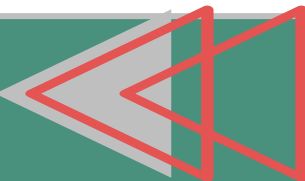


Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026	
		Meningkatkan infrastruktur dengan memprioritaskan terhubungnya pusat-pusat kegiatan	Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah				
		Meningkatkan aksesibilitas kawasan potensial sektor ekonomi	Pembangunan jalan mendukung kawasan industri dan pariwisata				
	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan perkotaan	Peningkatan sarana dan prasarana persampahan				
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup				
		Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Tanah				
			Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan				
			Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan				
			Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan				
		Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan				
			Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik				
			Pengolahan Limbah B3 secara terpadu				
		Percepatan Perwujudan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan di Perangkat Daerah Pelayanan Publik	Penerapan inovasi pelayanan publik secara elektronik			
				Peningkatan riset dan inovasi daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Peningkatan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil			
			Peningkatan kualitas keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif secara elektronik			
			Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah			
			Pengelolaan Keuangan daerah yang efektif dan efisien			
			Peningkatan PAD melalui penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi dan pemanfaatan sumber pendanaan lainnya			
			Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik			
	Meningkatnya kapasitas birokrasi	Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN	Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit			
			Penguatan Penataan Jabatan Fungsional			
		Meningkatkan efektifitas tata kelola instansi pemerintah daerah	Mengoptimalkan penerapan SPBE terintegrasi			
			Penguatan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Organisasi			
			Penataan kelembagaan dan proses bisnis yang efektif, serta berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan			

Sumber: Bappedaltbang Kota Lubuk Linggau, 2023



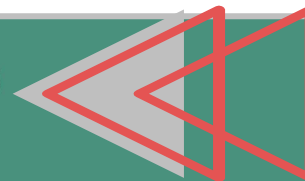
6.6. Program Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau 2024-2026

Penjabaran strategi dan arah kebijakan untuk menjawab tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diimplementasikan dalam Program Pembangunan Daerah yang merupakan program-program prioritas tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Masing-masing program prioritas tersebut memiliki indikator program (*outcome*) yang merupakan *intermediate outcome* bagi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Artinya keberhasilan pencapaian program-program prioritas tersebut sangat mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran. Adapun program, prioritas yang akan dilaksanakan pada pembangunan tahun 2024-2026 dapat dilihat dalam Tabel 6.5. sebagai berikut:



Tabel 6.5. Program Pembangunan Daerah yang Disertai dengan Pagu Indikatif Kota Lubuk Linggau

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	1.	Meningkatkan perluasan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan		Indeks Sumber Daya Manusia (ISDM)	Indeks	72,013	72,230		72,446		72,661		73,092		
		1.1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pengetahuan	Indeks	0,702	0,709		0,711		0,713		0,713		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	135	136	150.534.820	137	158.061.561	138	165.964.639	138	165.964.639	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	persen	98,2	99,2	130.000.000	100	136.500.000	100	143.325.000	100	143.325.000	
				Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) SD	persen	99,8	100	24.473.817.706	100	25.697.508.591	100	26.982.384.021	100	26.982.384.021	
				Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) SMP	persen	100	100	2.104.160.976	100	2.209.369.025	100	2.319.837.476	100	2.319.837.476	
				Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persen	30	32	719.194.450	34	755.154.173	36	792.911.881	36	792.911.881	
				Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	persen	70	74	14.453.656.000	75	15.176.338.800	76	15.935.155.740	76	15.935.155.740	
				Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	persen	84,2	86,2	6.606.025.000	88,2	6.936.326.250	90	7.283.142.562	90	7.283.142.562	
				Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	persen	1,42	1,44	3.517.880.000	1,46	3.693.774.000	1,48	3.878.462.700	1,48	3.878.462.700	
				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	persen	0,4	0,42	1.038.450.000	0,44	1.090.372.500	0,46	1.144.891.125	0,46	1.144.891.125	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum berstandar	persen	100	100	89.600.000	100	94.080.000	100	98.784.000	100	98.784.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	guru:murid	6,15	6,16	113.528.295	6,17	119.204.709	6,18	125.164.945	6,18	125.164.945	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	guru:murid	7,2	7,4	113.528.295	7,6	119.204.709	7,8	125.164.945	7,8	125.164.945	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	budaya	6	6	49.200.000	6	51.660.000	7	54.243.000	7	54.243.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah Seni budaya yang	seni	20	20	122.800.000	25	128.940.000	30	135.387.000	30	135.387.000	

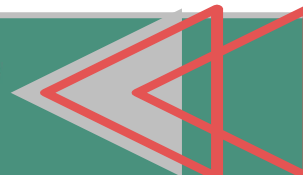


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								2024		2025		2026		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					dilestarikan	budaya										
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		50	60	17.000.000	65	17.850.000	70	18.742.500	70	18.742.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		80	85	589.319.600	90	618.785.580	90	701.120.196	90	701.120.196	
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	60	62	100.000.000	64	105.000.000	68	110.250.000	68	110.250.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Kunjungan Masyarakat ke ruang baca publik	orang	293.490,00	328.349,00	1.265.249.475	344.766,00	1.328.511.949	362.004,00	1.394.937.546	362.004,00	1.394.937.546	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang telah dialihmediakan	persen	0	38	39.510.000	75	41.485.500	100	43.559.775	100	43.559.775	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Persentase PD yang mengimplementasikan layanan kearsipan berbasis teknologi informasi	persen	0	38	105.619.453	75	110.900.425	100	116.445.447	100	116.445.447	
					Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsip secara Baku	persen	50	70	26.716.200	80	28.052.010	90	29.454.610	90	29.454.610	
		1.2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Indeks Kesehatan	Indeks	0,83	0,86		0,88		0,9		0,9		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Morbiditas	Persen	12,27	11,52	4.173.766.925	10,77	4.278.111.098	10,02	4.385.063.876	10,02	4.385.063.876	Dinas Kesehatan
					Cakupan peserta BPJS PBI APBD	Persen	4,4	5	17.210.551.325	5,1	17.640.815.108	5,2	18.081.835.485	5,2	18.081.835.485	
					Cukupan pelayanan kesehatan ibu dan balita	Persen	90,76	100	2.868.076.772	100	2.939.778.691	100	3.013.273.159	100	3.013.273.159	
					Kategori penyelenggaraan kota sehat	kategori kota sehat	swasti saba padapa status kota sehat	swasti saba wiwierda status kota sehat	791.418.839	swasti saba wiwierda status kota sehat	811.204.309	swasti saba wiwierda status kota sehat	831.484.417	swasti saba wiwierda status kota sehat	831.484.417	
					Persentase fasilitas kesehatan yang ter	Persen	83	95	5.494.592.422	100	5.631.957.233	100	5.772.756.164	100	5.772.756.164	

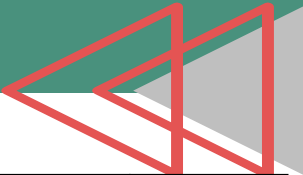


No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung- jawab
								2024		2025		2026		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					akreditasi											
					Persentase kemitraan di bidang kesehatan yang memenuhi standar	Persen	100	100	1.536.790.738	100	1.575.210.506	100	1.614.590.769	100	1.614.590.769	
					Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar	Persen	63	65	15.738.031.648	67	16.131.482.440	70	16.534.769.501	70	16.534.769.501	
					Prevalensi angka kejadian stunting	Persen	11,7	11	590.325.811	10,3	605.083.956	9,6	620.211.055	9,6	620.211.055	
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK yang tersedia sesuai standar	Persen	63	65	5.380.881.461	67	5.515.403.498	70	5.653.288.585	70	5.653.288.585	Dinas Kesehatan
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) berizin yang memenuhi standar	Persen	100	100	54.659.150	100	56.025.629	100	57.426.269	100	57.426.269	Dinas Kesehatan
					Persentase Sarana Apotik, Toko Obat dan Toko Alkes yang memenuhi standar	Persen	85	100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan penyelenggaraan kluster germas	Persen	100	100	491.989.624	100	524.963.982	100	538.087.774	100	538.087.774	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga	Persen	100	100	47.741.150	100	48.934.679	100	50.158.046	100	50.158.046	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase Data KKBPK yang akurat dan tepat waktu	Persen	95	95	127.500.000	95	130.687.500	95	133.954.688	95	133.954.688	
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan pasangan usia subur yang tidak ber-kb (unmeetnet)	Persen	23,32	16,23	40.400.000	10,5	41.410.000	10,1	42.445.250	10,1	42.445.250	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	19,05	28,39	425.000.000	32,3	435.625.000	33	446.515.625	33	446.515.625	
					Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	9,14	25,5		24,5		23,5		23,5		
				PROGRAM	Persentase Perkawinan	Persen	21,9	20,5	1.725.464.350	20	1.769.661.731	19,5	1.813.903.274	19,5	1.813.903.274	Dinas

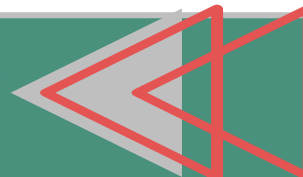


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Wanita Usia dibawah 20 Tahun											Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	cakupan pelatih yang bersertifikat	Persen	39	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
					cakupan pembinaan atlet muda	Persen	26	30	150.000.000	32	153.750.000	35	157.000.000	35	157.000.000	
					cakupan pembinaan olahraga	Persen	70	70	30.000.000	71	35.000.000	72	40.000.000	72	40.000.000	
					Persentase Kompetisi yang diikuti	Persen	86	86	4.310.000.000	87	4.417.000.000	87	4.417.000.000	87	4.417.000.000	
					rasio sarana olahraga per 1000 penduduk	Rasio	0,01	0,9	300.000.000	0,9	307.000.000	0,9	307.000.000	0,9	307.000.000	
	2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi			Pertumbuhan Ekonomi	angka	4,51	3,51		4,11		4,81		4,81		
		2.1.	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif		Nilai ICOR	nilai	10,05	8,672		8,484		8,295		8,295		
				PROGRAM PENINGKATANKETEN TERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda dan perkara	Persen	100	100	137.295.000	100	169.633.000	100	147.317.500	100	147.317.500	Satuan Polisi Pamong Praja
					Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)	Persen	100	100	2.630.700.000	100	2.574.700.000	100	2.419.100.000	100	2.419.100.000	
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	persentase penambahan nilai investasi	Persen	30	30	185.000.000	37,5	245.500.000	46,87	303.850.000	46,87	303.850.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	jumlah investor baru	investor baru	16	18	456.000.000	19	501.600.000	21	551.760.000	21	551.760.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	88	330.000.000	89	363.000.000	90	399.300.000	90		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

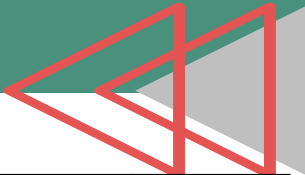


No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Pintu
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase pelanggaran penanaman modal yang ditindaklanjuti	persen	20	100	322.300.000	100	354.530.000	100	389.983.000	100	389.983.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	persentase penerapansarana dan prasarana penunjang layanan	persen	0	100	65.000.000	100	71.500.000	100	78.650.000	100	78.650.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang memahami ideologi dan wawasan kebangsaan	persen	100	100	1.500.000.000	100	1.600.000.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kelembagaan pemerintah yang berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi di masyarakat	persen	100	100	60.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase kerja sama ormas dengan pemerintah dalam pembangunan	persen	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam peningkatan solidaritas umat beragama	persen	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN	Tingkat kriminalitas	persen	100	100	400.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan

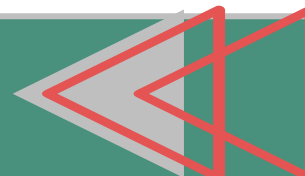


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											Politik	
		2.2.	Meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa	PDRB sektor perdagangan dan jasa	nilai		2.132,65		2.178,88		2.225,10		2.225,10			
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang memiliki sarana dan prasarana yang baik	persen	100	100	516.250.000	100	533.930.750	100	550.555.469	100	550.555.469	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase komunitas produk unggulan daerah yang dikembangkan	persen	100	100	205.000.000	100	210.125.000	100	215.378.125	100	215.378.125	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang tertib ukur	persen	100	100	169.125.000	100	173.353.125	100	177.686.953	100	177.686.953	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase tingkat penggunaan produk dalam negri	persen	100	100	1.025.000.000	100	1.050.625.000	100	1.076.890.625	100	1.076.890.625	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	persen	100	100	51.250.000	100	52.531.250	100	53.844.531	100	53.844.531	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat kecukupan barang penting	persen	100	100	649.000.000	100	665.225.000	100	681.855.625	100	681.855.625	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		2.3.	Meningkatnya pertumbuhan Industri	Laju Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	Persen		6,52		7,59		8,65		8,65			
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengumpulan data industri kecil, menengah dan aneka	Persen	100	100	450.000.000	100	461.250.000	100	472.781.250	100	472.781.250	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	4,8	4,9	717.500.000	5	735.437.500	5,1	753.823.438	5,6	753.823.438	Dinas Perdagangan dan	

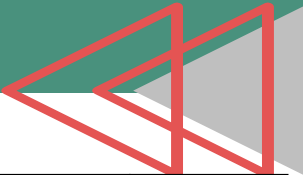


No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung- jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				INDUSTRI												Perindustrian
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase rekomendasi izin usaha industri yang dikeluarkan	Persen	100	100	100.000.000	100	102.500.000	100	105.062.500	100	105.062.500	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengumpulan data industri kecil, menengah dan aneka	Persen	100	100	450.000.000	100	461.250.000	100	472.781.250	100	472.781.250	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		2.4.	Meningkatnya pengembangan pariwisata		Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen		4,042		4,107		4,151		4,151		
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Persentase Daya Tarik Wisata Daerah	persen	20	30	1.035.000.000	40	1.665.000.000	50	2.810.000.000	50	2.810.000.000	Dinas Pariwisata
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Terlaksananya Promosi Pariwisata Daerah, Event Kepariwisataa, dan Produk Wisata Unggulan Daerah Lainnya	promosi	75	77	1.867.705.662	80	2.400.644.928	90	2.569.962.573	90	2.569.962.573	Dinas Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Dibina dan Ditingkatkan Potensinya	persen	15	30	250.000.000	45	325.000.000	60	400.000.000	60	400.000.000	Dinas Pariwisata
	3.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial			Indeks Gini	Indeks		0,35		0,341		0,332		0,332		
		3.1.	Menurunnya pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	5,94	5,28		4,95		4,62		4,62		
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersedianya Data Perencanaan Tenaga Kerja		1	1	220.000.000	1	2.500.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Dinas Ketenagakerja an
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												Dinas Ketenagakerja an
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												Dinas Ketenagakerja an
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												Dinas Ketenagakerja an
				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi aktif	persen	8	9	220.000.000	10	240.000.000	11	350.000.000	11	350.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

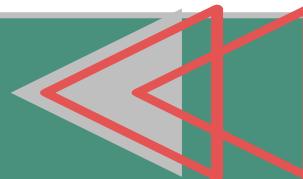


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mengikuti (RAT) rapat anggota tahunan	persen	40	50	230.000.000	54	260.000.000	56	260.000.000	56	260.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	persen	19,2	19,5	265.000.000	20	275.000.000	20,5	280.000.000	20,5	280.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang memiliki SDM koperasi	persen	26,92	30,83	220.000.000	38,13	250.000.000	42,66	285.000.000	42,66	285.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang memiliki pendampingan	persen	12	20	225.000.000	24	355.000.000	28	395.000.000	28	395.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Pelaku UMKM naik kelas	Pelaku UMKM	50	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	UMKM yang memenuhi standar pasar modern	Jumlah UMKM	25	40	80.000.000	50	150.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase OKP yang aktif	persen	72,84	80	200.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
					persentase pemuda sukarelawan	persen	1,32	1,5	55.000.000	1,5	55.000.000	1,5	55.000.000	1,5	55.000.000	
					persentase pemuda yang aktif dalam OKP	persen	4,26	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	
					persentase wirausaha muda	persen	8,4	11	157.000.000	11	157.000.000	11	157.000.000	11	157.000.000	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase OKP yang aktif	persen	72,84	80	200.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
					persentase pemuda sukarelawan	persen	1,32	1,5	55.000.000	1,5	55.000.000	1,5	55.000.000	1,5	55.000.000	
					persentase pemuda yang aktif dalam OKP	persen	4,26	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	
					persentase wirausaha muda	persen	8,4	11	157.000.000	11	157.000.000	11	157.000.000	11	157.000.000	
				PROGRAM	persentase pramuka yang	persen	8,89	8,89	300.000.000	8,89	300.000.000	8,89	300.000.000	8,89	300.000.000	Dinas Pemuda



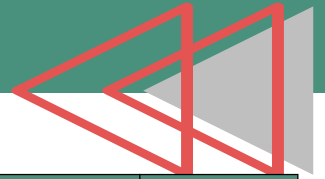
No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	aktif											dan Olahraga
		3.2.	Meningkatnya daya beli masyarakat		Indeks Pengeluaran	Indeks	0,502	0,74		0,77		0,8		0,8		
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	persen	100	100	51.250.000	100	52.531.250	100	53.844.531	100	53.844.531	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat kecukupan barang penting	persen	100	100	649.000.000	100	665.225.000	100	681.855.625	100	681.855.625	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.3.	Menurunnya Tingkat Kedalaman dan Tingkat Keparahan Kemiskinan		Angka Kemiskinan	Angka	12,68	12,35		12,23		12,12		12,12		
					Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	1,5	1,47		1,45		1,41		1,41		
					Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,27	0,24		0,23		0,21		0,21		
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase MBR mendapatkan Akses Perumahan subsidi	persen	23,72	23,72	700.287.500	27,92	717.794.687	32,22	735.739.554	32,22	735.739.554	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase wilayah rawan bencana yang mendapatkan layanan mitigasi bencana	persen	100	100	365.000.000	100	360.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulang an Bencana
					Persentase wilayah rentan bencana yang siaga bencana	persen	11,76	50		55		60		60		
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran	persen	73,57	100	3.062.502.000	100	3.015.516.000	100	3.222.502.000	100	3.222.502.000	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulang an Bencana
					Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah	menit	15	15		15		15		15		



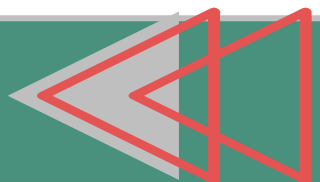
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)											
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah lembaga dan tenaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan	orang/lem baga	295	305	466.000.000	315	476.000.000	320	485.000.000	320	485.000.000	Dinas Sosial
				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran dan orang terlantar	persen	100	100	18.000.000	100	19.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Dinas Sosial
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelangan pengemis dan masyarakat yang mendapatkan rehabilitasi sosial	persen	53,6	56,2	200.000.000	58,3	250.000.000	60,6	300.000.000	60,6	300.000.000	Dinas Sosial
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persen	93,46	95	230.000.000	96	235.000.000	97	240.000.000	97	240.000.000	Dinas Sosial
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase bencana yang tertangani	persen	100	100	256.000.000	100	258.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	Dinas Sosial
		3.4.	Menguatnya ketahanan pangan daerah		Rasio kecukupan pangan	Rasio		1,09		1,16		1,18		1,18		
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah ketersediaan energi dan protein per kapita	gram/kap/ hari	63 gram/kap / hari	64 gram/ kap/hari	408.000.000	64 gram/ kap/hari	431.000.000	64 gram/ kap/hari	451.000.000	64 gram/ kap/hari	451.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
					Jumlah ketersediaan energi dan protein per kapita	kkal/kap/h ari	2004 kkal/kap/ hari	2400 kka l/kap/hari	408.000.000	2400 kka l/kap/hari	431.000.000	2400 kka l/kap/hari	451.000.000	2400 kka l/kap/hari	451.000.000	
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	skor	83	95	752.000.000	100	790.000.000	100	828.000.000	100	828.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN	Jumlah Rumah Tangga Rentan Rawan Pangan yang mendapat bantuan	persen	100	100	425.000.000	100	460.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

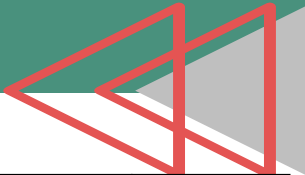


No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				PANGAN												
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Standarisasi Mutu Pangan	komoditi	10	15	75.000.000	20	85.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi	kelompok tani	60	62	1.785.000.000	66	1.882.500.000	70	1.984.375.000	70	1.984.375.000	Dinas Pertanian
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase lahan pertanian yang memiliki sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas	persen	70	75	2.400.599.570	80	2.568.129.548	90	2.711.536.025	90	2.711.536.025	Dinas Pertanian
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persentase penyakit yang tertangani	persen	85	90	820.000.000	93	935.000.000	95	1.050.750.000	95	1.050.750.000	Dinas Pertanian
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan, tanaman pangan dan holtikultura	persen	75	80	1.020.000.000	85	1.145.000.000	90	1.271.250.000	90	1.271.250.000	Dinas Pertanian
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	rasio cakupan binaan kelompok tani	rasio	70	75	450.000.000	77	472.500.000	80	496.125.000	80	496.125.000	Dinas Pertanian
	4.	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur			Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks		50,83		51,7		52,57		52,57		
		4.1.	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman		Luas Kawasan Kumuh	Hektar	527,05	413,87		414,8		410,16		410,16		
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan permukiman memiliki ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai	persen	70	95,5	32.340.810.726	96	34.429.794.226	96,5	36.063.647.976	96,5	36.063.647.976	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Rasio tempat pemakaman persatuan penduduk	M2/1000 Penduduk	317,67	317,67	145.701.093	317,67	145.701.093	317,67	145.701.093	317,67	145.701.093	
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase luasan taman dan makam terhadap pemenuhan ruang terbuka hijau	persen	0,046	0,06	5.112.832.173	0,07	5.240.652.978	0,08	5.371.669.303	0,08	5.371.669.303	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		4.2.	Meningkatnya infrastruktur dasar		Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	Indeks		65,86		67,67		69,48		69,48		

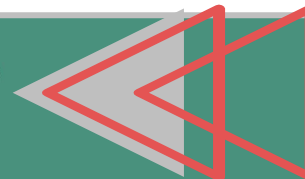


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penurunan Titik Rawan Bencana Akibat Daya Rusak Air	persen	29,51	29,51	10.800.000.000	35,25	12.900.000.000	35,25	12.900.000.000	35,25	12.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Ketersediaan Perencanaan Teknis Infrastruktur Sumber Daya Air	persen	28	28,57	1.200.000.000	34,52	1.450.000.000	36,9	1.550.000.000	36,9	1.550.000.000	
					Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi Yang Terbangun	persen	26,92	26,92	8.400.000.000	36,54	11.400.000.000	36,54	11.400.000.000	36,54	11.400.000.000	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum perpipaan	persen	42,04	42,04	1.312.500.000	42,14	1.312.500.000	42,25	1.312.500.000	42,25	1.312.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAANPERS AMPAHAN REGIONAL	Prosentase LayananTPA	persen	0	0	-	0	-	0	-	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase Pddk terlayani IPLT	persen	0	0	-	0	-	0	-	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Ketersediaan Saluran drainase sekunder yang fungsional	persen	76,31	76,31	4.428.000.000	76,95	4.428.000.000	79,66	4.428.000.000	79,66	4.428.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan Gedung Sesuai Standar	persen	100	100	56.425.000.000	100	56.425.000.000	100	56.425.000.000	100	56.425.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan Fasilitas publik dan lingkungannya dalam kondisi baik	persen	100	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan



No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Ruang
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase izin lokasi yang di terbitkan	persen	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti rugi dan santuna tanah yang terselesaikan	persen	37,14	65,71	15.050.000	100	10.050.000	100	15.050.000	100	15.050.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4.3.	Meningkatnya pengembangan wilayah		Indeks Aksesibilitas	Indeks		0,793		0,808		0,822		0,822		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Wilayah yang Terlayani Angkutan Perkotaan	kecamata n	7	8	350.000.000	8	367.500.000	8	385.875.000	8	385.875.000	Dinas Perhubungan
					Kecepatan Rata-Rata Per Ruas Jalan	km/jam	40	50	1.100.000.000	50	1.155.000.000	50	1.212.750.000	50	1.212.750.000	
					Persentase Angkutan Jalan (Orang dan/atau Barang) Laik Jalan	persen	100	100	410.000.000	100	430.500.000	100	452.025.000	100	452.025.000	
					Persentase Angkutan Perkotaan	persen	32	35	500.000.000	40	565.000.000	45	593.250.000	45	593.250.000	
		4.4.	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,86	67,46		68,37		69,28		69,28		
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu	persen	60	60	100.000.000	60	100.000.000	61	120.000.000	66	120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase Air Tanah yang	persen	60	60	100.000.000	60	100.000.000	61	120.000.000	69	120.000.000	

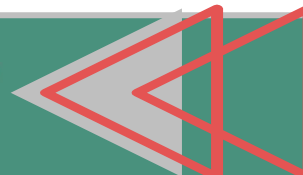


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Memenuhi Baku Mutu											
					Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi GRK	persen	0	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	
					Persentase Luas Lahan yang Telah Ditetapkan Status Kerusakan Lahan/Atau Tanah Untuk Produksi Bio Massa	persen	0	7,98	150.000.000	7,98	150.000.000	7,98	150.000.000	7,98	150.000.000	
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap kebijakan B3 dan LB3	persen	16	18	50.000.000	20	50.000.000	22	50.000.000	26	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Data/Dokumen LH	persen	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	persentase usaha/kegiatan yang memenuhi baku mutu	persen	20	25	50.000.000	30	50.000.000	35	50.000.000	45	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Tutupan Lahan	persen	80	80	350.828.000	80	350.828.000	80	428.000.000	80	428.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbunan Sampah	persen	74,9	72	4.624.000.000	73	4.624.000.000	77	5.124.000.000	85	5.124.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH												Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM	Persentase Penghargaan	persen	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas



No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung- jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Lingkungan Hidup										Lingkungan Hidup	
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	persen	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	5.	Percepatan Perwujudan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,47	57,29		60,41		63,69		63,69		
		5.1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,26	4,4		4,57		4,74		4,74		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,97	82,48		83,25		84,55		84,55		
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	presentase layanan pendaftaran penduduk	persen	100	100	390.000.000	100	450.000.000	100	552.600.000	100	552.600.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	persentase layanan pencatatan sipil	persen	100	100	70.000.000	100	71.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	persen	100	100	650.000.000	100	625.000.000	100	725.389.000	100	725.389.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	persentase pengelolaan profil kependudukan	persen	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	31.611.000	100	31.611.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan sesuai standar pelayanan Kecamatan Lubuklinggau Barat I	persen	100	100	275.000.000	100	300.000.000	100	325.000.000	100	325.000.000	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan sesuai standar pelayanan Kecamatan Lubuklinggau Barat II	persen	100	100	1.500.000.000	100	1.600.000.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	Kecamatan Lubuklinggau Barat II
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan sesuai standar pelayanan Kecamatan Lubuklinggau Timur I	persen	100	100	1.646.000.144	100	1.728.300.151	100	1.814.715.159	100	1.814.715.159	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
				PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase layanan sesuai standar pelayanan	persen	100	100	236.250.047	100	248.062.550	100	260.465.677	100	260.465.677	Kecamatan Lubuklinggau

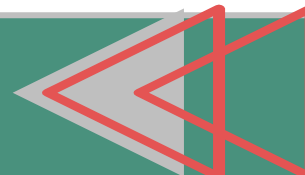


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung- jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Lubuklinggau Timur II											Timur II
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan sesuai standar pelayanan Kecamatan Lubuklinggau Utara I	persen	90	90	458.882.550	95	481.826.678	95	505.918.011	95	505.918.011	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan sesuai standar pelayanan Kecamatan Lubuklinggau Utaral II	persen	90	90	458.882.550	95	481.826.677	95	505.918.011	95	505.918.011	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan sesuai standar pelayanan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	persen	90	90	651.620.160	95	684.201.168	95	718.411.226	95	718.411.226	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan sesuai standar pelayanan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	persen	90	90	458.882.550	95	481.826.678	95	505.918.011	95	505.918.011	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok /lembaga masyarakat yang aktif	persen	90	90	3.050.000.000	95	3.050.000.000	95	3.060.000.000	90	3.060.000.000	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok /lembaga masyarakat yang aktif	persen	90	90	1.252.939.432	95	1.315.586.404	95	1.381.365.724	90	1.381.365.724	Kecamatan Lubuklinggau Barat II
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok /lembaga masyarakat yang aktif	persen	100	100	1.710.522.322	100	1.796.048.438	100	1.885.850.860	100	1.885.850.860	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok /lembaga masyarakat yang aktif	persen	100	100	2.502.301.907	100	2.627.417.002	100	2.758.787.852	100	2.758.787.852	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok /lembaga masyarakat yang aktif	persen	80	85	1.421.409.668	85	1.492.480.151	85	1.567.104.159	85	1.567.104.159	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok /lembaga masyarakat yang aktif	persen	85	90	666.242.937	90	699.555.083	90	734.532.838	90	734.532.838	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase kelompok /lembaga masyarakat yang aktif	persen	80	80	2.037.312.790	85	2.139.178.430	85	2.246.167.351	85	2.246.167.351	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I



No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								2024		2025		2026		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				DAN KELURAHAN												
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok /lembaga masyarakat yang aktif	persen	80	80	2.241.242.937	85	2.353.305.084	85	2.470.970.338	85	2.470.970.338	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Barat I	persen	80	80	72.000.000	85	90.000.000	85	90.000.000	85	90.000.000	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Barat II	persen	100	100	72.000.000	100	90.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	Kecamatan Lubuklinggau Barat II
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur I	persen	100	100	72.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur II	persen	100	100	72.500.000	100	79.380.000	100	83.349.000	100	83.349.000	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Utara I	persen	100	100	72.000.000	100	82.800.000	100	95.220.000	100	95.220.000	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Utara II	persen	80	85	60.000.000	85	69.000.000	90	79.350.000	90	79.350.000	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	persen	80	85	72.000.000	85	82.800.000	90	95.220.000	90	95.220.000	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	persen	80	85	60.000.000	85	69.000.000	90	79.350.000	90	79.350.000	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
		5.2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel		Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	nilai	BB	BB		BB		BB		BB		
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase laporan bendahara penerimaan tepat waktu	persen	90	90		90		90		90		
					Persentase laporan	persen	100	100		100		100		100		

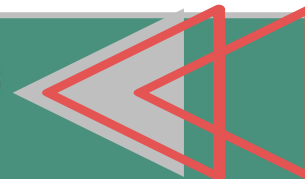


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					bendahara pengeluaran tepat waktu											
					Persentase penerapan sistem informasi keuangan daerah terintegrasi	persen	100	100		100		100		100		
					Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	persen	100	100		100		100		100		
					Persentase Perangkat Daerah dengan laporan keuangan sesuai SAP	persen	100	100		100		100		100		
					Persentase Perangkat daerah menyampaikan dokumen anggaran tepat waktu	persen	100	100	13.425.087.306	100	14.096.341.671	100	14.801.158.754	100	14.801.158.754	
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Penambahan Nilai Aset Daerah	persen	9	10	1.459.822.580	10,5	1.532.813.709	11	1.609.454.394	11	1.609.454.394	
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Efisiensi PAD	persen	0,01	0,01	813.032.598	0,01	855.823.787	0,01	900.867.145	0,01	900.867.145	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Self Assessment	nilai	100	100		100		100		100		
					Persentase PD dengan Maturity minimal Level 3	persen	100	100		100		100		100		
					Persentase PD yang sudah menerapkan Lingkungan Pengendalian	persen	100	100		100		100		100		
					Persentase PD yang sudah menerapkan Penilaian Risiko	persen	60	75	1.152.727.000	80	1.267.999.700	85	1.394.799.670	85	1.394.799.670	
					Tingkat Penyelesaian PKPT Tepat Waktu	persen	100	100		100		100		100		
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD dengan Maturity minimal Level 3	persen	100	100		100		100		100		
					Persentase PD yang sudah menerapkan Lingkungan Pengendalian	persen	100	100	575.510.731	100	633.061.804	100	696.367.985	100	696.367.985	
				PROGRAM PERENCANAAN,												Badan Perencanaan



No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		5.3.	Meningkatnya kapasitas birokrasi		Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks		69,08		70,15		72,85		72,85		
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase data dan informasi publik yang dipublikasikan	persen	60	65	850.000.000	70	440.000.000	75	440.000.000	75	440.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
					Tingkat kepuasan publik terhadap layanan data dan informasi	persen	80	81	2.570.450.000	81,25	3.163.744.501	90	3.041.783.897	90	3.041.783.897	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Data statistik yang dipublikasikan	persen	85	90	490.000.000	95	390.000.000	100	405.000.000	100	405.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) kategori sistem elektronik	Indeks	16	16	235.517.000	17	241.211.500	18	248.215.500	18	248.215.500	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
					Indeks Keamanan Informasi (KAMI) kategori status kesiapan	Indeks	185	185	229.340.000	190	232.350.000	195	243.750.000	195	243.750.000	
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	persentase pengadaan ASN yang direkrut sesuai dengan kebutuhan	persen	59,85	100	576.437.844	100	728.782.993	100	1.012.988.039	100	1.012.988.039	Badan Kepegawaian dan

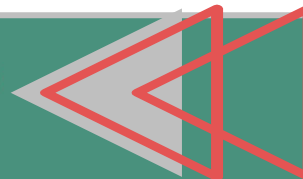


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung- jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Pengembang an Sumber Daya Manusia
					Persentase Pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	persen	100	100	329.808.936	100	346.299.383	100	363.614.352	100	363.614.352	
					Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan OPD	persen	85,89	87,6	998.140.884	89,35	1.040.679.637	89,8	1.081.980.582	89,8	1.081.980.582	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan kapasitas ASN	persen	30	30	1.204.241.451	30,2	1.448.653.252	30,5	1.521.085.915	30,5	1.521.085.915	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	168.317.386.622	100	176.733.255.953	100	185.715.770.164	100	185.715.770.164	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	101.037.003.136,00	100	103.562.928.214,00	100	106.088.853.292,00	100	106.088.853.292,00	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	5.223.401.000	100	5.484.571.103	100	5.758.799.658	100	5.758.799.658	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	4.906.911.789	100	5.122.446.459	100	5.497.031.445	100	5.497.031.445	Satuan Polisi Pamong Praja
				PROGRAM PENUNJANG	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat	persen	100	100	2.600.000.000	100	2.700.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	Badan Kesatuan

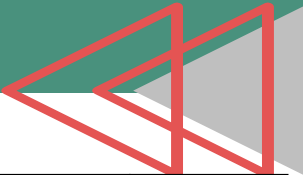


No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	daerah										Bangsa dan Politik	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	4.226.610.605	100	4.422.610.805	100	4.347.129.661	100	4.347.129.661	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulang an Bencana
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	3.322.100.000	100	3.400.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	Dinas Sosial
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	6.890.428	100	6.861.070.539	100	6.956.070.539	100	6.956.070.539	Dinas Ketenagakerja an
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	600.000.000	100	630.000.000	100	660.000.000	100	660.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	9.000.000.000	100	9.500.000.000	100	9.650.000.000	100	9.650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	3.966.000.000	100	3.806.000.000	100	4.202.120.000	100	4.202.120.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

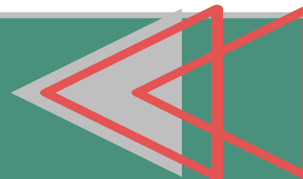


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung- jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				KABUPATEN/KOTA												Pemberdayaan Masyarakat
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	2.946.161.707	100	3.019.815.750	100	3.095.311.143	100	3.095.311.143	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	6.506.500.000	100	6.831.825.000	100	7.173.416.000	100	7.173.416.000	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	2.479.301.038	100	2.467.471.038	100	2.356.530.838	100	2.356.530.838	Dinas Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	4.048.342.671	100	4.160.765.180	100	4.092.215.281	100	4.092.215.281	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	5.116.322.024	100	5.149.254.625	100	5.698.979.226	100	5.698.979.226	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	3.303.721.837	100	3.386.314.882	100	3.470.972.755	100	3.470.972.755	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	4.014.301.070	100	3.910.690.986	100	4.236.225.330	100	4.236.225.330	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PROGRAM	Persentase pemenuhan											Dinas

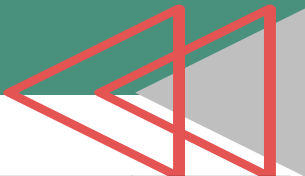


No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	layanan kinerja perangkat daerah											Perikanan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	2.314.836.781	100	2.372.707.101	100	2.467.615.385	100	2.467.615.385	Dinas Pariwisata
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	11.288.334.287	100	11.541.321.892	100	12.000.493.551	100	12.000.493.551	Dinas Pertanian
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	6.483.550.000	100	6.801.590.000	100	7.141.028.875	100	7.141.028.875	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah											Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah											Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	6.890.428.624	100	7.061.070.539	100	7.061.070.539	100	7.061.070.539	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	6.890.428.624	100	6.861.070.539	100	6.956.070.539	100	6.956.070.539	Kecamatan Lubuklinggau Barat II



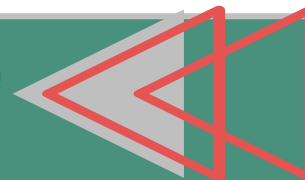
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				DAERAH KABUPATEN/KOTA												
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	5.218.710.628	100	5.479.646.159	100	5.753.628.467	100	5.753.628.467	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	249.069.135	100	261.522.592	100	466.001.720	100	466.001.720	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	5.517.872.966	100	5.793.766.614	100	6.315.973.316	100	6.315.973.316	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	6.437.823.135	100	6.759.714.292	100	7.378.515.761	100	7.378.515.761	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	4.540.052.530	100	4.767.055.156	100	5.191.186.341	100	5.191.186.341	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	6.432.416.260	100	6.754.037.037	100	7.372.039.952	100	7.372.039.952	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	5.598.518.679	100	6.158.370.547	100	6.804.567.602	100	6.804.567.602	Inspektorat
				PROGRAM	Persentase pemenuhan	persen	100	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	Badan



No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung- jawab
								2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	layanan kinerja perangkat daerah											Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembanga n
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	65.400.651.947	100	68.670.684.544	100	72.104.218.771	100	72.104.218.771	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	11.224.774.048	100	11.771.897.288	100	11.754.364.237	100	11.754.364.237	Badan Kepegawaian dan Pengembanga n Sumber Daya Manusia
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	persen	100	100	12.248.245.116	100	12.892.889.596	100	13.571.462.733	100	13.571.462.733	Badan Pendapatan Daerah

Sumber: SIPD Kementerian Dalam Negeri, 2023





BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

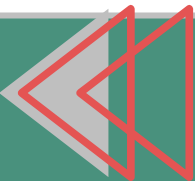
7.1. Kerangka Pendanaan

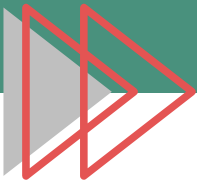
Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bab sebelumnya, dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- ◆ Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- ◆ Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- ◆ Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- ◆ Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- ◆ Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah ke depan. Berdasarkan hasil proyeksi, laju pertumbuhan pendapatan daerah yang diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah, diharapkan untuk periode lima tahun kedepan kapasitas kemampuan keuangan daerah Kota Lubuk Linggau semakin meningkat. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/ kegiatan selama periode RPD 2024-2026 Kota Lubuk Linggau. Dari hasil analisa keuangan daerah yang telah dijelaskan dalam bab





sebelumnya, kapasitas riil keuangan daerah tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1. Target Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tahun	Belanja Daerah (Rp)
2024	778.786.978.831,00
2025	798.526.247.396,23
2026	818.833.477.782,19

Sumber: BPKAD Kota Lubuk Linggau (diolah)

7.2. Program Perangkat Daerah

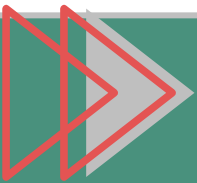
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut meliputi:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan prinsip kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah:

- a) Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
- b) Urusan pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
- c) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;





- d) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat; dan/atau
- e) Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 6) Sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- 1) Tenaga kerja;
- 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan hidup;
- 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan informatika;
- 11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) Penanaman modal;
- 13) Kepemudaan dan olah raga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan; dan
- 18) Kearsipan.

Urusan pemerintahan Pilihan meliputi:

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Perdagangan;
- 5) Perindustrian.

Fungsi Penunjang Pemerintah Daerah:

- 1) Perencanaan;
- 2) Keuangan;

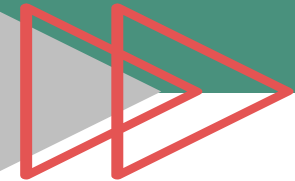


- 3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
- 4) Penelitian dan Pengembangan;
- 5) Sekretariat Daerah;
- 6) Sekretariat DPRD;
- 7) Inspektorat;
- 8) Kecamatan.

Dalam bab ini, sesuai dengan penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Selain itu juga disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

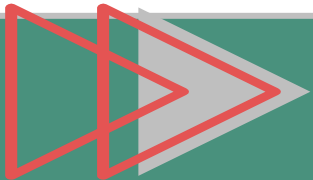
Setelah program prioritas diketahui, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Lubuk Linggau berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

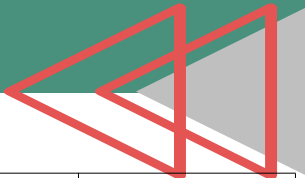
Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Lubuk Linggau, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 7.2 hanya yang bersumber dari APBD Kota Lubuk Linggau.



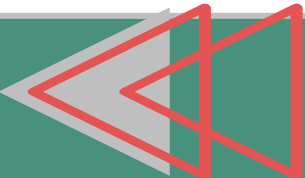
Tabel 7.2. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kota Lubuk Linggau Tahun Periode 2024 sd 2026

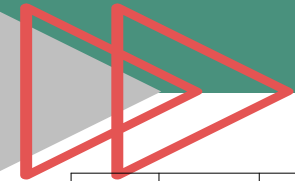
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat													
Meningkatnya Akses Pendidikan													
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	135 persen	136 persen	150.534.820	137 persen	158.061.561	138 persen	165.964.639	138 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98,20 persen	99,20 persen	130.000.000	101,20 persen	136.500.000	102,20 persen	143.325.000	102,20 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) SD	99,80 persen	100 persen	24.473.817.706	100 persen	25.697.508.591	100 persen	26.982.384.021,00	100 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) SMP	170 persen	171 persen	2.104.160.976	172 persen	2.209.369.025	173 persen	2.319.837.476	173 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	30 persen	32 persen	719.194.450	34 persen	755.154.173	36 persen	792.911.881	36 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	70 persen	74 persen	14.453.656.000	75 persen	15.176.338.800	76 persen	15.935.155.740,00	76 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	84,20 persen	86,20 persen	6.606.025.000	88,20 persen	6.936.326.250	90 persen	7.283.142.562	90 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	1,42 persen	1,44 persen	3.517.880.000	1,46 persen	3.693.774.000	1,48 persen	3.878.462.700	1,48 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	0,40 persen	0,42 persen	1.038.450.000	0,44 persen	1.090.372.500	0,46 persen	1.144.891.125	0,46 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
				Angka Melek Huruf	99,80 %	100 %	39.370.685.065	100 %	41.339.219.318	100 %	43.406.180.284,00	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Sekolah yang memiliki Jamban sesuai standar	34 %	40 %	000	50 %	000	55 %	000	55 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Sekolah yang memiliki UKS	60 %	64 %	000	68 %	000	70 %	000	70 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
				Persentase sekolah memiliki ruang kelas yang baik	89 %	95 %	11.482.292.515	98 %	12.056.407.140	99 %	12.659.227.497,00	99 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)										
				Persentase Pendidikan Anak usia dini	27,50 Persen	40,80 Persen	1.133.327.620	50,00 Persen	755.154.173	60,00 Persen	792.911.881	60,00 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase lembaga PNF yang Aktif	40 %	50 %	1.491.546.923	55 %	1.425.778.544	60 %	1.497.067.471	60 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase PNF Dengan Kepengurusan Lengkap	50 %	80 %	000	80 %	000	80 %	000	80 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
				Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	6,15 guru/muridsekolah	6,16 gur u/murids ekolah	113.528.295	6,17 gur u/murids ekolah	119.204.709	6,18 gur u/murids ekolah	125.164.945	6,18 guru/murids ekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	7,2 guru:murid/kelas	7,4 guru: murid/kel as	113.528.295	7,6 guru: murid/kel as	119.204.709	7,8 guru: murid/kel as	125.164.945	7,8 guru: murid/kelas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										
				Persentase pendidik Yang Lulus UKG	70 %	70 %	227.056.590	70 %	238.409.419	80 %	250.329.890	80 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Mutu Pendidikan													
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM										
				Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum berstandar	100 persen	100 persen	89.600.000	100 persen	94.080.000	100 persen	98.784.000	100 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar										
				Persentase Komite Sekolah Aktif	30 %	40 %	000	75 %	000	75 %	000	75 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	20 %	30 %	64.600.000	40 %	67.830.000	50 %	71.221.500	50 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase sekolah memiliki media sesuai dengan jumlah kelas	25 %	30 %	000	50 %	000	60 %	000	60 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Sekolah Yang Menerapkan Teknologi Dalam Pembelajaran	25 %	30 %	000	50 %	000	63 %	000	63 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal										
				Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan yang diterapkan	0 Kurikulum Muatan Lokal	1 Kurikul um Muatan Lokal	000	1 Kurikul um Muatan Lokal	000	1 Kurikul um Muatan Lokal	000	1 Kurikulum Muatan Lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase sekolah memiliki media sesuai dengan jumlah kelas	30 Media Sekolah	30 Media Sekolah	000	50 Media Sekolah	000	70 Media Sekolah	000	70 Media Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Sekolah Yang Menerapkan Teknologi Dalam Pembelajaran	30 Teknologi	30 Teknologi	000	50 Teknologi	000	60 Teknologi	000	60 Teknologi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat													
Meningkatnya Kelestarian Nilai Budaya													
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN										
				Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	6 budaya	6 budaya	49.200.000	6 budaya	51.660.000	7 budaya	54.243.000	7 budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah Seni budaya yang dilestarikan	20 seni budaya	20 seni	122.800.000	25 seni	128.940.000	30 seni	135.387.000	30 seni budaya	Dinas Pendidikan dan

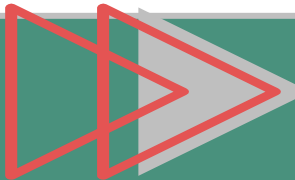




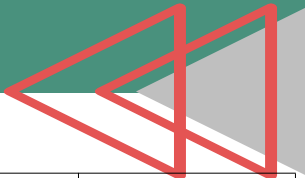
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target budaya	Rp	Target budaya	Rp	Target budaya	Rp		
		2.22.02.2.01	Pengelolaan	Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									Kebudayaan
				Jumlah karya budaya yang diinventarisir	2 Inventarisir	5 Inventa risir	246.000.000	6 Inventa risir	258.300.000	7 Inventa risir	271.215.000	7 Inventarisir	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah naskah hasil kajian pelestarian sejarah	400 Siswa	400 Siswa	000	400 Siswa	000	400 Siswa	000	400 Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah Seni Budaya Daerah dalam kurikulum di daerah	1 Seni Budata Daerah	3 Seni Budata Daerah	000	5 Seni Budata Daerah	000	8 Seni Budata Daerah	000	8 Seni Budata Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Kekayaan Budaya daerah ditetapkan	1 Kekayaan Budaya	2 Kekaya an Budaya	000	5 Kekaya an Budaya	000	8 Kekaya an Budaya	000	8 Kekayaan Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Tingkat Penerapan Hukum adat	4 Hukum Adat	5 Hukum Adat	000	6 Hukum Adat	000	8 Hukum Adat	000	8 Hukum Adat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL										
				Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	50 persen	60 persen	17.000.000	65 persen	17.850.000	70 persen	18.742.500	70 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	80 persen	85 persen	589.319.600	90 persen	618.785.580	90 persen	701.120.196	90 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.22.03.2.01	Pembinaan	Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
				Jumlah Cagar Budaya dilestarikan	7 Cagar Budaya Dilestarikan	8 Cagar Budaya Dilestarik an	000	9 Cagar Budaya Dilestarik an	000	10 Cagar Budaya Dilestarik an	000	10 Cagar Budaya Dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah Komunitas Seni Daerah	47 Komunitas Seni	54 Komu nitas Seni	000	60 Komu nitas Seni	000	70 Komu nitas Seni	000	70 Komunitas Seni	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah Pelaku Seni Budaya Daerah	4 Pelaku Seni	5 Pelaku Seni	000	20 Pelaku Seni	000	30 Pelaku Seni	000	30 Pelaku Seni	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase pelaku seni budaya daerah yang dibina	30 Pelaku Seni	40 Pelaku Seni	17.850.000	60 Pelaku Seni	18.742.500	80 Pelaku Seni	21.696.787	80 Pelaku Seni	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA										
				Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	60 persen	62 persen	100.000.000	64 persen	105.000.000	68 persen	110.250.000	68 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.22.05.2.01	Penetapan	Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									
				Jumlah Cagar Budaya	4 Cagar Budaya	4 Cagar Budaya	100.000.000	6 Cagar Budaya	105.000.000	7 Cagar Budaya	110.250.000	7 Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah Festival Budaya	2 Pertunjukan Seni	3 Pertunj ukan Seni	000	5 Pertunj ukan Seni	000	6 Pertunj ukan Seni	000	6 Pertunjukan Seni	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah Pertunjukan Seni	4 Seni	5 Seni	000	7 Seni	000	8 Seni	000	8 Seni	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatkan Kapasitas Birokrasi													

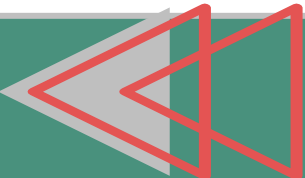
Meningkatkan Kapasitas Birokrasi

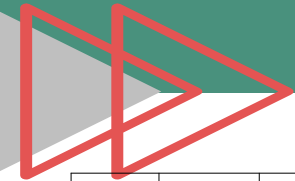


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026



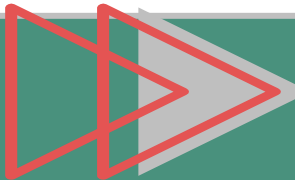
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Kinerja OPD													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	168.317.386.622	100 persen	176.733.255.953,00	100 persen	185.715.770.164,00	100 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80 %	80 %	150.000.000	85 %	157.500.000	90 %	165.375.000	90 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan administrasi keuangan	80 %	80 %	150.000.000	85 %	157.500.000	90 %	165.375.000	90 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	81.043.750	100 %	85.095.938	100 %	89.350.734	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	553.120.014	100 %	580.776.015	100 %	609.814.815	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 %	100 %	437.879.974	100 %	459.773.972	100 %	482.762.671	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1.775.482.337	12 Bulan	1.864.256.454	12 Bulan	1.957.469.277	12 Bulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas													
Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu dan Bayi													
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										
				Cukupan pelayanan kesehatan ibu dan balita	90,76 %	100 %	2.868.076.772	100 %	2.939.778.691	100 %	3.013.273.159	100 %	Dinas Kesehatan
				Kategori penyelenggaraan kota sehat	swasti saba padapa status kota sehat	swasti saba wiiwerda status kota sehat	791.418.839	swasti saba wiiwerda status kota sehat	811.204.309	swasti saba wiiwerda status kota sehat	831.484.417	swasti saba wiiwerda status kota sehat	Dinas Kesehatan
				Prevalensi angka kejadian stunting	11,7 %	11 %	590.325.811	10,3 %	605.083.956	9,6 %	620.211.055	9,6 %	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %	100 %	157.030.820	100 %	160.956.591	100 %	164.980.505	100 %	Dinas Kesehatan
				Jumlah Pos UKK yang dibina dan dikembangkan	70 %	80 %	164.489.643	80 %	168.601.884	85 %	172.816.931	85 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan pelayanan Kesehatan Balita	91 %	100 %	1.040.945.049	100 %	1.066.968.675	100 %	1.093.642.892	100 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	96,83 %	100 %	151.939.850	100 %	155.738.346	100 %	159.631.805	100 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (k4)	93,65 %	100 %	575.559.450	100 %	589.948.437	100 %	604.697.148	100 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan pelayanan kesehatan Pada Usia	75,04 %	100 %	372.809.013	100 %	382.129.238	100 %	391.682.469	100 %	Dinas Kesehatan



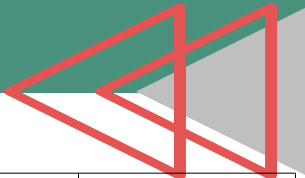


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

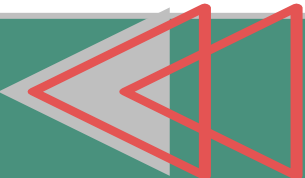
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Lanjut									
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100 %	100 %	345.036.228	100 %	353.662.133	100 %	362.503.687	100 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pengukuran eppgbm	94 %	100 %	590.325.811	100 %	605.083.956	100 %	620.211.055	100 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai	40 %	60 %	5.000.000	62 %	5.200.000	65 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Kelurahan Stop BABS	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Persentase kelurahan yang melaksanakan STBM	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu	10 %	7 %	50.000.000	7 %	52.000.000	7 %	54.000.000	7 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengukuran tes kebugaran kelas 4,5,6	50 %	60 %	5.000.000	60 %	5.200.000	60 %	5.400.000	70 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Sarana Air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	80,7 %	85 %	626.929.196	85 %	642.602.426	85 %	658.667.487	85 %	Dinas Kesehatan
				persentase tempat dan fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan	93 %	93 %	5.000.000	93 %	5.200.000	93 %	5.400.000	93 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Tempat Pengelohan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat	86 %	88 %	5.000.000	88 %	5.200.000	89 %	5.400.000	84 %	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	18 %	14 %	50.000.000	14 %	52.000.000	14 %	54.000.000	14 %	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)	6.9 %	7 %	50.000.000	7 %	52.000.000	7 %	54.000.000	7 %	Dinas Kesehatan
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										
				Cakupan penyelenggaraan kluster germas	100 %	100 %	491.989.624	100 %	524.963.982	100 %	538.087.774	100 %	Dinas Kesehatan
				cakupan UKBM	90 %	90 %	5.000.000	93 %	5.200.000	95 %	5.400.000	97 %	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan GERMAS	67,43 %	70 %	149.989.624	75 %	524.963.682	80 %	538.087.774	80 %	Dinas Kesehatan
				Persentase rumah tangga ber PHBS	83 %	90 %	5.000.000	90 %	5.200.000	90 %	5.400.000	90 %	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Persentase Posyandu Aktif	90.40 %	92 %	5.000.000	93 %	5.200.000	95 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Akses dan kualitas pelayanan kesehatan													
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										
				cakupan obat esensial yang dipenuhi	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan UHC	93 %	95 %	5.400.000.000	96 %	5.535.000.000	97 %	5.673.375.000	98 %	Dinas Kesehatan
				Persentase kemitraan di bidang kesehatan yang memenuhi standar	100 %	100 %	1.536.790.738	100 %	1.575.210.506	100 %	1.614.590.769	100 %	Dinas Kesehatan
				Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal utama	22 %	56 %	5.494.592.422	56 %	5.631.957.233	56 %	5.772.756.164	56 %	Dinas Kesehatan

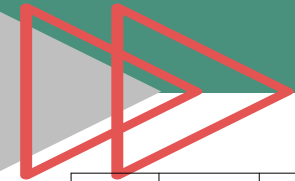


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026



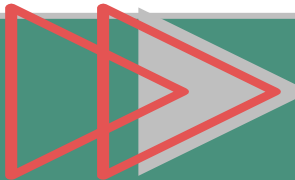
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar	100 %	100 %	15.738.031.648,00	100 %	16.131.482.440,00	100 %	16.534.769.501,00	100 %	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
				Cakupan Alat Kesehatan yang Memenuhi Standar	35 %	35 %	5.000.000	35 %	5.200.000	35 %	5.400.000	45 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan Prasarana Puskesmas yang memenuhi satndar	45 %	45 %	5.000.000	45 %	5.200.000	60 %	5.400.000	60 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan Sarana Puskesmas yang memenuhi satndar	80 %	80 %	5.000.000	80 %	5.200.000	80 %	5.400.000	80 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas tersedia obat esensial	100 %	100 %	50.000.000	100 %	52.000.000	100 %	54.000.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	100 %	100 %	50.000.000	100 %	52.000.000	100 %	54.000.000	100 %	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Cakupan FKTP non Puskesmas yang di Bina	50 %	70 %	5.000.000	80 %	5.200.000	90 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan FKTP non puskesmas yang teregistrasi	10 %	80 %	5.000.000	90 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
				cakupan Masyarakat Yang Mendapatkan bantuan jaminan kesehatan pemerintah (PBI dan APBD)	100 %	100 %	5.400.000.000	100 %	5.535.000.000	100 %	5.673.375.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pelaksanaan kesehatan Tradisional di FKTP Puskesmas	0 %	50 %	5.000.000	75 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
				cakupan peserta BPJS PBI APBD	51 %	50 %	4.000.000.000	51 %	4.100.000.000	52 %	4.202.500.000	53 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan PKM Inovasi dalam pelayanan kesehatan	80,7 %	100 %	1.536.790.738	100 %	1.575.210.506	100 %	1.614.590.769	100 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan Puskesmas yang memenuhi satndar	90 %	100 %	445.833.795	100 %	456.979.640	100 %	468.404.131	100 %	Dinas Kesehatan
				Indeks Keluarga Sehat	100 %	100 %	186.359.826	100 %	191.018.821	100 %	195.794.292	100 %	Dinas Kesehatan
				Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas	79 %	79 %	4.536.604.602	80 %	4.650.019.717	80 %	4.766.270.210	80 %	Dinas Kesehatan
				Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit	63 %	63 %	5.000.000	63 %	5.000.000	63 %	5.000.000	63 %	Dinas Kesehatan
				Persentase FKTP terakreditasi	95.75 %	90 %	50.000.000	90 %	52.000.000	90 %	54.000.000	90 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Laboratorium Kesehatan Yang Terakreditasi	100 %	56 %	5.000.000	56 %	5.200.000	56 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi										
				Jenis E Sistem Informasi Kesehatan yang diselenggarakan	3 dokumen	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	5.200.000	3 dokumen	5.400.000	3 dokumen	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Cakupan Faskes Rujukan yang dilakukan Pembinaan	50 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
				Persentase SDM yang tersedia sesuai standar	63 %	65 %	5.380.881.461	67 %	5.515.403.498	70 %	5.653.288.585	70 %	Dinas Kesehatan

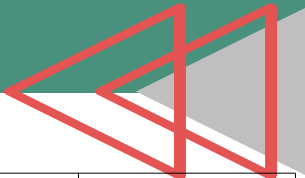




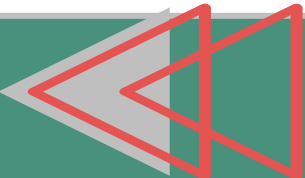
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

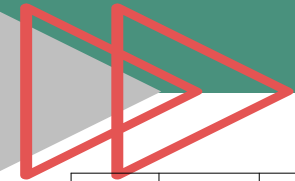
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota										
				Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki sirat izin Praktek	70 %	70 %	5.000.000	75 %	5.200.000	80 %	5.400.000	80 %	Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										
				Persentase Faskes yang Lengkap jenis nakes sesuai standar (RS dan PKM)	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	55 %	70 %	50.000.000	70 %	52.000.000	70 %	54.000.000	70 %	Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Persentase nakes yang memiliki STR	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN										
				Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) berizin yang memenuhi standar	100 %	100 %	54.659.150	100 %	56.025.629	100 %	57.426.269	100 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Sarana Apotik, Toko Obat dan Toko Alkes yang memenuhi standar	80 %	100 %	10.000.000	100 %	11.000.000	100 %	12.000.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Toko Alkes yang berizin Memenuhi Syarat	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										
				Persentase Sarana Apotik dan Toko Obat yang dibina Memenuhi syarat	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Toko Alkes yang dibina Memenuhi Syarat	100 %	100 %	1.238.774.900	100 %	1.269.744.273	100 %	1.301.487.879	100 %	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga										
				Persentase Industri Rumah Tanggga Pangan(IRTP) yang dibina Memenuhi Syarat	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit													
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										
				api malaria	0 per 1000 penduduk	0 per 1000 penduduk	2.500.000	0 per 1000 penduduk	2.562.500	0 per 1000 penduduk	2.626.563	0 per 1000 penduduk	Dinas Kesehatan
				Cakupan Posbindu PTM Utama	0 %	6.41 %	449.060.988	12.82 %	460.287.513	19.23 %	471.794.701	19.23 %	Dinas Kesehatan
				cakupan survailens aktif	100 %	100 %	450.000.000	100 %	461.250.000	100 %	472.781.250	100 %	Dinas Kesehatan
				Insiden HIV per 1.000 penduduk	0.06 per 1000 penduduk	0.06 per 1000 penduduk	97.402.800	0.05 per 1000 penduduk	99.837.870	0.04 per 1000 penduduk	102.333.817	0.04 per 1000 penduduk	Dinas Kesehatan
				insiden rate DBD	50 per 100000 penduduk	49 per 100000 p enduduk	700.000.000	45 per 100000 p enduduk	717.500.000	42 per 100000 p enduduk	735.437.500	42 per 100000 penduduk	Dinas Kesehatan
				insiden TB per 100.000 penduduk	306 per 100000	501 per 100000 p	412.900.000	466 per 100000 p	423.222.500	431 per 100000 p	433.803.063	431 per 100000 penduduk	Dinas Kesehatan





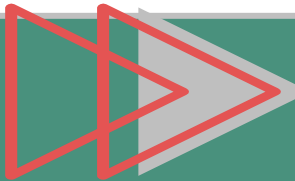
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					penduduk	enduduk		enduduk		enduduk			
				Persentase kelurahan UCI	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
				Cakupan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang dilayani sesuai standar	66 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	50 %	100 %	119.478.180	100 %	122.465.134	100 %	125.526.763	100 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar pada jamaah haji	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC	53.04 %	90 %	50.000.000	90 %	52.000.000	90 %	54.000.000	90 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pengobatan Malaria Sesuai Standar	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan penjarangan kasus AFP Non Rate	6.48 %	6.48 %	2.036.823.307	6.48 %	2.087.743.890	6.48 %	2.139.937.487	6.48 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan Penjarangan kasus diccarded Campak Rubella	5.75 %	4.11 %	5.000.000	4.11 %	5.200.000	4.11 %	5.400.000	4.11 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan puskesmas dan rumah sakit yang melakukan surveilans aktif	100 %	100 %	755.023.088	100 %	773.898.665	100 %	793.246.132	100 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan Terduga TB yang dilayani sesuai standar	18 %	90 %	621.009.022	92 %	636.534.247	100 %	652.447.603	100 %	Dinas Kesehatan
				insiden rate DBD	91 /100000 penduduk	49 /100000 pendudu k	5.000.000	45 /100000 pendudu k	5.200.000	42 /100000 pendudu k	5.400.000	42 /100000 penduduk	Dinas Kesehatan
				Jumlah Kab/kota yang menerapkan KTR	16 %	17 %	50.000.000	17 %	52.000.000	17 %	54.000.000	17 %	Dinas Kesehatan
				persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi kusta	100 %	100 %	50.000.000	100 %	52.000.000	100 %	54.000.000	100 %	Dinas Kesehatan
				persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	100 %	100 %	50.000.000	100 %	52.000.000	100 %	54.000.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	88 %	90 %	50.000.000	90 %	52.000.000	90 %	54.000.000	90 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap bayi (0-12 bulan) (Kelurahan UCI)	97 %	95 %	103.737.175	95 %	106.330.604	95 %	108.988.869	95 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100 %	100 %	50.000.000	100 %	52.000.000	100 %	54.000.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100 %	100 %	50.000.000	100 %	52.000.000	100 %	54.000.000	100 %	Dinas Kesehatan
				persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan

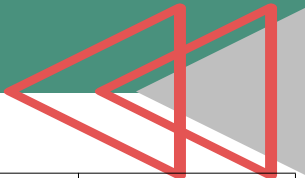




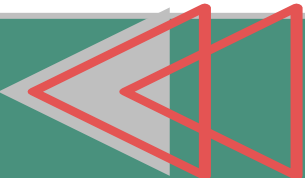
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
				persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan	60 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Presentase Kab/Kota yang mencapai target Imunisasi rutin	88.23 %	95 %	50.000.000	95 %	52.000.000	95 %	54.000.000	95 %	Dinas Kesehatan
				Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	21.8 %	21.8 %	50.000.000	21.8 %	52.000.000	21.8 %	54.000.000	21.8 %	Dinas Kesehatan
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Penunjang bidang Kesehatan												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				cakupan fasilitas kesehatan yang blud	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Jumlah Laporan Keuangan OPD (Laporan)	100 %	100 %	47.669.265	100 %	48.860.997	100 %	50.082.522	100 %	Dinas Kesehatan
				Jumlah orang yang mendapatkan jasa adiminstrasi pelaksanaan tugas ASN	100 %	100 %	162.909.400	100 %	166.982.135	100 %	171.156.688	100 %	Dinas Kesehatan
				Persentase Laporan BMD Sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	101.037.003.136,00	100 %	103.562.928.214,00	100 %	106.088.853.292,00	100 %	Dinas Kesehatan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (Dokumen)	100 %	100 %	45.226.157	100 %	46.356.811	100 %	47.515.731	100 %	Dinas Kesehatan
				Jumlah kegiatan evaluasi kinerja setiap bidang	100 %	100 %	48.290.917	100 %	49.498.190	100 %	50.735.645	100 %	Dinas Kesehatan
				Persentase dokumen perencanaan sesuai peraturan	100 %	100 %	150.020.302	100 %	153.770.809	100 %	157.615.080	100 %	Dinas Kesehatan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Presentase Laporan Keuangan Sesuai Peraturan dan tepat waktu	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Persentase Data ERK yang di Entri	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	397.103.450	100 %	407.031.036	100 %	417.206.812	100 %	Dinas Kesehatan
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase Laporan BMD Sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	5.400.000	100 %	Dinas Kesehatan





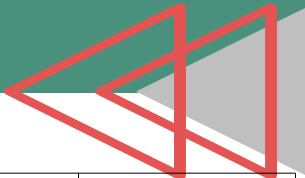
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Persentase Pemenuhan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	371.460.000	100 %	380.746.500	100 %	390.265.163	100 %	Dinas Kesehatan
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di Pelihara	2 Barang	4 Barang	5.000.000	4 Barang	5.200.000	4 Barang	5.400.000	4 Barang	Dinas Kesehatan
		X.XX.01.2.10	Peningkatan	Pelayanan BLUD									
				Cakupan Puskesmas Yang BLUD	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.200.000	100 %	54.000.000	100 %	Dinas Kesehatan
				Cakupan Rumah sakit Yang BLUD	100 %	100 %	71.554.540.804,00	100 %	73.343.404.324,00	100 %	75.176.989.432,00	100 %	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Infrastruktur Dasar													
	Meningkatnya sarana dan prasarana keciptakaryaan												
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										
				Persentase penduduk berakses air minum perpipaan	42,04 %	42,04 %	1.312.500.000	42,14 %	1.312.500.000	42,25 %	1.312.500.000	42,25 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota										
							000		000		000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Jumlah Rumah Tangga berakses air minum Perpipaan	250 SR	250 SR	1.312.500.000	250 SR	1.312.500.000	250 SR	1.312.500.000	250 SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL										
				Prosentase LayananTPA	0 %	0 %	000	0 %	000	0 %	000	0 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota										
				Kapasitas layanan TPA	0 bh	0 bh	000	0 bh	000	0 bh	000	0 bh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										
				Prosentase Pddk terlayani IPLT	0 %	0 %	000	0 %	000	0 %	000	0 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota										
							000		000		000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE										
				Ketersediaan Saluran drainase sekunder yang fungsional	76,31 %	76,31 %	4.428.000.000	76,95 %	4.428.000.000	79,66 %	4.428.000.000	79,66 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota										
				Panjang Saluran drainase sekunder yang fungsional	18,007 m	26,024 m	4.428.000.000	26,974 m	4.428.000.000	27,924 m	4.428.000.000	27,924 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



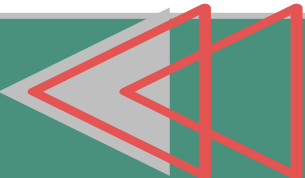
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

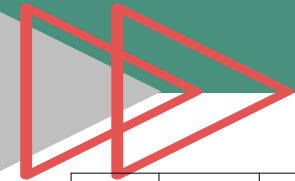
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG										
				Bangunan Gedung Sesuai Standar	100 %	100 %	56.425.000.000,0 0 0	100 %	56.425.000.000,0 0	100 %	56.425.000.000,0 0	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung										
							000		000		000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung										
				Gedung Pemerintah Kondisi Baik	80 %	80 %	56.425.000.000,0 0 0	80 %	56.425.000.000,0 0	80 %	56.425.000.000,0 0	80 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA										
				Persentase bangunan Fasilitas publik dan lingkungannya dalam kondisi baik	100 %	100 %	850.000.000	100 %	850.000.000	100 %	850.000.000	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah bangunan Fasilitas publik dan lingkungannya dalam kondisi baik	9 unit	9 unit	850.000.000	9 unit	850.000.000	9 unit	850.000.000	9 unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya Sumber Daya Air yang Handal													
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										
				Penurunan Titik Rawan Bencana Akibat Daya Rusak Air	29,51 %	29,51 %	10.800.000.000,0 0 0	35,25 %	12.900.000.000,0 0	35,25 %	12.900.000.000,0 0	35,25 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Ketersediaan Perencanaan Teknis Infrastruktur Sumber Daya Air	28,57 %	28,57 %	1.200.000.000	34,52 %	1.450.000.000	36,90 %	1.550.000.000	36,90 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi Yang Terbangun	26,92 %	26,92 %	8.400.000.000	36,54 %	11.400.000.000,0 0	36,54 %	11.400.000.000,0 0	36,54 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
				% Sungai memenuhi kriteria kesehatan dan keamanan	80 %	29,41 %	11.500.000.000,0 0 0	35,17 %	13.750.000.000,0 0	35,42 %	13.850.000.000,0 0	35,42 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
				Prosentase jaringan Irigasi Fungsional	78 %	78 %	8.900.000.000	78 %	12.000.000.000,0 0	78 %	12.000.000.000,0 0	78 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya Konektifitas Wilayah													
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										
				Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi	43,41 %	43,41 %	172.300.000.00 0, 00	71,18 %	142.300.000.000, 00	98,96 %	147.300.000.000, 00	98,96 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Ketersediaan Perencanaan Teknis Infrastruktur Kebinamargaan	100 %	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026



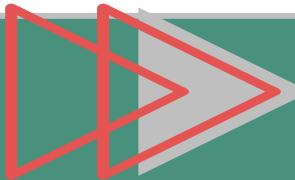
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										
				% Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	33,33 %	33,33 %	97.300.000.000,00	66,67 %	97.300.000.000,00	97,78 %	97.300.000.000,00	97,78 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya Sinkronisasi Pembangunan yang Mengacu kepada RTR													
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG										
				Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang	99,00 %	99,00 %	1.550.000.000	99,00 %	1.550.000.000	99,00 %	1.550.000.000	99,00 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	75 %	75 %	400.000.000	80 %	400.000.000	85 %	400.000.000	85 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota										
				Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	5 dok	3 dok	1.450.000.000	3 dok	145.000.000	3 dok	145.000.000	3 dok	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota										
				% Kegiatan Perencanaan Tata Ruang yang Tersinkronisasikan	100 %	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										
				% Kegiatan Perencanaan Tata Ruang yang Tersinkronisasikan	100 %	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										
				% Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Tersinkronisasikan	100 %	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya Kompetensi Badan Usaha Jasa Konstruksi													
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI										
				Persentase usaha jasa konstruksi yang kompeten (Badan Usaha dan Perseorangan)	38,89 %	38,89 %	915.000.000	48,33 %	945.000.000	57,78 %	945.000.000	57,78 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi										
				Persentase Penyedia jasa konstruksi memiliki tenaga terampil	50 %	94 %	330.000.000	117 %	340.000.000	139 %	340.000.000	139 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
				Persentase Ketersediaan Data Layanan Jasa Konstruksi Yang Ter Update	80 %	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)										
				Persentase tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	85 %	0 %	100.000.000	0 %	100.000.000	0 %	100.000.000	0 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi										
				Persentase Penyelenggaraan tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	70 %	70 %	385.000.000	70 %	385.000.000	70 %	385.000.000	70 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya Infrastruktur Dasar													

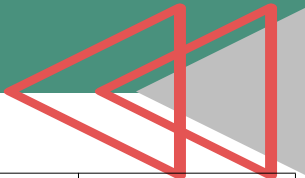




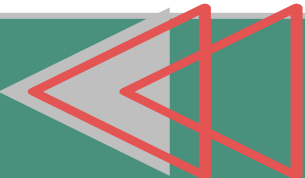
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

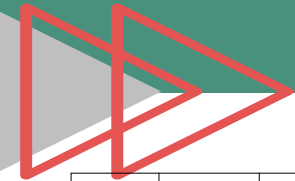
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Sinkronisasi Pembangunan yang Mengacu kepada RTR												
		2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI										
				Persentase izin lokasi yang di terbitkan	100 %	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2.10.02.2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
				% Izin Lokasi yang Diterbitkan	100 %	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN										
				Persentase ganti rugi dan santuna tanah yang terselesaikan	37,14 %	65,71 %	15.050.000.000,0 0 0	100 %	10.050.000.000,0 0	100 %	15.050.000.000,0 0	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Dokumen Ganti Rugi dan Santunan Tanah	8 dok	13 dok	15.050.000.000,0 0 0	10 dok	15.050.000.000,0 0	12 dok	1.505.000.000	12 dok	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH										
				Penatagunaan Tanah yang Sesuai Dengan Peruntukannya	100 %	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota										
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan kinerja OPD													
	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan penunjang bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	13.732.895.000,0 0 0	100 %	15.094.084.500,0 0	100 %	16.591.392.950,0 0	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							000		000		000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	7 dok	7 dok	393.250.000	7 dok	420.475.000	7 dok	420.475.000	7 dok	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Ketersediaan administrasi keuangan SKPD	40 pegawai	40 pegawai	10.066.595.000,0 0 0	40 pegawai	11.073.254.500,0 0	40 pegawai	12.180.579.950,0 0	40 pegawai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Ketersediaan administrasi kepegawaian SKPD	80 pegawai	80 pegawai	363.000.000	80 pegawai	399.300.000	80 pegawai	439.230.000	80 pegawai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										





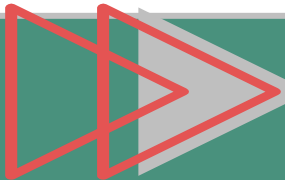
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Ketersediaan administrasi umum dan logistik SKPD	12 bln	12 bln	1.361.250.000	12 bln	1.497.375.000	12 bln	1.647.112.500	12 bln	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Tersepuhinya barang milik daerah urusan Pemerintah Daerah	43 unit	43 unit	496.100.000	43 unit	545.710.000	43 unit	600.218.000	43 unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
							000		000		000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
							000		000		000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan infrastruktur perumahan dan permukiman													
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman													
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN										
				Persentase lingkungan permukiman memiliki ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai	70 %	95,5 %	32.340.810.726,00	96 %	34.429.794.226,00	96,5 %	36.063.647.976,00	96,5 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha										
				Cakupan Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	8049,92 M	8049,92 M	8.550.000.000	8595,2 M	8.977.500.000	12892,8 M	9.426.375.000	12892,8 M	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Cakupan Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	4909 M	4909 M	16.411.500.000,00	9818 M	17.232.075.000,00	14727 M	18.093.678.750,00	14727 M	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Cakupan Talud Lingkungan Terbangun	1032,8 M	1032,8 M	2.350.000.000	2065,6 M	2.467.500.000	3098,4 M	2.590.875.000	3098,4 M	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Terfasilitasinya Pembangunan Rumah Tangga Berakses Pembuangan Limbah	29,04 %	29,04 %	4.948.389.550	33,51 %	5.671.798.050	37,98 %	5.871.798.050	37,98 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)										
				Persentase luasan taman dan makam terhadap pemenuhan ruang terbuka hijau	0,046 %	0,06 %	5.112.832.173	0,07 %	5.240.652.978	0,08 %	5.371.669.303	0,08 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Rasio tempat pemakaman per satuan penduduk	281 M2 per 1000 Penduduk	281 M2 per 1000 Pendudu k	231.998.000	290,75 M2 per 1000 Pe nduduk	237.797.950	299,72 M2 per 1000 Pe nduduk	243.742.898	299,72 M2 per 1000 Penduduk	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan										
				Cakupan Layanan PJU	87,50 %	87,50 %	1.116.580.248	88 %	1.172.409.260	88,50 %	1.231.029.723	88,50 %	Dinas Perumahan



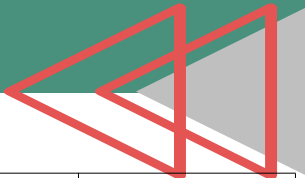


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

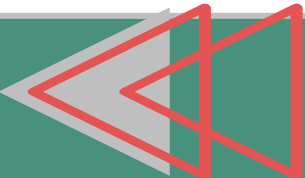
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Makam Pemerintahan yang Aktif	5 TPU	5 TPU	830.000.000	5 TPU	871.500.000	5 TPU	915.075.000	5 TPU	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Taman Kondisi Baik	46 Titik	46 Titik	3.050.000.000	46 Titik	3.202.500.000	46 Titik	3.362.625.000	46 Titik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Titik PJU Bertambah	390 Titik	390 Titik	10.500.000.000,00	440 Titik	11.025.000.000,00	490 Titik	11.576.250.000,00	490 Titik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Menurunkan Tingkat Kedalaman dan Tingkat Keparahan Kemiskinan													
	Meningkatnya kualitas perumahan												
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN										
				Persentase MBR mendapatkan Akses Perumahan subsidi	23,72 %	23,72 %	700.287.500	27,92 %	717.794.687	32,22 %	735.739.554	32,22 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota										
				Rumah Korban Bencana (RTLH) yang dibantu	10 Rumah	10 Rumah	175.000.000	10 Rumah	175.000.000	10 Rumah	175.000.000	10 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan										
				Persentase PSU Perumahan yang diserahkan kepada Daerah	97,94 %	97,94 %	173.643.750	98,44 %	174.077.859	98,94 %	182.781.751	98,94 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase PSU Sesuai Siteplan	97,94 %	97,94 %	173.643.750	98,44 %	174.077.859	98,94 %	182.781.751	98,94 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase Rumah Layak Huni	99,20 %	99,20 %	500.000.000	99,30 %	500.000.000	99,40 %	500.000.000	99,40 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Meningkatkan Kapasitas Birokrasi													
	Meningkatnya tatakelola administrasi pemerintahan penunjang bidang Disperkim												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	5.223.401.000	100 %	5.484.571.103	100 %	5.758.799.658	100 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang berkualitas dan	5 Laporan	5 Laporan	6.036.000	5 Laporan	6.036.000	5 Laporan	6.036.000	5 Laporan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan



Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

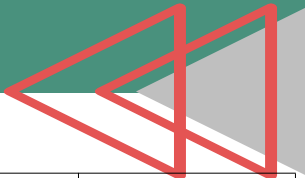


Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				akuntabel									Permukiman	
		X.XX.01.2.02	Administrasi	Keuangan Perangkat Daerah										
				Jasa pengelolaan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	3.592.959.358	12 Bulan	3.682.783.341	12 Bulan	3.774.852.924	12 Bulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01.2.05	Administrasi	Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Orang	4 Orang	275.941.825	4 Orang	282.840.370	4 Orang	289.911.379	4 Orang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01.2.06	Administrasi	Umum Perangkat Daerah										
				Kebutuhan penunjang kerja	12 Bulan	12 Bulan	1.004.325.082	12 Bulan	1.029.433.209	12 Bulan	1.055.169.039	12 Bulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Tersedianya barang guna menunjang kegiatan kantor	11 Item	11 Item	748.067.473	11 Item	766.769.159	11 Item	785.938.387	11 Item	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1.522.137.300	12 Bulan	1.560.190.732	12 Bulan	1.599.195.500	12 Bulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Layanan Pemeliharaan barang kantor	12 Bulan	12 Bulan	924.820.011	12 Bulan	947.940.511	12 Bulan	971.639.023	12 Bulan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Mewujudkan iklim usaha yang kondusif														
	Terciptanya ketenteraman dan ketertiban													
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
				Persentase penegakan perda dan perkara	100 %	100 %	162.295.000	100 %	194.633.000	100 %	172.317.500	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	
				tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketenteraman, ketertiban dan keindahan)	100 %	100 %	2.630.700.000	100 %	2.574.700.000	100 %	2.419.100.000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.2.01	Penanganan	Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
				Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	0,55 perRT	0,58 perRT	15.000.000	0,60 perRT	30.300.000	0,62 perRT	18.500.000	0,62 perRT	Satuan Polisi Pamong Praja	
				Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	81,05 persen	85 persen	2.605.700.000	90 persen	2.549.700.000	95 persen	2.394.100.000	95 persen	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.2.02	Penegakan	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota										
				Persentase penegakan Perda dan perkara	76,06 %	100 %	137.295.000	100 %	169.633.000	100 %	147.317.500	100 %	Satuan Polisi Pamong	

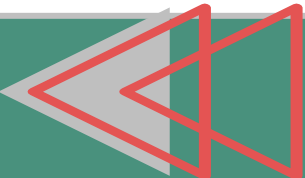


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.2.03	Pembinaan	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota									Praja
				Persentase PPNS Kota Lubuklinggau yang mendapatkan pembinaan	10 %	40 %	25.000.000	60 %	25.000.000	80 %	25.000.000	80 %	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
Meningkatnya kinerja Organisasi													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	4.906.911.789	100 %	5.122.446.459	100 %	5.497.031.445	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD Satpol PP	100 %	100 %	19.760.000	100 %	21.745.000	100 %	23.145.000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Persentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Dearah	100 %	100 %	3.358.001.204	100 %	3.433.111.459	100 %	3.432.816.445	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Persentase pemenuhan layanan administrasi Perangkat daeah	100 %	100 %	48.500.000	100 %	321.700.000	100 %	35.500.000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	351.345.500	100 %	382.740.000	100 %	357.400.000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase pemenuhan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	186.000.000	100 %	8.000.000	100 %	692.250.000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	596.200.000	100 %	601.300.000	100 %	600.200.000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	347.105.000	100 %	353.850.000	100 %	355.720.000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
Menurunkan tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana													
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA										
				Persentase wilayah rawan bencana yang mendapatkan layanan mitigasi bencana	100 %	100 %	395.000.000	100 %	360.000.000	100 %	440.000.000	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamata n dan Penan ggulangan

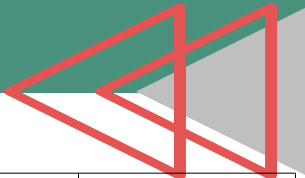


Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													Bencana
				Persentase wilayah rentan bencana yang siaga bencana	11,76 %	50 %	000	55 %	000	60 %	000	60 %	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamata n dan Penan ggulangan Bencana
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota										
				Jumlah kelompok masyarakat sadar bencana	8 kecamatan	8 kecam atan	290.000.000	8 kecam atan	300.000.000	8 kecam atan	300.000.000	8 kecamatan	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamata n dan Penan ggulangan Bencana
				Persentaee wilayah rawan bencana	100 %	100 %	000	100 %	000	100 %	000	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamata n dan Penan ggulangan Bencana
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
				Persentaee wilayah rentan bencana yang siaga bencana	11,76 %	15 %	25.000.000	20 %	30.000.000	25 %	30.000.000	25 %	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamata n dan Penan ggulangan Bencana
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										
				Persentase kecukupan sarana prasarana dan logistik	100 %	100 %	000	100 %	000	100 %	000	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamata n dan Penan ggulangan Bencana
				Persentase penanganan penanggulangan bencana sesuai waktu tanggap darurat	100 %	100 %	50.000.000	100 %	60.000.000	100 %	60.000.000	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamata n dan Penan ggulangan Bencana
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran													
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN										
				Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran	73,57 %	100 %	3.062.502.000	100 %	3.015.516.000	100 %	3.222.502.000	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamata n dan Penan ggulangan

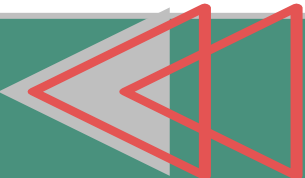


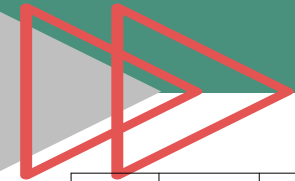
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													Bencana
				Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	15 menit	15 menit	000	15 menit	000	15 menit	000	15 menit	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamata n dan Penan ggulangan Bencana
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										
				Persentase cakupan WMK (wilayah manajemen kebakaran) yang memiliki tenaga pemadam kebakaran yang telah mengikuti diklat	6 %	10 %	2.782.502.000	10 %	2.702.502.000	10 %	2.882.502.000	10 %	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamata n dan Penan ggulangan Bencana
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran										
				Tingkat ketersediaan informasi teknis penindakan kebakaran	50 %	50 %	000	50 %	000	50 %	000	50 %	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamata n dan Penan ggulangan Bencana
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran										
				Persentase kelurahan yang memiliki satlakar	25% %	100 %	280.000.000	100 %	313.014.000	100 %	340.000.000	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamata n dan Penan ggulangan Bencana
Meningkatkan Kapasitas Birokrasi													
	MENINGKATNYA TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PENUNJANG BIDANG KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	4.422.610.605	100 %	4.422.610.805	100 %	4.347.129.661	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamata n dan Penan ggulangan Bencana
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	9 dokumen	9 dokumen	10.000.000	9 dokumen	15.000.000	9 dokumen	20.000.000	9 dokumen	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamata n dan Penan ggulangan Bencana
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Tingkat layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	2.937.557.135	100 %	3.041.947.135	100 %	3.194.044.492	100 %	Dinas Pemadam



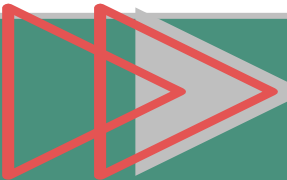
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													Kebakaran, Penyelamatan n dan Penan ggulangan Bencana
		X.XX.01.2.05	Administrasi	Kepegawaian Perangkat Daerah									
				Tingkat kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan n dan Penan ggulangan Bencana
		X.XX.01.2.06	Administrasi	Umum Perangkat Daerah									
				Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	440.917.439	100 %	492.420.240	100 %	534.261.939	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan n dan Penan ggulangan Bencana
		X.XX.01.2.07	Pengadaan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 %	100 %	000	100 %	000	100 %	000	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan n dan Penan ggulangan Bencana
		X.XX.01.2.08	Penyediaan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Tingkat ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	179.903.230	100 %	180.403.230	100 %	181.403.230	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan n dan Penan ggulangan Bencana
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	100 %	554.920.000	100 %	658.340.000	100 %	658.920.000	100 %	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan n dan Penan ggulangan Bencana
Menurunkan tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan													
	Menurunnya Penyangda ng Masalah Kesejahteraan Sosial												
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										
				Jumlah lembaga dan tenaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan	295 Orang/L embaga	305 Oran g/Lemba ga	466.000.000	315 Oran g/Lemba ga	476.000.000	320 Oran g/Lemba ga	485.000.000	320 Orang/Lembaga	Dinas Sosial
		1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota										



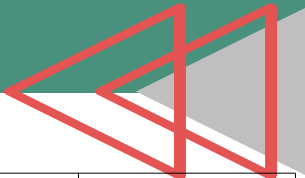


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang Barang yang diterbitkan dan Terawasi	20 Surat	20 Surat	20.000.000	25 Surat	22.000.000	30 Surat	25.000.000	30 Surat	Dinas Sosial
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dikembangkan	320 Orang/ Kelompok	320 Orang/ K elompok	446.000.000	325 Orang/ K elompok	454.000.000	330 Orang/ K elompok	460.000.000	330 Orang/ Kelompok	Dinas Sosial
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN										
				Persentase penanganan warga negara migran dan orang terlanter	100 %	100 %	18.000.000	100 %	19.000.000	100 %	20.000.000	100 %	Dinas Sosial
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal										
				Jumlah orang terlanter yang dapat kembali kedaerah asal	120 Orang	120 Orang	18.000.000	125 Orang	19.000.000	130 Orang	20.000.000	130 Orang	Dinas Sosial
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										
				Persentase penyandang disabilitas terlanter, anak terlanter, lansia terlanter, gelangan pengemis dan masyarakat yang mendapatkan rehabilitasi sosial	53,60 %	56,20 %	200.000.000	58,30 %	250.000.000	60,60 %	300.000.000	60,60 %	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										
				Persentase Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Anak Jalanan, ABH, Lansia Terlanter, Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	95 Persen	95 Persen	200.000.000	95,5 Persen	250.000.000	96 Persen	300.000.000	115 Persen	Dinas Sosial
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										
				Persentase anak terlanter dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	93,46 %	95 %	230.000.000	96 %	235.000.000	97 %	240.000.000	97 %	Dinas Sosial
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlanter										
				Persentase Anak Terlanter yang mendapatkan jaminan sosial di luar Panti	95 Persen	95 Persen	45.000.000	95,5 Persen	50.000.000	96 Persen	55.000.000	96 Persen	Dinas Sosial
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
				Persentase Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Fakir Miskin	94,39 Persen	94,39 Persen	205.000.000	94,89 Persen	225.000.000	95,39 Persen	245.000.000	95,39 Persen	Dinas Sosial
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA										
				Persentase bencana yang tertangani	100 %	100 %	256.000.000	100 %	258.000.000	100 %	260.000.000	100 %	Dinas Sosial
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota										
				Persentase Korban Bencana yang	100 Persen	100	39.600.000	100	55.000.000	100	76.400.000	100 Persen	Dinas Sosial



Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

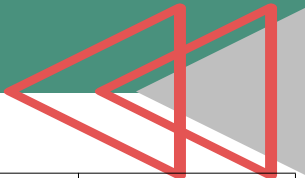


Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target Persen	Rp	Target Persen	Rp	Target Persen	Rp		
		1.06.06.2.02		mendapatkan jaminan sosial									
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota									
				Jumlah masyarakat yang diberdayakan untuk kesiapsiagaan bencana	48 Orang	48 Orang	230.400.000	50 Orang	240.000.000	52 Orang	249.000.000	52 Orang	Dinas Sosial
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
Meningkatnya Kinerja Organisasi													
		X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	3.322.100.000	100 %	3.400.000.000	100 %	3.500.000.000	100 %	Dinas Sosial
		X.XX.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
				Jumlah dokumen Perencanaan (Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Dokumen Evaluasi (LKJIP, LKPJ, LPPD, Monev) yang tersusun tepat waktu	9 Dokumen	9 Dokum en	45.000.000	9 Dokum en	48.000.000	9 Dokum en	51.000.000	9 Dokumen	Dinas Sosial
		X.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
				Tingkat layanan administrasi Kepegawaian	100 Orang	100 Orang	1.859.000.000	100 Orang	1.962.000.000	100 Orang	2.018.000.000	100 Orang	Dinas Sosial
		X.XX.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
				Tingkat layanan administrasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	48.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	51.500.000	100 Persen	Dinas Sosial
		X.XX.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				Tingkat Pemenuhan Adminstrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	380.500.000	100 Persen	542.500.000	100 Persen	573.000.000	100 Persen	Dinas Sosial
		X.XX.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Kecukupan barang penunjang urusan kantor	94 Persen	94 Persen	40.000.000	95 Persen	46.000.000	95,5 Persen	47.000.000	95,5 Persen	Dinas Sosial
		X.XX.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Tingkat ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	100 Persen	100 Persen	112.000.000	100 Persen	122.500.000	100 Persen	125.000.000	100 Persen	Dinas Sosial
		X.XX.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	415.500.000	100 Persen	429.000.000	100 Persen	435.500.000	100 Persen	Dinas Sosial
Menurunnya Pengangguran													
Meningkatnya Kesempatan Kerja													
		2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA									
				Tersedianya Data Perencanaan Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokum en	220.000.000	1 Dokum en	250.000.000	1 Dokum en	250.000.000	1 Dokumen	Dinas ketena gakerjaan
		2.07.02.2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)									
				Data Rencana Tenaga Kerja yang update	1 Dokumen	1 Dokum en	250.000.000	1 Dokum en	250.000.000	1 Dokum en	250.000.000	1 Dokumen	Dinas ketena gakerjaan
		2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA									

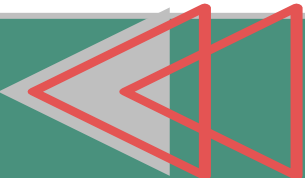


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase Tenaga Kerja yang berkompentensi	45,7 %	45,7 %	600.000.000	53,3 %	920.000.000	53,3 %	500.000.000	53,3 %	Dinas ketena gakerjaan
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan	Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi									
				Jumlah Tenaga Kerja Yang Lulus Uji Kompetensi	320 Orang	320 Orang	600.000.000	480 Orang	320.000.000	480 Orang	500.000.000	480 Orang	Dinas ketena gakerjaan
		2.07.03.2.04	Konsultasi	Produktivitas pada Perusahaan Kecil									
				Persentase perusahaan yang menerapkan program produktivitas	100 %	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	100 %	Dinas ketena gakerjaan
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis													
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										
				Persentase Penempatan Tenaga Kerja	33,3 %	33,3 %	280.000.000	34,6 %	280.000.000	35 %	280.000.000	35 %	Dinas ketena gakerjaan
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota										
				persentase informasi pasar kerja yang di sebarluaskan	100 %	100 %	180.000.000	100 %	180.000.000	100 %	180.000.000	100 %	Dinas ketena gakerjaan
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota										
				Persentase Penempatan Tenaga Kerja Melalui Pelayanan antar kerja	33,3 %	33,3 %	280.000.000	34,6 %	280.000.000	34,6 %	280.000.000	34,6 %	Dinas ketena gakerjaan
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja										
				persentase informasi pasar kerja yang di sebarluaskan	100 %	100 %	180.000.000	100 %	180.000.000	100 %	180.000.000	100 %	Dinas ketena gakerjaan
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										
				Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang Ketenagakerjaan	30,3 %	30,3 %	680.000.000	32,6 %	690.000.000	32,6 %	700.000.000	32,6 %	Dinas ketena gakerjaan
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
				Persentase jumlah perusahaan yang sudah menerapkan PP/PKB	100 %	100 %	330.000.000	100 %	340.000.000	100 %	350.000.000	100 %	Dinas ketena gakerjaan
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota										
				Persentase jumlah perusahaan yang sudah menerapkan PP/PKB	30,3 %	30,3 %	680.000.000	32,6 %	690.000.000	35 %	700.000.000	35 %	Dinas ketena gakerjaan
Meningkatnya kapasitas birokrasi													
Meningkatnya kinerja organisasi													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
							000		000		000		Dinas ketena gakerjaan
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.106.899.633	100 %	5.258.092.996	100 %	5.576.999.848	100 %	Dinas ketena gakerjaan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	Dinas ketena gakerjaan

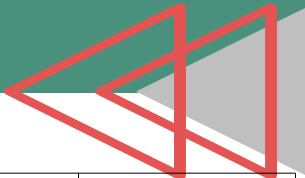


Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.02	Administrasi	Keuangan Perangkat Daerah									
				Pesentase Pemenuhan layanan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	3.449.850.663	100 %	3.613.899.046	100 %	3.786.149.848	100 %	Dinas ketena gakerjaan
		X.XX.01.2.05	Administrasi	Kepegawaian Perangkat Daerah									
				Pesentase Pemenuhan layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	87.500.000	100 %	87.500.000	100 %	87.500.000	100 %	Dinas ketena gakerjaan
		X.XX.01.2.06	Administrasi	Umum Perangkat Daerah									
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 %	100 %	408.149.000	100 %	426.893.950	100 %	485.550.000	100 %	Dinas ketena gakerjaan
		X.XX.01.2.07	Pengadaan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Persentase pengadaan barang milik daerah yang di laksanakan	100 %	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	195.000.000	100 %	Dinas ketena gakerjaan
		X.XX.01.2.08	Penyediaan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	141.800.000	100 %	144.800.000	100 %	154.800.000	100 %	Dinas ketena gakerjaan
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi	80 %	80 %	867.600.000	80 %	815.000.000	90 %	848.000.000	90 %	Dinas ketena gakerjaan
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat													
Meningkatnya kualitas hidup perempuan													
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										
				Nilai Keterlibatan Perempuan di Parlemen	14.29 Persen	30 Persen	000	30 Persen	000	30 Persen	000	30 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
				Nilai Perempuan sebagai Tenaga Profesional	53.89 Persen	50 Persen	000	50 Persen	000	50 Persen	000	50 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
				Nilai Sumbangan Pendapatan Perempuan	27.2 Persen	50 Persen	000	50 Persen	000	50 Persen	000	50 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
				Rasio Angka Harapan Hidup Perempuan dengan Laki-laki	1.06 Nilai	1 Nilai	150.000.000	1 Nilai	153.750.000	1 Nilai	157.593.750	1 Nilai	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan

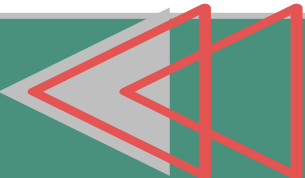


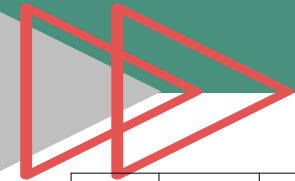
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													Masyarakat
				Rasio Harapan Lama Sekolah Perempuan dengan Laki-laki	1.06 Nilai	1 Nilai	000	1 Nilai	000	1 Nilai	000	1 Nilai	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
				Rasio Pengeluaran Per Kapita Perempuan dengan Laki-laki	0.74 Nilai	1 Nilai	000	1 Nilai	000	1 Nilai	000	1 Nilai	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
				Rasio Rata-rata Lama Sekolah Perempuan dengan Laki-laki	0.94 Nilai	1 Nilai	000	1 Nilai	000	1 Nilai	000	1 Nilai	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota										
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah	38 Peran gkat Daerah	150.000.000	38 Peran gkat Daerah	153.750.000	38 Peran gkat Daerah	157.593.750	38 Perangkat Daerah	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN										
				Rasio Perempuan yang mengalami Kekerasan per 100.000 Perempuan	6.28 Nilai	5 Nilai	750.000.000	5 Nilai	768.750.000	5 Nilai	787.968.750	5 Nilai	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										
				Rasio perempuan yang mengalami kekerasan per 100.000 perempuan	6,28 Nilai	5 Nilai	300.000.000	5 Nilai	307.500.000	5 Nilai	315.187.500	5 Nilai	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota										
				Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Layanan	4 Layanan	150.000.000	4 Layanan	153.750.000	4 Layanan	157.593.750	4 Layanan	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan



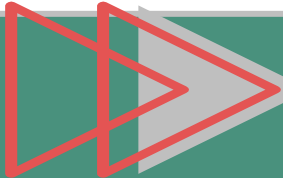
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													Masyarakat
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Rasio perempuan yang mengalami kekerasan per 100.000 perempuan	6,28 Nilai	5 Nilai	300.000.000	5 Nilai	307.500.000	5 Nilai	315.187.500	5 Nilai	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
	Meningkatnya pemenuhan hak anak												
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA										
				Persentase Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang / Keluarga yang Memperoleh Layanan sesuai Standar	60 Persen	60 Persen	150.000.000	60 Persen	153.750.000	60 Persen	157.593.750	60 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	150.000.000	1 Lembaga	153.750.000	1 Lembaga	157.593.750	1 Lembaga	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK										
				Jumlah Dokumen Profil Anak dan Perempuan Update dan Terpublikasi	1 Dokumen	2 Dokum en	150.000.000	2 Dokum en	153.750.000	2 Dokum en	157.593.750	2 Dokumen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	2 Dokum en	150.000.000	2 Dokum en	153.750.000	2 Dokum en	157.593.750	2 Dokumen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)										
				Persentase Komponen Kelembagaan Kota Layak Anak Sesuai Standar	60 Persen	65 Persen	150.000.000	70 Persen	153.750.000	75 Persen	157.593.750	75 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
				Persentase Komponen Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak sesuai Standar	60 Persen	65 Persen	000	70 Persen	000	75 Persen	000	75 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan,

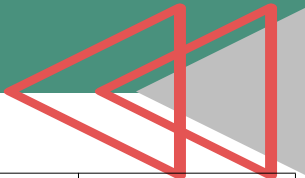




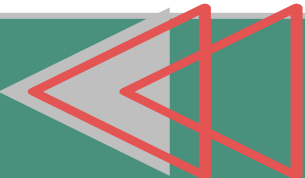
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

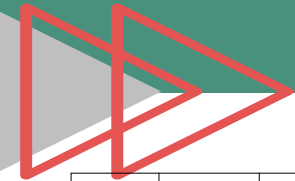
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
				Persentase Lingkungan Keluarga sesuai Standar	60 Persen	65 Persen	000	70 Persen	000	75 Persen	000	75 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
				Persentase Pemenuhan Kualitas Budaya	60 Persen	65 Persen	000	70 Persen	000	75 Persen	000	75 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
				Persentase Pemenuhan Kualitas Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sesuai Standar	60 Persen	65 Persen	000	70 Persen	000	75 Persen	000	75 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
				Persentase Pemenuhan Kualitas Pendidikan	60 Persen	65 Persen	000	70 Persen	000	75 Persen	000	75 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
				Persentase Pemenuhan Kualitas Rekreasi sesuai Standar	60 Persen	65 Persen	000	70 Persen	000	75 Persen	000	75 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
				Persentase Pemenuhan Kualitas Waktu Luang	60 Persen	65 Persen	000	70 Persen	000	75 Persen	000	75 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
				Persentase Pengasuhan Alternatif sesuai Standar	60 Pe	65 Pe	000	70 Pe	000	75 Pe	000	75 Pe	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										
				Jumlah Organisasi Pemerintah, Non	40	40 Organ	150.000.000	40 Organ	153.750.000	40 Organ	157.593.750	40 Organisasi	Dinas Pembe rdayaan





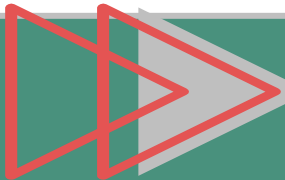
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target isasi	Rp	Target isasi	Rp	Target isasi	Rp		
				Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi								Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK										
				Rasio anak yang mengalami kekerasan per 10.000 jumlah anak	5.9 Nilai	5 Nilai	600.000.000	5 Nilai	615.000.000	5 Nilai	630.375.000	5 Nilai	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokum en	150.000.000	4 Dokum en	153.750.000	6 Dokum en	157.593.750	8 Dokumen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Rasio anak yang mengalami kekerasan per 10.000 jumlah anak	5,9 Nilai	5 Nilai	300.000.000	5 Nilai	307.500.000	5 Nilai	315.187.500	5 Nilai	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Rasio anak yang mengalami kekerasan per 10.000 jumlah anak	5,9 Nilai	5 Nilai	150.000.000	5 Nilai	153.750.000	5 Nilai	157.593.750	5 Nilai	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
Menurunnya Tingkat Kedalaman dan Tingkat Keparahan Kemiskinan													
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelurahan													
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT										
				Persentase kelurahan dengan nilai kualitas pemerintahan lebih dari 102	1.39 Persen	1.39 Persen	600.000.000	2.78 Persen	615.000.000	4.17 Persen	630.375.000	4.17 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
				Persentase kelurahan dengan nilai kualitas pengelolaan kemasyarakatan lebih dari 170	1.39 Persen	1.39 Persen	000	2.78 Persen	000	4.17 Persen	000	4.17 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

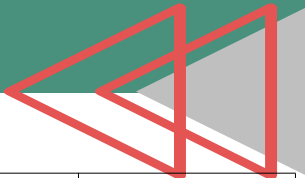




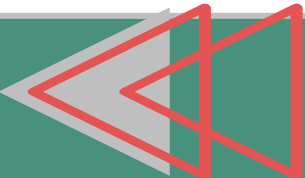
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													Pe mberdayaan Masyarakat
				Persentase kelurahan dengan nilai kualitas pengelolaan kewilayahan lebih dari 79	1.39 Persen	1.39 Persen	000	2.78 Persen	000	4.17 Persen	000	4.17 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										
				Persentase sub kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	600.000.000	100 Persen	615.000.000	100 Persen	630.375.000	100 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
	Meningkatnya kinerja organisasi												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	3.325.000.000	100 Persen	3.408.125.000	100 Persen	3.493.328.125	100 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Persentase dokumen, evaluasi dan laporan keuangan dengan kualitas baik	100 Persen	100 Persen	150.000.000	100 Persen	153.750.000	100 Persen	157.593.750	100 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan administrasi keuangan	100 Persen	100 Persen	2.050.000.000	100 Persen	2.101.250.000	100 Persen	2.153.781.250	100 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Tingkat kedisiplinan aparatur	100 Persen	100 Persen	100.000.000	100 Persen	102.500.000	100 Persen	105.062.500	100 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan



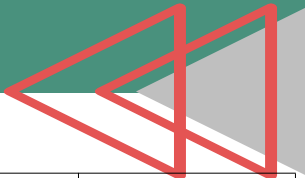


Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													Pe mberdayaan Masyarakat
		X.XX.01.2.06	Administrasi	Umum Perangkat Daerah									
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	450.000.000	100 Persen	461.250.000	100 Persen	472.781.250	100 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		X.XX.01.2.07	Pengadaan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	51.250.000	100 Persen	52.531.250	100 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		X.XX.01.2.08	Penyediaan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Tingkat pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah DPPPAPM	100 Persen	100 Persen	275.000.000	100 Persen	281.875.000	100 Persen	288.921.875	100 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	250.000.000	100 Persen	256.250.000	100 Persen	262.656.250	100 Persen	Dinas Pembe rdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pe mberdayaan Masyarakat
Menguatnya ketahanan pangan daerah													
	Terpenuhinya pangan masyarakat												
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN										
				Jumlah ketersediaan energi dan protein per kapita	2400 kkal/kap/hari	2400 kka l/kap/hari	51.050.000	2400 kka l/kap/hari	53.500.000	2400 kka l/kap/hari	56.000.000	2400 kkal/kap/hari	Dinas Ketahanan Pangan
				Jumlah ketersediaan energi dan protein per kapita	64 gram/kap/ hari	64 gram/ kap/hari	51.050.000	64 gram/ kap/hari	53.500.000	64 gram/ kap/hari	56.000.000	64 gram/kap/hari	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
				persentase pemenuhan infrastruktur pangan dalam kondisi baik	50 %	80 %	102.100.000	90 %	107.000.000	100 %	112.000.000	100 %	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT										
				Skor Pola Pangan Harapan	88,9 skor	100 skor	857.000.000	100 skor	901.000.000	100 skor	947.000.000	100 skor	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										

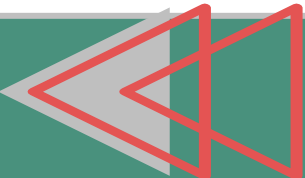


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Tingkat ketersediaan informasi pangan up-to-date	100 %	100 %	220.000.000	100 %	231.000.000	100 %	243.000.000	100 %	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota										
				Jumlah cadangan pangan	9,8 Ton	30 Ton	400.000.000	40 Ton	420.000.000	50 Ton	441.000.000	50 Ton	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi										
				Jumlah dokumen analisa neraca bahan makanan (NBM)	1 dok	4 dok	95.000.000	4 dok	100.000.000	4 dok	105.000.000	4 dok	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi										
				Angka Kecukupan Gizi(AKG) energi	2400 kal/org/hr	2400 kal/org/hr	71.000.000	2400 kal/org/hr	75.000.000	2400 kal/org/hr	79.000.000	2400 kal/org/hr	Dinas Ketahanan Pangan
				Angka Kecukupan Gizi(AKG) protein	64 gr/org/hr	64 gr/org/hr	71.000.000	64 gr/org/hr	75.000.000	64 gr/org/hr	79.000.000	64 gr/org/hr	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN										
				Jumlah Rumah Tangga Rentan Rawan Pangan yang mendapat bantuan	100 %	100 %	450.000.000	100 %	479.000.000	100 %	503.000.000	100 %	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan										
				Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	1 Dokumen	1 Dokum en	75.000.000	1 Dokum en	79.000.000	1 Dokum en	83.000.000	1 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota										
				jumlah rumah tangga rentan rawan pangan	300 kk	1000 kk	375.000.000	1000 kk	400.000.000	1000 kk	420.000.000	1000 kk	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN										
				Standarisasi Mutu Pangan	10 komoditi	15 komoditi	85.000.000	20 komoditi	90.000.000	20 komoditi	95.000.000	30 komoditi	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah pengawasan keamanan pangan	10 Komoditi	15 Komoditi	85.000.000	15 Komoditi	90.000.000	20 Komoditi	95.000.000	30 Komoditi	Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	2.997.000.000	100 %	3.234.000.000	100 %	3.570.000.000	100 %	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Kinerja yang Baik	4 dokumen	4 dokumen	25.000.000	4 dokumen	27.000.000	4 dokumen	29.000.000	4 dokumen	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Meningkatnya Administrasi keuangan skpd	14 bulan	14 bulan	2.300.000.000	14 bulan	2.500.000.000	14 bulan	2.800.000.000	14 bulan	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										

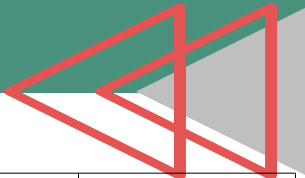


Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	32.000.000	100 persen	34.000.000	100 persen	36.000.000	100 persen	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	300.000.000	100 persen	315.000.000	100 persen	330.000.000	100 persen	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase Barang Milik Daerah Yang Tersedia	100 Persen	100 Persen	35.000.000	100 Persen	37.000.000	100 Persen	39.000.000	100 Persen	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Penyediaan Jumlah Jasa Pendukung Urusan Pemerintah	100 persen	100 persen	200.000.000	100 persen	210.000.000	100 persen	220.000.000	100 persen	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	80 persen	80 persen	105.000.000	80 persen	111.000.000	80 persen	116.000.000	80 persen	Dinas Ketahanan Pangan
Terjaganya kualitas lingkungan hidup													
	Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup												
	Meningkatnya kualitas air												
	Terkendalnya sumber daya air												
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											
				Persentase Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu	60 Persen	60 Persen	100.000.000	60 Persen	100.000.000	61 Persen	120.000.000	66 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Air Tanah yang Memenuhi Baku Mutu	60 Persen	60 Persen	100.000.000	60 Persen	100.000.000	61 Persen	120.000.000	69 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi GRK	0 Persen	50 Persen	150.000.000	50 Persen	150.000.000	50 Persen	150.000.000	50 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Luas Lahan yang Telah Ditetapkan Status Kerusakan Lahan/Atau Tanah Untuk Produksi Bio Massa	0 Persen	7,98 Persen	150.000.000	7,98 Persen	150.000.000	7,98 Persen	150.000.000	7,98 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											
				Persentase cakupan titik pantau air dan udara	76 Persen	79 Persen	100.000.000	82 Persen	100.000.000	85 Persen	100.000.000	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				persentase ketersediaan data bidang sumber daya air yang terupdate	100 persen	100 persen	50.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	Dinas Lingkungan Hidup
				RAD aksi mitigasi yang dilaksanakan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											
				Jumlah titik lahan kritis	1 Titik	1 Titik	75.000.000	1 Titik	75.000.000	1 Titik	75.000.000	1 Titik	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah titik sungai yang dibersihkan	1 Titik	1 Titik	75.000.000	1 Titik	75.000.000	1 Titik	75.000.000	1 Titik	Dinas Lingkungan Hidup

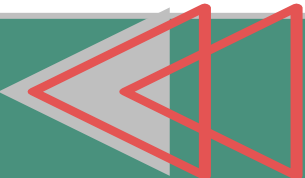


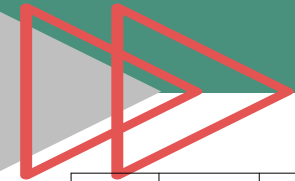
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Pengolahan Limbah												
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										
				Persentase Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu	60 Persen	60 Persen	100.000.000	60 Persen	100.000.000	61 Persen	120.000.000	66 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Air Tanah yang Memenuhi Baku Mutu	60 Persen	60 Persen	100.000.000	60 Persen	100.000.000	61 Persen	120.000.000	69 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi GRK	0 Persen	50 Persen	150.000.000	50 Persen	150.000.000	50 Persen	150.000.000	50 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Luas Lahan yang Telah Ditetapkan Status Kerusakan Lahan/Atau Tanah Untuk Produksi Bio Massa	0 Persen	7,98 Persen	150.000.000	7,98 Persen	150.000.000	7,98 Persen	150.000.000	7,98 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										
				Persentase cakupan titik pantau air dan udara	76 Persen	79 Persen	100.000.000	82 Persen	100.000.000	85 Persen	100.000.000	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				RAD aksi mitigasi yang dilaksanakan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										
				Persentase usaha/kegiatan yang memiliki IPAL	20 Persen	25 Persen	150.000.000	30 Persen	150.000.000	35 Persen	150.000.000	45 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)										
				persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap kebijakan B3 dan LB3	16 Persen	18 Persen	50.000.000	20 Persen	50.000.000	22 Persen	50.000.000	26 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3										
				Persentase pelaku usaha yang memiliki TPS LB3	16 Persen	18 Persen	50.000.000	20 Persen	50.000.000	22 Persen	50.000.000	26 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya validitas informasi data bidang sumber daya air												
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP										
				Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan LH	100 Persen	100 Persen	250.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota										
				Persentase ketersediaan data bidang lingkungan hidup	20 Persen	20 Persen	100.000.000	25 Persen	100.000.000	30 Persen	100.000.000	40 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota										
				Persentase ketersediaan data KLHS yang ada	20 Persen	20 Persen	150.000.000	25 Persen	150.000.000	30 Persen	150.000.000	40 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										
				Persentase Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu	60 Persen	60 Persen	100.000.000	60 Persen	100.000.000	61 Persen	120.000.000	66 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Air Tanah yang Memenuhi Baku Mutu	60 Persen	60 Persen	100.000.000	60 Persen	100.000.000	61 Persen	120.000.000	69 Persen	Dinas Lingkungan Hidup



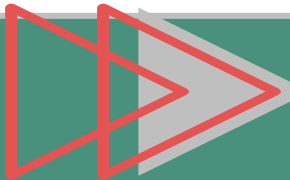
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi GRK	0 Persen	50 Persen	150.000.000	50 Persen	150.000.000	50 Persen	150.000.000	50 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Luas Lahan yang Telah Ditetapkan Status Kerusakan Lahan/Atau Tanah Untuk Produksi Bio Massa	0 Persen	7,98 Persen	150.000.000	7,98 Persen	150.000.000	7,98 Persen	150.000.000	7,98 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										
				Persentase usaha/kegiatan yang memiliki IPAL	20 Persen	25 Persen	150.000.000	30 Persen	150.000.000	35 Persen	150.000.000	45 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas udara													
Menurunnya sumber emisi tidak bergerak													
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)										
				persentase usaha/kegiatan yang memenuhi baku mutu	20 Persen	25 Persen	50.000.000	30 Persen	50.000.000	35 Persen	50.000.000	45 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
				Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup	20 Persen	25 Persen	25.000.000	30 Persen	25.000.000	35 Persen	25.000.000	45 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase pencemaran emisi tidak bergerak	0 Persen	2 Persen	25.000.000	2 Persen	25.000.000	2 Persen	25.000.000	2 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya aksi mitigasi perubahan iklim													
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										
				Persentase Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu	60 Persen	60 Persen	100.000.000	60 Persen	100.000.000	61 Persen	120.000.000	66 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Air Tanah yang Memenuhi Baku Mutu	60 Persen	60 Persen	100.000.000	60 Persen	100.000.000	61 Persen	120.000.000	69 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi GRK	0 Persen	50 Persen	150.000.000	50 Persen	150.000.000	50 Persen	150.000.000	50 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Luas Lahan yang Telah Ditetapkan Status Kerusakan Lahan/Atau Tanah Untuk Produksi Bio Massa	0 Persen	7,98 Persen	150.000.000	7,98 Persen	150.000.000	7,98 Persen	150.000.000	7,98 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										
				Persentase cakupan titik pantau air dan udara	76 Persen	79 Persen	100.000.000	82 Persen	100.000.000	85 Persen	100.000.000	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				RAD aksi mitigasi yang dilaksanakan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya tutupan lahan													
Meningkatnya ruang terbuka hijau													
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)										
				Persentase Luas Tutupan Lahan	80 Persen	80 Persen	350.828.000	80 Persen	350.828.000	80 Persen	428.000.000	80 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota										

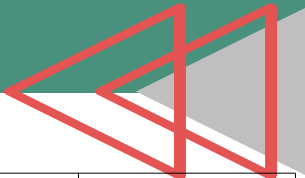




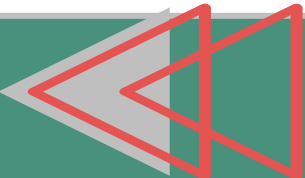
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase Luasan RTH	30 Persen	30 Persen	350.828.000	30 Persen	350.828.000	30 Persen	428.165.550	30 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
Menurunnya luas lahan kritis													
	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										
				Persentase Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu	60 Persen	60 Persen	100.000.000	60 Persen	100.000.000	61 Persen	120.000.000	66 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Air Tanah yang Memenuhi Baku Mutu	60 Persen	60 Persen	100.000.000	60 Persen	100.000.000	61 Persen	120.000.000	69 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi GRK	0 Persen	50 Persen	150.000.000	50 Persen	150.000.000	50 Persen	150.000.000	50 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Luas Lahan yang Telah Ditetapkan Status Kerusakan Lahan/Atau Tanah Untuk Produksi Bio Massa	0 Persen	7,98 Persen	150.000.000	7,98 Persen	150.000.000	7,98 Persen	150.000.000	7,98 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										
				Jumlah titik lahan kritis	0 Titik	5 Titik	75.000.000	5 Titik	75.000.000	5 Titik	75.000.000	5 Titik	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase sungai yang memenuhi baku mutu	60 Persen	60 Persen	75.000.000	60 Persen	75.000.000	60 Persen	75.000.000	60 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
Menurunnya volume timbunan sampah													
Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan													
	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										
				Persentase Timbunan Sampah	74,90 Persen	72 Persen	4.624.000.000	73 Persen	4.624.000.000	77 Persen	5.124.000.000	85 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01		Pengelolaan Sampah										
				Gerakan reduce sampah berbasis masyarakat	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1.156.000.000	1 Kegiatan	1.156.000.000	1 Kegiatan	1.281.000.000	1 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase luas area yang terlayani	60 Persen	65 Persen	1.156.000.000	70 Persen	1.156.000.000	75 Persen	1.281.000.000	85 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase volume sampah yang di reuse	0 Persen	0,1 Persen	1.156.000.000	0,1 Persen	1.156.000.000	0,1 Persen	1.281.000.000	0,1 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase volume sampah yang direcycle	0 Persen	1 Persen	1.156.000.000	1 Persen	1.156.000.000	1 Persen	1.281.000.000	1 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya nilai guna sampah													
	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										
				Persentase Timbunan Sampah	74,90 Persen	72 Persen	4.624.000.000	73 Persen	4.624.000.000	77 Persen	5.124.000.000	85 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01		Pengelolaan Sampah										
				Gerakan reduce sampah berbasis masyarakat	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1.156.000.000	1 Kegiatan	1.156.000.000	1 Kegiatan	1.281.000.000	1 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase luas area yang terlayani	60 Persen	65	1.156.000.000	70	1.156.000.000	75	1.281.000.000	80 Persen	Dinas Lingkungan





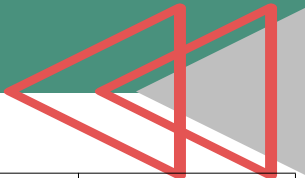
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Persen		Persen		Persen			Hidup
				Persentase volume sampah yang di reuse	0 Persen	0,1 Persen	1.156.000.000	0,1 Persen	1.156.000.000	0,1 Persen	1.281.000.000	0,1 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase volume sampah yang direcycle	0 Persen	1 Persen	1.156.000.000	1 Persen	1.156.000.000	1 Persen	1.281.000.000	1 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengurangan sumber sampah baru													
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											
				Persentase Timbulan Sampah	74,90 Persen	72 Persen	4.624.000.000	73 Persen	4.624.000.000	77 Persen	5.124.000.000	85 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah											
				Gerakan reduce sampah berbasis masyarakat	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1.156.000.000	1 Kegiatan	1.156.000.000	1 Kegiatan	1.281.000.000	1 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase luas area yang terlayani	60 Persen	65 Persen	1.156.000.000	70 Persen	1.156.000.000	75 Persen	1.281.000.000	85 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase volume sampah yang di reuse	0 Persen	0,1 Persen	1.156.000.000	0,1 Persen	1.156.000.000	0,1 Persen	1.281.000.000	0,1 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase volume sampah yang direcycle	0 Persen	1 Persen	1.156.000.000	1 Persen	1.156.000.000	1 Persen	1.281.000.000	1 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup													
Meningkatnya komunitas sadar lingkungan													
	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH											
				Persentase MHA yang diakui pemerintah kota terkait dengan PPLH	0 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH											
				Persentase luas kawasan MHA yang diusulkan mendapat pengakuan	0 Persen	20 Persen	50.000.000	20 Persen	50.000.000	20 Persen	50.000.000	20 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											
				persentase komunitas lingkungan hidup	- persen	40 persen	50.000.000	45 persen	60.000.000	50 persen	65.000.000	55 persen	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
				Jumlah Komunitas Lingkungan Hidup	0 Komunitas	46 Komunitas	50.000.000	46 Komunitas	50.000.000	46 Komunitas	50.000.000	46 Komunitas	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											
				Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup	100 Persen	100 Persen	200.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
				Persentase media edukasi dan komunikasi	28 Persen	28 Persen	200.000.000	28 Persen	200.000.000	28 Persen	200.000.000	28 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP											
				Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100 Persen	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100 Persen	Dinas Lingkungan



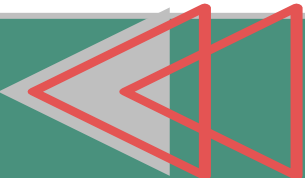
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

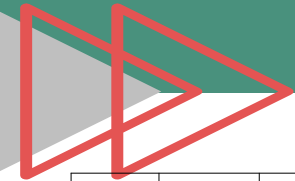
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target Persen	Rp	Target Persen	Rp	Target Persen	Rp		
		2.11.10.2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota									Hidup
				Jumlah pengaduan yang ditindakanjuti	8 Pengaduan	8 Penga duan	25.000.000	8 Penga duan	25.000.000	8 Penga duan	25.000.000	8 Pengaduan	Dinas Lingkungan Hidup
percepatan perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik													
meningkatnya kapasitas biroksari													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	9.644.000.000	100 Persen	9.700.000.000	100 Persen	9.750.000.000	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokum en	25.000.000	8 Dokum en	25.000.000	8 Dokum en	25.000.000	8 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Rata-rata jasa transaksi keuangan	100 Persen	100 Persen	3.840.000.000	100 Persen	3.890.000.000	100 Persen	3.940.000.000	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Terlaksananya adminitrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	84.000.000	100 Persen	84.000.000	100 Persen	84.000.000	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Terlaksananya adminitrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	229.000.000	100 Persen	229.000.000	100 Persen	229.000.000	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	1.225.000.000	100 Persen	1.225.000.000	100 Persen	1.225.000.000	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Terlaksananya penyediaan jasa urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	363.000.000	100 Persen	363.000.000	100 Persen	363.000.000	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	3.878.000.000	100 Persen	3.878.000.000	100 Persen	3.878.000.000	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas pelayanan publik													
Meningkatnya Tertib Dokumen Kependudukan													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan													
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK										
				presentase layanan pendaftaran penduduk	100 %	100 %	310.000.000	100 %	320.000.000	100 %	325.000.000	100 %	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk										
				Jumlah jenis layanan Pendaftaran Penduduk	11 Jenis layanan	11 Jenis layanan	90.000.000	11 Jenis layanan	100.000.000	11 Jenis layanan	105.000.000	11 Jenis layanan	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026



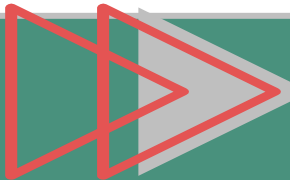
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk										
				Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk	0 Kali	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk										
				Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0 Kali	4 Kali	50.000.000	4 Kali	50.000.000	4 Kali	50.000.000	4 Kali	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk										
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokum en	70.000.000	1 Dokum en	70.000.000	1 Dokum en	70.000.000	1 Dokumen	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL										
				persentase layanan pencatatan sipil	100 %	100 %	110.000.000	100 %	110.000.000	100 %	110.000.000	100 %	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil										
				Jumlah jenis layanan pencatatan sipil	11 Jenis Layanan	11 Jenis Layanan	80.000.000	11 Jenis Layanan	80.000.000	11 Jenis Layanan	80.000.000	11 Jenis Layanan	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										
				Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										
				Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0 Kali	4 Kali	40.000.000	4 Kali	40.000.000	4 Kali	40.000.000	4 Kali	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
				persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100 %	100 %	650.000.000	100 %	625.000.000	100 %	725.389.000	100 %	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan										
				Jumlah Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	4 Laporan	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
				Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	520.000.000	12 Laporan	520.000.000	12 Laporan	520.000.000	12 Laporan	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
				Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Kali	4 Kali	60.000.000	4 Kali	60.000.000	4 Kali	60.000.000	4 Kali	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN										
				persentase pengelolaan profil kependudukan	100 %	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	31.611.000	100 %	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan										
				Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokum en	20.000.000	1 Dokum en	20.000.000	1 Dokum en	20.000.000	1 Dokumen	Dinas Kepen dudukan



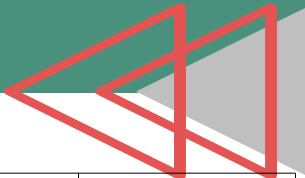


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

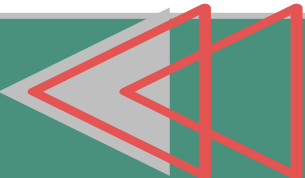
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	3.966.000.000	100 %	3.806.000.000	100 %	4.202.120.000	100 %	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	30.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	12 Bulan	12 Bulan	3.034.648.100	12 Bulan	3.110.514.303	12 Bulan	3.188.277.160	12 Bulan	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Persentase pemenuhan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Persentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	767.000.000	100 %	787.000.000	100 %	838.440.000	100 %	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase pemenuhan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	3 Jenis	940.000.000	3 Jenis	700.000.000	3 Jenis	700.000.000	3 Jenis	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase pemenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	284.000.000	100 %	284.000.000	100 %	295.350.000	100 %	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase pemenuhan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	285.000.000	100 %	235.000.000	100 %	260.830.000	100 %	Dinas Kepen dudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat													
	Terkendallinya laju pertumbuhan penduduk dari kelahiran												
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK										
				Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga	100 %	100 %	175.241.150	100 %	179.622.179	100 %	184.112.733	100 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Data KKBPK yang akurat dan tepat waktu	95 %	95 %	36.000.000	95 %	36.900.000	95 %	37.822.500	95 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk										
				Persentase Tingkat Akurasi Data Profil	95 %	100 %	36.000.000	100 %	36.900.000	100 %	37.822.500	100 %	Dinas Penge ndalian



Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

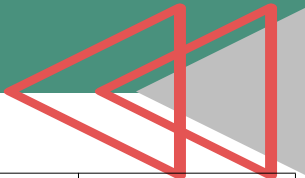


Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Kependudukan								Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
				Jenis informasi data mikro kependudukan keluarga	3 Jenis	3 Jenis	175.241.150	3 Jenis	179.622.179	3 Jenis	184.112.733	3 Jenis	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)										
				Cakupan pasangan usia subur yang tidak ber-kb (unmeetnet)	18,52 %	16,23 %	40.400.000	10,50 %	41.410.000	10,10 %	42.445.250	10,10 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase peserta KB aktif (CPR)	69,42 %	57,91 %	554.600.000	63,40 %	568.465.000	63,90 %	582.676.625	63,90 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Kampung KB Yang Mandiri	20 %	20 %	673.000.000	30 %	689.825.000	40 %	707.070.625	40 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	19,05 %	28,39 %	425.000.000	32,30 %	435.625.000	33 %	446.515.625	33 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Peserta Kab Baru	57,4 %	15 %	648.575.000	17 %	664.789.375	19 %	681.409.109	19 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	9,14 %	25,50 %	149.841.700	24,50 %	153.587.743	23,50 %	157.427.436	23,50 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal										
				Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	79,27 %	80 %	648.575.000	85 %	664.789.375	90 %	681.409.109	90 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)										
				Rasio PKB/PLKB	2.25 Rasio	1.6 Rasio	554.600.000	1.5 Rasio	568.465.000	1.4 Rasio	582.676.625	1.4 Rasio	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota										
				Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 %	100 %	615.241.700	100 %	630.622.743	100 %	646.388.311	100 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										
				Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang Terbentuk di Kampung KB	38,8 %	52,7 %	673.000.000	66,6 %	689.825.000	70 %	707.070.625	70 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga

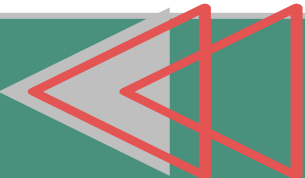


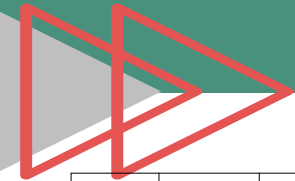
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
												Berencana	
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)										
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	53,31 Skala 0-100	60,91 Skala 0-100	1.725.464.350	61 Skala 0-100	1.769.661.731	62,90 Skala 0-100	1.813.903.274	62,90 Skala 0-100	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										
				Cakupan Kampung KB yang Memiliki UPPKA	61,07 %	68 %	100.000.000	69 %	102.500.000	70 %	105.062.500	70 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Keluarga yang Aktif dalam BKR (Tribina)	82 %	82 %	1.625.464.350	83 %	1.666.100.959	85 %	1.707.753.483	85 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Kapasitas Birokrasi													
Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	2.946.161.707	100 %	3.019.815.750	100 %	3.095.311.143	100 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Persentase dokumen,evaluasi dan laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.625.000	100 %	26.265.625	100 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Keuangan	100 %	100 %	1.944.590.959	100 %	1.993.205.733	100 %	2.043.035.875	100 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Tingkat kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	31.500.000	100 %	32.287.500	100 %	33.094.687	100 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	294.705.600	100 %	302.073.240	100 %	309.625.071	100 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	290.000.000	100 %	297.250.000	100 %	304.681.250	100 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Jasa	100 %	100 %	162.827.148	100 %	166.897.827	100 %	171.070.272	100 %	Dinas Penge ndalian



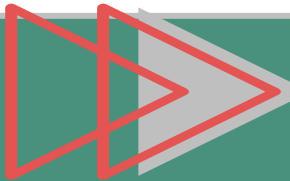
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									Penduduk dan Keluarga Berencana
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daeah	100 %	100 %	197.538.000	100 %	202.476.450	100 %	207.538.361	100 %	Dinas Penge ndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Pengembangan wilayah													
Meningkatnya Layanan Sistem Transportasi Perkotaan													
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										
				Jumlah Wilayah yang Terlayani Angkutan Perkotaan	7 Kecamatan	8 Kecam atan	600.000.000	8 Kecam atan	682.500.000	8 Kecam atan	716.625.000	8 Kecamatan	Dinas Perhubungan
				Kecepatan Rata-Rata Per Ruas Jalan	40 Km/Jam	40 Km/Jam	500.000.000	40 Km/Jam	525.000.000	40 Km/Jam	551.250.000	40 Km/Jam	Dinas Perhubungan
				Persentase Angkutan Jalan (Orang dan/atau Barang) Laik Jalan	100 Persen	100 Persen	360.000.000	100 Persen	378.000.000	100 Persen	396.900.000	100 Persen	Dinas Perhubungan
				Persentase Prasarana Perhubungan	75 Persen	75 Persen	900.000.000	80 Persen	985.000.000	85 Persen	1.034.250.000	85 Persen	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Transportasi	0 dokumen	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	210.000.000	1 dokumen	220.500.000	1 dokumen	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
				Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	0 unit	144 unit	550.000.000	154 unit	577.500.000	154 unit	606.375.000	222 unit	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C										
				Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C	38 Persen	38 Persen	300.000.000	40 Persen	355.000.000	45 Persen	372.750.000	45 Persen	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir										
				Persentase Titik Parkir Memiliki Izin Pengelolaan Parkir	0 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	52.500.000	100 Persen	55.125.000	100 Persen	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
				Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0 Persen	100 Persen	310.000.000	100 Persen	325.500.000	100 Persen	341.775.000	100 Persen	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										
				Persentase Pelaksanaan Menejemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan Kota	0 Persen	80 Persen	450.000.000	82 Persen	472.500.000	85 Persen	496.125.000	85 Persen	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota										
				Persentase Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas	0 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	52.500.000	100 Persen	55.125.000	100 Persen	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan										

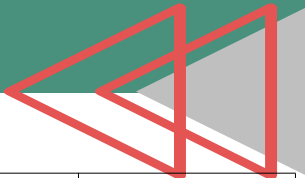




Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

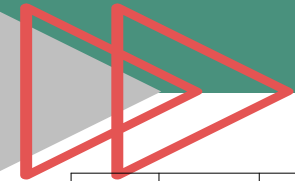
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah Dokumen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	0 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	52.500.000	1 dokumen	55.125.000	1 dokumen	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
				Persentase Layanan Angkutan Perkotaan	0 Persen	32 Persen	150.000.000	32 Persen	157.500.000	32 Persen	165.375.000	32 Persen	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
				Persentase Jaringan Trayek Perkotaan	0 Persen	38 Persen	150.000.000	38 Persen	157.500.000	38 Persen	165.375.000	38 Persen	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
				Penetapan Tarif Angkutan Perkotaan Kelas Ekonomi	0 Persen	100 Persen	150.000.000	100 Persen	157.500.000	100 Persen	165.375.000	100 Persen	Dinas Perhubungan
Meningkatkan Kapasitas Birokrasi													
	Meningkatnya Kinerja Organisasi												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	6.506.500.000	100 Persen	6.831.825.000	100 Persen	7.173.416.000	100 Persen	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							000		000		000		Dinas Perhubungan
				Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	55.000.000	100 Persen	57.750.000	100 Persen	60.637.500	100 Persen	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
							000		000		000		Dinas Perhubungan
				Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	4.595.000.000	100 Persen	4.824.750.000	100 Persen	5.065.987.500	100 Persen	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
							000		000		000		Dinas Perhubungan
				Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	75.000.000	100 Persen	78.750.000	100 Persen	82.687.500	100 Persen	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
							000		000		000		Dinas Perhubungan
				Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	344.000.000	100 Persen	361.200.000	100 Persen	379.260.000	100 Persen	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
							000		000		000		Dinas Perhubungan
				Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	450.000.000	100 Persen	472.500.000	100 Persen	496.125.000	100 Persen	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
							000		000		000		Dinas Perhubungan





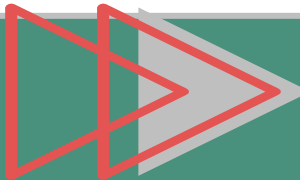
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	487.500.000	100 Persen	511.875.000	100 Persen	537.468.500	100 Persen	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
							000		000		000		Dinas Perhubungan
				Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	500.000.000	100 Persen	525.000.000	100 Persen	551.250.000	100 Persen	Dinas Perhubungan
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPBE												
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										
				Persentase data dan informasi publik yang dipublikasikan	60 %	65 %	850.000.000	70 %	440.000.000	75 %	440.000.000	75 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Tingkat kepuasan publik terhadap layanan data dan informasi	80 %	81 %	2.570.450.000	81,25 %	3.163.744.501	90 %	3.041.783.897	90 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
				presentase sarana aksebilitas data dan informasi	92 %	96 %	3.420.450.000	100 %	3.603.744.501	100 %	3.481.783.897	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA										
				Nilai Self Assessment SPBE	3,2 nilai	2,3 nilai	5.163.324.000	2,6 nilai	6.928.878.000	2,8 nilai	12.359.357.728,00	2,8 nilai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
				Nilai Self assesment SPBE	2,3 Indeks	2,3 Indeks	5.163.324.000	2,6 Indeks	6.928.878.000	2,8 Indeks	12.359.357.728,00	2,8 Indeks	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
	Terwujudnya Penyediaan Data Statistik Sektoral												
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										
				Data statistik yang dipublikasikan	85 %	90 %	490.000.000	95 %	390.000.000	100 %	405.000.000	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										
				Persentase data dan informasi siap di publikasikan	100 %	100 %	490.000.000	100 %	390.000.000	100 %	405.000.000	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

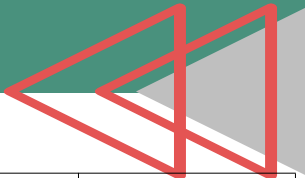




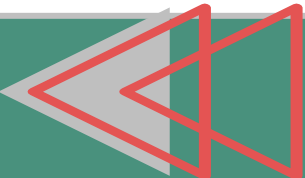
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

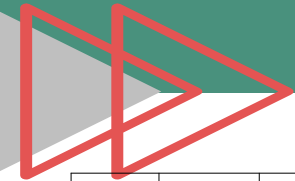
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
	Terciptanya Keamanan Data dan Informasi												
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI) kategori sistem elektronik	16 indeks	16 indeks	235.517.000	17 indeks	241.211.500	18 indeks	248.215.500	18 indeks	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI) kategori status kesiapan	185 indeks	185 indeks	229.340.000	190 indeks	232.350.000	195 indeks	243.750.000	195 indeks	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
				Rasio data dan informasi yang diamankan	0,3 Rasio	0,3 Rasio	344.290.000	0,35 Rasio	350.110.000	0,45 Rasio	366.715.500	0,45 Rasio	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	5 %	15 %	120.567.000	25 %	123.451.500	35 %	125.250.000	35 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Penunjang Bidang Komunikasi dan Informatika												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	2.479.301.038	100 %	2.467.471.038	100 %	2.356.530.838	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	105.913.000	100 %	105.913.000	100 %	105.913.000	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Persentase Pembayaran jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.273.401.038	100 %	2.249.521.038	100 %	2.134.275.838	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Persentase Pakaian Dinas Yang terpenuhi	100 %	100 %	62.950.000	100 %	79.950.000	100 %	70.455.000	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	100 %	461.076.500	100 %	414.936.499	100 %	441.940.776	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										





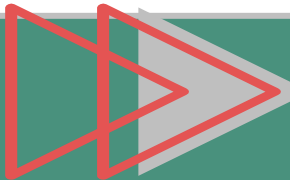
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi	100 %	100 %	257.000.000	100 %	106.500.000	100 %	219.068.925	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	142.950.000	100 %	138.000.000	100 %	151.800.000	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah Yang Terpelihara	100 %	100 %	297.538.000	100 %	323.668.000	100 %	215.919.154	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Menurunkan Pengangguran													
	meningkatnya koperasi yang berkualitas												
		2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM										
				Persentase koperasi aktif	8 %	9 %	120.000.000	9 %	120.000.000	9 %	120.000.000	9 %	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
				tingkat partisipasi anggota	68 %	70 %	120.000.000	70 %	120.000.000	70 %	120.000.000	70 %	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI										
				Persentase koperasi yang mengikuti (RAT) rapat anggota tahunan	40 %	50 %	100.000.000	50 %	100.000.000	50 %	100.000.000	50 %	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota										
				jumlah koperasi yang di nilai	20 koperasi	20 koperasi	100.000.000	20 koperasi	100.000.000	20 koperasi	100.000.000	20 koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI										
				Persentase koperasi sehat	19,2 %	19,5 %	130.000.000	19,5 %	130.000.000	19,5 %	130.000.000	19,5 %	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
				tingkat kelengkapan data koperasi	80 %	83 %	130.000.000	83 %	130.000.000	83 %	130.000.000	83 %	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN										
				Persentase koperasi yang memiliki SDM koperasi	26,92 %	30,83 %	120.000.000	30,83 %	120.000.000	30,83 %	120.000.000	30,83 %	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah koperasi yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan	25 koperasi	25 koperasi	120.000.000	25 koperasi	120.000.000	25 koperasi	120.000.000	25 koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI										
				Persentase koperasi yang memiliki pendampingan	12 %	20 %	90.000.000	20 %	90.000.000	20 %	90.000.000	20 %	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

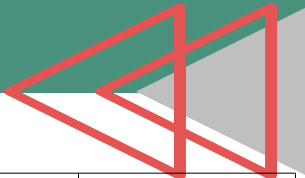




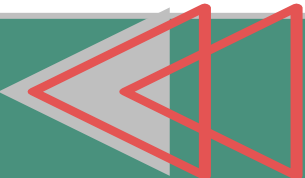
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

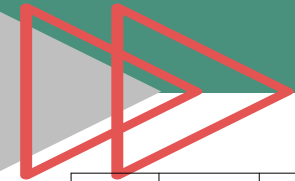
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
				jumlah koperasi mengikuti standar pembiayaan bintek pelatihan	2 koperasi	3 koperasi	90.000.000	3 koperasi	90.000.000	3 koperasi	90.000.000	3 koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)										
				Jumlah Pelaku UMKM naik kelas	50 umkm	10 umkm	300.000.000	10 umkm	300.000.000	10 umkm	300.000.000	10 umkm	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan										
				pelaku usaha yang profisioanal, handal dan berdaya saing pada pasar modern	50 umkm	15 umkm	300.000.000	15 umkm	300.000.000	15 umkm	300.000.000	15 umkm	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM										
				UMKM yang memenuhi standar pasar modern	25 umkm	25 umkm	80.000.000	25 umkm	80.000.000	25 umkm	80.000.000	25 umkm	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil										
				pelaku UMKM dapat berdaya saing di pasar modern	50 UMKM	25 UMKM	80.000.000	25 UMKM	80.000.000	25 UMKM	80.000.000	25 UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya Koperasi dan UKM yang berkualitas													
Meningkatnya Profesionalisme Aparatur													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	4.048.342.671	100 %	4.160.765.180	100 %	4.092.215.281	100 %	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							000		000		000		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	93 %	93 %	30.021.205	93 %	30.021.205	93 %	30.021.205	93 %	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	79008000 pertransaksi	7900800 0 pertran saksi	81.780.000	7900800 0 pertran saksi	81.780.000	7900800 0 pertran saksi	81.780.000	79008000 pertransaksi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	38 orang	38 orang	3.055.053.121	38 orang	3.055.053.121	38 orang	3.055.053.121	38 orang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	35 orang	35 orang	30.000.000	35 orang	30.000.000	35 orang	30.000.000	35 orang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Pengadaan Pakian Olah Raga Lengkap	35 orang	35 orang	40.000.000	35 orang	40.000.000	35 orang	40.000.000	35 orang	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Penyediaan bahan dan peraturan perundang - undangan	1460 eksemplar	1460 eks emplar	5.400.000	1460 eks emplar	5.400.000	1460 eks emplar	5.400.000	1460 eksemplar	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	732 buku	732 buku	25.000.000	732 buku	25.000.000	732 buku	25.000.000	732 buku	Dinas Koperasi dan





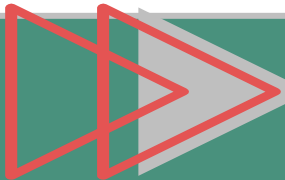
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													Usaha Kecil Menengah
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	5 komponen	5 kompo nen	20.741.200	5 kompo nen	20.741.200	5 kompo nen	20.741.200	5 komponen	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31 item	31 item	20.000.000	31 item	20.000.000	31 item	20.000.000	31 item	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Kali	40 Kali	300.000.000	40 Kali	300.000.000	40 Kali	300.000.000	40 Kali	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				persentase alat tulis kantoryang dapat di sediakan dengan total kebutuhan	100 %	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Pengadaan Mebeler	1 unit	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	6 unit	6 unit	53.279.820	6 unit	53.279.820	6 unit	53.279.820	6 unit	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Pengadaan peralatan gedung kantor	18 m2	18 m2	53.279.820	18 m2	53.279.820	18 m2	53.279.820	18 m2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	3400000 perbulan	3400000 perbulan	40.000.000	3400000 perbulan	40.000.000	3400000 perbulan	40.000.000	3400000 perbulan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3600000 perbulan	3600000 perbulan	43.200.000	3600000 perbulan	43.200.000	3600000 perbulan	43.200.000	3600000 perbulan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Penyediaan jasa surat menyurat	480 buah	480 buah	4.800.000	480 buah	4.800.000	480 buah	4.800.000	480 buah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Pemeliharaan Gedung kantor	18 m2	18 m2	25.000.000	18 m2	25.000.000	18 m2	25.000.000	18 m2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6 unit	6 unit	53.279.820	6 unit	53.279.820	6 unit	53.279.820	6 unit	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	14 unit	14 unit	104.997.600	14 unit	104.997.600	14 unit	104.997.600	14 unit	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Mewujudkan iklim usaha yang kondusif													
Meningkatkan Nilai Investasi													
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										
				persentase penambahan nilai investasi	30 %	30 %	185.000.000	37,5 %	245.500.000	46,87 %	303.850.000	46,87 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
						000		000		000			Dinas Penanaman



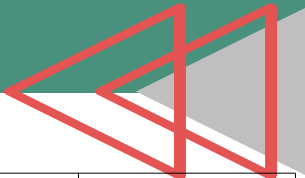


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah Regulasi Penanaman Modal	1 Regulasi/Kebijakan	2 Regulasi/Kebijakan	185.000.000	2 Regulasi/Kebijakan	203.500.000	2 Regulasi/Kebijakan	223.850.000	2 Regulasi/Kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										
							000		000		000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah Potensi Usaha	10 Potensi Usaha	6 Potensi Usaha	50.000.000	6 Potensi Usaha	60.000.000	8 Potensi Usaha	80.000.000	8 Potensi Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL										
				jumlah investor baru	16 investor baru	18 investor baru	456.000.000	19 investor baru	501.600.000	21 investor baru	551.760.000	21 investor baru	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
							000		000		000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan													
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL										
				Indeks Kepuasan Masyarakat	88 Indeks	88 Indeks	330.000.000	89 Indeks	363.000.000	90 Indeks	399.300.000	90 Indeks	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										
							000		000		000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										
				persentase pelanggaran penanaman modal yang ditindaklanjuti	20 %	100 %	322.300.000	100 %	354.530.000	100 %	389.983.000	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										
				persentase penerapansarana dan prasarana penunjang layanan	0 %	100 %	65.000.000	100 %	71.500.000	100 %	78.650.000	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
			Meningkatnya Kinerja Organisasi										
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										

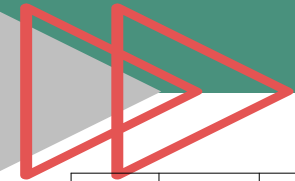


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026



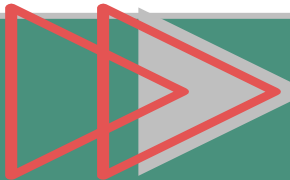
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	5.116.322.024	100 %	5.149.254.625	100 %	5.698.979.226	100 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas													
Meningkatnya Pembudayaan Olahraga													
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN										
				cakupan pelatih yang bersertifikat	59 persen	59 persen	35.000.000	60 persen	35.000.000	60 persen	35.000.000	62 persen	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				cakupan pembinaan atlet muda	26 persen	28 persen	150.000.000	28 persen	150.000.000	28 persen	150.000.000	28 persen	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				cakupan pembinaan olahraga	70 persen	70 persen	349.425.000	71 persen	363.367.000	72 persen	372.704.000	72 persen	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Persentase Kompetisi yang diikuti	81 %	82 %	1.754.403.335	84 %	1.707.808.000	85 %	2.262.788.000	85 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				rasio sarana olahraga per 1000 penduduk	0.01 rasio	0.01 rasio	200.000.000	0.02 rasio	220.000.000	0.02 rasio	250.000.000	0.02 rasio	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	1 Prasarana	1 Prasar ana	000	1 Prasar ana	000	1 Prasar ana	000	1 Prasarana	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Jumlah sarana prasarana olahraga yang direhab	1 Saprass	1 Saprass	75.000.000	1 Saprass	75.000.000	1 Saprass	75.000.000	1 Saprass	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				sarana dan prasarana dalam kondisi terawat	2 Saprass	2 Saprass	000	2 Saprass	000	2 Saprass	000	2 Saprass	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung olahraga berkualitas / sesuai standar	2 unit	2 unit	75.000.000	2 unit	75.000.000	2 unit	75.000.000	2 unit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah cabor yang mengikuti kejuaraan olahraga	36 cabor	12 cabor	600.000.000	36 cabor	240.000.000	18 cabor	650.000.000	18 cabor	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Jumlah kompetisi	13 kompetisi	13 komp etisi	249.808.335	13 komp etisi	287.808.000	13 komp etisi	316.788.000	13 kompetisi	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi										
				Jumlah Atlit Muda	268 Orang	270 Orang	150.000.000	272 Orang	150.000.000	272 Orang	150.000.000	272 Orang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Jumlah Cabor Olahraga Prestasi yg dibina	11 cabor	5 cabor	449.425.000	13 cabor	463.367.000	5 cabor	472.704.000	5 cabor	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga										
				Jumlah atlit	450 atlit	450 atlit	75.000.000	450 atlit	75.000.000	450 atlit	75.000.000	450 atlit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Jumlah Cabang Olahraga	67 cabor	67 cabor	500.000.000	67 cabor	605.000.000	67 cabor	699.000.000	67 cabor	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga



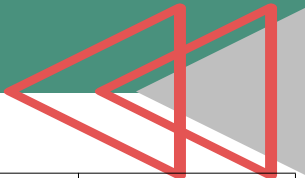


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

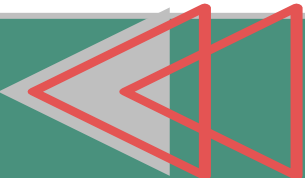
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah Tenaga keolahragaan yang bersertifikasi	96 orang	96 orang	35.000.000	96 orang	35.000.000	96 orang	35.000.000	96 orang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi										
				Jumlah cabor yang mengikuti kejuaraan olahraga	26 Cabor	26 Cabor	112.000.000	28 Cabor	125.000.000	30 Cabor	131.000.000	30 Cabor	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Jumlah Keikutsertaan OPD, FKPD, BUMD dan Pelajar dan Masyarakat dalam Olahraga rekreasi	300 Orang	300 Orang	194.595.000	300 Orang	200.000.000	300 Orang	220.000.000	300 Orang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Jumlah OPD yang mengikuti senam Kesegaran Jasmani	40 OPD	40 OPD	83.000.000	40 OPD	86.000.000	40 OPD	90.000.000	40 OPD	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Menurunkan pengangguran													
	Meningkatnya Kualitas Pemuda												
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN										
				persentase OKP yang aktif	73.75 persen	73.80 persen	296.000.000	73.82 persen	300.000.000	73.84 persen	325.000.000	73.84 persen	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				persentase pemuda sukarelawan	1,50 persen	1,53 persen	250.000.000	1,55 persen	350.000.000	1,60 persen	410.000.000	1,60 persen	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				persentase pemuda yang aktif dalam OKP	5 persen	5 persen	60.000.000	5 persen	60.000.000	5 persen	60.000.000	5 persen	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Persentase Wirausaha Muda	11 persen	12 persen	250.000.000	15 persen	300.000.000	17 persen	350.000.000	17 persen	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota										
				Jumlah Pemuda Pelopor	- Orang	2 Orang	190.000.000	4 Orang	220.000.000	6 Orang	280.000.000	6 Orang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Jumlah Pemuda yang di bina	20 Orang	40 Orang	250.000.000	50 Orang	300.000.000	60 Orang	350.000.000	60 Orang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Partisipasi Pemuda dalam kegiatan jambore TK. Provinsi dan Nasional	20 Orang	25 Orang	125.000.000	30 Orang	130.000.000	35 Orang	130.000.000	35 Orang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				sertifikat, kategori KLP	- sertifikat	1 sertifikat	190.000.000	1 sertifikat	200.000.000	1 sertifikat	200.000.000	1 sertifikat	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
				% OKP yang mempunyai legalitas kelembagaan	70 %	70 %	000	70 %	000	70 %	000	70 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Jumlah OKP yang telah mendapatkan pembinaan	18 OKP	18 OKP	296.000.000	20 OKP	300.000.000	25 OKP	325.000.000	25 OKP	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Jumlah Pemuda Kader Berprestasi	5 orang	10 orang	000	15 orang	000	20 orang	000	20 orang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

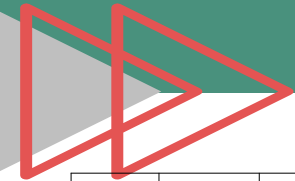


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026



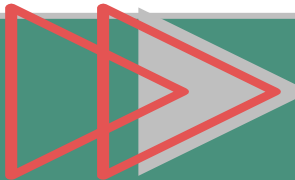
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN										
				persentase pramuka yang aktif	70 persen	80 persen	350.000.000	82 persen	360.000.000	85 persen	380.000.000	85 persen	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										
				Jumlah Pramuka Aktif	40000 Orang	40050 Orang	350.000.000	40060 Orang	360.000.000	40070 Orang	380.000.000	40070 Orang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	4.020.857.672	100 persen	4.142.602.614	100 persen	4.428.984.646	100 persen	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.500.940	100 %	5.500.940	100 %	5.500.940	100 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	95 %	95 %	2.260.923.367	95 %	2.382.631.325	95 %	2.504.728.928	95 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	265.550.000	100 %	120.550.000	100 %	120.550.000	100 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	413.903.263	100 %	455.293.589	100 %	500.822.948	100 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	338.000.000	100 %	371.800.000	100 %	408.980.000	100 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	468.337.000	100 %	515.170.700	100 %	566.687.770	100 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	268.643.102	100 %	295.000.000	100 %	325.058.000	100 %	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Meningkatkan Kualitas pendidikan masyarakat													
	Meningkatnya Aksesibilitas Membaca Masyarakat												
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										
				Jumlah Kunjungan Masyarakat ke ruang baca publik	293490 kunjungan	328349 k unjungan	1.265.249.475	344766 k unjungan	1.328.511.949	362004 k unjungan	1.394.937.546	362004 kunjungan	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										

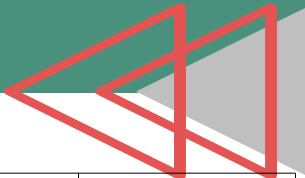




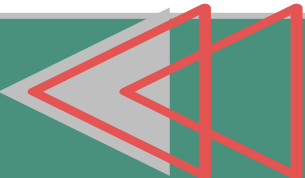
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

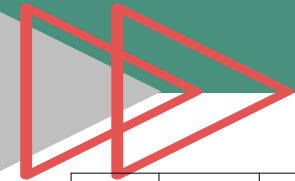
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase Pemenuhan Layanan Perpustakaan	80 %	100 %	1.013.249.475	100 %	1.063.911.949	100 %	1.117.107.546	100 %	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan
		2.23.02.2.02	Pembudayaan	Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
				Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	252.000.000	2 Kegiatan	264.600.000	2 Kegiatan	277.830.000	2 Kegiatan	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
	Persentase Perangkat Daerah Yang menerapkan arsip secara Baku												
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP										
				persentase arsip yang telah di alihmediakan	13 %	38 %	39.510.000	75 %	41.485.500	100 %	43.559.775	100 %	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan
				persentase PD yang menginplementasika n layanan kearsipan berbasis teknologi informasi	13 %	35 %	171.845.653	50 %	180.437.935	65 %	189.459.832	65 %	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan
				persentase perengkat daerah yang menerapkan arsip secara baku	50 %	70 %	26.716.200	80 %	28.052.010	90 %	29.454.610	90 %	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota										
				% PD yang menyampaikan Arsip Inaktif	20 %	40 %	39.510.000	80 %	41.485.500	100 %	43.559.775	100 %	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan
		2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota										
				Persentase Arsip Statis Yang dikelola	30 %	60 %	26.716.200	90 %	28.052.010	100 %	29.454.611	100 %	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota										
				Persentase PD yang mengimplementasika n layanan kearsipan berbasis teknologi informasi	13 %	38 %	105.619.453	75 %	110.900.425	100 %	116.445.447	100 %	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
	Meningkatnya Kinerja Organisasi												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	4.014.301.070	100 %	3.910.690.986	100 %	4.236.225.330	100 %	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %	10.901.625	100 %	11.446.706	100 %	12.019.042	100 %	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Keuangan	100 %	100 %	2.737.246.221	100 %	2.874.108.532	100 %	3.017.813.959	100 %	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	20.900.000	100 %	34.200.000	100 %	85.455.000	100 %	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										





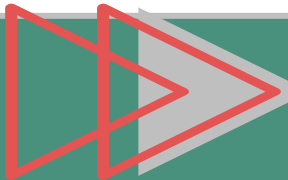
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	552.546.639	100 %	479.683.558	100 %	458.238.345	100 %	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	116.890.000	100 %	106.722.000	100 %	112.058.100	100 %	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	253.394.085	100 %	195.323.190	100 %	179.709.715	100 %	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase pemenuhan Layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	322.422.500	100 %	209.207.000	100 %	370.931.170	100 %	Dinas Perpus takaan dan Kearsipan
Menguatkan ketersediaan pangan daerah													
	Tercukupinya Kebutuhan Pangan Asal Ikan												
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA										
				Jumlah Produksi Ikan	4774992 kg	4831059 kg	1.810.000.000	5314165 kg	1.965.000.000	5845581 kg	2.335.000.000	6430139 kg	Dinas Perikanan
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil										
				Persentase kelompok budidaya perikanan yang mendapat pelatihan	52,63 %	43,9 %	6.847.300.012	49,6 %	7.695.190.014	53,8 %	8.401.569.016	53,8 %	Dinas Perikanan
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan										
				Jumlah Kelompok tani yang aktif	114 kelompok	114 kelo mpok	1.200.000.000	123 kelo mpok	1.500.000.000	132 kelo mpok	1.750.000.000	132 kelompok	Dinas Perikanan
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN										
				Angka Konsumsi Ikan	49,1 kg/kap/tahun	54,8 kg/k ap/tahun	870.000.000	56,4 kg/k ap/tahun	957.000.000	58,60 kg/ kap/tahu n	1.157.970.000	61,30 kg/kap/tahun	Dinas Perikanan
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil										
				Persentase kelompok pengolahan ikan memiliki sarana lengkap	50 %	50 %	120.000.000	50 %	132.000.000	50 %	145.200.000	60 %	Dinas Perikanan
				Persentase kelompok pengolahan memiliki sertifikasi pengolahan ikan	55,56 %	55,56 %	120.000.000	66,67 %	132.000.000	83,33 %	145.200.000	83,33 %	Dinas Perikanan
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota										
				Jumlah stok bahan Baku	2.661.373 kg	2.794.44 1 kg	250.000.000	3.073.88 6 kg	275.000.000	3.381.27 4 kg	302.500.000	3.381.274 kg	Dinas Perikanan
				Persentase kelompok usaha pengolahan ikan yang menggunakan teknologi pengolahan yang dibina	50 %	50 %	200.000.000	50 %	255.000.000	50 %	275.000.000	50 %	Dinas Perikanan
				Persentase produk perikanan yang memenuhi standarisasi	75 %	75 %	250.000.000	75 %	255.000.000	75 %	275.000.000	75 %	Dinas Perikanan

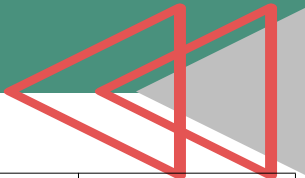




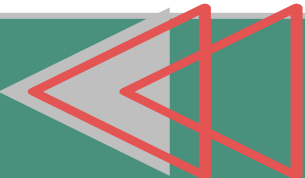
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

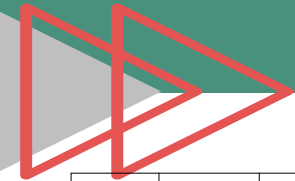
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Kinerja OPD Dinas Perikanan													
	Tercapainya kinerja OPD Dinas Perikanan												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				meningkatnya pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	4.277.300.012	100 persen	4.813.190.014	100 persen	4.983.869.016	100 persen	Dinas Perikanan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	35.000.000	100 %	40.000.000	100 %	45.000.000	100 %	Dinas Perikanan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Tingkat Pemenuhan Jasa Admistras Keuangan	100 %	100 %	2.240.000.000	100 %	2.962.400.000	100 %	3.294.577.000	100 %	Dinas Perikanan
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Tingkat Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	38.400.000	100 %	38.400.000	100 %	38.400.000	100 %	Dinas Perikanan
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Umum Perkantoran	100 %	100 %	600.500.000	100 %	660.550.000	100 %	726.605.000	100 %	Dinas Perikanan
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase pemenuhan barang milik Daerah yang disediakan	100 %	100 %	548.000.000	100 %	602.800.000	100 %	663.080.000	100 %	Dinas Perikanan
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	417.000.000	100 %	458.700.000	100 %	504.570.000	100 %	Dinas Perikanan
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase barang Miik Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	296.400.000	100 %	326.040.000	100 %	394.508.400	100 %	Dinas Perikanan
Meningkatnya Pengembangan Pariwisata													
	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata												
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA										
				Meningkatnya Persentase Daya Tarik Wisata Daerah	20 Persen	30 Persen	1.035.000.000	40 Persen	1.665.000.000	50 Persen	2.810.000.000	50 Persen	Dinas Pariwisata
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota										
				Persentase Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan menjadi Destinasi Wisata	20 Persen	30 Persen	150.000.000	40 Persen	250.000.000	50 Persen	450.000.000	50 Persen	Dinas Pariwisata
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
				Peningkatan Fasilitas Destinasi Pariwisata	2 Destinasi	3 Destinasi	585.000.000	3 Destinasi	1.035.000.000	4 Destinasi	1.550.000.000	4 Destinasi	Dinas Pariwisata
		3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota										
				Meningktanya Usaha Pariwisata yang	46,73 Persen	48	300.000.000	50	330.000.000	53	350.000.000	53 Persen	Dinas Pariwisata





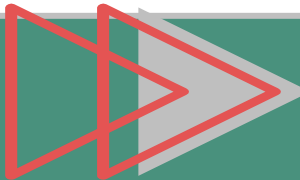
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Terdaftar dan Terdata		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA										
				Terlaksananya Promosi Pariwisata Daerah, Event Kepariwisataan, dan Produk Wisata Unggulan Daerah Lainnya	75 Persen	77 Persen	1.867.705.662	80 Persen	2.400.644.928	90 Persen	2.569.962.573	90 Persen	Dinas Pariwisata
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										
				Meningkatnya Penyediaan Jenis Layanan Informasi dan Database Kepariwisataan Daerah	80 Persen	100 Persen	40.066.400	100 Persen	230.000.000	100 Persen	250.932.000	100 Persen	Dinas Pariwisata
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL										
				Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Dibina dan Ditingkatkan Potensinya	15 Persen	30 Persen	250.000.000	45 Persen	325.000.000	60 Persen	400.000.000	60 Persen	Dinas Pariwisata
		3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota										
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Ekonomi Kreatif	0 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	50.000.000	15 Pelaku Usaha	75.000.000	20 Pelaku Usaha	100.000.000	45 Pelaku Usaha	Dinas Pariwisata
		3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif										
				Meningkatnya Sinergi antara Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dengan Pemerintah	0 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	250.000.000	2 Kegiatan	275.000.000	5 Kegiatan	Dinas Pariwisata
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										
				Persentase SDM Kepariwisataan dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Dibina dan Ditingkatkan Potensinya	45 Persen	60 Persen	422.572.200	75 Persen	540.000.000	90 Persen	605.000.000	90 Persen	Dinas Pariwisata
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar										
				Tersedianya SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang Profesional dan Berkompetensi	40 Orang	40 Orang	352.572.200	40 Orang	460.000.000	40 Orang	515.000.000	160 Orang	Dinas Pariwisata
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif										
				Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Berkompeten dan Berdaya Saing.	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	70.000.000	30 Pelaku Usaha	80.000.000	35 Pelaku Usaha	90.000.000	115 Pelaku Usaha	Dinas Pariwisata
Meningkatnya kapasitas birokrasi													
		Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Penunjang Bidang Pariwisata											
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	2.314.836.781	100 Persen	2.372.707.101	100 Persen	2.467.615.385	100 Persen	Dinas Pariwisata
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	36 Dokumen	Dinas Pariwisata

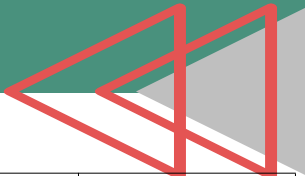




Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

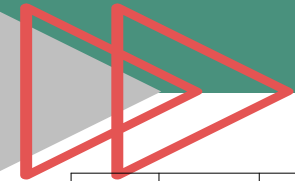
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
		X.XX.01.2.02	Administrasi	Keuangan Perangkat Daerah										
				Tingkat Pemenuhan Administrasi Keuangan ASN Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.398.767.001	12 Bulan	2.467.121.607	12 Bulan	2.685.430.190	12 Bulan	Dinas Pariwisata	
		X.XX.01.2.05	Administrasi	Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Tersedianya Aparatur Perangkat Daerah yang Profesional dan Memiliki Kompetensi	24 Orang	30 Orang	28.200.000	33 Orang	35.000.000	33 Orang	40.000.000	33 Orang	Dinas Pariwisata	
		X.XX.01.2.06	Administrasi	Umum Perangkat Daerah										
				Tersedianya Barang dan Jasa Kebutuhan Rutin dan Bulanan Guna Menunjang Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	588.500.000	12 Bulan	650.000.000	12 Bulan	675.000.000	12 Bulan	Dinas Pariwisata	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
				Tersedianya Barang Kebutuhan Milik Daerah Guna Menunjang Operasional Perangkat Daerah	3 Kategori	3 Kategori	350.000.000	3 Kategori	500.000.000	3 Kategori	650.000.000	3 Kategori	Dinas Pariwisata	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Tersedianya Jasa Penunjang Operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah	4 Kelompok	4 Kelom pok	320.960.000	4 Kelom pok	325.850.000	4 Kelom pok	330.500.000	4 Kelompok	Dinas Pariwisata	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Guna Menunjang Operasional Perangkat Daerah	3 Kelompok	3 Kelom pok	350.000.000	3 Kelom pok	375.000.000	3 Kelom pok	400.000.000	3 Kelompok	Dinas Pariwisata	
Menguatkan Ketahanan Pangan Daerah														
	Meningkatnya Produktifitas Pertanian													
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											
				jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi	60 kelompok	62 kelom pok	1.785.000.000	66 kelom pok	1.882.500.000	70 kelom pok	1.984.375.000	70 kelompok	Dinas Pertanian	
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota											
				Jumlah KEL.tani yang menerapkan tehnologi	62 Kelompok	62 Kelo mpok	700.000.000	66 Kelo mpok	700.000.000	70 Kelo mpok	700.000.000	70 Kelompok	Dinas Pertanian	
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota											
				Ratio Kecukupan Bibit Benin Unggul Pertanian Perkebunan	70 %	70 %	700.000.000	75 %	735.000.000	80 %	771.750.000	80 %	Dinas Pertanian	
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain											
				Jumlah Benih Bibit Pertanian Yang Tersertifikasi	3 Ton	3 Ton	250.000.000	5 Ton	265.000.000	7 Ton	275.000.000	7 Ton	Dinas Pertanian	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											
				persentase lahan pertanian yang memiliki sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas	70 %	75 %	2.400.599.570	80 %	2.568.129.548	90 %	2.711.536.025	90 %	Dinas Pertanian	
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian											
				Persentase Lahan Pertanian Yang Memiliki	80 Persen	80	2.400.599.570	85	2.568.129.548	90	2.711.536.025	95 Persen	Dinas Pertanian	





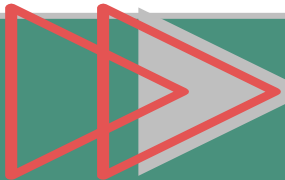
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target Persen	Rp	Target Persen	Rp	Target Persen	Rp		
		3.27.04		Sarana dan Prasarana Pertanian berkualitas									
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									
				persentase penyakit yang tertangani	85 %	90 %	820.000.000	93 %	935.000.000	95 %	1.050.750.000	95 %	Dinas Pertanian
		3.27.04.2.02	Pengawasan	Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota									
				Pelayanan Pemeriksaan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang keluar atau masuk Wilayah Kota/Kabupaten	50 Kali/Tahun	50 Kali/Tahun	250.000.000	55 Kali/Tahun	300.000.000	60 Kali/Tahun	350.000.000	60 Kali/Tahun	Dinas Pertanian
		3.27.04.2.03	Pengelolaan	Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota									
				Jumlah Penyediaan Obat Ternak dan Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular (dosis)	2500 Dosis/Tahun	2500 Dosis/Tahun	300.000.000	2600 Dosis/Tahun	315.000.000	2700 Dosis/Tahun	330.750.000	2700 Dosis/Tahun	Dinas Pertanian
		3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan	Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan									
				Persentase pengawasan kesehatan dan keamanan hewan dan daging hewan Kurban	85 %	85 %	20.000.000	90 %	25.000.000	95 %	30.000.000	95 %	Dinas Pertanian
		3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									
				persentase pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	75 %	80 %	1.020.000.000	85 %	1.145.000.000	90 %	1.271.250.000	90 %	Dinas Pertanian
		3.27.05.2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota									
				Persentase Pengendalian Hama Dan Penyakit Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	80 %	80 %	200.000.000	85 %	210.000.000	90 %	220.500.000	90 %	Dinas Pertanian
		3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									
				rasio cakupan binaan kelompok tani	70 kelompok	75 kelompok	450.000.000	77 kelompok	472.500.000	80 kelompok	496.125.000	80 kelompok	Dinas Pertanian
		3.27.07.2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian									
				Rasio cakupan binaan kelompok tani	75 Kelompok	75 Kelompok	450.000.000	77 Kelompok	475.000.000	80 Kelompok	500.000.000	80 Kelompok	Dinas Pertanian
Menguatkan Kapasitas Birokrasi													
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran													
		X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	11.288.334.287,00	100 %	11.541.321.892,00	100 %	12.000.493.551,00	100 %	Dinas Pertanian
		X.XX.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
				Jumlah Laporan Kinerja yang Baik	4 Jenis	4 Jenis	32.999.656	4 Jenis	34.649.639	4 Jenis	36.382.121	4 Jenis	Dinas Pertanian
		X.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
				Meningkatnya Administrasi keuangan skpd	14 Bulan	14 Bulan	8.212.719.040	14 Bulan	8.623.354.991	14 Bulan	9.054.522.741	14 Bulan	Dinas Pertanian
		X.XX.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									



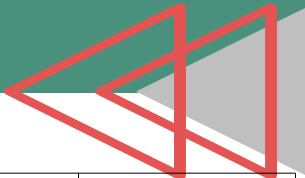


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	360.000.000	100 persen	378.000.000	100 persen	396.900.000	100 persen	Dinas Pertanian
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	819.670.011	100 Persen	860.653.511	100 Persen	903.686.187	100 Persen	Dinas Pertanian
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Tersedia	100 Persen	100 Persen	600.000.000	100 Persen	630.000.000	100 Persen	670.000.000	100 Persen	Dinas Pertanian
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jumlah Jasa Pendukung Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	257.449.206	100 Persen	270.321.667	100 Persen	283.837.750	100 Persen	Dinas Pertanian
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	80 Persen	80 Persen	662.286.000	85 Persen	695.400.300	90 Persen	695.400.300	90 Persen	Dinas Pertanian
Meningkatkan nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa													
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan												
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN										
				Persentase pasar yang memiliki sarana dan prasarana yang baik	100 %	100 %	516.250.000	100 %	533.930.750	100 %	550.555.469	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										
				Jumlah Pasar yang Representatif	100 %	100 %	358.750.000	100 %	367.718.750	100 %	376.911.719	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya										
				Pesentase Pedagang dan Pelaku Usaha yang di Bina	90 %	100 %	6.150.000	100 %	6.303.750	100 %	6.461.344	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR										
				Persentase komunitas produk unggulan daerah yang dikembangkan	100 %	100 %	205.000.000	100 %	210.125.000	100 %	215.378.125	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
				Persentase komoditas produk Unggulan daerah yang dikembangkan	100 %	100 %	205.000.000	100 %	210.125.000	100 %	215.378.125	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN										
				Persentase UTPP yang tertib ukur	100 %	100 %	169.125.000	100 %	173.353.125	100 %	177.686.953	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan										
				Persentase UTPP (Unit Takar Timbang dan Perlengkapan Lainnya) yang tertib ukur	100 %	100 %	169.125.000	100 %	173.353.125	100 %	177.686.953	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI										
				Persentase Tingkat Penggunaan Produk	100 %	100 %	1.025.000.000	100 %	1.050.625.000	100 %	1.076.890.625	100 %	Dinas Perdagangan

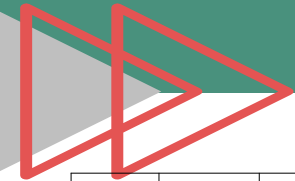


Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026



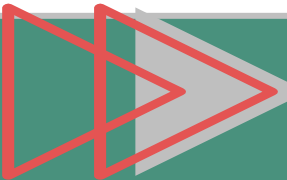
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				dalam Negeri									dan Perindustrian
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan	Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri									
				Persentase Tingkat Penggunaan Produk dalam Negeri	100 %	100 %	1.025.000.000	100 %	1.050.625.000	100 %	1.076.890.625	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatkan daya beli masyarakat													
			Tingkat inflasi harga pokok dan penting										
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN										
				Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	100 %	100 %	51.250.000	100 %	52.531.250	100 %	53.844.531	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										
				Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	100 %	100 %	51.250.000	100 %	52.531.250	100 %	53.844.531	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING										
				Tingkat kecukupan barang penting	100 %	100 %	649.000.000	100 %	665.225.000	100 %	681.855.625	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota										
				Tigtat Kecukupan Barang Pokok dan Penting	100 %	100 %	649.000.000	100 %	665.225.000	100 %	681.855.625	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatkan pertumbuhan Industri													
			Persentase Pertumbuhan sentra industri										
			Persentase Kualitas Produk Indutri										
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI										
				Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB	4.80 %	4.90 %	717.500.000	5.00 %	735.437.500	5.10 %	753.823.438	5.60 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota										
				Persentase Dokumen Perencanaan Kawasan untuk industri dan Pergudangan	100 %	100 %	717.500.000	100 %	735.437.500	100 %	753.823.438	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Menurunkan pengangguran													
			Meningkatnya Indutri kecil dan menengah Naik Kelas										
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI										
				Persentase Rekomendasi izin usaha industri yang dikeluarkan	100 %	100 %	100.000.000	100 %	102.500.000	100 %	105.062.500	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota										
				Persentase Rekomendasi izin usaha industri yang dikeluarkan	100 %	100 %	100.000.000	100 %	102.500.000	100 %	105.062.500	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL										
				Persentase pengumpulan data industri kecil, menengah dan aneka	100 %	100 %	450.000.000	100 %	461.250.000	100 %	472.781.250	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota										
				Persentase Pengumpulan data industri Kecil,	100 %	100 %	450.000.000	100 %	461.250.000	100 %	472.781.250	100 %	Dinas Perdagangan

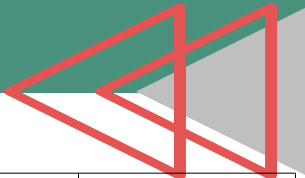




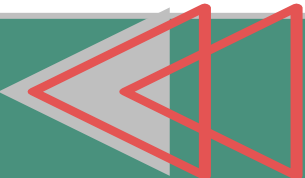
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

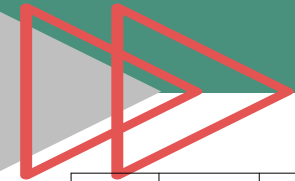
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Menengah dan Aneka								dan Perindustrian	
Meningkatnya kapasitas birokrasi													
Meningkatnya Kinerja Organisasi													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	5.328.455.965	100 %	5.461.667.364	100 %	5.598.209.048	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Terlaksananya Koordinasi Penyusuna Laporan Capaian Kinerja	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.125.000	100 %	5.253.125	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Meningkat Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 orang/bulan	12 orang /bulan	4.045.390.629	12 orang /bulan	4.146.525.395	12 orang /bulan	4.250.188.530	12 orang/bulan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	55 Paket	55 Paket	35.000.000	55 Paket	35.875.000	55 Paket	36.771.875	55 Paket	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Terpenuhinya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	173.500.000	100 %	177.837.500	100 %	182.283.438	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 %	100 %	16.000.000	100 %	16.400.000	100 %	16.810.000	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	818.565.336	100 %	839.029.469	100 %	860.005.206	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Pesentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	235.000.000	100 %	240.875.000	100 %	246.896.875	100 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik													
Meningkatnya Sinergitas Pemerintah daerah dan Stakeholder dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat													
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										
				Persentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah	100 persen	100 persen	1.200.000.000	100 persen	1.300.000.000	100 persen	1.400.000.000	100 persen	Sekretariat Daerah
				Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	100 persen	100 persen	2.000.000.000	100 persen	2.200.000.000	100 persen	2.500.000.000	100 persen	Sekretariat Daerah
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Pemerintahan	100 persen	100 persen	800.000.000	100 persen	850.000.000	100 persen	900.000.000	100 persen	Sekretariat Daerah
				Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	100 persen	100 persen	2.000.000.000	100 persen	2.200.000.000	100 persen	2.500.000.000	100 persen	Sekretariat Daerah
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Pemerintahan	100 persen	100 persen	800.000.000	100 persen	850.000.000	100 persen	900.000.000	100 persen	Sekretariat Daerah





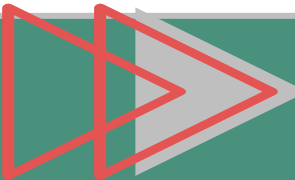
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase realisasi bantuan dibidang kesejahteraan yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	3.500.000.000	100 persen	4.000.000.000	100 persen	4.500.000.000	100 persen	Sekretariat Daerah
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum										
				Persentase Pemenuhan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 Persen	100 Persen	1.200.000.000	100 Persen	1.300.000.000	100 Persen	1.400.000.000	100 Persen	Sekretariat Daerah
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik													
	Meningkatnya Profesiaanalitas Penyelenggara Pelayanan Publik												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	31.328.418.457,00	100 %	32.894.839.800,00	100 %	34.461.260.743,00	100 %	Sekretariat Daerah
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi										
				Persentase Penataan Organisasi	100 Persen	100 Persen	000	100 Persen	000	100 Persen	000	100 Persen	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan Publik													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
						100 %	31.328.418.457,00	100 %	32.894.839.800,00	100 %	34.461.260.743,00	100 %	Sekretariat Daerah
				Persentase Penataan Organisasi	100 Persen	100 Persen	000	100 Persen	000	100 Persen	000		
Meningkatnya Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Publik													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	31.328.418.457,00	100 %	32.894.839.800,00	100 %	34.461.260.743,00	100 %	Sekretariat Daerah
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi										
				Persentase Penataan Organisasi	100 Persen	100 Persen	000	100 Persen	000	100 Persen	000	100 Persen	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	31.328.418.457,00	100 %	32.894.839.800,00	100 %	34.461.260.743,00	100 %	Sekretariat Daerah
		X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan										
				Persentase Pelaksanaan Keprotokolan Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	100 Persen	100 Persen	3.500.000.000	100 Persen	3.675.000.000	100 Persen	3.858.750.000	100 Persen	Sekretariat Daerah
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Akuntabel													
	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah												

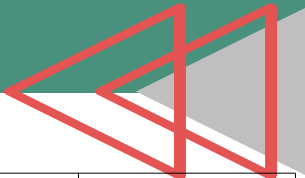




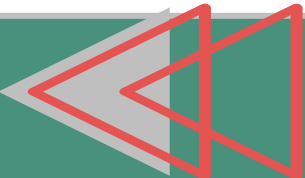
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

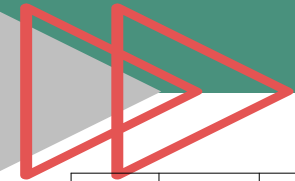
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah Tepat Struktur dan Tepat Fungsi	100 Persen	100 Persen	150.000.000	100 Persen	160.000.000	100 Persen	175.000.000	100 Persen	Sekretariat Daerah
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi										
				Persentase Penataan Organisasi	100 Persen	100 Persen	150.000.000	100 Persen	160.000.000	100 Persen	175.000.000	100 Persen	Sekretariat Daerah
Meningkatkan Kapasitas Birokrasi													
	Meningkatnya Kinerja Organisasi												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	31.328.418.457,00	100 %	32.894.839.800,00	100 %	34.461.260.743,00	100 %	Sekretariat Daerah
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 Persen	100 Persen	60.000.000	100 Persen	63.000.000	100 Persen	66.150.000	100 Persen	Sekretariat Daerah
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	100 Persen	100 Persen	7.974.488.689	100 Persen	8.353.213.123	100 Persen	8.587.123.780	100 Persen	Sekretariat Daerah
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
				Persentase Barang Milik Daerah Yang Terdata dengan Baik	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	52.500.000	100 Persen	55.125.000	100 Persen	Sekretariat Daerah
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	250.000.000	100 Persen	262.500.000	100 Persen	275.625.000	100 Persen	Sekretariat Daerah
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	100 Persen	100 Persen	5.600.000.000	100 Persen	5.900.000.000	100 Persen	6.378.750.000	100 Persen	Sekretariat Daerah
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase Capaian Barang Milik Daerah dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	680.000.000	100 Persen	714.000.000	100 Persen	749.700.000	100 Persen	Sekretariat Daerah
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	3.700.000.000	100 Persen	3.885.000.000	100 Persen	4.079.250.000	100 Persen	Sekretariat Daerah
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100 Persen	100 Persen	2.500.000.000	100 Persen	2.625.000.000	100 Persen	2.756.250.000	100 Persen	Sekretariat Daerah
		X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
				Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	14 Bulan	828.418.457	14 Bulan	894.839.800	14 Bulan	961.260.743	14 Bulan	Sekretariat Daerah





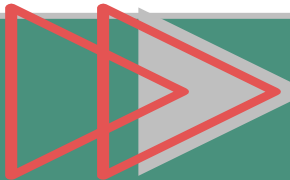
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
				Persentase Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, KDH/WKDH yang Terpenuhi	100 Persen	100 Persen	8.685.511.311	100 Persen	9.094.786.877	100 Persen	9.458.276.220	100 Persen	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	31.328.418.457,00	100 %	32.894.839.800,00	100 %	34.461.260.743,00	100 %	Sekretariat Daerah
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi										
				Persentase Penataan Organisasi	100 Persen	100 Persen	000	100 Persen	000	100 Persen	000	100 Persen	Sekretariat Daerah
Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan													
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
				Persentase Fasilitasi Persidangan yang Terlayani	100 Persen	100 Persen	000	100 Persen	000	100 Persen	000	100 Persen	Sekretariat DPRD
				Persentase fasilitasi persidangan yang terlayani	100 persen	100 persen	000	100 persen	000	100 persen	000	100 persen	Sekretariat DPRD
				Persentase legislasi daerah	70 persen	75 persen	13.444.527.855,00	80 persen	14.116.801.498,00	85 persen	14.822.641.573,00	85 persen	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										
				Jumlah Perda	3 Dokumen	3 Dokum en	3.384.948.420	3 Dokum en	3.554.195.841	3 Dokum en	3.731.905.633	3 Dokumen	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran										
				Jumlah Rapat - rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran	24 Rapat	24 Rapat	170.270.100	24 Rapat	178.173.605	24 Rapat	187.722.785	24 Rapat	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD										
				Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Dokumen	4 Dokum en	1.028.919.150	4 Dokum en	1.080.365.108	4 Dokum en	1.134.383.363	4 Dokumen	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										
				Terjaringnya aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD	3 Dokumen	3 Dokum en	1.851.960.868	3 Dokum en	1.944.558.911	3 Dokum en	2.041.786.857	3 Dokumen	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD										
				Jumlah keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam tugas dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	7.680.702.960	1 Tahun	8.064.738.108	1 Tahun	8.467.975.013	1 Tahun	Sekretariat DPRD
Meningkatkan kapasitas Birokrasi													
Meningkatnya Kinerja OPD													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										

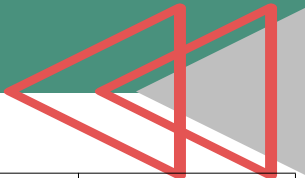




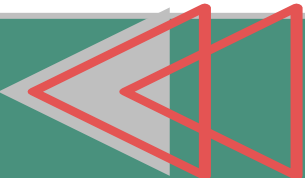
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

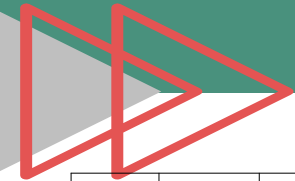
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	35.658.469.211,00	100 Persen	37.441.392.671,00	100 Persen	37.967.112.988,00	100 Persen	Sekretariat DPRD
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Persentase Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	117.500.040	100 Persen	123.375.042	100 Persen	129.543.794	100 Persen	Sekretariat DPRD
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	3.041.135.381	100 Persen	3.193.192.151	100 Persen	3.352.851.758	100 Persen	Sekretariat DPRD
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	745.323.075	100 Persen	782.589.229	100 Persen	821.718.690	100 Persen	Sekretariat DPRD
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	3.113.744.153	100 Persen	3.269.431.360	100 Persen	3.432.902.929	100 Persen	Sekretariat DPRD
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	1.081.500.000	100 Persen	1.135.575.000	100 Persen	1.192.353.750	100 Persen	Sekretariat DPRD
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.032.017.709	100 Persen	2.133.618.595	100 Persen	2.240.299.524	100 Persen	Sekretariat DPRD
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	995.005.000	100 Persen	1.044.755.250	100 Persen	1.096.993.013	100 Persen	Sekretariat DPRD
		X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										
				Persentase Pemenuhan Layana Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	100 Persen	22.402.641.352,00	100 Persen	23.522.773.420,00	100 Persen	24.698.912.091,00	100 Persen	Sekretariat DPRD
		X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD										
				Persentase Pemenuhan Layanan Admnistrasi DPRD	100 Persen	100 Persen	2.129.602.500	100 Persen	2.236.082.625	100 Persen	234.886.756	100 Persen	Sekretariat DPRD
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel													
Meningkatnya keselarasan perencanaan kinerja daerah													
Terwujudnya keselarasan pengukuran kinerja dengan perencanaan kinerja													
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										
				Tingkat perencanaan, pengendalian dan	100 %	100 %	680.000.000	100 %	714.000.000	100 %	749.700.000	100 %	Badan Perencanaan





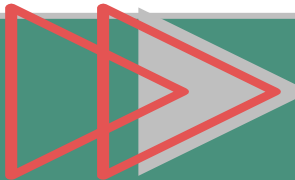
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				evaluasi pembangunan daerah yang baik, efektif dan efisien								Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengem bangan	
		5.01.02.2.01	Penyusunan	Perencanaan dan Pendanaan									
				Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang Sesuai dengan Peraturan Perundang -Undangan	100 %	100 %	455.000.000	100 %	477.750.000	100 %	501.637.500	100 %	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengem bangan
		5.01.02.2.02	Analisis Data	dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									
				Persentase Pemenuhan Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	110.000.000	100 %	115.500.000	100 %	121.275.000	100 %	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengem bangan
		5.01.02.2.03	Pengendalian,	Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									
				Persentase Ketersediaan Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang Akurat	100 %	100 %	110.000.000	100 %	115.500.000	100 %	121.275.000	100 %	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengem bangan
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
				Tingkat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	100 %	100 %	900.000.000	100 %	945.000.000	100 %	992.250.000	100 %	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengem bangan
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										
				Persentase dokumen bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku	100 %	100 %	450.000.000	100 %	472.500.000	100 %	496.125.000	100 %	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengem bangan
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										
				Persentase dokumen bidang Perekonomian dan SDA yang sesuai dengan Peraturan Pe rundang-undangan yang berlaku	100 %	100 %	300.000.000	100 %	315.000.000	100 %	330.750.000	100 %	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengem bangan
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										
				Persentase dokumen bidang infrastruktur dan kewilayahan yang sesuai dengan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku	100 %	100 %	150.000.000	100 %	157.500.000	100 %	165.375.000	100 %	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengem bangan
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel													
Optimalnya peran kelitbangan dalam pembangunan daerah													

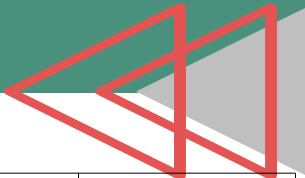




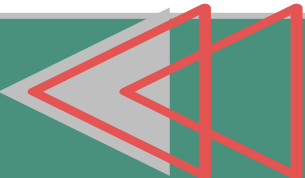
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										
				Persentase Hasil Kelitbangan yang Dilaksanakan	100 %	100 %	615.000.000	100 %	645.750.000	100 %	678.037.500	100 %	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengem bangan
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										
				Persentase pemenuhan dokumen kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang berkualitas	100 %	100 %	145.000.000	100 %	152.250.000	100 %	159.862.500	100 %	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengem bangan
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										
				Persentase pemenuhan dokumen kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang berkualitas	100 %	100 %	110.000.000	100 %	115.500.000	100 %	121.275.000	100 %	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengem bangan
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										
				Persentase pemenuhan dokumen kelitbangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang berkualitas	100 %	100 %	165.000.000	100 %	173.250.000	100 %	181.912.500	100 %	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengem bangan
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi										
				Persentase pemenuhan dokumen kelitbangan bidang pengembangan inovasi dan teknologi yang berkualitas	100 %	100 %	195.000.000	100 %	204.750.000	100 %	214.987.500	100 %	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengem bangan
Meningkatnya kapasitas birokrasi													
	Meningkatnya Kinerja Organisasi												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.462.311.910	100 %	5.725.677.506	100 %	6.002.211.381	100 %	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengem bangan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	100 %	100 %	88.000.000	100 %	92.400.000	100 %	97.020.000	100 %	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengem bangan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	3.451.800.000	100 %	3.624.390.000	100 %	3.805.609.500	100 %	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah,





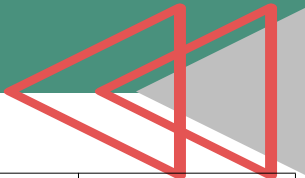
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													Penelitian dan Pengembangan
		X.XX.01.2.05	Administrasi	Kepegawaian Perangkat Daerah									
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	126.400.000	100 %	132.720.000	100 %	139.356.000	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		X.XX.01.2.06	Administrasi	Umum Perangkat Daerah									
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	662.500.000	100 %	653.625.000	100 %	686.306.250	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		X.XX.01.2.07	Pengadaan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Persentase Kecukupan Barang Penunjang Urusan Kantor	100 %	100 %	245.000.000	100 %	257.250.000	100 %	270.112.500	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		X.XX.01.2.08	Penyediaan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	100 %	100 %	537.232.260	100 %	554.343.873	100 %	572.311.067	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	391.379.650	100 %	410.948.633	100 %	431.496.064	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel													
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah												
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										
				Persentase laporan bendahara penerimaan tepat waktu	90 %	90 %	000	90 %	000	90 %	000	90 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase laporan bendahara pengeluaran tepat waktu	100 %	100 %	000	100 %	000	100 %	000	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase penerapan sistem informasi keuangan daerah terintegrasi	100 %	100 %	000	100 %	000	100 %	000	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	100 %	100 %	000	100 %	000	100 %	000	100 %	Badan Pengelolaan



Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

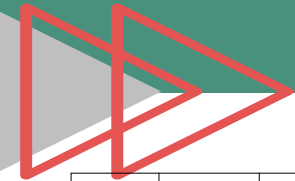
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													Kuangan dan Aset Daerah
				Persentase Perangkat Daerah dengan laporan keuangan sesuai SAP	100 %	100 %	000	100 %	000	100 %	000	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase Perangkat daerah menyampaikan dokumen anggaran tepat waktu	100 %	100 %	13.425.087.306,00	100 %	14.096.341.671,00	100 %	14.801.158.754,00	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										
				Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	6 Dokumen	6 Doku men	1.052.964.045	6 Doku men	1.105.612.247	6 Doku men	1.160.892.859	6 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										
				Persentase pengelolaan perbendaharaan Daerah sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	710.961.504	100 Persen	746.509.579	100 Persen	783.835.058	100 Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										
				Persentase PD dengan Laporan Keuangan sesuai SAP	100 Persen	100 Persen	1.755.036.271	100 Persen	1.842.788.085	100 Persen	1.934.927.489	100 Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
				Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Daerah	100 Persen	100 Persen	10.298.270.062,00	100 Persen	10.813.183.565,00	100 Persen	11.353.842.743,00	100 Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah										
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terintegrasi	100 Persen	100 Persen	226.461.585	100 Persen	237.784.664	100 Persen	249.673.897	100 Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										
				Tingkat Penambahan Nilai Aset Daerah	9 %	10 %	1.459.822.580	10,5 %	1.532.813.709	11 %	1.609.454.394	11 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah										
				Persentase Pengelolaan Barang milik Daerah sesuai standar	100 Persen	100 Persen	1.532.813.709	100 Persen	1.609.454.394	100 Persen	1.689.927.114	100 Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
	Meningkatnya Kinerja Organisasi												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja	100 %	100 %	65.400.651.947,	100 %	68.670.684.544,0	100 %	72.104.218.771,0	100 %	Badan Pengelolaan

Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026



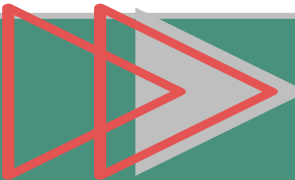
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				perangkat daerah		0 0		0		0		Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	72.777.915	100 Persen	76.416.810	100 Persen	80.237.651	100 Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
			Persentase layanan administrasi keuangan	100 Persen	100 Persen	65.958.437.018,0 0	100 Persen	69.256.358.869,0 0	100 Persen	72.719.176.812,0 0	100 Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
			Persentase layanan administrasi kepegawaian	100 Persen	100 Persen	77.910.000	100 Persen	81.805.500	100 Persen	85.895.775	100 Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
			Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	671.432.937	100 Persen	705.004.583	100 Persen	740.254.813	100 Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
			Persentase kecukupan barang penunjang urusan kantor	100 Persen	100 Persen	629.265.000	100 Persen	660.728.250	100 Persen	693.764.662	100 Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
			Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan kantor	100 Persen	100 Persen	612.031.184	100 Persen	642.632.743	100 Persen	674.764.380	100 Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
			Persentase sarana dan prasarana penunjang kantor dlm kondisi baik	100 Persen	100 Persen	648.830.490	100 Persen	681.272.014	100 Persen	715.335.615	100 Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel													
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah													
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										
			Tingkat Efisiensi PAD	0,01 %	0,01 %	813.032.598	0,01 %	855.823.787	0,01 %	900.867.145	0,01 %	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										
			% UPTB yang mencapai target	80 Persen	80 Persen	162.606.520	80 Persen	171.164.758	80 Persen	180.173.429	80 Persen	Badan Pendapatan Daerah	
			Persentase Rata-rata peningkatan WP baru perwilayah	75 Persen	75 Persen	162.606.520	75 Persen	171.164.758	75 Persen	180.173.429	75 Persen	Badan Pendapatan Daerah	

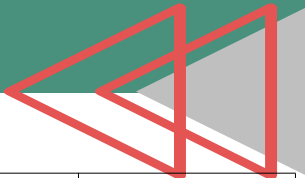




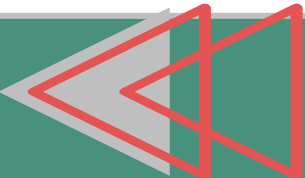
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

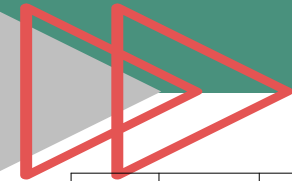
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
				Persentase Realisasi Pendapatan Baru	75 Persen	75 Persen	162.606.520	75 Persen	171.164.758	75 Persen	180.173.429	75 Persen	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase WP membayar pajak tepat waktu	75 Persen	75 Persen	162.606.520	75 Persen	171.164.758	75 Persen	180.173.429	75 Persen	Badan Pendapatan Daerah
				Realisasi Pajak Daerah	100 Persen	100 Persen	162.606.520	100 Persen	171.164.758	100 Persen	180.173.429	100 Persen	Badan Pendapatan Daerah
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
	Meningkatnya Kinerja Organisasi												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	12.248.245.116,00	100 %	12.892.889.596,00	100 %	13.571.462.733,00	100 %	Badan Pendapatan Daerah
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	9.256.360	100 Persen	9.743.537	100 Persen	10.256.355	100 Persen	Badan Pendapatan Daerah
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan administrasi keuangan	100 Persen	100 Persen	10.600.148.036,00	100 Persen	11.158.050.564,00	100 Persen	11.745.316.384,00	100 Persen	Badan Pendapatan Daerah
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	92.055.000	100 Persen	96.900.000	100 Persen	102.000.000	100 Persen	Badan Pendapatan Daerah
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	461.629.647	100 Persen	485.925.944	100 Persen	511.500.994	100 Persen	Badan Pendapatan Daerah
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	398.402.307	100 Persen	419.370.850	100 Persen	441.443.000	100 Persen	Badan Pendapatan Daerah
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	162.089.000	100 Persen	170.620.000	100 Persen	179.600.000	100 Persen	Badan Pendapatan Daerah
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	260.313.490	100 Persen	274.014.200	100 Persen	288.436.000	100 Persen	Badan Pendapatan Daerah
meningkatkan kapasitas birokrasi													
	terpenuhinya sistem merit												
	meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian												





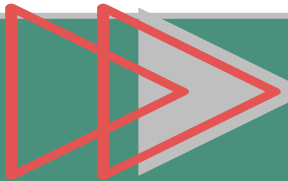
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
				persentase pengadaan ASN yang direkrut sesuai dengan kebutuhan	100 %	100 %	576.437.844	100 %	728.782.993	100 %	1.012.988.039	100 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				persentase jumlah ASN yang mendapatkan nilai predikat kinerja dengan nilai baik keatas	80 %	80,5 %	178.311.526	81 %	187.227.102	81,5 %	196.588.457	81,5 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase Pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	151.497.410	100 %	159.072.280	100 %	167.025.894	100 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase pemenuhan jabatan ASN	67,32 %	68,67 %	998.140.884	79,04 %	1.040.679.637	71,44 %	1.081.980.582	71,44 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN										
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	5,59 rasio	5,70 rasio	576.437.844	5,82 rasio	728.782.994	5,93 rasio	1.012.988.038	6,05 rasio	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN										
				layanan mutasi dan promosi ASN	98 %	98 %	811.456.216	98,1 %	844.660.736	98,2 %	876.160.736	98,3 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN										
				Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	38,8 %	38,84 %	186.684.668	39,62 %	196.018.901	40,41 %	205.819.846	41,42 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										
				Rata-rata Nilai Kinerja ASN	88 %	88,2 %	329.808.936	88,4 %	346.299.383	88,6 %	363.614.352	88,6 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
meningkatkan kapasitas birokrasi													
	terpenuhinya sistem merit												
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
				Tingkat kompetensi dan kualifikasi ASN	1 %	1,1 %	1.204.241.451	1,2 %	1.448.653.252	1,3 %	1.521.085.915	1,3 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										
				Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	36,17 %	1.204.241.451	36,89 %	1.448.653.252	37,63 %	2.486.763.715	38,38 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
meningkatkan kapasitas birokrasi													

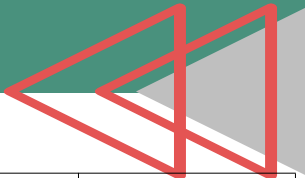




Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

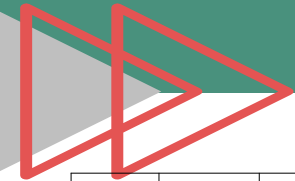
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	meningkatkan kinerja perangkat daerah												
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	11.224.774.048,00	100 %	11.771.897.288,00	100 %	11.754.364.237,00	100 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang terpenuhi	100 %	100 %	64.967.600	100 %	68.215.980	100 %	71.626.779	100 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	5.286.181.641	100 %	5.544.331.723	100 %	5.815.389.209	100 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	26.250.000	100 %	27.562.500	100 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	89.500.000	100 %	8.950.000	100 %	8.950.000	100 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.241.786.307	100 %	1.199.736.585	100 %	1.202.076.149	100 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
			Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah	100 %	100 %	125.000.000	100 %	450.785.500	100 %	148.000.000	100 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	273.660.000	100 %	273.300.000	100 %	278.100.000	100 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	618.678.500	100 %	619.777.500	100 %	622.109.500	100 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD											
			Jumlah program pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi	2 layanan	2 layanan	3.500.000.000	2 layanan	3.500.000.000	2 layanan	3.500.000.000	2 layanan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	





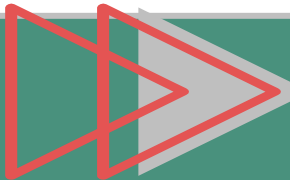
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
												Sumber Daya Manusia	
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel													
Meningkatnya Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)													
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah													
Meningkatnya kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)													
Pengendalian Korupsi													
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN										
				Nilai Self Assessment	100 %	100 %	000	100 %	000	100 %	000	100 %	Inspektorat Daerah
				Persentase PD dengan Maturity minimal Level 3	100 %	100 %	000	100 %	000	100 %	000	100 %	Inspektorat Daerah
				Persentase PD yang sudah menerapkan Lingkungan Pengendalian	100 %	100 %	000	100 %	000	100 %	000	100 %	Inspektorat Daerah
				Persentase PD yang sudah menerapkan Penilaian Risiko	60 %	75 %	1.152.727.000	80 %	1.267.999.700	85 %	1.394.799.670	85 %	Inspektorat Daerah
				Tingkat Penyelesaian PKPT Tepat Waktu	100 %	100 %	000	100 %	000	100 %	000	100 %	Inspektorat Daerah
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal										
				Dokumen laporan hasil reviu	100 %	100 %	000	100 %	000	100 %	000	100 %	Inspektorat Daerah
				Jumlah Pemeriksaan Kinerja, audit operasional/belanja	100 %	100 %	860.480.000	100 %	946.528.000	100 %	1.041.180.800	100 %	Inspektorat Daerah
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										
				Laporan Hasil pemeriksaan khusus	100 %	100 %	000	100 %	000	100 %	000	100 %	Inspektorat Daerah
				Persentase temuan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh OPD	100 %	100 %	860.480.000	100 %	946.528.000	100 %	1.041.180.800	100 %	Inspektorat Daerah
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										
				Persentase PD dengan Maturity minimal Level 3	100 %	100 %	000	100 %	000	100 %	000	100 %	Inspektorat Daerah
				Persentase PD yang sudah menerapkan Lingkungan Pengendalian	100 %	100 %	575.510.731	100 %	633.061.804	100 %	696.367.985	100 %	Inspektorat Daerah
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan										
				Dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan dan dokumen fasilitasi pengawasan	100 %	100 %	319.715.980	100 %	351.687.578	100 %	386.856.336	100 %	Inspektorat Daerah
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi										
				Dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan dan dokumen fasilitasi pengawasan	100 %	100 %	319.715.980	100 %	351.687.578	100 %	386.856.336	100 %	Inspektorat Daerah
				Persentase ASN yang memahami Aturan LHKASN	100 %	100 %	255.794.751	100 %	281.374.226	100 %	309.511.649	100 %	Inspektorat Daerah
				Persentase Unit Layanan ditetapkan menjadi Zona Integritas (ZI)	100 %	100 %	000	100 %	000	100 %	000	100 %	Inspektorat Daerah

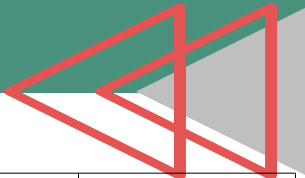




Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Kapasitas Birokrasi													
	Meningkatnya Kinerja Organisasi												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	5.598.518.679	100 %	6.158.370.547	100 %	6.804.567.602	100 %	Inspektorat Daerah
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	4 dokumen	4 dokumen	49.650.000	4 dokumen	54.615.000	4 dokumen	60.076.500	4 dokumen	Inspektorat Daerah
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.150.821.464	100 %	4.565.903.610	100 %	5.022.493.971	100 %	Inspektorat Daerah
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	349.698.626	100 %	384.668.489	100 %	453.495.337	100 %	Inspektorat Daerah
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	591.690.500	100 %	650.859.550	100 %	715.945.505	100 %	Inspektorat Daerah
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan	100 %	100 %	74.900.000	100 %	82.390.000	100 %	90.629.000	100 %	Inspektorat Daerah
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	82.441.050	100 %	90.685.155	100 %	99.753.671	100 %	Inspektorat Daerah
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	299.317.039	100 %	329.248.743	100 %	362.173.617	100 %	Inspektorat Daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan publik													
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan												
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
				Persentase Layanan sesuai standar Pelayanan Kecamatan LLG Barat I	100 Persen	100 Persen	275.000.000	100 Persen	300.000.000	100 Persen	325.000.000	100 Persen	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										
				Jumlah Pelayanan Kelurahan	11 Layanan	11 Layanan	275.000.000	11 Layanan	300.000.000	11 Layanan	325.000.000	11 Layanan	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan													
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
				Persentase kelompok masyarakat kelurahan yang aktif	90 Persen	90 Persen	3.050.000.000	90 Persen	3.050.000.000	90 Persen	306.000.000	90 Persen	Kecamatan Lubuklinggau Barat I



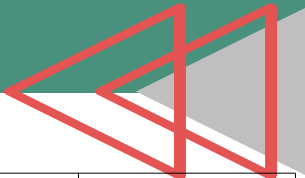


Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
				Persentase kegiatan sosial / kegamaan masyarakat yang terlaksana	90 Persen	90 Persen	3.050.000.000	90 Persen	3.050.000.000	90 Persen	3.060.000.000	90 Persen	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan													
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
				Tingkat keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan	80 Persen	85 Persen	75.000.000	85 Persen	90.000.000	90 Persen	90.000.000	90 Persen	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
				Jumlah jasa patroli tramtib tingkat Kecamatan	5 orang	5 orang	72.000.000	5 orang	90.000.000	5 orang	90.000.000	5 orang	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	6.905.428.624	100 %	7.076.070.539	100 %	7.121.070.539	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	6.099.018.085	100 Persen	6.210.000.000	100 Persen	6.210.000.000	100 Persen	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 Persen	80 Persen	80.000.000	80 Persen	80.000.000	80 Persen	80.000.000	80 Persen	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	243.870.539	100 Persen	243.870.539	100 Persen	243.870.539	100 Persen	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Persen	80 Persen	125.000.000	80 Persen	140.000.000	80 Persen	170.000.000	80 Persen	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	179.690.000	100 Persen	187.200.000	100 Persen	187.200.000	100 Persen	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Persen	80 Persen	177.850.000	80 Persen	215.000.000	80 Persen	230.000.000	80 Persen	Kecamatan Lubuklinggau Barat I
Meningkatkan kualitas pelayanan publik													
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan													
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
				Persentase Layanan Sesuai Standar	100 Persen	100	240.000.000	100	252.000.000	100	264.600.000	100 Persen	Kecamatan

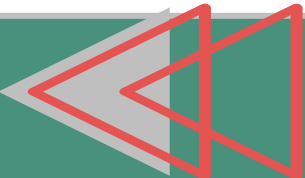


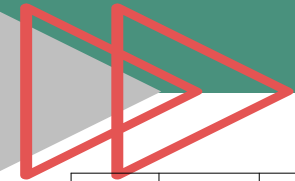
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pelayanan Kecamatan Llg Barat II		Persen		Persen		Persen			Lubuklinggau Barat II
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										
			Persentase Layanan Sesuai Standar Pelayanan Kecamatan Llg Barat II	100 Persen	100 Persen	240.000.000	100 Persen	252.000.000	100 Persen	264.600.000	100 Persen		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
	Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan												
	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
			Persentase kelompok / lembaga masyarakat yang aktif	90 Persen	90 Persen	4.065.000.000	90 Persen	4.901.250.000	90 Persen	5.739.062.500	90 Persen		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
	7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
			Persentase kelompok / lembaga masyarakat yang aktif	90 Persen	90 Persen	4.065.000.000	90 Persen	4.901.250.000	90 Persen	5.739.062.500	90 Persen		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan												
	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
			Persentase Tingkat keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan	80 Persen	80 Persen	72.000.000	80 Persen	85.000.000	80 Persen	90.000.000	80 Persen		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
			Persentase Tingkat keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan	85 Persen	85 Persen	72.000.000	90 Persen	85.000.000	90 Persen	90.000.000	90 Persen		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Meningkatkan Kapasitas Birokrasi													
	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat daerah												
	X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
			Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	5.287.058.524	100 %	5.617.369.450	100 %	5.972.837.922	100 %		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
	X.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
			Persentase 'Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	4.457.018.524	100 Persen	4.679.369.450	100 Persen	4.912.837.922	100 Persen		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
	X.XX.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	80.000.000	100 Persen	90.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
	X.XX.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	257.500.000	100 Persen	283.500.000	100 Persen	325.000.000	100 Persen		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
	X.XX.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
			Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 Persen	100 Persen	130.000.000	100 Persen	145.000.000	100 Persen	170.000.000	100 Persen		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
	X.XX.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
			Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	179.690.000	100 Persen	199.500.000	100 Persen	210.000.000	100 Persen		Kecamatan Lubuklinggau Barat II
	X.XX.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
			Persentase Pemenuhan Layanan	100 Persen	100	182.850.000	100	220.000.000	100	255.000.000	100 Persen		Kecamatan



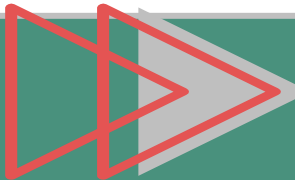
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target Persen	Rp	Target Persen	Rp	Target Persen	Rp		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Lubuklinggau Barat II
Meningkatkan kualitas pelayanan publik													
Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan													
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
				Persentase layanan sesuai standar pelayanan Lubuklinggau Timur I	100 %	100 %	180.000.151	100 %	190.040.159	100 %	203.742.167	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										
				Persentase pemenuhan penerapan perjenis layanan sesuai dengan layanan	100 %	100 %	184.800.151	100 %	194.040.159	100 %	203.742.167	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikecamatan													
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
				Persentase kelompok masyarakat yang aktif	100 %	100 %	2.080.050.053	100 %	2.184.052.555	100 %	2.293.255.183	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
				Tingkat layanan pemberdayaan kelurahan	100 %	100 %	2.080.050.053	100 %	2.184.052.555	100 %	2.293.255.183	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum kecamatan													
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
				Tingkat Keamanan dan Ketertiban diwilayah Kecamatan	100 %	100 %	76.600.000	100 %	79.380.000	100 %	83.349.000	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
				Persentase pemenuhan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	75.600.000	100 %	79.300.000	100 %	83.349.000	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
Meningkatnya kinerja organisasi													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase Pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.218.710.628	100 %	5.479.646.159	100 %	5.753.628.467	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Tingkat layanan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	96.193.125	100 %	101.002.781	100 %	106.052.920	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Tingkat layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	96.193.125	100 %	101.002.781	100 %	106.052.920	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	167.823.533	100 %	176.214.709	100 %	185.025.445	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur I

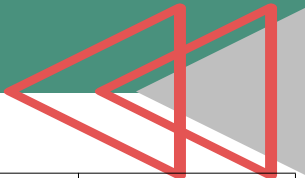




Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

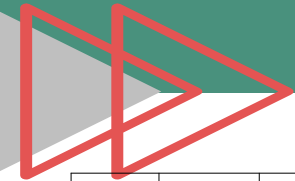
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase kecukupan barang penunjang urusan kantor	100 %	100 %	133.627.243	100 %	140.308.605	100 %	147.324.035	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Tingkat ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	100 %	100 %	151.013.029	100 %	158.563.680	100 %	166.491.864	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase sarana dan prasarana penunjang kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	245.543.550	100 %	257.820.728	100 %	270.711.764	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Meningkatkan kualitas pelayanan publik													
	Meningkatnya Kinerja pelayanan Kecamatan												
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
				Persentase layanan sesuai standar layanan Lubuklinggau Timur II	100 %	100 %	236.250.047	100 %	248.062.550	100 %	260.465.677	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										
				Presentase pemenuhan penerapan perjenis layanan sesuai dengan layanan	100 %	100 %	226.125.045	100 %	227.255.670	100 %	228.391.949	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan												
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
				Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif	100 %	100 %	2.502.301.907	100 %	2.627.417.002	100 %	2.758.278.852	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
				Tingkat Layanan Pemberdayaan Kelurahan	80 %	80 %	2.395.060.396	85 %	2.514.813.416	85 %	2.640.554.087	85 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum kecamatan												
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
				Tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan lubuklinggau Timur II	100 %	100 %	72.500.000	100 %	79.780.000	100 %	83.349.000	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
				Presentase pemeunuhan koordinasi upaya penyelenggaraan trantibum	85 %	85 %	72.630.000	85 %	83.214.000	90 %	95.696.100	90 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
	Meningkatnya Kinerja organisasi												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	249.069.135	100 persen	261.522.592	100 persen	466.001.720	100 persen	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Tersedianya dokumen perencanaan an,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	5.352.043	100 %	5.619.645	100 %	6.181.610	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur II





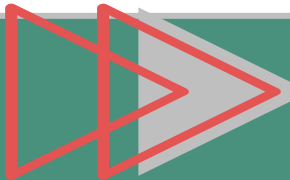
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.02	Administrasi	Keuangan Perangkat Daerah									
				Tingkat layanan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	3.822.035.201	100 %	4.013.136.961	100 %	4.414.450.657	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
		X.XX.01.2.05	Administrasi	Kepegawaian Perangkat Daerah									
				Tingkat Layanan Administrasi kepegawaian	100 %	100 %	40.401.000	100 %	42.421.050	100 %	44.542.103	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
		X.XX.01.2.06	Administrasi	Umum Perangkat Daerah									
				Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Pekantoran	85 %	85 %	218.294.744	90 %	229.209.481	90 %	240.669.955	90 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
		X.XX.01.2.07	Pengadaan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Persentase kecukupan barang penunjang urusan kantor	80 %	80 %	123.052.200	80 %	190.565.996	80 %	200.094.296	80 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
		X.XX.01.2.08	Penyediaan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	80 %	80 %	138.779.931	85 %	145.718.928	85 %	153.004.874	85 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Presetase sarana dan prasarana penunjang kantor dalam kondisi baik	80 %	80 %	305.244.370	85 %	320.506.588	85 %	336.531.917	85 %	Kecamatan Lubuklinggau Timur II
Meningkatkan kualitas pelayanan publik													
	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan												
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
				Prosentase layanan sesuai standar pelayanan Lubuklinggau utara 1	90 %	90 %	458.882.550	95 %	481.826.678	95 %	505.918.011	95 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										
				Persentase pemenuhan penerapan perjenis layanan sesuai dengan layanan	100 %	100 %	458.882.550	100 %	481.826.678	100 %	505.918.011	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di kecamatan												
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
				Prosentase kelompok masyarakat yang aktif	80 %	80 %	1.421.409.668	85 %	1.492.480.151	85 %	1.567.104.159	85 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
				Tingkat layanan pemberdayaan kelurahan	80 %	80 %	1.617.792.218	85 %	1.698.681.829	85 %	1.783.615.920	85 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum kecamatan												
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
				Tingkat keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan	100 %	100 %	72.000.000	100 %	82.800.000	100 %	95.220.000	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
				persentase pemenuhan koordinasi upaya penyelenggaraan trantibum	100 %	100 %	72.000.000	100 %	82.800.000	100 %	95.220.000	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara I

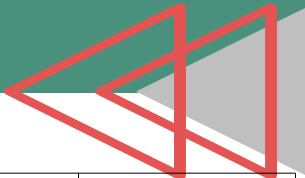




Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

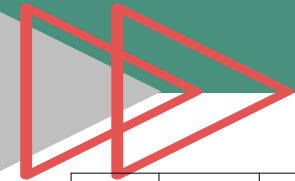
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
	Meningkatnya Kinerja Organisasi												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	5.517.872.966	100 %	5.793.766.614	100 %	6.315.973.316	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	5.650.158	100 %	5.932.666	100 %	6.525.932	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Tingkat layanna Administrasi Keungan	100 %	100 %	4.423.271.188	100 %	4.644.434.747	100 %	5.108.878.222	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Tingkat layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	96.193.125	100 %	101.002.781	100 %	106.052.920	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	85 %	85 %	311.505.311	90 %	327.080.577	90 %	343.434.605	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase kecukupan barang penunjang urusan kantor	80 %	80 %	153.892.243	85 %	161.586.855	85 %	169.666.198	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Tingkat ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Knator	80 %	80 %	233.793.945	85 %	245.483.642	85 %	257.757.824	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase kecukupan barang penunjang urusan kantor	80 %	80 %	293.566.996	85 %	308.245.346	85 %	323.657.613	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Meningkatkan kualitas pelayanan publik													
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan												
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
				Prosentase layanan sesuai standar pelayanan Lubuklinggau utara 2	90 %	90 %	458.882.550	95 %	481.826.677	95 %	505.918.011	95 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										
				Persentase pemenuhan penerapan perjenis layanan sesuai dengan layanan	90 %	90 %	458.882.550	95 %	481.826.677	95 %	505.918.011	95 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan													
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
				Prosentase kelompok masyarakat yang aktif	80 %	85 %	666.242.937	85 %	699.555.083	90 %	734.532.838	90 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										





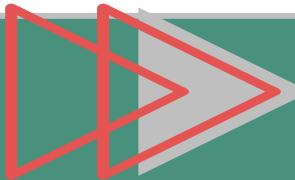
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Tingkat layanan pemberdayaan kelurahan	80 %	85 %	666.242.937	85 %	699.555.083	90 %	734.532.838	90 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan													
		7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
				Tingkat keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan	80 %	85 %	60.000.000	85 %	69.000.000	90 %	79.350.000	90 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
		7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
				Persentase Pemenuhan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantibum	80 %	85 %	60.000.000	85 %	69.000.000	90 %	79.350.000	90 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
	Meningkatnya Kinerja organisasi												
		X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
				Persentase Pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah	90 %	90 %	6.504.255.135	95 %	6.829.467.892	95 %	7.451.757.041	95 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
		X.XX.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
				tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	17.364.375	100 %	18.232.593	100 %	20.055.853	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
		X.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
				Tingkat layanna Administrasi Keungan	100 %	100 %	5.397.939.140	100 %	5.667.836.097	100 %	6.231.132.027	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
		X.XX.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
				Tingkat layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	311.505.311	100 %	327.080.576	100 %	343.434.605	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
		X.XX.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	85 %	85 %	311.505.311	90 %	327.080.576	90 %	343.434.605	90 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
		X.XX.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Persentase kecukupan barang penunjang urusan kantor	80 %	80 %	153.892.243	85 %	161.586.855	85 %	169.666.197	85 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
		X.XX.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Tingkat ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	80 %	80 %	233.793.945	85 %	245.483.642	85 %	257.757.824	85 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
		X.XX.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Persentase sarana dan prasarana penunjang kantor dalam kondisi baik	80 %	80 %	293.566.996	85 %	308.245.345	85 %	323.657.613	85 %	Kecamatan Lubuklinggau Utara II
Meningkatkan kualitas pelayanan publik													
	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan												
		7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
				Persentase layanan sesuai standar pelayanan	90 %	90 %	175.000.000	95 %	183.750.000	95 %	192.937.500	95 %	Kecamatan

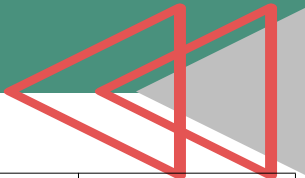




Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

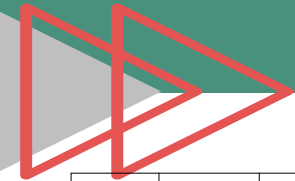
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								Lubuklinggau Selatan I	
				Persentase pemenuhan penerapan perjenis layanan sesuai dengan layanan	100 %	100 %	175.000.000	100 %	183.750.000	100 %	192.937.500	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembagunan dalam kecamatan											
		7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
				Persentase kelompok/lembaga masyarakat yang aktif	80 %	85 %	1.733.185.000	85 %	1.819.844.250	85 %	1.910.836.463	85 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
		7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
				Tingkat layanan pemberdayaan kelurahan	80 %	80 %	1.733.185.000	85 %	1.819.844.250	85 %	1.910.836.463	85 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
		Meningkatnya ketentaraman dan ketertiban umum kecamatan											
		7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
				Tingkat keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan	80 %	85 %	72.000.000	85 %	82.800.000	90 %	95.220.000	90 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
		7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
				persentase pemenuhan koordinasi upaya penyelenggaraan trantibum	80 %	85 %	72.000.000	85 %	82.800.000	90 %	95.220.000	90 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
		Meningatnya kapasitas birokrasi											
		X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	4.006.623.094	100 %	4.206.954.249	100 %	4.607.724.296	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
		X.XX.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
				tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	1.555.900	100 %	1.633.695	100 %	1.797.065	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
		X.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
				Tingkat layanan Administrasi Keungan	100 %	100 %	3.625.536.196	100 %	3.806.813.006	100 %	4.187.494.306	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
		X.XX.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
				Tingkat layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	47.600.000	100 %	49.980.000	100 %	52.479.000	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
		X.XX.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	105.731.000	100 %	111.017.550	100 %	116.568.428	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
		X.XX.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Persentase kecukupan barang penunjang urusan kantor	100 %	100 %	6.000.000	100 %	6.300.000	100 %	6.615.000	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
		X.XX.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									





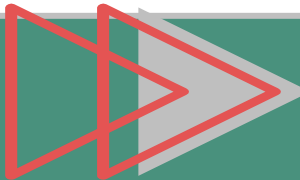
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Tingkat ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	100 %	100 %	76.408.000	100 %	80.228.400	100 %	84.239.820	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase sarana dan prasarana penunjang kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	143.791.998	100 %	150.981.598	100 %	158.530.678	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik														
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan													
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
				Persentase layanan sesuai standar pelayanan Lubuklinggau Selatan 2	90 %	95 %	458.882.550	95 %	481.826.678	95 %	505.918.011	95 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											
				Persentase pemenuhan penerapan perjenis layanan sesuai dengan layanan	100 %	100 %	458.882.550	100 %	481.826.678	100 %	505.918.011	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan														
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
				Prosentase kelompok masyarakat yang aktif	80 %	85 %	2.241.242.937	85 %	2.353.305.084	85 %	2.470.970.338	85 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											
				Tingkat layanan pemberdayaan kelurahan	80 %	80 %	2.241.242.937	85 %	2.353.305.084	85 %	2.470.970.338	85 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan														
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
				Tingkat keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan	80 %	85 %	60.000.000	85 %	69.000.000	90 %	79.350.000	90 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											
				Persentase Pemenuhan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantibum	80 %	80 %	60.000.000	85 %	69.000.000	85 %	79.350.000	85 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	
Meningkatkan kapasitas birokrasi														
	Meningkatnya Kinerja organisasi													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	6.432.416.260	100 %	6.754.037.037	100 %	7.372.039.952	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	7.560.000	100 %	7.938.000	100 %	8.731.800	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
				Tingkat layanna Administrasi Keuangan	100 %	100 %	5.331.507.140	100 %	5.598.082.497	100 %	6.157.890.747	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											

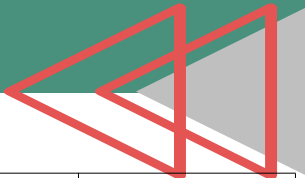




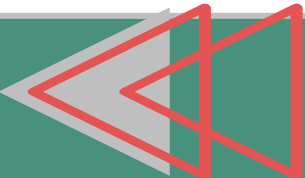
Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

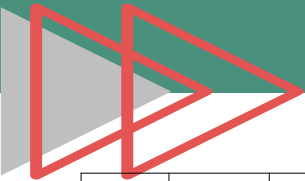
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Tingkat layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	96.193.125	100 %	101.002.781	100 %	106.052.920	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	85 %	90 %	315.902.811	90 %	331.697.952	100 %	348.282.849	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
				Persentase kecukupan barang penunjang urusan kantor	80 %	80 %	153.892.243	85 %	161.586.855	85 %	169.666.198	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Tingkat ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	80 %	80 %	233.793.945	85 %	245.483.642	85 %	257.757.824	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase sarana dan prasarana penunjang kantor dalam kondisi baik	80 %	85 %	293.566.996	85 %	308.245.346	100 %	323.657.613	100 %	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
Meningkatkan kualitas pelayanan publik													
Mewujudkan iklim usaha kondusif													
	Meningkatnya Keamanan Wilayah												
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN										
				Perentase kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang memahami ideologi dan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	1.500.000.000	100 %	1.600.000.000	100 %	1.700.000.000	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										
				Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembinaan ideologi pancasila	100 %	100 %	1.500.000.000	100 %	1.600.000.000	100 %	1.700.000.000	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										
				Persentase kelembagaan pemerintah yang berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi di masyarakat	0 %	100 %	60.000.000.000,00	0 %	1.000.000.000	0 %	1.000.000.000	0 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										
				Persentase parpol yang melakukan pembinaan politik ke masyarakat	100 %	100 %	60.000.000.000,00	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN										
				Persentase kerja sama ormas dengan pemerintah dalam pembangunan	100 %	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										
				Persentase ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	100 %	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	100 persen	100 persen	200.000.000	100 persen	200.000.000	100 persen	200.000.000	100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA										
				Persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam peningkatan solidaritas umat beragama	100 %	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya										
				Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100 %	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										
				Tingkat kriminalitas	100 %	100 %	400.000.000	100 %	500.000.000	100 %	600.000.000	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										
				Persentase konflik dan tindak kriminalitas yang terselesaikan	100 %	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatkan kapasitas birokrasi													
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	2.600.000.000	100 %	2.700.000.000	100 %	2.800.000.000	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				jumlah dokumen perencanaan	6 Dokumen	6 Dokum en	90.000.000	6 Dokum en	100.000.000	6 Dokum en	100.000.000	6 Dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				jumlah gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	1.350.000.000	14 Bulan	1.370.000.000	14 Bulan	1.380.000.000	14 Bulan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
				Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	25 Paket	25 Paket	35.000.000	25 Paket	35.000.000	25 Paket	35.000.000	25 Paket	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokum en	15.000.000	4 Dokum en	15.000.000	4 Dokum en	15.000.000	4 Dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	300.000.000	50 Laporan	300.000.000	50 Laporan	300.000.000	50 Laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	150.000.000	5 Paket	160.000.000	5 Paket	170.000.000	5 Paket	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7 Paket	7 Paket	14.000.000	7 Paket	14.000.000	7 Paket	14.000.000	7 Paket	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										

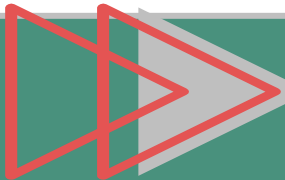




Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	5 Unit	200.000.000	5 Unit	60.000.000	5 Unit	60.000.000	5 Unit	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	5 Unit	5 Unit	500.000.000	5 Unit	500.000.000	5 Unit	500.000.000	5 Unit	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KESBANGPOL	100 %	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Peralatan dan Mesin	25 Peralatan dan Mesin	25.000.000	25 Peralatan dan Mesin	25.000.000	25 Peralatan dan Mesin	25.000.000	25 Peralatan dan Mesin	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Kendaraan	10 Kendaraan	200.000.000	10 Kendaraan	250.000.000	10 Kendaraan	250.000.000	10 Kendaraan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: SIPD Kementerian Dalam Negeri, 2023





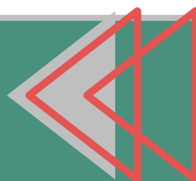
BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memberi gambaran tentang kinerja penyelenggaraan daerah melalui penetapan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat absolut setiap tahun perencanaan sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah pada RPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 dirumuskan berdasarkan hasil analisis objektivitas dan pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

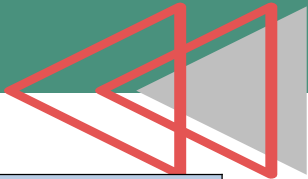
Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah diambil dari indikator sasaran strategis RPD, yang telah dijabarkan dalam indikator sasaran strategis Renstra Perangkat Daerah, dan menjadi pedoman pelaksanaan program Perangkat Daerah. Tujuan penyusunan Indikator Kinerja dimaksudkan untuk menyiapkan alat ukur dalam mengukur Rencana Pembangunan serta hasil-hasilnya. Setiap *stakeholder* dan komponen masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan visi Kota Lubuk Linggau.

Penetapan Indikator kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Lubuk Linggau dapat dilihat pada Tabel berikut.

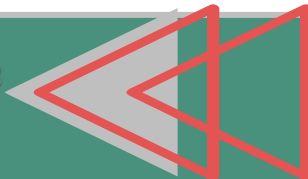


Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Lubuk Linggau

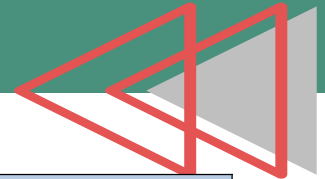
NO	INDIKATOR	SATUAN	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
1	Indeks Sumber Daya Manusia (ISDM)	Indeks	$ISDM = \sqrt{Indeks\ Pengetahuan \times Indeks\ Kesehatan}$		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan
2	Indeks Pengetahuan	Indeks	$\frac{IHLS+IRLS}{2}$ $IHLS = \frac{(HLS-0)}{(18-0)}$ $IRLS = \frac{(RLS-0)}{(15-0)}$	IHLS = Indeks Harapan Lama Sekolah, IRLS = Indeks Rata-Rata Lama Sekolah, HLS = Harapan Lama Sekolah, RLS = Rata-Rata Lama Sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. RLS adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Indeks Kesehatan	Indeks	$\frac{(AHH-AHHmin)}{(AHHmax-AHHmin)} = \frac{(AHH-20)}{(85-20)}$	AHH = Angka Harapan Hidup, AHHmin = Angka Harapan Hidup Minimum, AHHmax = Angka Harapan Hidup Maksimal. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat	Dinas Kesehatan
4	Indeks Madani	Indeks	$Indeks\ Madani = \sqrt{IPM \times ID}$		Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, Dinas Olahraga dan Kepemudaan, DPPPAPM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



NO	INDIKATOR	SATUAN	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
5	Indeks Kesadaran Demokrasi	Indeks	ID = (30% x Persentase pemilih dalam pemilu) + (15% x Persentase pemuda yang berperan aktif dalam pembangunan) + (15 x Partisipasi masy dlm pemb (nilai swadaya)) + (10 x Indeks Pembangunan Gender) + (10 x Indeks Pemberdayaan Gender) + (10% x Skor (nilai) status Kota Layak Anak) + (5 x Jumlah budaya lokal yang lestari) + (5% x Konflik antar umat beragama yang terselesaikan)	Indeks Demokrasi Kota Lubuk Linggau merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Lubuk Linggau. Tingkat capaiannya dilihat dari 8 komponen yaitu Persentase pemilih dalam pemilu, Persentase pemuda yang berperan aktif dalam pembangunan, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan (nilai swadaya), Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Skor (nilai) status Kota Layak Anak, Jumlah budaya lokal yang lestari, Konflik antar umat beragama yang terselesaikan. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, Dinas Olahraga dan Kepemudaan, DPPAPM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6	Pertumbuhan ekonomi	%	$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_n - PDRB_{n-1}}{PDRB_{n-1}} \times 100\%$ Data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS	Pertumbuhan ekonomi didasarkan pada nilai PRDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu ukuran kinerja pembangunan khususnya di bidang ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.	
7	Nilai ICOR	Nilai	$\frac{(\text{Nilai PMTB tahun } n)}{(\text{Nilai PDRB tahun } n) - (\text{Nilai PDRB tahun } n-1)}$	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PDRB adalah Nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Sumber Data BPS	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, SatpolPP



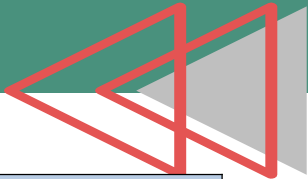
NO	INDIKATOR	SATUAN	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
8	PDRB sektor perdagangan dan jasa	Rp (Milliar)	Perhitungan : $\sum$ PDRB Sektor - i Komposit Nilai Sektor PDRB ADHK 2010 : 1) Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan sepeda motor 2) Transportasi dan Pergudangan 3) Jasa Keuangan dan Asuransi 4) Jasa Perusahaan 5) Jasa Pendidikan 6) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7) Jasa Lainnya	PDRB sektor perdagangan dan jasa adalah Nilai dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha pada beberapa sektor perdagangan dan jasa di Kota Lubuk Linggau (miliar rupiah). (Data BPS)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9	Laju Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	%	Nilai Laju Pertumbuhan PDRB pada sektor Industri Pengolahan/Manufacturing	Laju Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB adalah Nilai dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha pada sektor Industri Pengolahan / Manufacturing di Kota Lubuk Linggau (persen). (data BPS)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
10	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	%	Perhitungan : Nilai PDRB sektor-i $\sum$ PDRBt Keterangan : Nilai PDRB sektor-i = Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Milyar) $\sum$ PDRBt = Jumlah keseluruhan sektor PDRB pada tahun dihitung (Milyar)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB adalah Distribusi dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Lubuk Linggau (data BPS)	Badan Keuangan Daerah & Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Indeks Gini		Data Gini Rasio rilis BPS	Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh.	



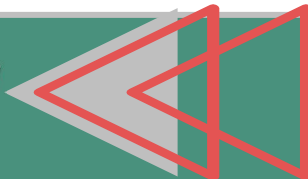
NO	INDIKATOR	SATUAN	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Data BPS (Proyeksi).	Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
13	Indeks Pengeluaran	Indeks	$\frac{(\text{Pengeluaran perkapita} - \text{Pengeluaran perkapita min})}{(\text{Pengeluaran perkapita max} - \text{Pengeluaran perkapita min})}$ Ket : (BPS) Max : 26.572.352 (Daya Beli di Jakarta Selatan 2025) Min : 1.007.436 (Daya beli di Tolikara Papua)	Pengeluaran per kapita adalah Rata-rata pengeluaran setiap penduduk pada suatu wilayah yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan
14	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : $\alpha = 1$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Data BPS (Proyeksi)	Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : $\alpha = 2$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$),	Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Data BPS (Proyeksi)	Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	INDIKATOR	SATUAN	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
			$y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.		
16	Angka Kemiskinan	%	Data Kemiskinan Rilis BPS	Angka kemiskinan digambarkan dengan persentase penduduk miskin. Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.	Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Rasio kecukupan pangan		$\frac{\sum \text{rasio kecukupan pangan komoditas ke } i (1,2..n)}{n}$ Rasio kecukupan pangan (komoditas ke i) = $\frac{\text{Jumlah ketersediaan pangan (komoditas ke i)}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan (komoditas ke i)}}$	Jumlah Kebutuhan Pangan (komoditi ke i) = Jumlah Konsumsi komoditi ke i (Ideal Susenas) x Jumlah Penduduk x 365 hr. Jumlah Ketersediaan Pangan (Komoditas ke i) = Jumlah pangan strategis komoditas ke i yang tersedia (Sumber Data : Dinas Perdagangan & Perindustrian, Dinas Pertanian, Bulog, BPS, data diolah Dinas Ketahanan Pangan).	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan
18	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	$\frac{1}{3} * (\text{Indeks infrastruktur perkim} + \text{Indeks infrastruktur dasar} + \text{IKLH})$		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan
19	Luas Kawasan Kumuh	Ha	(Berdasarkan SK Kawasan Kumuh th 2019 atau yg terbaru)	Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya dihubung-hubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Ket : Luas Kawasan Terindikasi Kumuh tahun 2019 = 517,66 Ha (Satker Kotaku).	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20	Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	$IDP = \frac{\sum P_n}{n}$ Dimana: I-IDP = Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	Rata-rata geometris dari 7 komponen 1) Layanan Sanitasi Skala Perkotaan 2) Penduduk Berakses Air Minum Perpipaan 3) Jaringan Irigasi Fungsional 4) Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap 5) Panjang Jembatan Dalam Kondisi Mantap 6) Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan



NO	INDIKATOR	SATUAN	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
			$\sum P_n$ = Jumlah penting masing-masing jenis komposit ke-n n = Jumlah individu komposit ke-n Komposit Pembentuk P_n : 1) Persentase Layanan Sanitasi Skala Perkotaan 2) Persentase Penduduk Berakses Air Minum Perpipaan 3) Persentase Jaringan Irigasi Fungsional 4) Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap 5) Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Mantap 6) Persentase Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung PSU yang memadai 7) Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik	PSU yang memadai 7) Rumah Tangga yang menggunakan Listrik	Permukiman
21	Indeks Aksesibilitas	Indeks	Indeks Aksesibilitas = $\frac{\text{Panjang jalan (km)}}{\text{Luas wilayah (km}^2\text{)}}$	Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu tujuan lokasi yang menjadi ukuran adalah jarak tempuh, waktu tempuh, kelengkapan dan kualitas dari fasilitas prasarana yang tersedia. Nilai indeks aksesibilitas dihitung dengan rumus (Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan sesuai dengan KEPMEN Kimpraswil No 534/KPTS/M/2001).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	$(\text{Indeks Kualitas Air} \times 30\%) + (\text{Indeks Kualitas Udara} \times 30\%) + (\text{Indeks Tutupan Lahan} \times 40\%)$	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Dengan mengetahui media lingkungan yang masih kurang baik, sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara lebih tepat sehingga akan lebih efektif dan efisien. Indeks Kualitas Air adalah status kualitas air, Indeks Kualitas Udara adalah status kualitas air, Indeks Tutupan Lahan adalah jumlah tutupan lahan secara spasial.	Dinas Lingkungan Hidup
23	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	$IRB = \sqrt{IPP \times IKM}$ Sistem Aplikasi Reformasi Birokrasi (KemenpanRB)		Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), Semua Perangkat Daerah Pelayanan Publik



NO	INDIKATOR	SATUAN	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Crosscutting)
24	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	$IPP = (30\% * \text{Kebijakan Pelayanan}) + (18\% * \text{Profesionalisme SDM}) + (15\% * \text{Sarana Prasarana}) + (15\% * \text{Sistem Informasi Pelayanan Publik}) + (15\% * \text{Konsultasi dan Pengaduan}) + (7\% * \text{Inovasi})$	IPP didapat melalui Evaluasi Kemenpan RB RI pada Pemerintah Daerah dengan 6 Aspek : 1. Kebijakan Pelayanan 2. Profesionalisme SDM 3. Sarana Prasarana 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik 5. Konsultasi dan Pengaduan 6. Inovasi (0 – 1,00 F; 1,01 – 1,50 E; 1,51 – 2,00 D; 2,01 – 2,50 C- Cukup (DC); 2,51 – 3,00 C Cukup; 3,01 – 3,50 B- Baik (CB); 3,51 – 4,00 B Baik; 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik; 4,51 – 5,00 A Prima)	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), Semua Perangkat Daerah Pelayanan Publik
		Nilai			
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sumber PermenpanRB nomor 14 Tahun 2017.	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), Semua Perangkat Daerah Pelayanan Publik
26	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	Evaluasi SAKIP KemenPAN&RB : (0-30 D; 30-50 C; 50-60 CC; 60-70 B; 70-80 BB; 80-90 A; 90-100 AA)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.	Inspektorat, Bappedalitbang, Setda (Bagian Organisasi), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27	Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks	$IKB = (30\% * \text{Indeks Profesionalitas}) + (20\% * \text{Kelembagaan (Persentase Organisasi tepat fungsi tepat ukur)}) + (15\% * \text{Indeks SPBE} * 10) + (15\% * \text{Indeks Keterbukaan Informasi Publik} * 10) + (10\% * \text{Indeks Arsip}) + (10\% * \text{Persentase Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan})$	Indeks Kapasitas Birokrasi merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan kapasitas birokrasi di Lubuk Linggau. Tingkat capainya diukur dari penjumlahan Indeks Profesionalitas, Kelembagaan; Persentase Organisasi tepat fungsi tepat ukur, Indeks SPBE, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Indeks Arsip dan Persentase Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Setda/Bag. Organisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Setda/Bag. Hukum

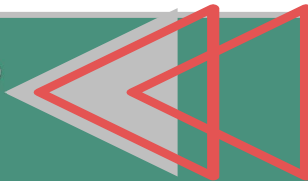
Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2023



Tabel 8.2. Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kota Lubuk Linggau

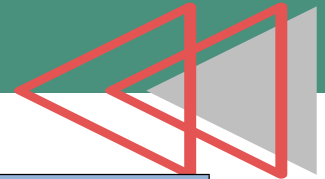
NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET			KONDISI AKHIR (2026)
				2024	2025	2026	
1	Indeks Sumber Daya Manusia (ISDM)	Indeks	72,013	72,23	72,446	72,661	72,661
2	Indeks Pengetahuan	Indeks	0,702	0,709	0,711	0,713	0,713
3	Indeks Kesehatan	Indeks	0,766	0,773	0,777	0,780	0,78
4	Pertumbuhan ekonomi	%	4,51	5,463	5,946	6,429	6,429
5	Nilai ICOR	Nilai	10,05	8,672	8,484	8,295	8,295
6	PDRB sektor perdagangan dan jasa	Rp (Milliar)	2.096,80	2.132,65	2.178,88	2.225,10	2.225,10
7	Laju Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	%	5,82	6,52	7,59	8,65	8,65
8	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	%	3,98	4,04	4,11	4,15	4,15
9	Indeks Gini		n/a	0,333	0,332	0,331	0,331
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,94	4,79	4,62	4,25	4,25
11	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,502	0,74	0,77	0,8	0,8
12	Angka Kemiskinan	%	12,68	12,35	12,23	12,12	12,12
13	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	1,5	1,47	1,45	1,41	1,41
14	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,27	0,24	0,23	0,21	0,21
15	Rasio kecukupan pangan		0,91	1,09	1,16	1,18	1,18
16	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	n/a	50,83	51,7	52,57	52,57
17	Luas Kawasan Kumuh	Ha	422,53	413,87	412,80	410,16	410,16
18	Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	n/a	65,86	67,67	69,48	69,48
19	Indeks Aksesibilitas	Indeks	0,775	0,793	0,808	0,822	0,822
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,86	67,46	68,37	69,28	69,28
21	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,47	57,29	60,41	63,69	63,69
22	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,26	4,4	4,57	4,74	4,74
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,97	82,48	83,25	84,55	84,55
24	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB
25	Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks	n/a	69,08	70,15	72,85	72,85

Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2023



Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Lubuk Linggau

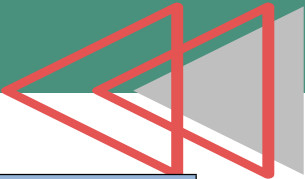
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
				2024	2025	2026	
I	Indikator Makro						
1	PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)	Rp (Juta)	4.671,89	5.101.811,06	5.248.333,66	5.674.661,47	5.674.661,47
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,51	5,78	5,95	6,43	6,43
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,53	76,34	76,7	77,17	77,17
4	Angka Kemiskinan	%	12,68	12,35	12,23	12,12	12,12
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,94	4,79	4,62	4,25	4,25
6	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,37	0,33	0,32	0,315	0,315
II	Indikator Kinerja Daerah Pada Masing-Masing Urusan						
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,78	5,95	6,43	6,43	5,78
2	Laju inflasi	%	3,79	3,01	2,51	2,51	3,79
3	PDRB per kapita (ADHK)	Rp.	22.298.955	22.939.375	24.802.765	24.802.765	22.298.955
4	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	23,05	23,45	23,84	23,84	23,05
5	Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	%	17,81	17,85	18,01	18,01	17,81
6	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	7,28	7,35	7,43	7,43	7,28
II.	Kesejahteraan Sosial						
1	Indeks PembangunanManusia (IPM)	Nilai Indeks	75,53	76,34	76,7	77,17	77,17
2	Angka melek huruf	%	98,85	100	100	100	100
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,91	9,96	9,97	9,97	9,97
4	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,39	13,41	13,42	13,43	13,43
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,94	4,79	4,62	4,25	4,25



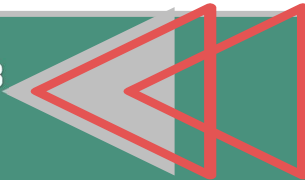
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
				2024	2025	2026	
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,44	1,43	1,42	1,41	1,41
III.	Seni Budaya dan Olahraga						
1	Jumlah Prestasi Olahraga yang diraih	cabor	11	33	33	33	33
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
I.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
1	Produktifitas Pangan Utama	Ton/Ha	-	17,2	17,2	17,2	17,2
II.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	-	51,76	54,01	56,26	56,26
III.	Fokus Iklim Berinvestasi						
1	Nilai ICOR	Nilai	10,05	8,3	7,98	7,67	7,67
2	Angka kriminalitas	Jumlah Angka	-	100	100	100	100
3	IKM Bidang Pelayanan Perizinan	%	86,64	90	90	90	90
IV.	Fokus Sumber Daya Manusia						
1	Indeks Sumber Daya Manusia	Indeks	76,3	72,23	72,45	72,66	74,22
2	Indeks Pengetahuan	Indeks	0,702	0,714	0,719	0,722	0,722
3	Indeks Kesehatan	Indeks	0,766	0,772	0,777	0,781	0,781
ASPEK PELAYANAN UMUM							
I.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1.	Pendidikan						
1	Angka melek huruf	persen	98,72	99,09	99	100	100
2	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	persen	115,28	113,05	111,84	108,1	108,1
3	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	persen	86,51	99,21	99,63	99,7	99,7
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	persen	99,54	99,63	99,08	99,05	99,05



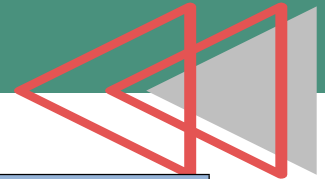
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
				2024	2025	2026	
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	persen	87,69	86,87	87,57	88	88
6	Angka Putus Sekolah SD	persen	0,9	0,09	0,81	0,6	0,6
7	Angka Putus Sekolah SMP	persen	0,37	0,23	1,39	0,34	0,34
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,31	13,36	13,37	13,45	13,45
9	Persentase SD/MI dengan akreditasi A	persen	2,75	2,75	2,8	3	3
10	Persentase SMP/MTs dengan akreditasi A	persen	3,5	3,5	3,5	3,75	3,75
11	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	9,7	9,97	9,89	9,68	9,68
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	99,75	99,24	98,85	100	100
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	98,6	98,05	93,23	100	100
13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	88,11	62,95	98,74	98	98
2.	Kesehatan						
1	Angka Kematian Bayi	angka	4,75	4,5	4,4	4,3	4,3
2	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	angka	141	100	90	80	80
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76,86	80	81	82	82
4	Persentase fasilitas keshatan yang terakreditasi	%	85	95	100	100	100
5	Angka kesakitan	angka	10,89	11,03	11,89	10,75	10,75
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Rata -rata Persentase Cakupan Layanan sarana dan prasarana keciptakaryaan	%	31,16	31,16	64,36	96,79	96,79
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung PSU yang memadai (diatas 70%)	%	96,95	95,5	96	96,5	96,5
2	Persentase Rumah Layak Huni	%	99,2	97,94	98,44	98,94	98,94
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
				2024	2025	2026	
1	Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Perda/perkada yang terselesaikan	persen	100	100	100	100	100
2	Persentase wilayah rawan bencana yang mendapatkan layanan mitigasi bencana	%	83,78	100	100	100	100
3	Persentase Wilayah rentan bencana yang siaga bencana	%	11,76	50	55	60	60
4	Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran	%	73,57	100	100	100	100
5	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	menit	15	15	15	15	15
6	Persentase Tindak Kriminalitas yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100
6.	Sosial						
1	Persentase PMKS yang mampu keluar dari Permasalahan Sosial	persen	86,89	89,14	90,34	90,48	90,48
II.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
1.	Tenaga Kerja						
1	Tingkat Kesempatan Kerja	%	95,18	95,18	95,2	95,22	95,22
2	% Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	%	25,02	25,02	25,03	26	26
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	IPG (indeks pembangunan gender)	Nilai	95,84	96	96	96	96
2	IDG (indeks pemberdayaan gender)	Nilai	60,81	66	66	66	66
3	Skor nilai kota layak anak (KLA)	Nilai	600	650	690	700	700
4	Status kota layak anak (KLA)	Nilai	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya
3	Pangan						
1	Stabilitas harga pangan	%	100	100	100	100	100
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	88,9	100	100	100	100
4	Pertanahan						



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
				2024	2025	2026	
1	Persentase Legalitas Tanah	%	-	20	20	20	20
2	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	54,17	100	100	100	100
5	Lingkungan Hidup						
1	Indeks pencemaran air	Indeks	55	67,35	67,45	67,55	67,55
2	Indeks pencemaran udara	Indeks	85,57	82,89	82,99	83,09	83,09
3	Indeks tutupan lahan	Indeks	23,26	37,12	37,22	37,32	37,32
4	Persentase air permukaan yg memenuhi baku mutu	persen	60	60	60	61	66
5	Persentase air tanah yang memenuhi baku mutu	persen	60	60	60	60	69
6	Persentase sungai yang Memenuhi baku mutu dan keamanan	persen	60	60	60	61	66
7	Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup	persen	20	25	30	35	45
8	Persentase pelaku usaha yang memiliki TPS LB3	persen	16	18	20	22	26
9	Persentase usaha / kegiatan yang memiliki IPAL	persen	20	25	30	35	45
10	Persentase Ketersediaan data bidang sumber daya air ter-update	persen	20	25	30	35	40
11	Tingkat penurunan emisi GRK	persen	0	2	2	2	2
12	Tingkat pencemaran emisi tidak bergerak	persen	0	2	2	2	2
13	RAD aksi mitigasi yang dilaksanakan	kegiatan	0	0	0	0	0
14	Persentase luas tutupan lahan	persen	80	80	80	80	80
15	Persentase luasan RTH	persen	30	30	30	30	30
16	Luas lahan kritis	Ha	6.205	6.205	6.205	6.205	6.205
17	Persentase timbulan sampah	persen	71	72	73	77	85
18	Persentase luas area yang terlayani	persen	60	65	70	75	85
19	Persentase volume sampah yang di Recycle	persen	0	1	1	1	5
20	Persentase vulome sampah yang di reuse	persen	0	0,1	0,1	0,1	0,5
21	Gerakan reduce sampah berbasis masyarakat	kegiatan	1	1	1	1	1

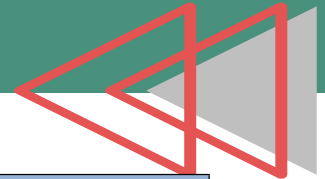


No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
				2024	2025	2026	
22	Persentase komunitas / penggiat lingkungan hidup yang aktif	persen	40	42	44	46	50
23	Jumlah Komunitas lingkungan	komunitas	34	36	38	40	44
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen Kependudukan (Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun)	%	97,98	97	98	100	100
2	Persentase penduduk yang memiliki dokumen Kependudukan (Kepemilikan KIA)	%	42,93	48	50	60	60
3	Persentase penduduk yang memiliki dokumen Kependudukan (Kepemilikan KTP)	%	98,77	97	98	100	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	Indeks	85,38	86	87	88	88
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	persen	0	1,39	2,78	4,17	4,17
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Angka Kelahiran Kasar (<i>Crude Birth Rate</i>)	Per 1000 penduduk	13,85	13,5	13,3	13	13
2	Rata- rata jumlah anak perkeluarga/TFR	Jumlah Anak	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3	Cakupan pasangan usia subur yang tidak ber-kb (unmeetnet)	%	23,32	16,23	10,5	10,1	10,1
4	TFR (Angka Kelahiran Total)		-	2,64	2,54	2,44	2,44
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	59,74	81,77	82,1	82,44	82,44
9.	Perhubungan						
1	Kinerja Lalu Lintas Jalan Kota	ratio	0,35	0,35	0,3	0,3	0,3
2	Ratio Konektivitas Kota	ratio	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6



Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026

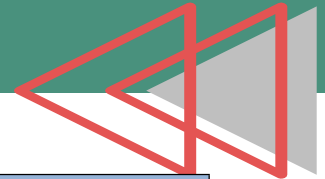
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
				2024	2025	2026	
10	Komunikasi dan Informatika						
1	Indeks SPBE	indeks	2,45	2,5	2,6	2,7	2,7
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
1	Persentase Koperasi Sehat	%	8	8,8	9,7	12,6	12,9
12	Penanaman Modal						
1	Jumlah nilai investasi	Rp(juta)	2.221.331	2.250.000	2.812.500	3.516.000	3.516.000
2	Indeks Kepuasan Masyarakat		87,04	88	89	90	90
13.	Kepemudaan dan Olah Raga						
1	Jumlah Prestasi Olahraga yang Diraih	medali	11	15	125	20	20
2	Tingkat Pertumbuhan Komunitas Olahraga	%	60	65	70	75	75
3	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	45,17	45,2	45,22	45,25	45,25
14.	Statistik						
1	Presentase OPD yang menggunakan Data Statistik Sektoral	%	85	90	95	100	100
15.	Persandian						
1	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	indeks	16	16	17	18	18
16.	Kebudayaan						
1	Kekayaan Budaya daerah ditetapkan	nilai	4	4	5	8	8
2	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	0	67,85	69,15	71,25	71,25
17.	Perpustakaan						
1	Jumlah Kunjungan Masyarakat Ke Ruang Baca Publik	kunjungan	74.321	78.037	81.939	86.036	86.036
18.	Kearsipan						
1	Persentase Perangkat Daerah Yang menerapkan arsip secara Baku	%	20	40	60	80	80
III.	Urusan Pilihan						
1.	Pariwisata						
1	Jumlah kunjungan wisatawan	wisatawan	155.000	165.000	175.000	185.000	185.000



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
				2024	2025	2026	
2.	Pertanian						
1	Populasi Ternak	ekor	43.482	43.482	45.542	46.321	46.321
2	Produktifitas Tanaman Holtikultura	Ton/Ha	45	45	50	55	55
3	Produktifitas Pangan Utama	Ton/Ha	13	13	14	14,5	14,5
4	Produktifitas Perkebunan	Ton/Ha	3	3	3,5	4	4
5	Produktifitas Tanaman Biofarmika	Ton/Ha	8	8	8,5	9	9
3.	Perdagangan						
1	Meningkatnya Pengamanan Perdagangan	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Menurunnya Tingkat Infasi daerah		2,15	2,10	2,05	2,00	1,95
4.	Perindustrian						
1	Indutri Pengolahan yang Bersertifikat Halal/SNI	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Sentra Industri	%	100	100	100	100	100
5.	Kelautan dan Perikanan						
1	Persentase Peningkatan Ketersediaan Ikan	%	5	6	6	7	7
IV.	Fungsi Penunjang						
1.	Perencanaan Pembangunan						
1	Tingkat Sinkronisasi Pendanaan Daerah	%	100	100	100	100	100
2	Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Daerah	%	100	100	100	100	100
2.	Kuangan						
1	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP Predikat	WTP Predikat	WTP Predikat	WTP Predikat	WTP Predikat
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	persen	50	50	50	50	50
3	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	persen	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
				2024	2025	2026	
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
1	pemenuhan nilai sistem merit	Nilai	278,5	292,43	307,05	322,4	322,4
2	indeks kepuasan layanan	Nilai	82,98	83,39	83,81	84,23	84,65
4.	Penelitian dan Pengembangan						
1	Indeks Inovasi Daerah	skor indeks	50	52	55	58	58
2	Persentase hasil kelitbangan di terapkan dalam kebijakan daerah	%	100	100	100	100	100
5.	Inspektorat						
1	Internal Audit Capability Model (IACM)	level	3	3	3	4	4
2	Level Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	level	2	2	3	3	3
6.	Sekretariat DPRD						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap Pelayanan Kesekretariatan	indeks	85	90,25	90,5	90,75	90,75
7.	Sekretariat Daerah						
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	persen	85	90	95	100	100
2	Persentase Capaian Pengendalian Kegiatan Pembangunan	persen	90	95	100	100	100
3	Persentase proses pengadaan barang/jasa yang diselesaikan	persen	100	100	100	100	100
4	Laju Inflasi Daerah	persen	1	1	1	1	1
5	Prosentase MOU yang ditindaklanjuti dengan Program	persen	100	100	100	100	100
6	Persentase Tingkat Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah	persen	100	100	100	100	100
7	Nilai Rata-rata Profesionalisme Aparatur Pelayanan	persen	90	90,05	92,5	95	95
8	Rata-rata Pemenuhan dan Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan Publik	nilai	3	3,25	3,5	3,75	3,75
9	Nilai Rata-Rata Penerapan Kebijakan Pelayanan UPP	nilai	73,5	74	74.50	75	75



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
				2024	2025	2026	
10	Persentase Pelayanan per Jenis Layanan Selesai Tepat Waktu	persen	90	92	95	100	100
11	Persentase Layanan KDH Sesuai SOP	persen	100	100	100	100	100
12	Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Pada Komponen SAKIP	nilai	14	14,1	14,2	14,5	14,5
12	Persentase organisasi tepat fungsi tepat ukur	persen	50	60	70	80	80
8.	Kecamatan						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lubuk Linggau Barat I	indeks	85	90	90	90	90
2	Persentase Penyelesaian Layanan sesuai standar pelayanan	persen	100	100	100	100	100
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM Kecamatan	kelompok	2	3	4	5	5
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kecamatan	kelompok	4	4	4	4	4
5	Tingkat Kriminalitas yang tertangani	persen	100	100	100	100	100
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lubuk Linggau Barat II	Indeks	85	90	90	90	90
7	Persentase Penyelesaian Layanan Sesuai Standar Pelayanan	persen	100	100	100	100	100
8	Rata - rata Jumlah Kelompok Binaan Kecamatan	kelompok	2	3	4	5	5
9	Rata -rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kecamatan	kelompok	4	4	4	4	4
10	Tingkat Kriminalitas yang tertangani	persen	100	100	100	100	100
11	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lubuk Linggau Timur I	Indeks	85	85	85	85	85
12	persentase penyelesaian layanan sesuai standar pelayanan	persen	100	100	100	100	100
13	rata-rata jumlah kelompok binaan LPM kecamatan	kelompok	3	3	3	3	3
14	rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kecamatan	kelompok	4	4	4	4	4
15	Tingkat kriminalitas Kecamatan yang tertangani	%	100	100	100	100	100
16	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lubuk Linggau Timur II	Indeks	87,72	87,72	87,72	87,72	87,72
17	Persentase penyelesaian layanan sesuai standar pelayanan	%	100	100	100	100	100
18	rata-rata jumlah kelompok binaan LPM Kecamatan	kelompok	3	4	5	6	6
19	rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kecamatan	kelompok	6	6,2	6,3	7,77	7,77



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
				2024	2025	2026	
20	Tingkat kriminalitas Kecamatan yang tertangani	%	100	100	100	100	100
21	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lubuk Linggau Utara I	Indeks	87,72	87,72	87,72	87,72	87,72
22	Persentase Penyelesaian layanan sesuai standar Pelayanan	%	100	100	100	100	100
23	Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPM Kecamatan	kelompok	3	4	5	6	6
24	Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK Kecamatan	kelompok	4	4	4	4	4
25	Tingkat Kriminalitas kecamatan yang tertangani	%	100	100	100	100	100
26	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lubuk Linggau Utara II	Indeks	85	85	86	86	87
27	Persentase Penyelesaian Layanan sesuai standar pelayanan	persen	90	90	95	100	100
28	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM Kecamatan	kelompok	2	2	2	2	2
29	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kecamatan	kelompok	2	2	2	2	2
30	Tingkat Kriminalitas yang tertangani	persen	75	75	80	80	80
31	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I	%	95	95	100	100	100
32	Persentase penyelesaian layanan sesuai standar pelayanan	%	85	85	90	95	95
33	Rata- rata jumlah kelompok binaan LPM kecamatan	kelompok	4	4	4	4	4
34	Rata- rata jumlah kelompok binaan PKK kecamatan	kelompok	6	6	6	6	6
35	Tingkat kriminalitas kecamatan yang tertangani	%	90	90	95	95	95
36	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II	Indeks	87,72	87,72	87,72	87,72	87,72
37	Persentase Penyelesaian Layanan Sesuai Stndar Pelayanan	%	100	100	100	100	100
38	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Kecamatan	kelompok	1	1	1	1	1
39	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kecamatan	kelompok	1	1	1	1	1
40	Tingkat Kriminalitas Kecamatan Yang Tertangani	%	100	100	100	100	100

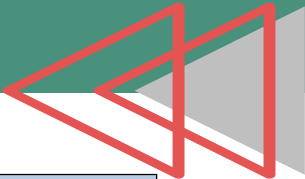
Sumber: SIPD Kemendagri, 2023

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah pasal 15 ayat (3), bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari 6 urusan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, maka Kota Lubuk Linggau tahun 2024-2026 akan mengupayakan pelaksanaan SPM : 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3)Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; 5) Keamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dan 6) Sosial. Target capaian SPM tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 8.4. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026**

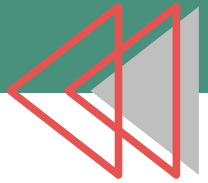
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (2022) ¹	Target (%) ²		
			2024	2025	2026
Bidang Pendidikan					
1	Pendidikan Dasar	94,45	100	100	100
2	Pendidikan Kesetaraan	55,08	100	100	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	51,04			
Bidang Kesehatan					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	98,73	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	96,98	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	97,78	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	76,87	100	100	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	86,67	100	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	50,97	100	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	91,43	100	100	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	57,12	100	100	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	49,55	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	91,00	100	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	65,09	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	53,90	100	100	100
Bidang Sosial					
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti Sosial	92,95	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial Dasar anak terlantar di luar panti sosial	98,67	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	98,67	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar Panti Sosial	98,67	100	100	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100,00	100	100	100
Bidang Trantibumlinmas					
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	91,48	100	100	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	54,44	100	100	100
3	Pelayanan informasi rawan bencana	65,33	100	100	100



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (2022) ¹	Target (%) ²		
			2024	2025	2026
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	88,00	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	93,90	100	100	100
Bidang Perumahan Rakyat					
1	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak huni bagi Korban Bencana Kab/Kota	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	17,72	100	100	100
Bidang Pekerjaan Umum					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	78,39	100	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah domestik	19,81	100	100	100

Sumber: 1. Bangda Kemendagri, 2023
2. Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2023





BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Lubuk Linggau yang terencana, terpadu dan searah dengan pembangunan provinsi dan nasional selama tiga tahun mendatang. Dokumen RPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 menjadi pendorong gerakan bersama membangun dan memajukan Kota Lubuk Linggau. Keberhasilan pelaksanaan RPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, komitmen dan dukungan DPRD Kota Lubuk Linggau, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, masyarakat sipil dan kemitraan dengan pihak swasta.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

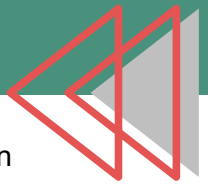
Kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Eksekutif dan Legislatif Kota Lubuk Linggau dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Lubuk Linggau, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPD dengan sebaik-baiknya;
2. Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026;
3. Perangkat Daerah (PD) berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra) PD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja PD setiap tahun;
4. RPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Karena itu seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok, dan fokus pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja PD setiap tahun, dengan berpedoman pada RPD untuk menjamin konsistensi dan



kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan dan ditetapkan oleh kepala PD serta disahkan oleh Wali Kota;

5. Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan RPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Lubuk Linggau berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Renstra PD Kota Lubuk Linggau;
6. Penjabaran lebih lanjut RPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Kota Lubuk Linggau;
7. PD berkewajiban menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara RPD dengan Renstra PD yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Renja PD;
8. Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan RPD, Bappedalitbang berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPD ke dalam Renstra PD;
9. Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan RPD Kota Lubuk Linggau 2024-2026, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 sebagai berikut :
 - a) Kepala Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran.
 - b) Kepala Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RPD dan RKPD.
 - c) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD yang mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah
 - d) Kepala PD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Renja PD kepada Wali Kota melalui kepala Bappedalitbang.
 - e) Kepala Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD yang disampaikan oleh kepala PD.



- f) Kepala Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - g) Kepala PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan PD periode sebelumnya;
 - h) Kepala Bappedalitbang Kota LubukLinggau menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (g);
 - i) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (h) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kota Lubuk Linggau dan diperkirakan dapat mempengaruhi pelaksanaan RPD Kota Lubuk Linggau, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kota Lubuk Linggau untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.
11. Dalam hal pelaksanaan RPD terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran dan program tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran daerah, maka penetapan perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

9.2. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2023 berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kota Lubuk Linggau, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Lubuk Linggau sampai dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024;
2. Renstra-PD Tahun 2023-2026

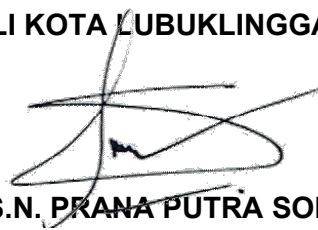


Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024-2026;

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024-2026

Penyusunan RKPD Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Lubuk Linggau 2024-2026 ini.

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE